

RPJPD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen Pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 2

(1) RPJPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan/perumusan:
    a. materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
    b. RPJMD; dan
    c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
(3) RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat dan RTRW.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD, terdiri dari:

a. BAB I Pendahuluan,
   Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RPJPD;
b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,
   Berisi uraian Kondisi Umum Daerah, Evaluasi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah;
c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis,
   Berisi uraian penjelasan tentang permasalahan dan isu strategis Kota Bekasi;
d. BAB IV Visi dan Misi Daerah,
   Berisi uraian tentang:
   1. Visi Daerah Tahun 2025-2045
      Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045;
   2. Misi Daerah 2025-2045
      Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045;
e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok,
   Berisi uraian tentang:
   1. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah:

a) Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
c) Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
d) Arah Kebijakan Periode 2040-2044.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

f. BAB VI Penutup,

Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RPJPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RPJPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Isi dan Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
   c. pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (12/241/2024)

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi

Tahun 2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen 5
1.3.1. Visi Indonesia 2045 dan RPJPN 2025-2045 7
1.3.2. Penelaahan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025-2045 8
1.3.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 10
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.5. Sistematika Penulisan 13

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 14

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 15
2.1.1. Geografi 15
2.1.2. Demografi 47
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 56
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 56
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya 62
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 68
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah 68
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 77
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 79
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi 83
2.4. Aspek Pelayanan Umum 84
2.4.1. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 84
2.4.2. Reformasi Birokrasi 85
2.4.3. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 87
2.4.4. Pencegahan Korupsi 87
2.4.5. Pelayanan Publik 88
2.4.6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 89
2.4.7. Inovasi Daerah 90
2.4.8. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman 92

2.4.9. Indeks Kota Toleran 93
2.5. Hasil Evaluasi RPJP Daerah Kota Bekasi 2005-2025 94
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 101
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan 101
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana 107
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 125
2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 125
2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana 134

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 138
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 139
3.1.1. Bidang Sosial Budaya 140
3.1.2. Bidang Lingkungan 142
3.1.3. Bidang Tata Kelola 147
3.1.4. Bidang Ekonomi 149
3.1.5. Bidang Infrastruktur 151
3.2. Isu Strategis 158

BAB 4 VISI DAN MISI DAERAH 173
4.1. Visi 174
4.1.1. Visi Nasional Indonesia 174
4.1.2. Visi Regional Provinsi Jawa Barat 176
4.1.3. Visi Kota Bekasi 178
4.2. Misi 185
4.2.1. Misi Nasional 185
4.2.2. Misi Provinsi Jawa Barat 186
4.2.3. Misi Kota Bekasi 186

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 192
5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 193
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 234
5.2.1. Arah Pembangunan Kota Bekasi 2025-2045 234
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi 244

BAB 6 PENUTUP 269
6.1. Kaidah Pelaksanaan 270
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan 270
6.1.2. Kaidah Evaluasi dan Pengendalian 272
6.1.3. Mekanisme Perubahan 273
6.2. Kaidah Pembiayaan 274
6.3. Sistem Insentif 274
6.4. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah 275
6.5. Evaluasi Manajemen Risiko 276
6.6. Mekanisme Perubahan 276

6.7. Komunikasi Publik....277
6.8. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik....278
6.9. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non-Publik....278
6.10. Manajemen Investasi....279

Lampiran.... 280

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan di Kota Bekasi 16
Tabel 2.2. Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi sesuai RTRW Kota Bekasi tahun 2024-2044 17
Tabel 2.3. Rencana Kawasan Budi Daya Kota Bekasi RTRW Kota Bekasi tahun 2024-2044 18
Tabel 2.4. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota menurut Kecamatan di Kota Bekasi . 20
Tabel 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 24
Tabel 2.6. Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi 26
Tabel 2.7. Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bekasi 28
Tabel 2.8. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 30
Tabel 2.9. Status Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 31
Tabel 2.10. Ambang Batas Pangan Kota Bekasi Tahun 2022 33
Tabel 2.11. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 34
Tabel 2.12. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 34
Tabel 2.13. Ambang Batas Air Kota Bekasi Tahun 2022 35
Tabel 2.14. Persentase Indeks Lingkungan di Kota Bekasi Tahun 2010-2023 38
Tabel 2.15. Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 38
Tabel 2.16. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2022 40
Tabel 2.17. Kawasan Rawan Gempa Bumi Kota Bekasi Tahun 2022 41
Tabel 2.18. Jumlah Kejadian Banjir Menurut Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2010-2022 44
Tabel 2.19. Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Bekasi Tahun 2022 44
Tabel 2.20. Kelas Risiko Bencana di Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 46
Tabel 2.21. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi Tahun 2010-2023. 59
Tabel 2.22. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (miliar rupiah) 71
Tabel 2.23. Distribusi PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2023 (persen) 72
Tabel 2.24. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi Tahun 2010-2022 .. 75
Tabel 2.25. Panjang jalan di Kota Bekasi berdasarkan tingkat kewenangan 79
Tabel 2.26. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi 79
Tabel 2.27. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kota Bekasi pada Tahun 2010-2023 80
Tabel 2.28. Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan pada Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi 81
Tabel 2.29. Jumlah Kendaraan (Unit) Berdasarkan Kepemilikan pada Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi 82
Tabel 2.30. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Bekasi pada Tahun 2010-2023 82

Tabel 2.31. Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi tahun 2017-2022 87
Tabel 2.32. Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Nilai Sangat Baik pada Semester 1 Tahun 2022 89
Tabel 2.33. Rekomendasi Kebijakan 98
Tabel 2.34. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045....102
Tabel 2.35. Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045....102
Tabel 2.36. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2).103
Tabel 2.37. Proyeksi Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2)....103
Tabel 2.38. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045 105
Tabel 2.39. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2025-2045 107
Tabel 2.40. Proyeksi Jumlah Rumah dan Gap Rumah di Kota Bekasi 108
Tabel 2.41. Proyeksi Kebutuhan Rumah Susun di Kota Bekasi 110
Tabel 2.42. Proyeksi Kebutuhan Kran Umum dan Kebutuhan Air Kran Umum di Kota Bekasi 112
Tabel 2.43. Kebutuhan Sarana Sanitasi di Kota Bekasi pada Tahun 2025-2045 114
Tabel 2.44. Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Kota Bekasi Tahun 2025 – 2045....117
Tabel 2.45. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 118
Tabel 3.1. Pengelompokkan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Bidang Pembangunan 139
Tabel 3.2. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2016-2023 148
Tabel 3.3. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2022 156
Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Bekasi, 2018-2022....170
Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, 2022 171
Tabel 3.6. Penyandingan permasalahan utama dan isu strategis 172
Tabel 4.1. Indikator dan Target Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045..182
Tabel 4.2. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045 187
Tabel 4.3. Penyandingan Permasalahan, Isu Strategis, Kata Kunci Visi dan Misi 190
Tabel 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 214
Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Bekasi 2025-2045....234
Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transfromasi Kota Bekasi 2025-2045....244
Tabel 5.4. Kertas Kerja Penyusunan Sasaran Pokok 250
Tabel 5.5. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 255
Tabel 5.6. Persandingan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045....258
Tabel 5.7. Keteritan Visi dengan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045....265

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya 6
Gambar 1.2. Penelaahan Arah Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat 11
Gambar 1.3. Diagram Alur yang menggambarkan Materi Teknis RTRW Kota Bekasi 12
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bekasi 15
Gambar 2.2. Persentase Luas Kecamatan di Kota Bekasi 16
Gambar 2.3. Peta Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2023 18
Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lahan Kota Bekasi..... 19
Gambar 2.5. Peta Geologi Kota Bekasi 21
Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kota Bekasi 21
Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kota Bekasi..... 22
Gambar 2.8. Persentase Luas Tutupan Lahan di Kota Bekasi 22
Gambar 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2018-2023..... 24
Gambar 2.10. Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Bekasi Tahun 2010-2022..... 25
Gambar 2.11. Volume Air yang Disalurkan oleh PDAM di Kota Bekasi Tahun 2010-2022.. 26
Gambar 2.12. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) di Kota Bekasi Tahun 2019-2022..... 27
Gambar 2.13. Jumlah Listrik PLN yang Terjual di Kota Bekasi Tahun 2010-2022..... 28
Gambar 2.14. Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Bekasi Tahun 2013-2023..... 29
Gambar 2.15. Persentase Daya Dukung Pangan Kota Bekasi..... 31
Gambar 2.16. Peta Kebutuhan Pangan Kota Bekasi 32
Gambar 2.17. Peta Ketersediaan Pangan Kota Bekasi 32
Gambar 2.18. Peta Daya Dukung Pangan di Kota Bekasi..... 33
Gambar 2.19. Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 34
Gambar 2.20. Presentase Daya Dukung Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022 35
Gambar 2.21. Peta Kebutuhan Air di Kota Bekasi 36
Gambar 2.22. Peta Ketersediaan Air di Kota Bekasi 36
Gambar 2.23. Peta Daya Dukung Air di Kota Bekasi 37
Gambar 2.24. Persentasi Penurunan Emisi GRK (%) Kota Bekasi Tahun 2017 – 2021 39
Gambar 2.25. Peta Indeks Kerentanan Kota Bekasi..... 40
Gambar 2.26. Persentase Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bekasi Tahun 2022 42
Gambar 2.27. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Bekasi 42
Gambar 2.28. Grafik Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi Tahun 2018-2023 43
Gambar 2.29. Sebaran Banjir di Kota Bekasi Tahun 2020..... 43
Gambar 2.30. Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi..... 45
Gambar 2.31. Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2018-2023 45

Gambar 2.32. Indeks Risiko Bencana Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Cuaca Ekstream Tahun 2018-2023 46
Gambar 2.33. Jumlah Penduduk Kota Bekasi dari tahun 2010-2023 48
Gambar 2.34. Jumlah Penduduk per-Kecamatan di Kota Bekasi dari tahun 2010-2023 48
Gambar 2.35. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010–2023 49
Gambar 2.36. Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Bekasi dari tahun 2010-2023 50
Gambar 2.37. Jumlah Kepadatan Penduduk per-Kecamatan di Kota Bekasi dari tahun 2010-2023 51
Gambar 2.38. Sebaran Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2) setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 52
Gambar 2.39. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bekasi dari Tahun 2010-2023 53
Gambar 2.40. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bekasi tahun 2023 53
Gambar 2.41. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2023 54
Gambar 2.42. Jumlah *Sex Ratio* Penduduk Kota Bekasi dari Tahun 2010-2023 54
Gambar 2.43. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Persen) 56
Gambar 2.44. Inflasi Kota Bekasi Tahun 2013-2023 (%) 57
Gambar 2.45. Inflasi Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 57
Gambar 2.46. Indeks Gini Kota Bekasi dan Jawa Barat tahun 2010-2022 58
Gambar 2.47. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Persen) 58
Gambar 2.48. Perkembangan IPM Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 59
Gambar 2.49. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Tahun) 60
Gambar 2.50. Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Tahun) 60
Gambar 2.51. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi Tahun 2010-2024 61
Gambar 2.52. Persentase Penduduk Miskin Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 61
Gambar 2.53. Usia Harapan Hidup Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Tahun) 62
Gambar 2.54. Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2010-2020 62
Gambar 2.55. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 63
Gambar 2.56. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022 64
Gambar 2.57. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 64
Gambar 2.58. Prevalensi Status Gizi Balita Kota Bekasi Tahun 2018-2020 65
Gambar 2.59. Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Bekasi Tahun 2016-2020 (orang) 66
Gambar 2.60. Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2020 (Kasus) 67
Gambar 2.61. Kedudukan Ekonomi Kota Bekasi terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 berdasarkan PDRB ADHK (miliar rupiah) 68
Gambar 2.62. Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Miliar Rupiah) 69

Gambar 2.63. Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2023 69
Gambar 2.64. PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (ribu rupiah) 73
Gambar 2.65. PDRB per Kapita Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Ribu Rupiah per Tahun) 74
Gambar 2.66. Indeks Ekonomi Inklusif Kota Bekasi Tahun 2010-2023 74
Gambar 2.67. Jumlah UMKM di Kota Bekasi Tahun 2010-2023 76
Gambar 2.68. Rasio Kewirausahaan Kota Bekasi Tahun 2019-2023 76
Gambar 2.69. Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2010-2022 77
Gambar 2.70. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Persen) 78
Gambar 2.71. Angka Ketergantungan Penduduk di Kota Bekasi Tahun 2010-2023 78
Gambar 2.72. Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bekasi Tahun 2022-2023 83
Gambar 2.73. Indek Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2017-2023 84
Gambar 2.74. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012-2021 85
Gambar 2.75. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2016-2023 86
Gambar 2.76. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 86
Gambar 2.77. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Kota Bekasi Tahun 2019-2023 88
Gambar 2.78. Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2019-2023 89
Gambar 2.79. Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023 90
Gambar 2.80. Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2023 91
Gambar 2.81. Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 91
Gambar 2.82. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2023 92
Gambar 2.83. Persentase infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman di Kota Bekasi tahun 2019-2023 93
Gambar 2.84. Indek Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2017-2023 94
Gambar 2.85. Capaian Indikator Berdasarkan Misi 95
Gambar 2.86. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 1 95
Gambar 2.87. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 2 96
Gambar 2.88. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 3 96
Gambar 2.89. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 4 97
Gambar 2.90. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 5 97
Gambar 2.91. Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 102
Gambar 2.92. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2) 103
Gambar 2.93. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045 105
Gambar 2.94. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045 106
Gambar 2.95. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 106
Gambar 2.96. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2025-2045 107
Gambar 2.97. Proyeksi kebutuhan air bersih (juta m³/tahun) di Kota Bekasi 119
Gambar 2.98. Proyeksi kebutuhan air bersih (juta m³/tahun) di Kota Bekasi menurut kecamatan 119
Gambar 2.99. Proyeksi kebutuhan listrik (juta VA/tahun) di Kota Bekasi 120
Gambar 2.100. Proyeksi kebutuhan listrik (juta VA/tahun) di Kota Bekasi menurut kecamatan 121
Gambar 2.101. Jumlah fasilitas kesehatan Kota Bekasi tahun 2011-2023 122

Gambar 2.102. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan (a) Posyandu, (b) Puskesmas, (c) Tempat praktek dokter/Poliklinik, (d) Apotek/Rumah Obat di Kota Bekasi tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 123
Gambar 2.103. Jumlah fasilitas pendidikan Kota Bekasi tahun 2010-2024 124
Gambar 2.104. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan (a) TK/RA, (b) SD/MI, (c) SMP/MTS (d) SMA/MA/MTS di Kota Bekasi tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045....125
Gambar 3.1. Alur Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah 139
Gambar 3.2. Lokasi Proyek Strategis Nasional Kota Bekasi....154
Gambar 3.3. Isu kemampuan adaptasi wilayah terhadap ledakan penduduk 158
Gambar 3.4. Isu peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan....159
Gambar 3.5. Isu optimalisasi tata kelola pemerintahan yang responsif....160
Gambar 3.6. Isu optimalisasi penataan ruang 161
Gambar 3.7. Isu peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan 162
Gambar 3.8. Isu peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global....164
Gambar 3.9. Isu penguatan ekonomi Kota Bekasi berorientasi pada *Smart City*....166
Gambar 3.10. Isu peningkatan integrasi wilayah regional 168
Gambar 3.11. Isu bonus demografi....169
Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045 174
Gambar 4.2. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045....176
Gambar 4.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045....177
Gambar 4.4. Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kota Bekasi Tahun 2025- 2045....180
Gambar 4.5. Penyelarasan Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN Tahun 2025-2045 181
Gambar 4.6. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045 185
Gambar 4.7. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045....186
Gambar 4.8. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Kota Bekasi 2045....187
Gambar 4.9. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045 187
Gambar 5.1. Tahapan Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berahlak, Unggul, Berdaya Saing, serta Kreatif 195
Gambar 5.2. Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif 198
Gambar 5.3. Tahapan Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif....201
Gambar 5.4. Tahapan Misi Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum 204
Gambar 5.5. Tahapan Misi Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan....205
Gambar 5.6. Tahapan Misi Mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata 207
Gambar 5.7. Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas 210
Gambar 5.8. Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan 211
Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional 271
Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan Turunannya....272

BAB 1
PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

1.1. Latar Belakang

Kota Bekasi memiliki sejarah yang panjang, mulai dari sebagai salah satu pos perdagangan di Wilayah Hindia Belanda pada masa kolonial Belanda abad ke-17, berkembang menjadi pusat administratif pada awal abad ke-20 hingga menjadi Kota Bekasi.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bekasi menjadi bagian dari wilayah Batavia, yang berubah nama menjadi Jakarta, masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jatinegara. Pada tahun 1950, terjadi unjuk rasa di alun-alun Bekasi. Rakyak Bekasi mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, dan 95 desa.

Pada tahun 1960 Kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan H Juanda. Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamagan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa.

Kota Administratif Bekasi diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan Wali Kota pertama dijabat oleh Bapak H. Soedjono (1982-1988). Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs. Andi Sukardi (1988-1991), kemudian diganti oleh Bapak Drs. H. Khailani AR (1991-1997).

Pada perkembangannya, Kota Administratif Bekasi ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 pada tanggal 10 Maret 1997.

Selanjutnya, berdasakran hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998 Wali Kota pertama dijabat oleh Bapak Drs. H. Nonon Sonthanie (1998-2003). Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi berturut-turut adalah sebagai berikut :

- Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad (2003-2008);
- Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi (2008-2013);
- Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu (2013-2018);
- Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono (2018-2023).

Dalam menjalankan pemerintahan, Daerah menyusun dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Daerah menjabarkan visi dan misi daerah, berbeda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini seharusnya berimplikasi pada RPJPD yang lebih sedikit memuat kepentingan politik, dan lebih dominan berisi kepentingan daerah dalam jangka Panjang, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan Daerah ini menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan di Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan Daerah tersebut, perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 1 (satu) tahun.

Dari ketiga dokumen perencanaan tersebut, RPJPD Kota Bekasi 2005- 2025 akan berakhir pada Tahun 2025. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (1) bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Oleh karena itu, Bappelitbangda perlu menyusun rancangan awal RPJPD pada Tahun Anggaran 2023 sebagai awal proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

Sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Sedangkan menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, maka daerah diwajibkan untuk menyusun RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman kepada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi.

RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang memuat penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subyek pembangunan. Tentu hal ini tidak terlepas dari prinsip hak asasi yang menjadi dasar pemikiran, bahwasanya dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan di daerah.

Penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. RPJPD menjabarkan visi dan misi daerah, berbeda dengan RPJMD yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal ini seharusnya berimplikasi pada RPJPD yang lebih sedikit memuat kepentingan politik, dan lebih dominan berisi kepentingan daerah dalam jangka panjang. Selain itu penyusunan RPJPD juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan ruang teknokratik dan ruang partisipatif yang seimbang dengan berbagai pendekatan yang dilakukan sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih komprehensif. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 tersebut adalah pendekatan teknokratik serta pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah;
b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c. Pendekatan Tematik-Holistik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
d. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
e. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Masa depan menjadi semakin kompleks dan tidak pasti karena diwarnai dengan berbagai disrupsi yang terjadi. Bentuk-bentuk disrupsi tersebut tidak hanya dalam bentuk disrupsi teknologi, namun ada juga dalam bentuk disrupsi stabilitas geopolitik, disrupsi perubahan iklim, dan disrupsi kedaruratan kesehatan. Melalui RPJPD Tahun 2025-2045, Kota Bekasi diharapkan dapat mengantisipasi segala dinamika dan tantangan sepanjang 20 tahun yang akan datang, sehingga dapat mengoptimalkan tantangan-tantangan tersebut menjadi kekuatan daerah dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

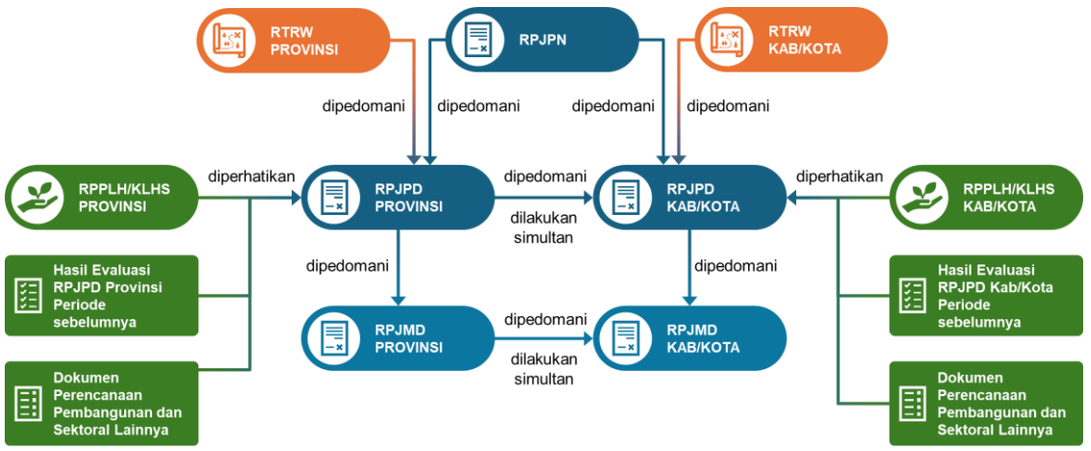
Landasan hukum dalam penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
14. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2003 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Guna mencapai sasaran nasional 2045, diperlukan kontribusi pembangunan di tingkat daerah yang digerakkan ke arah yang sama dengan arah pembangunan nasional. Apalagi, cita-cita Indonesia Emas 2045 itu sejalan dengan tujuan pembangunan daerah sendiri. Namun, tentu saja bahwa kontribusi masing-masing daerah di seluruh Indonesia terhadap pencapaian sasaran nasional 2045 tidak bisa disamaratakan melainkan harus disesuaikan dengan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas masing-masing daerah. Hal ini sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017), bahwa salah satu prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah adalah "dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional".



Sumber: Inmendagri 1/2024

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh **Gambar 1.1** merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur di dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Di antara prinsip-prinsip penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut adalah:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
b. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD menjadi hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kota Bekasi 2025-2045. Hal-hal yang harus diperhatikan pada RPPLH adalah kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya alam, kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang direncanakan, serta rekomendasi RPPLH. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dari KLHS RPJPD adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis, serta rekomendasi KLHS.

Penelaahan RPPLH menjadi penting karena dapat:

a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global.

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJPD menjadi hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. KLHS menjadi penting dalam proses penyusunan RPJPD untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan pada dokumen KLHS.

Bagian dokumen lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD adalah Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya. Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 menunjukkan capaian pembangunan periode RPJPD Tahun 2005-2025 dan berisi rekomendasi untuk menjadi perhatian

dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

1.3.1. Visi Indonesia 2045 dan RPJPN 2025-2045

Salah satu dokumen yang harus ditelaah dalam penyusunan RPJP Daerah Kota Bekasi 2025-2045 adalah dokumen Visi Indoensia 2045 dan dokumen RPJPN 2025-2045.

Di dalam Dokumen Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045 terdapat 3 kondisi yang diprediksikan akan terjadi di Indonesia karena pengaruh lingkungan eksternal dan megatren Dunia 2045. Ketiga kondisi tersebut antara lain bahwa : 1) Indonesia akan menuju Negara Pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045; 2) demografi, urbanisasi dan perlunya pemindahan pusat pemerintahan karena diprediksikan 90% penduduk Jawa tinggal di perkotaan dan daya dukung pulau Jawa yang terbatas; 3) perkembangan teknologi dengan tren teknologi digital (internet seluler, otomatisasi *cloud technology*) yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, 3D *printing*, *nanotechnology*, transportasi dan distribusi), teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas dan *geothermal*) dan teknologi kesehatan (*telemedicine*).

Selain itu, dalam Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) pilar Visi Indonesia 2045 yaitu: 1) Pembangunan Manusia Serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3) Pemerataan Pembangunan, serta 4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan.

Dalam pilar **pertama** tentang Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencakup tentang pendidikan dan kebudayaan, dimana disebutkan bahwa perlu adanya **upaya peningkatan pendidikan vokasi dan penyelarasan pengembangan ilmu di perguruan tinggi** untuk menjawab perubahan struktur ekonomi yang ditopang oleh **kemitraan tiga pihak/*triple helix*** (pemerintah, perguruan tinggi dan industri) yang kuat. Sebagai kota industri yang mulai bergeser menjadi kota perdagangan dan jasa, Bekasi harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan (vokasi dan pendidikan tinggi), pendidikan *entrepreneurship* dan pendidikan karakter agar mampu menyediakan **SDM** yang sanggup menjawab perubahan **struktur ekonomi di masa depan. Reformasi ketenagakerjaan** untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan adaptif menjadi kunci utama. Pelatihan tenaga kerja melalui penguatan relevansi kebutuhan industri, dilanjutkan dengan penguatan relevansi bidang keteknikan dan teknologi informasi dan tercapainya perluasan cakupan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) ketenagakerjaan secara universal merupakan strategi yang harus dilakukan. **Peranan *Emerging Economies*** akan muncul di Asia karena diperkirakan bahwa *output* negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total *output* dunia dengan Asia sebagai pendorong utama (mencapai 54%). Untuk menghadapinya, dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan Bahasa asing yang baik agar mampu bersaing di pasar kerja global. Bagi Kota Bekasi, kolaborasi *triple helix* harus melembaga dalam setiap proses hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian sebagai strategi Ilmu pengetahuan dan teknologi agar memberi kontribusi untuk Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan Iptek di kawasan Asia dan dunia, khususnya di bidang teknologi material.

Pilar **kedua** tentang Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, mencakup salah satunya tentang **industri dan ekonomi kreatif** sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Efisiensi industri nasional ditingkatkan bertahap dengan penerapan *smart and sustainable manufacturing*, untuk mengantisipasi *aging population*, aktivitas perkotaan yang efisien, konektivitas dan pergerakan manusia-barang-jasa yang luas, serta kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. **Penguatan struktur ekonomi kreatif** dan digital difokuskan pada; a) peningkatan daya saing SDM dan usaha kreatif/digital; b) penguatan ekosistem; c) pengembangan transformasi digital yang terintegrasi untuk mendorong produktivitas dan efisiensi ekonomi. Di samping bidang ekonomi, terdapat strategi pemantapan **ketahanan air** agar tercipta kehidupan berkelanjutan dengan memulihkan 108 DAS prioritas sebelum tahun 2045 melalui kebijakan lintas sektor dan tentunya Kota Bekasi termasuk salah satu wilayah yang dilewati. Untuk kondisi lingkungan yang lebih baik hingga 2045, perlu adanya **komitmen lingkungan hidup dan**

pembangunan rendah karbon agar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi meningkat (melalui pengembangan EBT dan penanganan limbah terpadu). Hal lain terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah bahwa iklim investasi Indonesia ditingkatkan menjadi salah satu terbaik di kawasan Asia dan dunia dengan strategi antara lain: 1) penguatan sektor padat karya, berorientasi ekspor dan bernilai tambah; 2) percepatan investasi pada sektor teknologi maju dan inovasi tinggi; 3) investasi yang berkelanjutan dan perlindungan investasi di luar negeri. Di samping itu juga perdagangan luar negeri dimana Indonesia tetap menjalankan kebijakan perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil dengan strategi: 1) penguatan pranata ekspor dengan perubahan struktur ekspor dari komoditas pada manufaktur dan jasa; 2) percepatan pertumbuhan ekspor dengan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi; 3) pemantapan ekspor dengan barang dan jasa berkualitas dunia dan berbasis inovasi sehingga Indonesia bisa mencapai peringkat 10 dunia untuk ekspor di tahun 2045. Kota Bekasi sekali lagi merupakan bagian penting dari Jabodetabek yang kelak akan bertransformasi menjadi mega urban yang tentu akan berkontribusi besar terhadap peringkat 10 dunia ini.

Pilar **ketiga** tentang Pemerataan Pembangunan mencakup **Pemerataan Pendapatan** dan **Pengentasan Kemiskinan** dengan strategi antara lain: 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh penduduk, 2) memperluas perlindungan sosial termasuk SJSN berkelanjutan, 3) mempermudah kepemilikan aset dan mendorong inklusi keuangan, 4) memperluas kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif, 5) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan, dan 6) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Momentum **pertumbuhan pulau Jawa** tetap dipertahankan dengan **arah pengembangan** daerah **berbasis perdagangan dan jasa**. Di samping itu juga direncanakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di mana **transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat** untuk antisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa. Pembangunan infrastruktur ke depan juga diarahkan untuk **antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim** termasuk kenaikan muka air laut.

Pilar **keempat** tentang Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan mencakup **Reformasi Birokrasi dan kelembagaan** untuk mewujudkan: a) peran dan fungsi pemerintah dalam pencapaian kepentingan publik; b) kelembagaan birokrasi yang kontekstual serta tepat fungsi dan ukuran; c) tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif, partisipatif, dan saling menunjang antar sektor, serta d) kelembagaan birokrasi yang andal dan modern dengan SDM aparatur sipil negara yang profesional, dan mampu mengelola perubahan dengan baik. Arah reformasi birokrasi dan kelembagaan 2045 adalah: 1) kelembagaan yang adaptif berbasis isu/tematik; bersifat lintas sektor, *people driven,* dan *locally empowered;* serta responsif terhadap isu; 2) tata kelola yang inklusif, dan berbasis TIK; 3) SDP aparatur sipil negara yang berpikir kreatif, sistemik, *evidence-based,* berwawasan global, inklusif, serta mampu mengelola perubahan, beretos kerja tinggi dan produktif dan pelayanan proaktif sesuai dengan kebutuhan publik.

1.3.2. Penelaahan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) 2025-2045

Dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjangnya yaitu RPJP Daerah 2025-2045. Proses penelaahan ini bertujuan untuk sinkronisasi rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

RPJP Nasional 2025-2045 berperan untuk mengawal terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Strategi yang berupa reformasi dirasa belum cukup dalam mewujudkan visi tersebut, sehingga perlu langkah transformasi dalam berbagai bidang pembangunan khususnya pada aspek sosial, ekonomi dan tata kelola. Transformasi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerangka implementasi yang kuat berupa pembangunan kewilayahan yang didukung sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan

pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan strategi tersebut maka lima sasaran utama Indonesia yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara dengan negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Sasaran utama di atas menjadi pertimbangan dalam perumusan sasaran perencanaan pembangunan di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Bekasi 2025-2045, beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan amanah yang telah tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional yaitu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perkotaan/metropolitan. Hal ini penting karena Kota Bekasi merupakan bagian dari mega urban Jabodetabekpunjur yang terus berkembang. Oleh sebab itu berbagai tantangan perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah perkotaan ke depan yang menuntut perencanaan yang baik dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi PDB perkotaan per kapita terhadap pertumbuhan penduduk perkotaan yang hanya mencapai 1,4 persen per 1 persen penduduk (sedangkan China mencapai 3,00 persen per 1 persen penduduk);
2. Tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun (sementara China 1,21 persen);
3. Terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya;
4. Ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
5. Kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas;
6. Kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun; dan
7. Terbatasnya sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan dan kota-kota.

Tantangan di atas dapat diselesaikan dengan membuat rumusan arah kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045, diantaranya:

1. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dalam melaksanakan transformasi ekonomi, melalui:
    a. Pembangunan perkotaan dengan referensi konsep IKN;
    b. Pengembangan kelembagaan pengelolaan metropolitan (lintas batas administratif);
    c. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dimulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, dan Malang.
2. Pengelolaan urbanisasi dan pembangunan perkotaan, melalui:
    a. Pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan merujuk pada konsep *masterplan* IKN;
    b. Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas intra dan antar kawasan perkotaan, konektivitas antara kota dan desa serta penyediaan sarana prasarana sosial ekonomi;
    c. Implementasi regulasi perkotaan dan pembentukan kelembagaan perkotaan yang memungkinkan penanganan perkotaan secara terpadu dan terintegrasi.

1.3.3. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1.3.3.1. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat

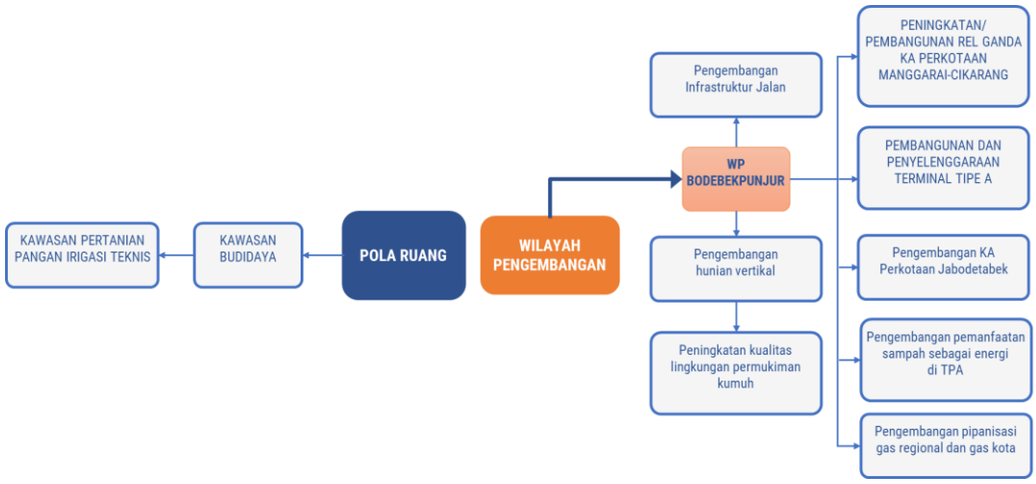
Proses sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dalam proses penyusunan RPJPD Kota Bekasi, dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan wilayah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menelaah dampak perencanaan wilayah yang berpengaruh terhadap rencana pembangunan jangka panjang Kota Bekasi dan harus dipertimbangkan ke dalam dokumen perencanaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Sasaran dari dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45 persen dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan, terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis, terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi, dan terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat salah satunya mengatur kebijakan pengembangan wilayah yang diwujudkan melalui pembagian ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan. Penetapan WP ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan merupakan penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada sistem perencanaan wilayah nasional. Dalam kebijakan pengembangan wilayah tersebut, Kota Bekasi termasuk ke dalam WP Bodebekpunjur bersama 4 (empat) daerah lain di Jawa Barat, yakni: Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur.

Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur memiliki berbagai arah pengembangan wilayah dalam mendukung pengembangan WP yang diatur dalam RTRW termasuk di dalamnya meliputi di Kota Bekasi. Pada RTRW Provinsi Jawa Barat terdapat 7 (tujuh) kebijakan untuk mendukung pengembangan WP Bodebekpunjur yang terkait dengan pengembangan Kota Bekasi yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang.
2. Pembangunan dan penyelenggaraan terminal Tipe A.
3. Pengembangan KA Perkotaan Jabodetabek.
4. Pengembangan pemanfaatan sampah sebagai energi di TPA.
5. Pengembangan pipanisasi gas regional dan gas kota.
6. Pengembangan infrastruktur jalan dan pengembangan hunian vertikal.
7. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh.

Selain terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah (WP), pengembangan Kota Bekasi pada RTRW Provinsi Jawa Barat juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang di dalam RTRW Provinsi Jawa Barat meliputi pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya. Kota Bekasi dalam RTRW Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam pengembangan kawasan budi daya sebagai kawasan pengembangan pertanian pangan yang diarahkan untuk kawasan pertanian pangan irigasi teknis. Secara lebih lanjut, hasil penelaahan RTRW Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan Kota Bekasi ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.2. Penelaahan Arah Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat

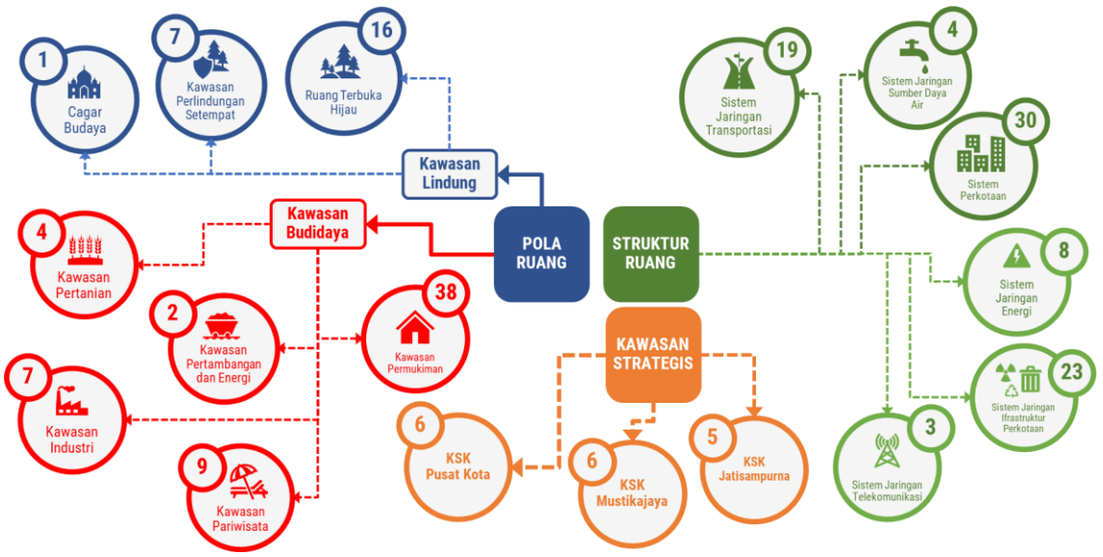
1.3.3.2. Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi

Kota Bekasi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi secara spasial. RTRW ini juga memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman bagi pembangunan seluruh sektor yang di dalamnya memuat kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang Kota Bekasi.

Proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di Kota Bekasi tidak selalu berjalan seperti yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya terdapat perubahan perundang-undangan dan kebijakan. Sedangkan faktor internal diantaranya munculnya pusat-pusat/bangkitan ekonomi baru yang diakibatkan oleh pembangunan jalan baru, perkembangan kawasan permukiman, serta perlunya penyesuaian RTRW terhadap aspirasi dan dinamika perkembangan masyarakat yang terjadi. Terkait dengan kedua faktor tersebut, pada tahun 2016 dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang hasilnya menyimpulkan bahwa RTRW Kota Bekasi harus direvisi dengan status dicabut. Saat ini Kota Bekasi memiliki perda terbaru tentang RTRW yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2024. Oleh karena itu maka penelaahan RTRW ini sudah mengacu pada RTRW Kota Bekasi tahun 2024-2044 yang tercantum dalam perda tersebut agar didapatkan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan terbaru khususnya terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Bekasi.

Penataan ruang wilayah Kota Bekasi bertujuan mewujudkan wilayah Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tujuan ini akan dicapai dengan Kebijakan dan Strategi RTRWK terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, yang terdiri dari 6 kebijakan yang akan diwujudkan dengan 33 strategi.
b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang terdiri dari 7 kebijakan yang diwujudkan dengan 37 strategi
c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota berupa penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu yang terdiri atas (1) penetapan sudut kepentingan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; (2) pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta.



Gambar 1.3. Diagram Alur yang menggambarkan Materi Teknis RTRW Kota Bekasi

Perkembangan terbaru khususnya terkait sistem jaringan jalan, terdapat lokasi PSN yang baru di Kota Bekasi yaitu Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Jalan Tol Cibitung-Cilincing dan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan verifikasi aktual penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi tanggal 1 Agustus Tahun 2022 antara Direktorat Jenderal Tanah Kementerian ATR/BPN dengan Pemerintah Kota Bekasi telah disepakati bahwa dengan luas 29,64 (dua puluh sembilan koma enam empat) hektar LSD (lahan sawah dilindungi) dijadikan sebagai kawasan tanaman pangan. Oleh karena itu di Kota Bekasi tidak ada alokasi ruang untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkomitmen dalam upaya pemenuhan penyediaan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10%, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Perhitungan RTH menggunakan perhitungan dari ATR/BPN yaitu:

1. RTH Publik Terpetakan dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Bekasi Seluas ± 1.278 ha (± 6%)
2. Pembelian lahan untuk RTH publik pada setiap tahun seluas ± 1.104 ha (± 5%) dengan kemajuan:
    - Tahun 2022-2023 seluas 10 ha
    - Tahun 2024-2028 seluas 285 ha
    - Tahun 2029-2033 seluas 285 ha
    - Tahun 2034-2038 seluas 285 ha
    - Tahun 2039-2042 seluas 239 ha
3. Pengembangan potensi RTH publik yang terdiri dari kewajiban pemenuhan lahan RTH yang diserahterimakan untuk kawasan perumahan seluas ±1.878 ha (± 9%). Hal ini dapat dilihat dalam indikasi program RTRW Kota Bekasi dan surat pernyataan komitmen Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 050/2379/Bapelitbangda/III/2022.

Terkait arahan pemanfaatan ruang telah disempurnakan dengan rincian sebagai berikut:

- Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 tahunan; dan
- Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang

Hal ini sesuai amanat Lampiran III Halaman 133-158 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR. Terkait Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 Tahunan terdapat perubahan yang disempurnakan khususnya pada pasal terkait sumber pendanaan program dengan rincian sebagai berikut: Pendanaan program utama bersumber pada: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD Kota; d. swasta; e. masyarakat; dan/atau f. sumber lain yang sah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Kemudian Tujuan penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya gambaran umum kondisi Daerah
2. Tersusunnya tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik
3. Terumuskannya pengembangan pusat pertumbuhan
4. Teridentifikasi dan terumuskannya permasalahan dan isu strategis Daerah
5. Terumuskannya visi dan misi Daerah
6. Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan antar dokumen (RPJPD dan dokumen rencana lainnya).

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum evaluasi RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana pelayanan publik, serta menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sesuai regulasi.

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan dan potensi daerah.

BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini memuat visi Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan demi mewujudkan visi daerah hingga tahun 2045.

BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, bab ini juga memuat sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.

BAB 6. PENUTUP

Bab ini memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

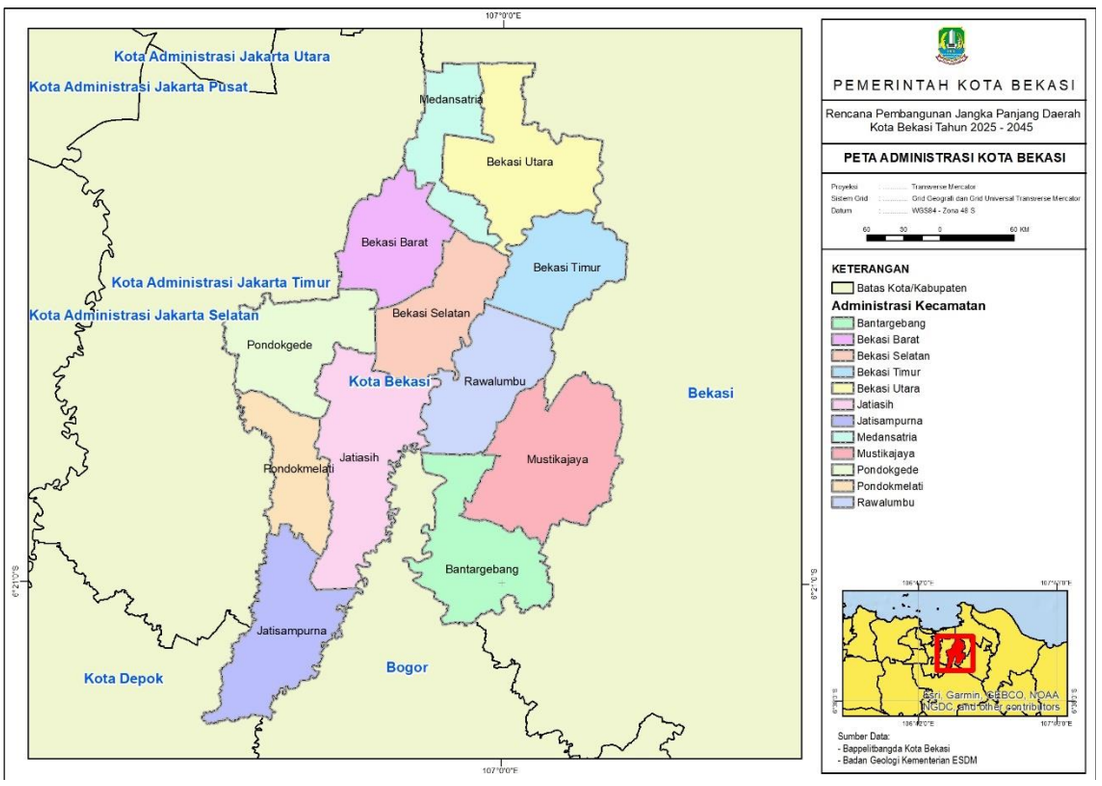
2.1.1.1. Posisi Strategis Kota Bekasi

Secara geografis, Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"-6°30'6" Lintang Selatan dengan ketinggian antara 11-81 m di atas permukaan laut. Kota Bekasi memiliki luas wilayah 21.304 hektare atau 213,04 km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024. Kota Bekasi merupakan wilayah yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, batas wilayah Kota Bekasi melingkupi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok

Kota Bekasi dalam konstelasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, depok, Tangerang, dan Bekasi), dapat dilihat dari fungsi kota sebagai bagian atau *buffer city* bagi perkembangan pusat Ibukota yaitu DKI Jakarta, sehingga dalam struktur ruang Kota Bekasi lebih cenderung untuk mendukung pusat DKI. Hal ini berdampak pada skala pelayanan Kota Bekasi yang cenderung berkembang dalam skala pelayanan dalam kota, sedangkan untuk pelayanan regional tetap akan tercakup dalam pelayanan DKI Jakarta. Padahal apabila melihat potensi yang ada di Kota Bekasi, skala pelayanan Kota Bekasi memungkinkan untuk berkembang menjadi skala pelayanan regional ataupun nasional sehingga secara otomatis Kota Bekasi akan menjadi pusat baru selain DKI Jakarta.

Kota Bekasi dalam konstelasi Jawa Barat menempatkan Kota Bekasi sebagai wilayah metropolitan BODEBEK (Bogor, Depok, Bekasi). Akan tetapi diketahui bahwa perkembangan Kota Bekasi lebih mengarah pada konstelasi perkembangan DKI Jakarta, sehingga dapat dikatakan bahwa tarikan Kota Bekasi lebih erat ke dalam wilayah DKI Jakarta.



Sumber: Pemerintah Kota Bekasi, 2019

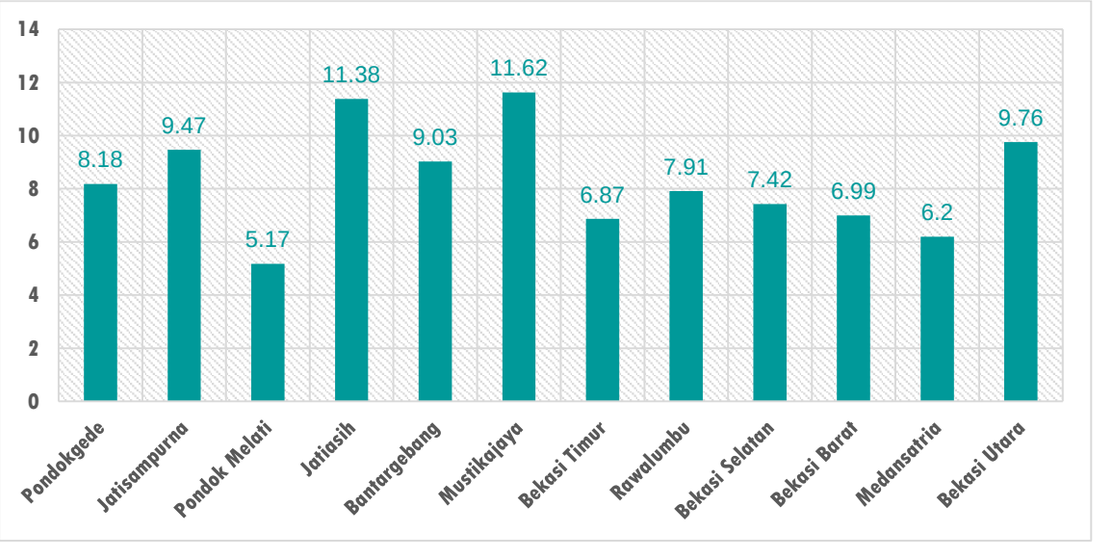
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bekasi

Luas masing-masing kecamatan di Kota Bekasi disajikan pada **Tabel 2.1**, sedangkan luas terbesar ada pada Kecamatan Mustikajaya yaitu 11,62 persen dari total luas Kota Bekasi, dan luas terkecil ada pada Kecamatan Pondokmelati yaitu 5,17 persen.

Tabel 2.1. Luas Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (km²)
1	Pondokgede	Jatiwaringin	16,55
2	Jatisampurna	Jatisampurna	19,21
3	Pondokmelati	Jatirahayu	11,75
4	Jatiasih	Jatiasih	25,75
5	Bantargebang	Bantargebang	18,84
6	Mustikajaya	Mustikajaya	24,97
7	Bekasi Timur	Bekasijaya	14,64
8	Rawalumbu	Bojong Rawalumbu	17,12
9	Bekasi Selatan	Pekayonjaya	15,38
10	Bekasi Barat	Bintara	14,42
11	Medansatria	Medansatria	10,12
12	Bekasi Utara	Perwira	24,37
	Kota Bekasi		213,04

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2023

Gambar 2.2. Persentase Luas Kecamatan di Kota Bekasi

A. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Implementasi pemanfaatan ruang merupakan salah satu perwujudan RTRW Kota Bekasi sesuai dengan arah rencana. Komponen rencana pemanfaatan ruang meliputi struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Pemanfaatan ruang berdasarkan pola ruang dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya.

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, kawasan lindung dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Badan Air, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. Dalam melindungi kawasan tersebut, maka terdapat beberapa kebijakan pola pemanfaatan ruang kawasan lindung di Kota Bekasi, yaitu:

a. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan lindung
b. Menerapkan aturan dan pengendalian yang ketat bagi pengembangan kawasan di daerah kawasan lindung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024, luas kawasan lindung Kota Bekasi adalah sebagaimana terlihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2. Rencana Kawasan Lindung Kota Bekasi sesuai RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044

Pola Ruang/Kecamatan	Luas (ha)
Badan Air	154
Kawasan Perlindungan Setempat	488
Kawasan Ruang Terbuka Hijau	555

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044

Kawasan perlindungan setempat di Kota Bekasi terdiri dari (1) sempadan sungai dan (2) sempadan sekitar danau atau waduk. Sempadan danau atau waduk yang dimaksud adalah:

a. Situ Rawalumbu di Kelurahan Bojong Rawalumbu pada Kecamatan Rawalumbu;
b. Situ Rawagede di Kelurahan Bojongmenteng pada Kecamatan Rawalumbu;
c. Danau Harapanbaru di Kelurahan Harapanbaru pada Kecamatan Bekasi Utara;
d. Situ Karang Kitri di Kelurahan Margahayu pada Kecamatan Bekasi Timur;
e. Situ Rawa Pasung di Kelurahan Kalibaru pada Kecamatan Medansatria;
f. Situ Uwong, Situ Rawa Bogo di Kelurahan Padurenan pada Kecamatan Mustikajaya;
g. Situ Rawa Pulo di Kelurahan Jatikarya pada Kecamatan Jatisampurna; dan
h. Danau Grand Bekasi di Kelurahan Pekayonjaya pada Kecamatan Bekasi Selatan.

Perwujudan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, Pemerintah Daerah Kota berkewajiban untuk menganggarkan pengadaan lahan RTH publik setiap tahun anggaran. Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi dibagi menjadi (1) taman kota, (2) pemakaman, dan (3) jalur hijau. Jalur hijau yang ada di Kota Bekasi terdapat di beberapa kecamatan seperti:

a. Kecamatan Bantargebang;
b. Kecamatan Bekasi Barat;
c. Kecamatan Bekasi Selatan;
d. Kecamatan Bekasi Timur;
e. Kecamatan Bekasi Utara;
f. Kecamatan Jatiasih;
g. Kecamatan Medansatria;
h. Kecamatan Pondokgede;
i. Kecamatan Pondokmelati; dan
j. Kecamatan Rawalumbu.

2. Kawasan Budi Daya

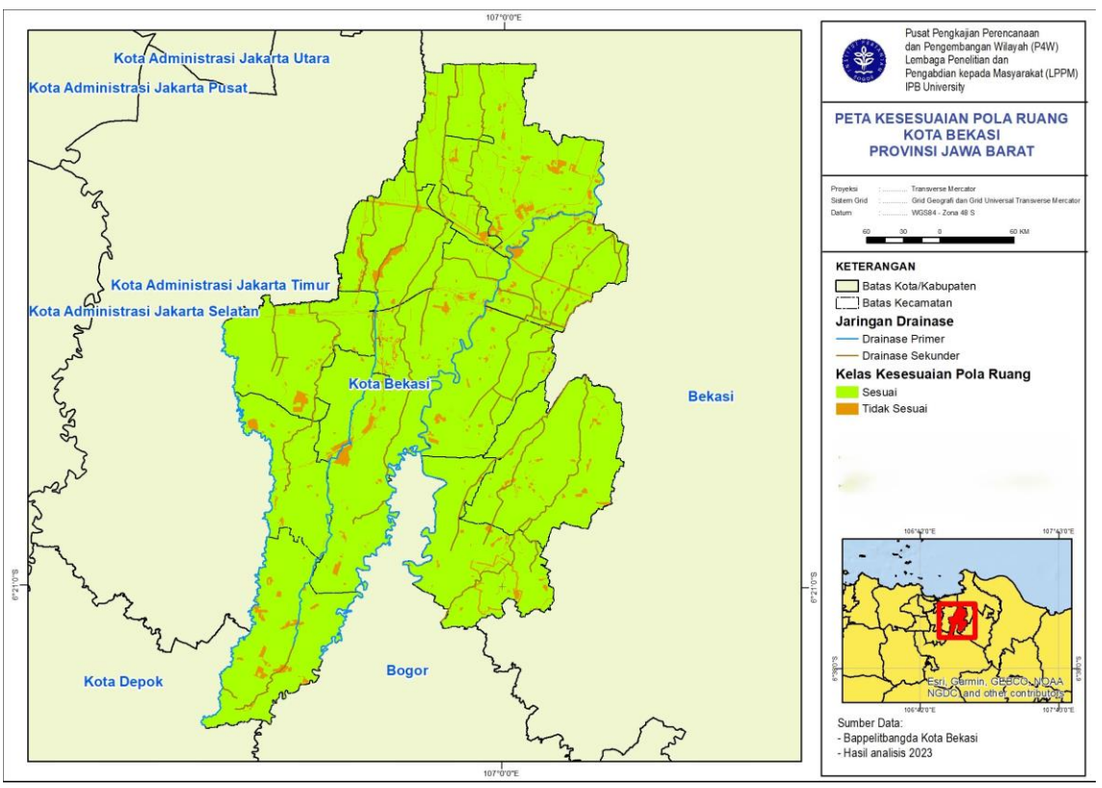
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, kawasan budi daya dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu Badan Jalan, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. Sebagaimana diketahui bahwa jenis kawasan budi daya di Kota Bekasi didominasi oleh Kawasan Perumahan sebesar 63,37 persen dari total luas kawasan budi daya. Hal ini berbanding lurus dengan tutupan lahan permukiman yang mencapai 79 persen dari total luas tutupan lahan yang termasuk ke dalam kawasan budi daya. Tutupan lahan permukiman baik yang terstruktur maupun permukiman yang dibangun oleh individu masyarakat. Perkembangan kegiatan permukiman terstruktur beberapa tahun terakhir mengakibatkan bangkitan kegiatan pendukung permukiman berupa perdagangan, jasa dan kebutuhan fasilitas masyarakatnya. Di sisi lain perkembangan Kota Jakarta menyebabkan Kota Bekasi yang berfungsi sebagai penyangga Provinsi DKI Jakarta mendapat limpahan kegiatan baik berupa industri, perdagangan dan jasa serta permukiman itu sendiri. Penggunaan lahan di Kota Bekasi dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3. Rencana Kawasan Budi Daya Kota Bekasi RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044

Pola Ruang/Kecamatan	Luas (ha)
Badan Jalan	246
Kawasan Pertanian	30
Kawasan Pertambangan dan Energi	36
Kawasan Peruntukan Industri	1.495
Kawasan Pariwisata	381
Kawasan Permukiman	12.743
Kawasan Campuran	2.142
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2.848
Kawasan Perkantoran	80
Kawasan Transportasi	19
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	87

Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044

Berdasarkan persentase pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun budidaya, maka persentase capaian dari RTRW Kota Bekasi dapat dihitung dengan membandingkan kawasan pola ruang dan tutupan lahan Kota Bekasi. Hasil dari perhitungan kesesuai RTRW hasil analisis 2023, menunjukan bahwa kelas kesesuai RTRW terhadap tutupan lahan Kota Bekasi lebih besar mencapai 93,67 persen dibandingkan dengan kelas tidak sesuai yang hanya 6,33 persen saja dari total luasan 213,04 km^2. Persentase tersebut menunjukan tingkat ketercapaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi lebih tinggi.



Sumber: Hasil analisis 2023

Gambar 2.3. Peta Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2023

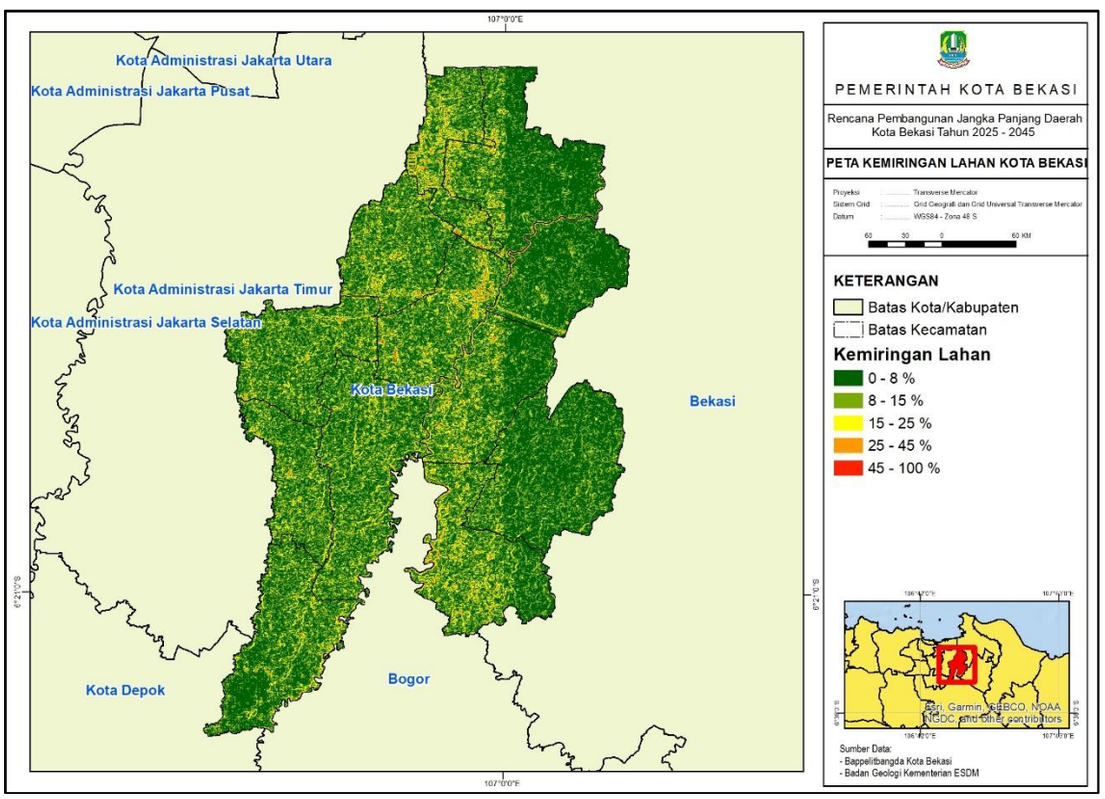
B. Persentase Alih Fungsi Lahan

Perkembangan Kota Bekasi berjalan seiring dengan perkembangan Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya. Kota Bekasi yang memiliki kondisi alam tanpa potensi Hutan dan Perkebunan menyebabkan arah perkembangannya kepada penggunaan lahan untuk hunian, perdagangan dan jasa, serta industri yang menyokong Kota Jakarta. Dominasi penggunaan lahan di Kota Bekasi yaitu lahan terbangun yang diperuntukan untuk kawasan perumahan dan permukiman, perdagangan dan

jasa, campuran, sarana pelayanan umum dan dimanfaatkan untuk jaringan infrastruktur. Untuk melihat alih fungsi lahan di Kota Bekasi yaitu dengan membandingkan data penggunaan lahan tahun 2005 dengan data penggunaan lahan tahun 2014. Pada tahun 2005 penggunaan lahan untuk pertanian masih sangat luas yaitu sebesar 8748,90 ha atau sekitar 41,56% dan lahan kosong sekitar 16,25%, sedangkan lahan terbangun barumencapai 8693,11 ha atau sekitar 41,30%. Sedangkan berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014 penggunaan lahan di dominasi dengan lahan tidak terbangun (non pertaniaan) dengan luas 12.732,88 Ha dengan sekitar 60,49% dengan demikian penggunaan lahan terbangun mengalami peningkatan sekitar 31,72%, dan penggunaan lahan untuk pertanian mengalami penurunan sebesar 23,63%. Hal ini menunjukan adanya alih fungsi lahan pertaniaan ke lahan non pertanian yang dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perumahan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa (komersial), sarana pelayanan umum dan jaringan infrastuktur, selain itu juga alih fungsi lahan terjadi pada lahan pertaniaan ke lahan kosong dan lahan kosong ke kawasan terbangun.

2.1.1.2. Topografi

Kondisi Topografi Kota Bekasi didominasi oleh kemiringan lahan antara 0 - 8 persen sebesar 55,93 persen dan terletak pada ketinggian antara 0 - 110 mdpl di atas permukaan air laut. Kemiringan lahan di Kota Bekasi teridentifikasi pada kelas Datar hingga Sangat Curam, persentase terbesar pada kelas datar (0-8 persen) sebesar 55,92 persen dan disusul oleh kelas landai (8-15 persen) sebesar 32 persen, kelas agak curam (15-25 persen) sebesar 10 persen dan sisanya berada pada kelas curam (25-45 persen) hingga sangat curam (45-100 persen).



Sumber: DEMNAS dan hasil analisis, 2024

Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lahan Kota Bekasi

Ketinggian wilayah Kota Bekasi didominasi oleh kelas ketinggian 25-50 mdpl seluas 57 persen, kemudian disusul oleh kelas ketinggian 50-110 mdpl seluas 43 persen dari total luas keseluruhan Kota Bekasi. Kecamatan dengan ketinggian >25 mdpl yaitu Mustikajaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medansatria, dan Bekasi Utara. Kecamatan dengan ketinggian >50 mdpl yaitu Pondokgede, Jatisampurna, Pondokmelati, Jatiasih, dan Bantargebang. Wilayah dengan ketinggian dan kemiringan rendah akan berakibat wilayah dengan banyak genangan, terutama pada saat musim hujan.

Tabel 2.4. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibu Kota menurut Kecamatan di Kota Bekasi

No.	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibu Kota Kota (km)
1	Pondokgede	58	12
2	Jatisampurna	110	25
3	Pondokmelati	51	19
4	Jatiasih	53	9
5	Bantargebang	58	10
6	Mustikajaya	28	11,6
7	Bekasi Timur	36	2,9
8	Rawalumbu	48	4,8
9	Bekasi Selatan	40	5,4
10	Bekasi Barat	38	4,3
11	Medansatria	31	7,5
12	Bekasi Utara	33	4,8

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

2.1.1.3. Geologi dan Jenis Tanah

Kondisi geologi wilayah Kota Bekasi didominasi oleh Pleistosen Volcanic, atau gunung api yang berumur Pleistosen, namun terdapat dua kecamatan yang memiliki karakteristik struktur lainnya, yaitu Bekasi Utara dengan struktur Aluvium dan Bekasi Timur dengan struktur Miosen Sedimentary. Satuan batuan yang berfasies gunung api berumur Pleistosen tersusun atas konglomerat, batu pasir tufaan, tuf, breksi yang berumur Pleistosen. Konglomerat berwarna kemerah-merahan, agak padu tetapi mudah hancur.

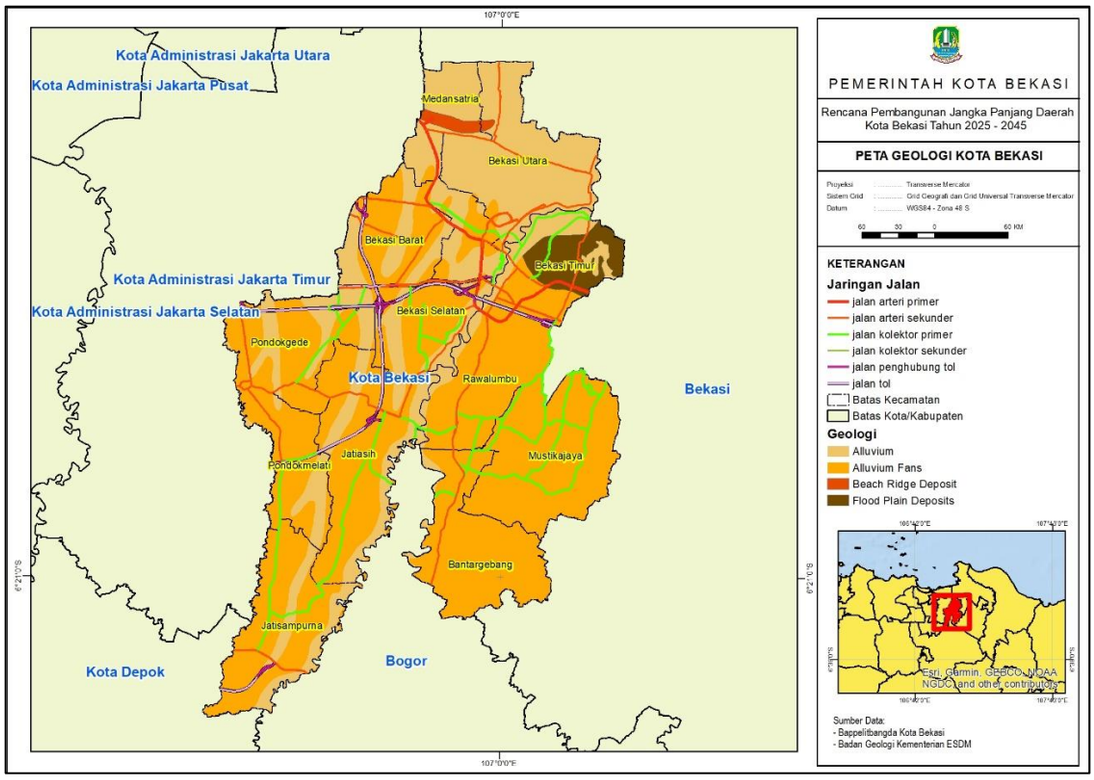
Komponennya terdiri dari andesit, basal dan batu apung, membundar tanggung hingga membundar, pemilahan buruk, umumnya menunjukkan kemas tertutup hingga terbuka, besar butir umumnya berkisar dari kerikil sampai kerakal. Matriksnya berupa batu pasir tufaan, umumnya sudah lapuk berwarna kelabu kotor kemerah-merahan. Pada satuan ini banyak dijumpai struktur silang siur.

Batu pasir tufan dan tuf agak padu, tetapi mudah hancur, berbutir halus sampai kasar, pemilahan buruk, membundar tanggung sampai membundar sempurna, terdapat struktur silang siur. Breksi berwarna kelabu kemerahan, komponen batu apung dan andesit, berukuran antara 1-10 cm, menyudut tanggung, agak kompak dan pemilahan buruk. Matriksnya berupa batu pasir tufaan berwarna kemerah-merahan, umumnya lapuk mengulit bawang. Setempat breksi ini mengandung bongkah andesit dengan ukuran 2-50 m.

Breksi ini diduga merupakan endapan lahar, pada wilayah Jakarta sebarannya mendominasi, sedangkan pada wilayah Bekasi-Karawang tersebar pada bagian barat daya dan tenggara cekungan. Makin ke utara ukuran komponennya makin halus dan makin lapuk, sehingga sering dijumpai hanya sebagai tanah berwarna merah. Satuan ini berumur Pleistosen dan merupakan endapan sungai jenis kipas aluvium. Tebalnya diperkirakan mencapai 40 m.

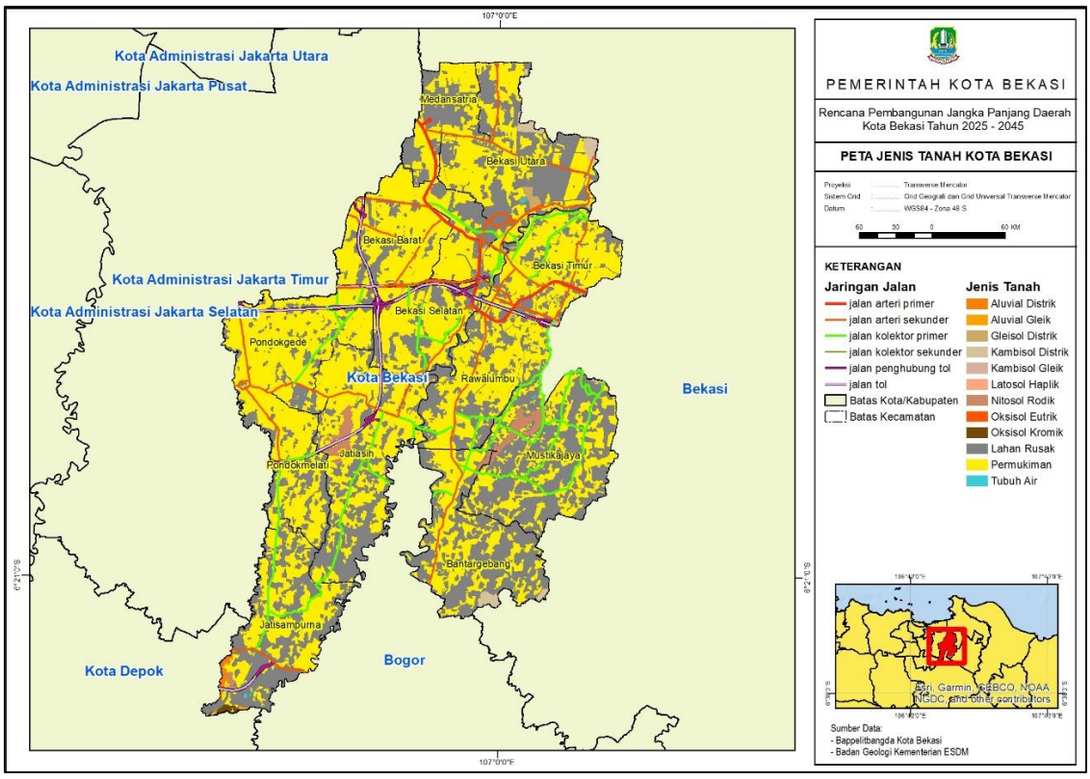
Satuan Konglomerat dan batu pasir Tufaan ini kemungkinan dapat menjadi akuifer yang sangat baik, air tanah bergerak melalui ruang antar butir, karena ketebalannya hanya sekitar 40 meteran dan penyebaran tidak begitu luas, maka air tanah yang dijumpai berupa air tanah tidak tertekan atau air tanah setengah tertekan. Di sepanjang alur sungai utama seperti Kali Bekasi dan menyebar ke bagian utara tersusun oleh satuan endapan limpah banjir ini berumur Holosen dan tersusun atas pasir lempungan, lempung pasiran, dan lempung humusan atau gambutan. Pasir lempungan berwarna coklat-coklat kehitaman-hitaman, makin ke selatan Lembar Peta warnanya makin kemerah-merahan dan makin tufaan. Lempung pasiran berwarna coklat-coklat kekuningan-kuningan, lunak dan terkoalinkan. Lempung humusan atau gambutan berwarna kelabu kecoklatan-coklatan, banyak mengandung sisa tumbuhan.

Endapan Dataran Banjir tebalnya berkisar antara 5-15 m, merupakan akuifer yang cukup baik, penyebaran luas, air tanah berupa air tanah tidak tertekan yang mengalir di antara ruang antar butir. Untuk lebih jelasnya mengenai geologi di Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2021-2041

Gambar 2.5. Peta Geologi Kota Bekasi

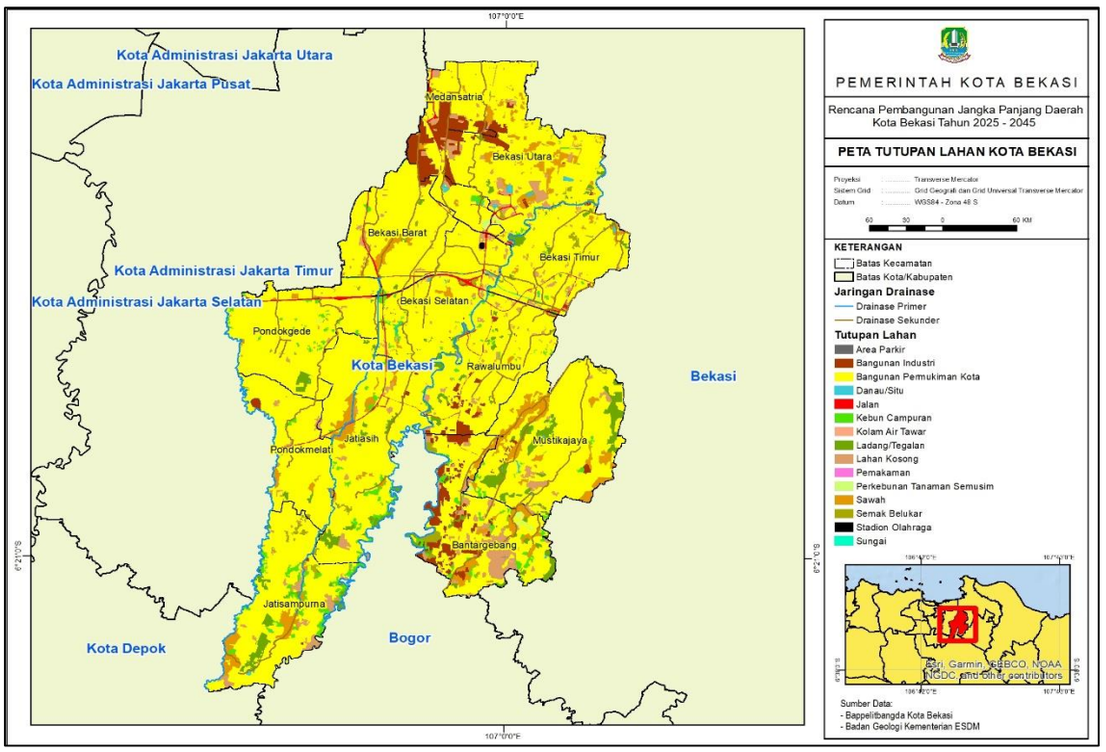


Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2021-2041

Gambar 2.6. Peta Jenis Tanah Kota Bekasi

2.1.1.4. Tutupan Lahan

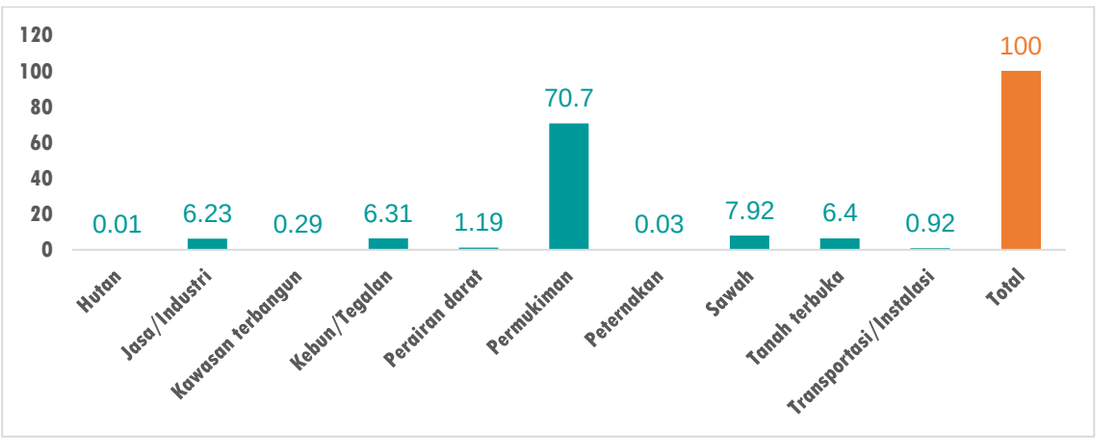
Kota Bekasi dalam konstelasi Jabodetabek sebagai kota peri-urban atau pendukung Jakarta, berfungsi sebagai penyedia layanan jasa, utamanya adalah jasa perumahan sebagai kawasan hunian para kaum *commuter* dan layanan dasar sosial-ekonomi masyarakat. Maka dari itu, tutupan lahan Kota Bekasi sudah pasti didominasi oleh tutupan lahan **Bangunan Permukiman dan Kota**.



Sumber: Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2021-2041

Gambar 2.7. Peta Tutupan Lahan Kota Bekasi

Berdasarkan tutupan lahan Kota Bekasi, jenis tutupan lahan terluas ada pada **Bangunan Permukiman dan Kota** dengan persentase mencapai 77,75 persen dari luas total Kota Bekasi. Kemudian disusul oleh jenis tutupan lahan **Sawah** yang hanya mencapai 5,06 persen dari total luas Kota Bekasi, lebih jelasnya disajikan pada **Gambar 2.8**.



Sumber: Pemerintah Kota Bekasi, 2020 dan Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.8. Persentase Luas Tutupan Lahan di Kota Bekasi

Kawasan permukiman di Kota Bekasi dibangun secara teratur yang dikembangkan oleh developer, berbeda dengan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Kebutuhan permukiman semakin meningkat dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang strategis untuk menampung para penduduk yang bekerja di DKI Jakarta atau kota-kota sekitarnya. Mengatasi kepadatan penduduk yang tinggi maka banyaknya permukiman yang dibangun oleh developer memenuhi Kota Bekasi. Tutupan lahan lainnya yang juga

bersanding dengan kawasan permukiman adalah kawasan industri, pemerintahan, perkantoran, infrastruktur pendukung perkotaan, kawasan campur. Kawasan campur dalam peraturan penataan ruang, diatur dalam zona campuran (C), yang meliputi: perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perdagangan/jasa dan perkantoran.

2.1.1.5. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati dan benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai wilayah daratan dan perairan yang keduanya mengandung sumber daya alam beragam antar daerah. Secara garis besar sumber daya alam dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (seperti: hutan, perikanan, dan lain-lain), dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (seperti: minyak bumi, batu bara, timah, gas alam dan hasil tambang lainnya).

A. Kehutanan

Kota Bekasi merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta serta beberapa kota/kabupaten lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sehingga wilayahnya relatif datar. Kota Bekasi secara geografis tidak memiliki potensi hutan alam. Walaupun begitu Kota Bekasi memiliki potensi hutan kota dan taman kota. Potensi daerah Kota Bekasi yang tidak memiliki hutan alam menyebabkan perkembangan kota menuju daerah perdagangan, jasa serta industri. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2021-2041 luas hutan kota hanya sebesar 2,9 hektar atau 0,01 persen dan taman kota 6,27 hektar atau 0,03 persen. Persentase tersebut belum memenuhi peraturan PP No.63 tahun 2002 mengenai Hutan Kota yang menjelaskan bahwa persentasi luas hutan kota paling sedikit sekitar 10 persen dari wilayah perkotaan.

Kebutuhan akan lahan hutan untuk memenuhi 10 persen wilayah Kota Bekasi sudah sangat sulit ditemukan. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat urbanisasi, disertai dengan banyaknya kaum *commuter* yang mengadu nasib di Ibu Kota lebih memilih untuk tinggal di Kota Bekasi sebagai tempat tinggal. Fenomena tersebut menyebabkan kebutuhan lahan bermukim menjadi meningkat, sehingga lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau berubah menjadi permukiman.

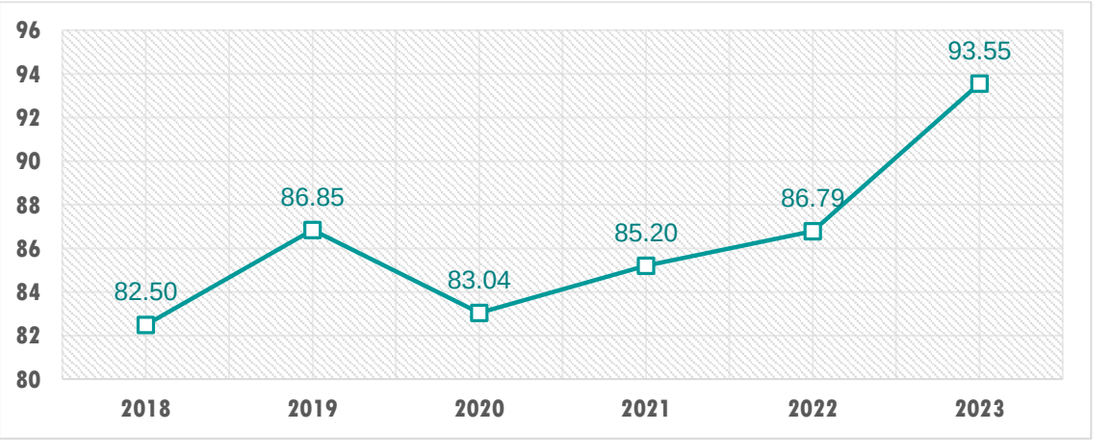
B. Pertanian

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKPPP) Kota Bekasi, luas lahan pertanian saat ini tersisa 312 hektar. Luasan lahan tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan luas Kota Bekasi menurut Badan Pusat Statistika yaitu 21.312 hektar, luas lahan pertanian hanya 1,46 persen dari luas Kota Bekasi. Lahan pertanian yang tidak terlalu besar di Kota Bekasi dikarenakan banyaknya permukiman yang kian bertambah dengan bertambahnya penduduk. Lahan pertanian mayoritas ditanami oleh padi dan sisanya tanaman hortikultura. Lahan pertanian yang tidak terlalu luas, maka produktifitas pertanian pun tidak terlampau tinggi. Produksi pertanian hanya mampu mencukupi ±2 persen dari total konsumsi masyarakat Kota Bekasi. Kota Bekasi dengan situasinya yang tidak bisa memenuhi konsumsi pangan sebagian besar masyarakatnya, sehingga pemenuhan ketahanan pangan tidak menjadi masalah. Kebutuhan pangan Kota Bekasi ditutupi atau dipasok oleh daerah di luar Bekasi, seperti dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga

aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota tertentu. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berdasarkan data IKP Kota Bekasi, menggambangkan tren yang relatif naik, walaupun di tahun 2020 sempat turun, namun kembali naik sampai tahun 2023 dengan nilai 93,55.



Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2018-2023

Gambar 2.9. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Berdasarkan peringkat, IKP Provinsi Jawa Barat menduduki posisi ke-8 sehingga masuk kelas kerentanan IKP "Sangat Tahan". Begitupun dengan Kota Bekasi, berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kota Bekasi menduduki peringkat ke-8, dengan kelas kerentanan sangat tahan dengan nilai peningkatan skor dari tahun sebelumnya (2022).

Tabel 2.5. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

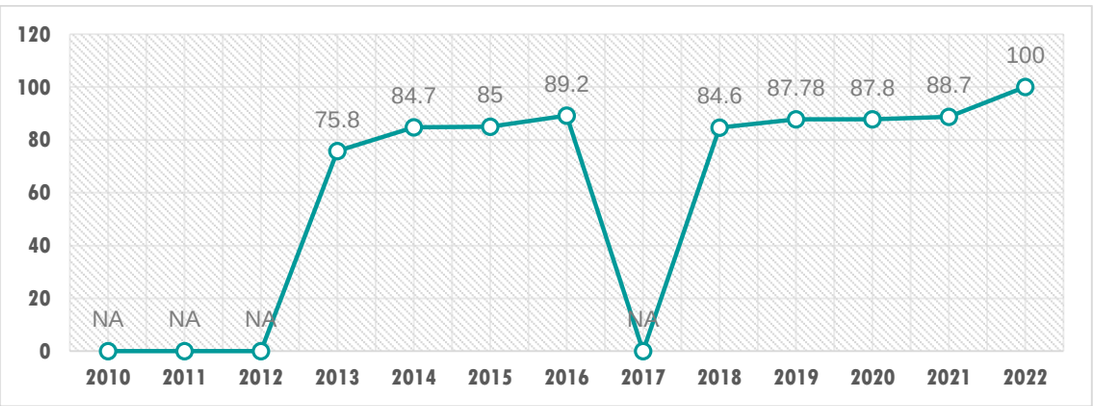
No.	Kabupaten	IKP
1	Kota Bekasi	93,55
2	Kota Bandung	90,46
3	Kota Depok	89,47
4	Karawang	88,48
5	Bekasi	88,05
6	Kota Cimahi	87,17
7	Subang	85,31
8	Sumedang	84,88
9	Indramayu	84,52
10	Kota Bogor	83,78
11	Kota Cirebon	83,77
12	Pangandaran	83,57
13	Bandung	82,48

No.	Kabupaten	IKP
14	Ciamis	82,36
15	Cirebon	82,03
16	Majalengka	81,39
17	Kuningan	80,95
18	Purwakarta	80,42
19	Kota Banjar	79,55
20	Kota Sukabumi	79,08
21	Cianjur	78,99
22	Garut	78,04
23	Sukabumi	77,65
24	Tasikmalaya	75,68
25	Bandung Barat	74,19
26	Kota Tasikmalaya	72,71
27	Bogor	70,57

Sumber: Daya , 2023

Selain ketahanan pangan, perlunya melihat ketersediaan pangan di suatu wilayah dengan menggunakan perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pola Pangan Harapan *(desirable dietary pattern)* adalah susunan jumlah pangan yang terdiri dari sembilan kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energi yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas, maupun keragaman dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Dewasa ini, Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator dari pembangunan nasional di bidang gizi dan pangan yang digunakan sebagai acuan dalam penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan dilihat dari sisi produksi, pengolahan, ataupun konsumsi mengingat pentingnya kecukupan energi dan zat gizi bagi setiap individu.

Melalui pendekatan PPH di atas, kualitas atau mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (*dietary score)* dan dikenal sebagai skor PPH. Skor PPH dapat dihitung dengan menggunakan formulasi persentase angka kecukupan gizi dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan (mencakup kelompok padi-padian, umbi-umbian, hewani, minyak dan lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain). Apabila skor PPH makin tinggi (idealnya 100), maka artinya konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang. Pencapaian skor pola pangan harapan di Kota Bekasi dapat dilihat dalam **Gambar 2.10** di bawah ini. Sepanjang periode 2010-2022, skor PPH Kota Bekasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tepatnya bergerak naik dari 84,6 pada tahun 2018 naik menjadi 87,8 tahun 2020 dan meningkat menjadi 89,24 pada tahun 2022. Peningkatan skor PPH ini mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di Kota Bekasi semakin beragam dan seimbang, baik dari sisi komposisi maupun mutu gizinya selama kurun waktu di atas.

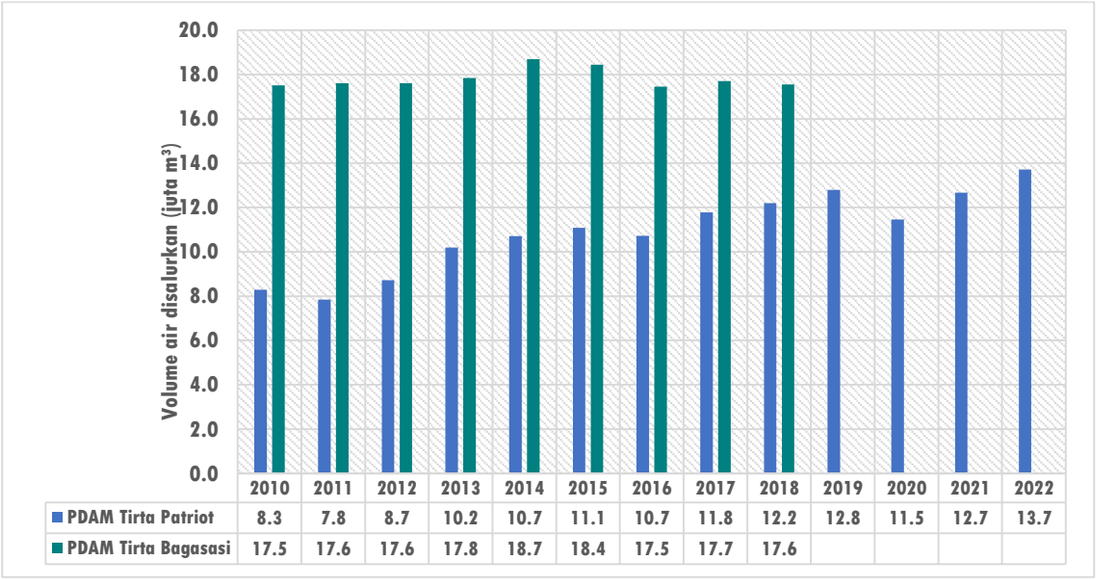


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2016- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kota Bekasi, 2022

Gambar 2.10. Perkembangan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Bekasi Tahun 2010-2022

C. Energi

Air bersih merupakan sumber daya utama bagi kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi salah satunya dikelola oleh dua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu PDAM Tirta Patriot dan PDAM Tirta Bhagasasi. Volume air yang disalurkan oleh dua PDAM tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.11**.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDAM Tirta Patriot	8.3	7.8	8.7	10.2	10.7	11.1	10.7	11.8	12.2	12.8	11.5	12.7	13.7
PDAM Tirta Bagasasi	17.5	17.6	17.6	17.8	18.7	18.4	17.5	17.7	17.6				

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2011-2023

Gambar 2.11. Volume Air yang Disalurkan oleh PDAM di Kota Bekasi Tahun 2010-2022

Gambar 2.11 menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2022, volume air yang disalurkan oleh PDAM Tirta Patriot berkisar antara 7,8 - 13,7 juta m³ dan sekitar 17,5 - 18,7 juta m³ yang disalurkan oleh PDAM Tirta Bhagasasi. Pada tahun 2023, jumlah pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi sekitar lebih dari 300 ribu pelanggan dan air yang diproduksi oleh PDAM ini sekitar lebih dari 3000 liter per detik. Wilayah pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi dikelola oleh 12 kantor cabang (KC) dan 10 kantor cabang pembantu (KCP) sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6. Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi

Kantor PDAM	Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi
Kantor cabang	1. Cabang Babelan
	2. Cabang Bekasi Kota
	3. Cabang Cibarusah
	4. Cabang Cikarang Selatan
	5. Cabang Cikarang Utara
	6. Cabang Jababeka
	7. Cabang Lemah Abang
	8. Cabang Pondok Ungu
	9. Cabang Rawalumbu
	10. Cabang Rawa Tembaga
	11. Cabang Tambun
	12. Cabang Tarumajaya
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	1. KCP Bojongmangu
	2. KCP Cabangbungin
	3. KCP Cikarang Barat
	4. KCP GCC
	5. KCP Kedung Waringin
	6. KCP Sukatani
	7. KCP Setia Mekar
	8. KCP Tambelang
	9. KCP Tambun Utara
	10. KCP Tegal Danas

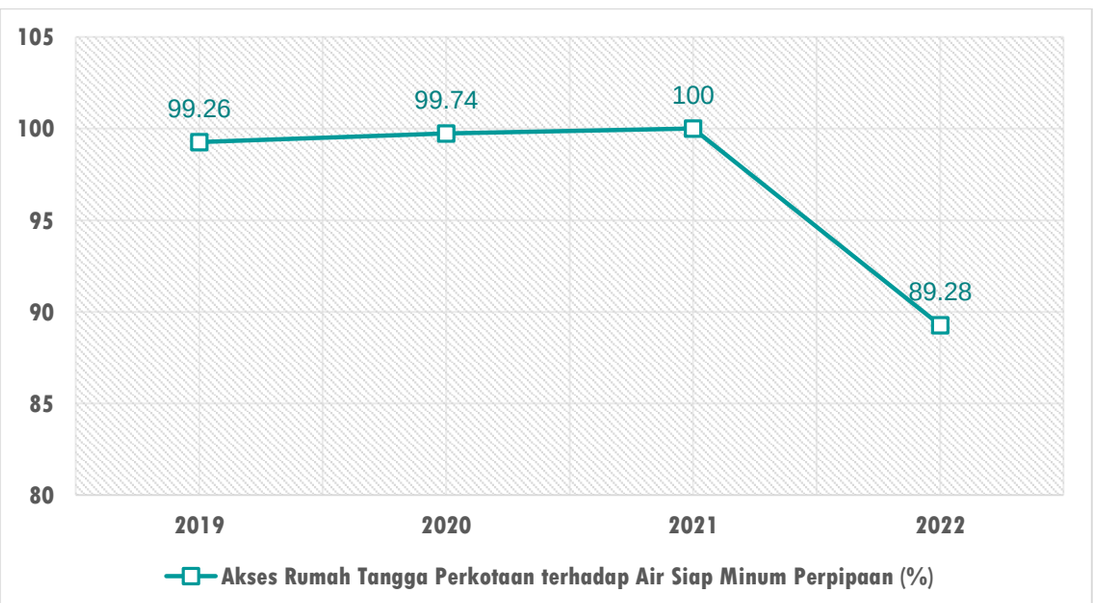
Sumber: Tirtabhagasasi, 2023 (https://tirtabhagasasi.co.id/)

Air bersih yang menjadi sumber air minum di Kota Bekasi bersumber dari ledeng, pompa, air dalam kemasan, dan sumur terlindung. Keempat sumber air minum tersebut termasuk dalam sumber air minum layak yang merupakan fasilitas air minum yang higienis dan terlindungi dari kontaminasi, khususnya kontaminasi dengan kotoran. Distribusi persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum pada tahun 2019 sebesar 76,49 persen untuk air dalam kemasan, pompa sebesar 23,05 persen, air ledeng sebesar 0,24 persen, dan sumur terlindung sebesar 0,22 persen.

Pada tahun 2018-2019, sumber air minum utama masyarakat Kota Bekasi adalah air dalam kemasan dan pompa. Distribusi persentase rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum sekitar 75-76% dan yang bersumber dari pompa sekitar 22-23% pada tahun 2018 hingga 2019. Sebagian kecil rumah tangga lainnya memanfaatkan ledeng dan sumur terlindung sebagai sumber air minum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data diatas perlunya melihat ketahanan air di Kota Bekasi sehingga bisa memperkirakan keberlanjutan dan risiko dalam memakai air. Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air (*draft* Jaknas Sumber Daya Air 2020-2023). Perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak. Dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa Indeks Ketahanan Air perlu disusun untuk menunjang strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam memenuhi nilai ketahanan air, diperlukan dua indikator pendukung yaitu Kapasitas Air Baku (m³/detik) dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%). Didapatkan data Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan tahun 2019-2022, data menunjukan bahwa nilai relatif naik walapun di tahun 2022 menurun menjadi 89,28 persen dari 100 persen di tahun 2021. Maka perlunya program pemerintah daerah dalam meningkakan akses terhadap air perpipaan, karena akses air minum yang aman di Indonesia semestinya diarahkan pada air perpipaan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah kontaminasi air perpipaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan air sumur dan sumber-sumber lain. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan akses terhadap air perpipaan tersebut menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber pendanaan.



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2022

Gambar 2.12. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) di Kota Bekasi Tahun 2019-2022

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

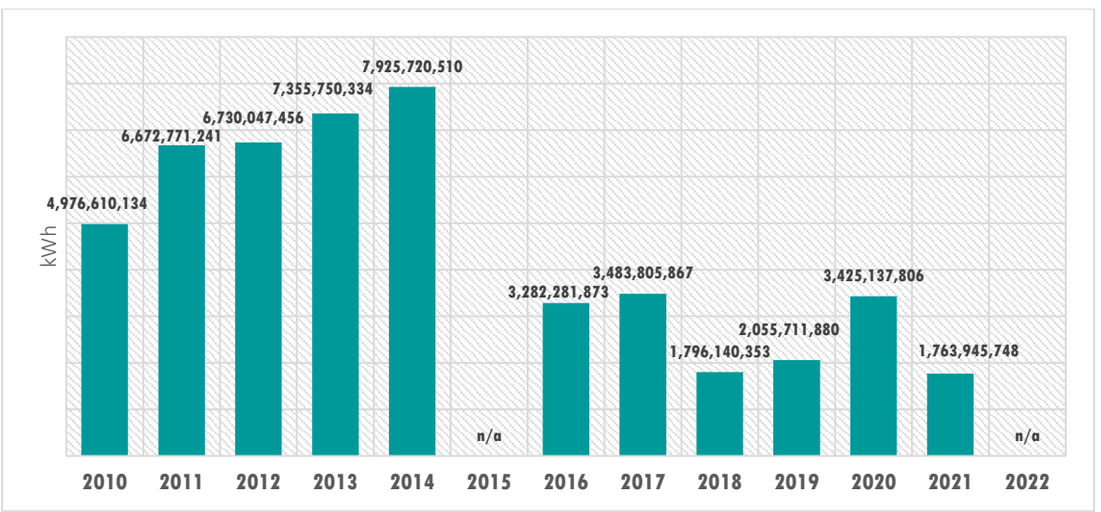
Selain kebutuhan air, energi listrik juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggak di perkotaan, dengan dominansi aktivitas sehari-harinya menggunakan listrik. Penyediaan energi listrik di Kota Bekasi dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik di Kota Bekasi dapat dilihat pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7. Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Bekasi

Tahun	Jumlah pelanggan
2010	823.101
2011	874.784
2012	981.465
2013	1.125.988
2014	1.233.806
2015	1.369.615
2016	421.669
2017	447.324
2018	662.386
2019	881.680
2020	918.375
2021	na
2022	na

Keterangan: na = data tidak tersedia
Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2013-2021

Selama tahun 2010 hingga 2020, jumlah pelanggan listrik di Kota Bekasi mengalami peningkatan, dari 823.101 pelanggan di tahun 2010, menjadi 918.375 pelanggan di tahun 2020. Energi listrik dari PLN di Kota Bekasi diantaranya dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis, industri, pemerintahan, rumah tangga, sosial, dan lain-lain. Meningkatnya jumlah pelanggan listrik di Kota Bekasi dari tahun ke tahun dipicu oleh bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya infrastruktur, bisnis, dan industri di wilayah perkotaan. Adapun jumlah listrik terjual di Kota Bekasi disajikan pada **Gambar 2.13**.



Keterangan: na = data tidak tersedia
Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2011-2022

Gambar 2.13. Jumlah Listrik PLN yang Terjual di Kota Bekasi Tahun 2010-2022

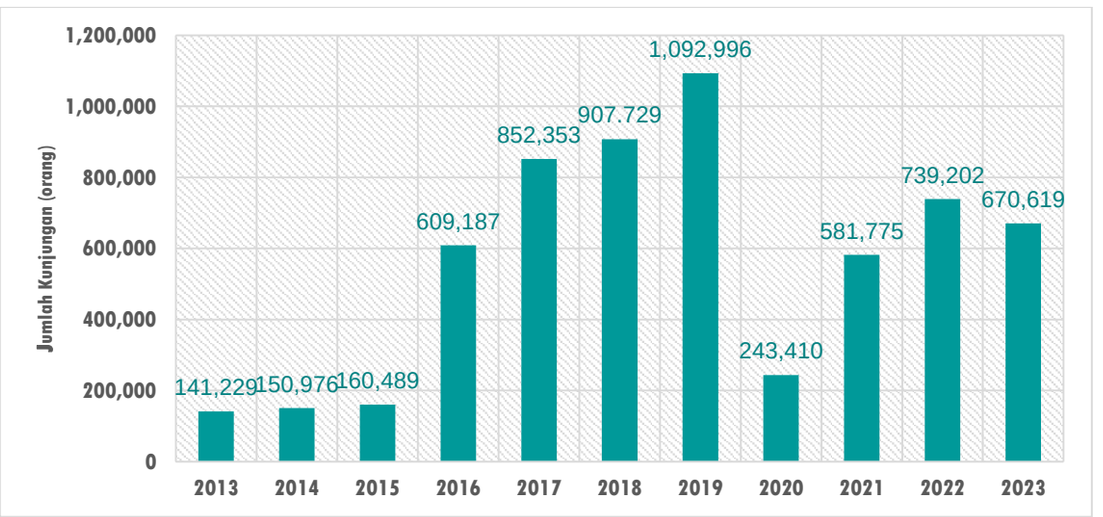
Sebagian besar listrik PLN dimanfaatkan oleh rumah tangga penduduk Kota Bekasi, dengan distribusinya yang mencapai 76% pada tahun 2019. Rata-rata listrik yang terjual di Kota Bekasi pada periode tahun 2010 hingga 2021 (**Gambar 2.13**) sekitar 4.497.083.927 kWh, dengan penjualan listrik tertinggi hingga 7.925.720.510 Kwh pada tahun 2014.

D. Pariwisata

Dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah, sektor pariwisata memiliki andil yang sangat besar. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik-baiknya maka suatu daerah dapat menarik para wisatawan baik yang ada di dalam negeri maupun wisatawan asing untuk datang dan berwisata di daerahnya. Secara geografis Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten besar di Jawa Barat dan DKI Jakarta, maka potensi sektor wisata yang ada di Kota Bekasi didominasi oleh produk wisata kota (*urban tourism*) seperti: wisata keluarga, wisata kuliner, wisata belanja, wisata pendidikan dan budaya, wisata industri, dan wisata sejarah.

Wisata kota yang ditawarkan seperti berbagai pusat perbelanjaan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di luar Kota Bekasi. Ditambah dengan adanya festival seni dan budaya yang diselenggarakan secara rutin maupun berkala dapat menggerakkan perekonomian lokal. Kota Bekasi juga memiliki objek wisata sejarah yang ditunjukkan dengan adanya 8 situs dan cagar budaya. Peninggalan bersejarah tersebut diantaranya Rumah Adat Bekasi dan Sumur Kembar Kranggan di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Jatisampurna; Sumur Batu di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang; Tugu Perjuangan Kali Bekasi; Tugu Perjuangan Rakyat Bekasi di area Alun-alun Kota Bekasi; Tugu Bambu Runcing di area Hutan Kota Bekasi; Tugu Perjuangan di Jalan H Agus Salim; dan Gedong Papak.

Jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bekasi secara umum terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2023. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, peningkatan tersebut setiap tahunnya mencapai 2 hingga 100 persen. Pada tahun 2019 kunjungan wisatawan di Kota Bekasi mengalami peningkatan signifikan yang mencapai 1.092.996 wisatawan, sedangkan penurunan signifikan dialami pada tahun 2020 hingga mencapai 243.410 wisatawan. Penurunan kunjungan tersebut salah satunya disebabkan adanya pandemi covid-19, dengan adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, serta penutupan sementara destinasi wisata. Walau demikian, kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik hingga mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,95 persen atau masuk dalam kategori sangat baik. Namun demikian informasi kunjungan wisata pada tahun 2018 tidak diketahui karena datanya tidak tersedia. Lama kunjungan wisatawan di Kota Bekasi rata-rata hanya 1 sampai 2 hari. Hal ini diduga karena wisatawan yang datang berasal dari daerah sekitar yang lokasinya relatif dekat dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai lokasi tujuan. Dinamika jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bekasi dapat dilihat pada **Gambar 2.14**.



Sumber: https://disparbud.bekasikota.go.id, Bappelitbangda Kota Bekasi

Gambar 2.14. Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Bekasi Tahun 2013-2023

2.1.1.6. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, menjadi salah satu hal yang wajib ada dan dilakukan pada tahap kajian 6 (enam) muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Daya Dukung Penyedia Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Diketahui dalam menghitung ketersediaan pangan diperlukan data produksi pangan dalam suatu wilayah per tahun. Selain itu identifikasi jenis dan luasan tutupan lahan yang ada di kawasan perencanaan. Adapun Distribusi Ketersediaan Pangan per Kecamatan per Tutupan Lahan yaitu produksi di kali bobot dikali hasil pembagian luas penggunaan lahan yang telah dibagi oleh total luas penggunaan lahan. Setelah diketahui ketersediaan pangan, maka dilakukan perhitungan kebutuhan pangan di Kota Bekasi dengan kebutuhan ideal angka kalori yaitu sebesar 2.150 kkal/kap/hari dikalikan dengan jumlah penduduk. Tahun 2022 ketersediaan pangan sebesar 2.610.799.620,01 kkal/tahun dan kebutuhan pangan sebesar 2.032.706.535.000,00 kkal/tahun. Sehingga terjadi defisit sebesar-2.030.095.735.379,97 kkal/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan peta pada gambar berikut:

Tabel 2.8. Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Pangan (kkal/tahun)		Selisih
		Ketersediaan	Kebutuhan	
1	Bantargebang	260.818.666,40	85.851.650.000,00	-85.590.831.333,60
2	Bekasi Barat	190.132.913,49	223.975.497.500,00	-223.785.364.586,50
3	Bekasi Selatan	189.327.465,02	167.638.295.000,00	-167.448.967.534,99
4	Bekasi Timur	181.312.104,86	204.466.612.500,00	-204.285.300.395,13
5	Bekasi Utara	289.766.715,94	269.279.115.000,00	-268.989.348.284,07
6	Jatiasih	307.017.989,73	199.962.147.500,00	-199.655.129.510,27
7	Jatisampurna	262.917.251,05	99.804.505.000,00	-99.541.587.748,95
8	Medansatria	152.940.913,45	128.596.982.500,00	-128.444.041.586,55
9	Mustikajaya	300.831.724,24	173.665.175.000,00	-173.364.343.275,75
10	Pondokgede	193.192.751,22	199.483.450.000,00	-199.290.257.248,77
11	Pondokmelati	115.275.317,70	104.112.782.500,00	-103.997.507.182,32
12	Rawalumbu	167.265.806,92	175.870.322.500,00	-175.703.056.693,07
Grand Total		2.610.799.620,01	2.032.706.535.000,00	-2.030.095.735.379,97

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

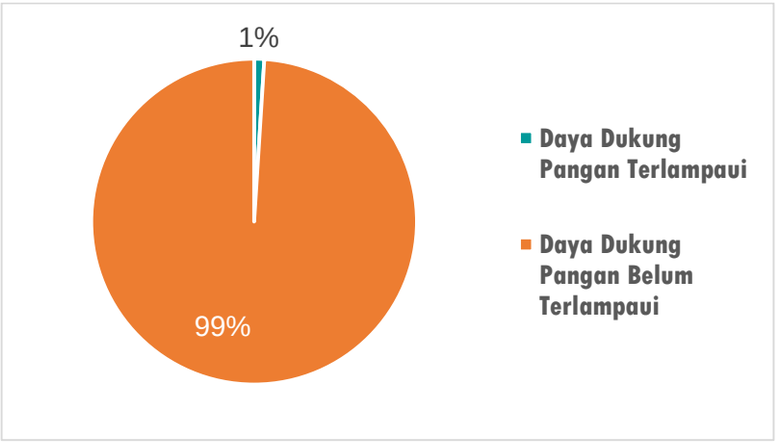
Tabel berikut memperlihatkan status pangan Kota Bekasi Tahun 2022, terdapat 3 kecamatan yang belum terlampaui yaitu Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Selatan, dan Rawalumbu. Luas wilayah yang belum terlampaui sebesar 101,83 hektar dan yang telah terlampaui sekitar 21.201,76 hektar, sehingga terdapat selisih sekitar 21.303,59 hektar.

Tabel 2.9. Status Pangan Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Pangan (hektar)		Selisih (hektar)
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Bantargebang	51,91	1.871,66	1.923,57
2	Bekasi Barat	-	1.489,40	1.489,40
3	Bekasi Selatan	-	1.580,04	1.580,04
4	Bekasi Timur	6,04	1.456,86	1.462,89
5	Bekasi Utara	12,29	2.067,36	2.079,65
6	Jatiasih	11,90	2.413,42	2.425,32
7	Jatisampurna	11,81	2.006,87	2.018,68
8	Medansatria	2,25	1.318,67	1.320,92
9	Mustikajaya	3,34	2.471,26	2.474,60
10	Pondokgede	0,35	1.742,32	1.742,67
11	Pondokmelati	1,94	1.099,27	1.101,21
12	Rawalumbu	-	1.684,63	1.684,63
Grand Total		101,83	21.201,76	21.303,59
Persen (%)		0,478	99,522	100,00

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

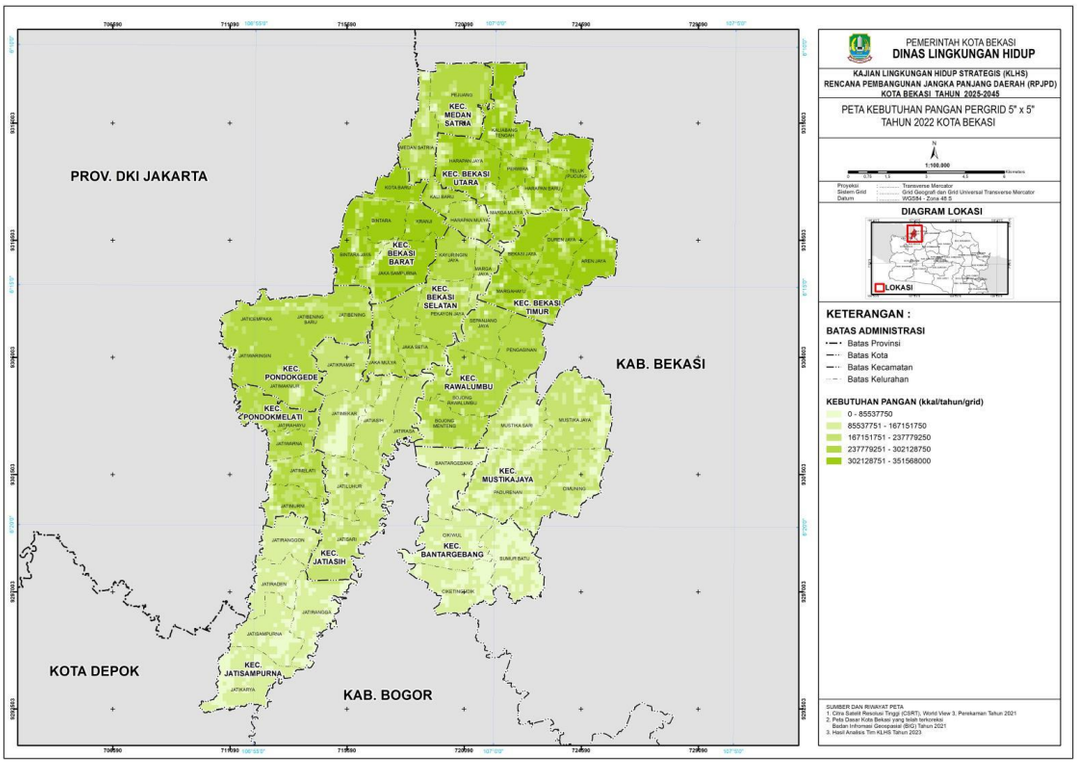
Status pangan di Kota Bekasi mencapai 99 persen untuk daya dukung yang terlampaui atau defisit. Status pangan yang belum terlampaui hanya sebesar 1 persen, lihat gambar berikut.



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

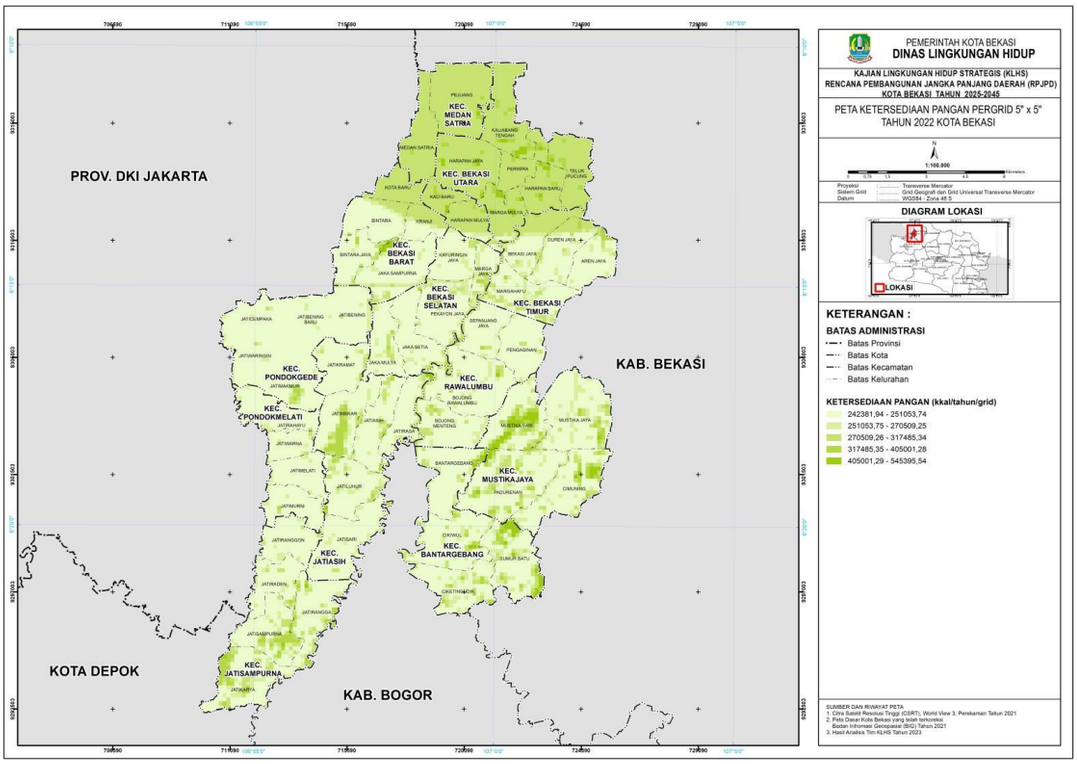
Gambar 2.15. Persentase Daya Dukung Pangan Kota Bekasi

Jika dilihat secara spasial, kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan ditunjukan dengan peta kebutuhan pangan dan peta ketersediaan pangan pada **Gambar 2.16** dan **Gambar 2.17**, sehingga menghasilkan Peta Daya Dukung Penyedia Pangan Kota Bekasi pada **Gambar 2.18**.



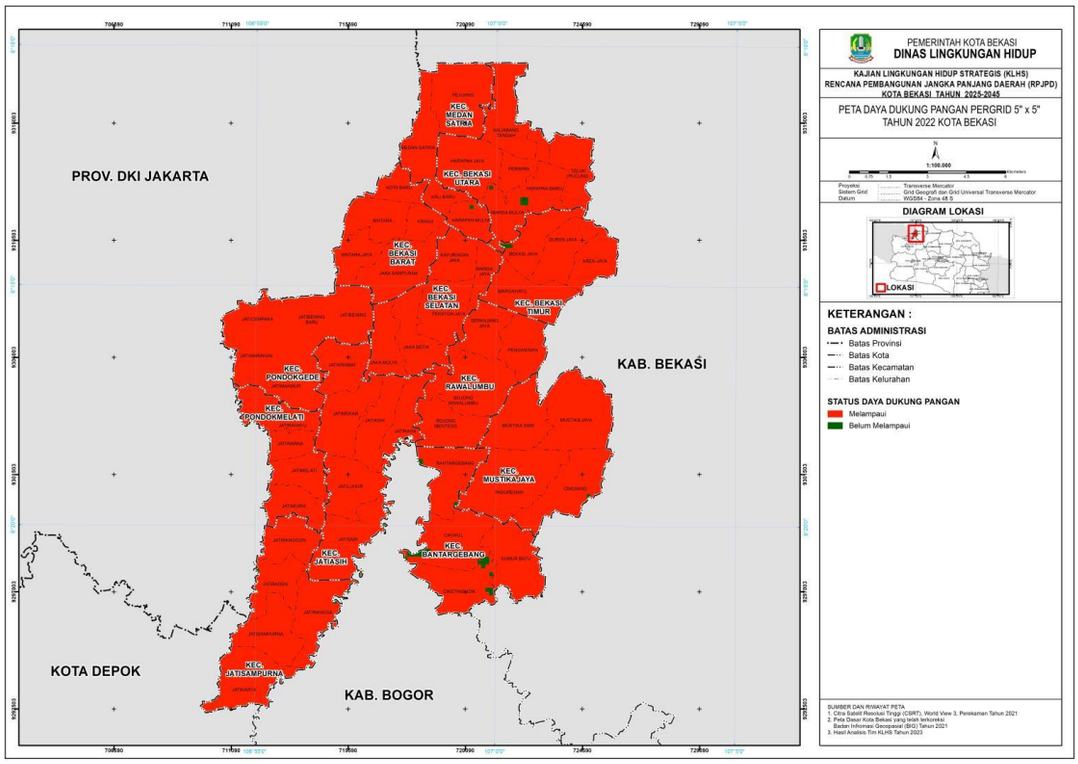
Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.16. Peta Kebutuhan Pangan Kota Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.17. Peta Ketersediaan Pangan Kota Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.18. Peta Daya Dukung Pangan di Kota Bekasi

Nilai ambang batas pangan Kota Bekasi Tahun 2022 termasuk melebihi ambang batas. Jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2022 sekitar 2.590.260 jiwa memiliki nilai nilai ambang batas sebesar 3.327. Berdasarkan hasil analisis ambang batas daya dukung penyedia lahan maka didapatkan bahwa semua kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi nilainya sudah melebihi ambang batas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.10. Ambang Batas Pangan Kota Bekasi Tahun 2022

Kecamatan	Ketersediaan (Kkal/th)	Kebutuhan (Kkal/th)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ambang Batas	Keterangan
Bantargebang	260.818.666,40	85.851.650.000,00	109.400	332	MelebihiAB
Bekasi Barat	190.132.913,49	223.975.497.500,00	285.410	242	MelebihiAB
Bekasi Selatan	189.327.465,02	167.638.295.000,00	213.620	241	MelebihiAB
Bekasi Timur	181.312.104,86	204.466.612.500,00	260.550	231	MelebihiAB
Bekasi Utara	289.766.715,94	269.279.115.000,00	343.140	369	MelebihiAB
Jatiasih	307.017.989,73	199.962.147.500,00	254.810	391	MelebihiAB
Jatisampurna	262.917.251,05	99.804.505.000,00	127.180	335	MelebihiAB
Medansatria	152.940.913,45	128.596.982.500,00	163.870	195	MelebihiAB
Mustikajaya	300.831.724,24	173.665.175.000,00	221.300	383	MelebihiAB
Pondokgede	193.192.751,22	199.483.450.000,00	254.200	246	MelebihiAB
Pondokmelati	115.275.317,70	104.112.782.500,00	132.670	147	MelebihiAB
Rawalumbu	167.265.806,92	175.870.322.500,00	224.110	213	MelebihiAB
Grand Total	2.610.799.620,01	2.032.706.535.000,00	2.590.260	3.327	MelebihiAB

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

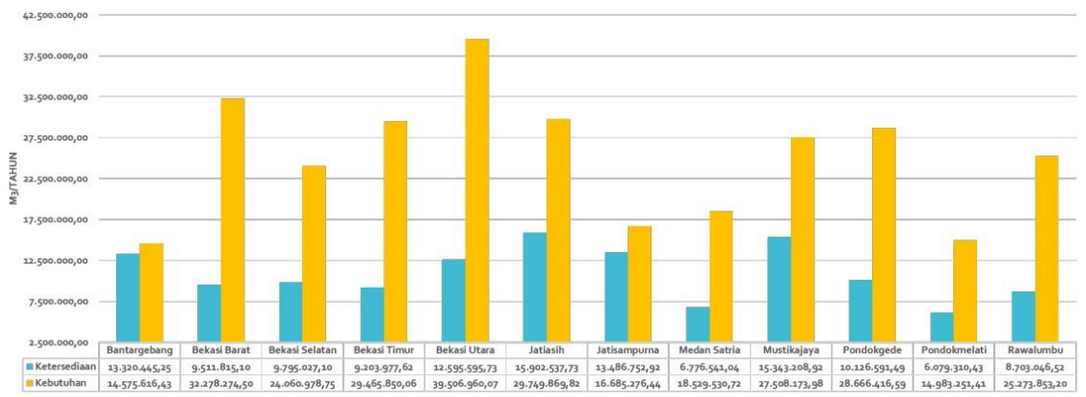
B. Daya Dukung Penyedia Air Bersih

Penentuan daya dukung air dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu mengenai potensi ketersediaan air yang ada di Kota Bekasi, yang dimana sumber air bakunya berasal dari air permukaan. Kebutuhan air domestik, dihitung dengan mengacu pada SK.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Kebutuhan air di Kota Bekasi sebesar 301.284.051,97 m³/tahun, sedangkan ketersediaan air sebesar 130.844.849,84 m³/tahun. Artinya daya dukung air di Kota Bekasi telah terlampaui/defisit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kebutuhan air per desa di bawah ini. Lihat tabel, peta, dan gambar berikut.

Tabel 2.11. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Air Bersih (m³/tahun)		Selisih
		Ketersediaan	Kebutuhan	
1	Bantargebang	13.320.445,25	14.575.616,43	-1.255.171,18
2	Bekasi Barat	9.511.815,10	32.278.274,50	-22.766.459,40
3	Bekasi Selatan	9.795.027,10	24.060.978,75	-14.265.951,64
4	Bekasi Timur	9.203.977,62	29.465.850,06	-20.261.872,43
5	Bekasi Utara	12.595.595,73	39.506.960,07	-26.911.364,34
6	Jatiasih	15.902.537,73	29.749.869,82	-13.853.679,89
7	Jatisampurna	13.486.752,92	16.685.276,44	-3.198.523,52
8	Medansatria	6.776.541,04	18.529.530,72	-11.752.989,68
9	Mustikajaya	15.343.208,92	27.508.173,98	-12.164.965,06
10	Pondokgede	10.126.591,49	28.666.416,59	-18.539.825,10
11	Pondokmelati	6.079.310,43	14.983.251,41	-8.914.555,22
12	Rawalumbu	8.703.046,52	25.273.853,20	-16.570.806,68
Grand Total		130.844.849,84	301.284.051,97	-170.456.164,16

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.19. Grafik Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022

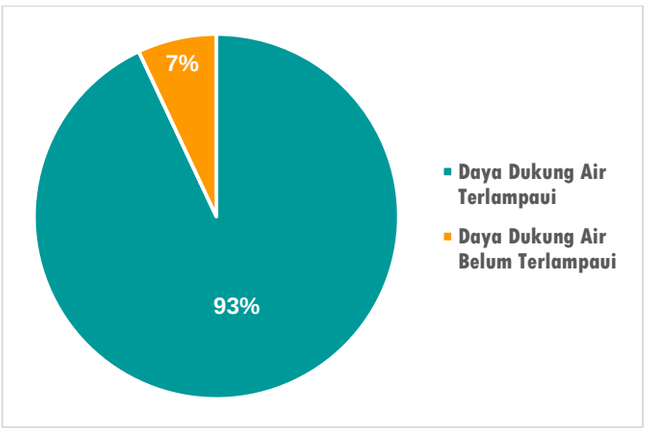
Tabel 2.12. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (hektar)		Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
1	Bantargebang	561,63	1.361,95	1.923,57
2	Bekasi Barat	24,15	1.465,25	1.489,40
3	Bekasi Selatan	71,26	1.508,78	1.580,04
4	Bekasi Timur	41,46	1.421,43	1.462,89
5	Bekasi Utara	88,86	1.990,79	2.079,65
6	Jatiasih	148,62	2.276,70	2.425,32

No	Kecamatan	Status Daya Dukung Air (hektar)		Total
		Belum Melampaui	Melampaui	
7	Jatisampurna	333,33	1.685,35	2.018,68
8	Medansatria	53,26	1.267,66	1.320,92
9	Mustikajaya	150,39	2.324,21	2.474,60
10	Pondokgede	15,41	1.727,26	1.742,67
11	Pondokmelati	29,73	1.071,48	1.101,21
12	Rawalumbu	42,52	1.642,11	1.684,63
Grand Total		1.560,61	19.742,98	21.303,59

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Grafik berikut memperlihatkan status daya dukung air sudah terlampaui sebesar 93 persen pada lahan seluas 19.742,98 hektar dan yang belum terlampaui hanya 7 persen pada lahan seluas 1.560,61 hektar.



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

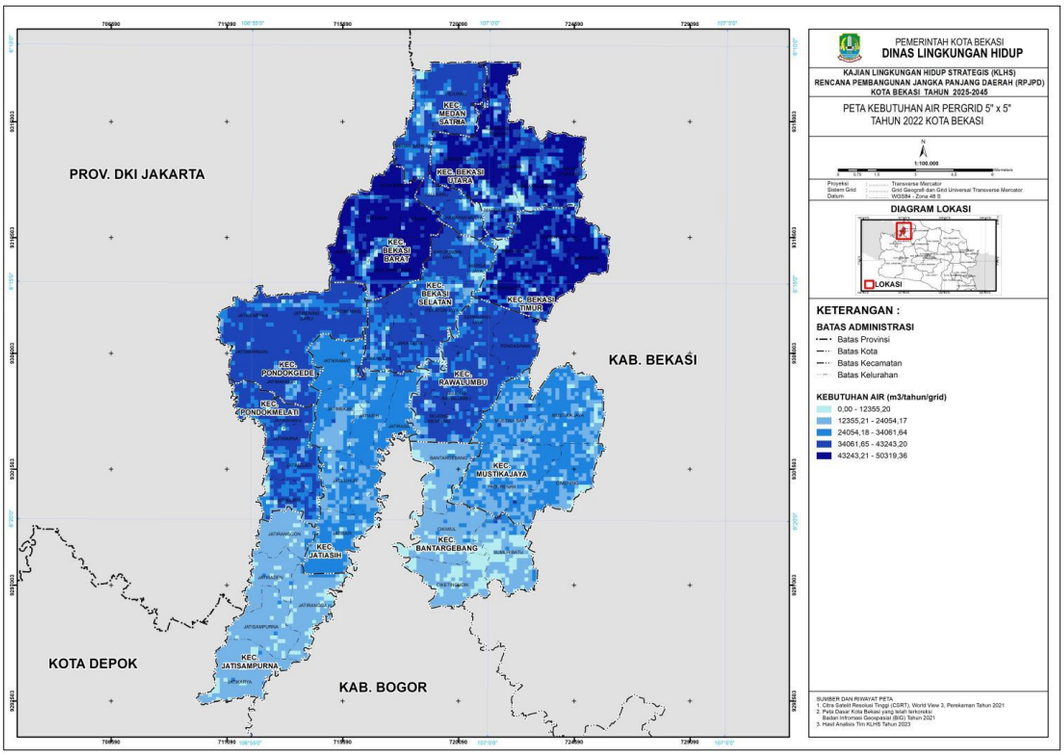
Gambar 2.20. Presentase Daya Dukung Air Bersih Kota Bekasi Tahun 2022

Nilai ambang batas air Kota Bekasi Tahun 2022 termasuk melebihi ambang batas. Jumlah penduduk Kota Bekasi Tahun 2022 sekitar 2.590.260 jiwa memiliki nilai nilai ambang batas sebesar 2.377.211. Semua kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi nilainya sudah melebihi ambang batas. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel 2.13. Ambang Batas Air Kota Bekasi Tahun 2022

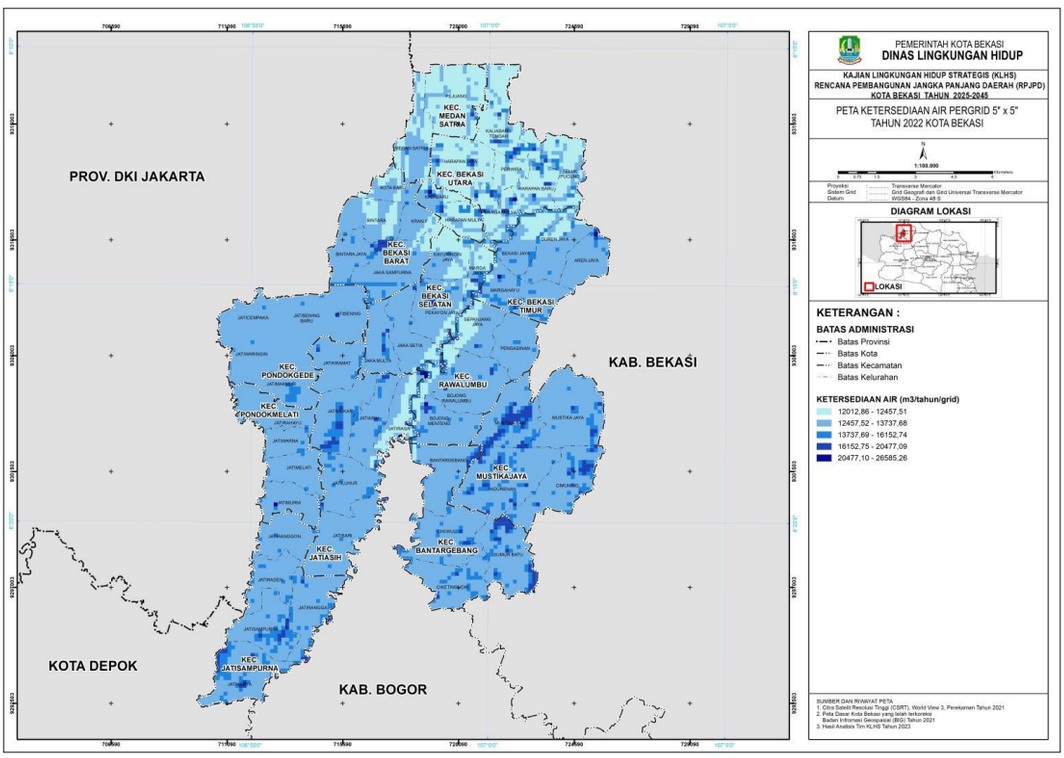
Kecamatan	Ketersediaan Air (m^3/th)	Kebutuhan Air (m^3/th)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ambang Batas	Keterangan
Bantargebang	13.320.445	14.575.616	109.400	107.831	Melebihi AB
Bekasi Barat	9.511.815	32.278.275	285.410	256.952	Melebihi AB
Bekasi Selatan	9.795.027	24.060.979	213.620	195.788	Melebihi AB
Bekasi Timur	9.203.978	29.465.850	260.550	235.223	Melebihi AB
Bekasi Utara	12.595.596	39.506.960	343.140	309.501	Melebihi AB
Jatiasih	15.902.538	29.749.870	254.810	237.501	Melebihi AB
Jatisampurna	13.486.753	16.685.276	127.180	123.182	Melebihi AB
Medansatria	6.776.541	18.529.531	163.870	149.179	Melebihi AB
Mustikajaya	15.343.209	27.508.174	221.300	206.094	Melebihi AB
Pondokgede	10.126.591	28.666.417	254.200	231.025	Melebihi AB
Pondokmelati	6.079.310	14.983.251	132.670	121.540	Melebihi AB
Rawalumbu	8.703.047	25.273.853	224.110	203.396	Melebihi AB
Kota Bekasi	130.844.849,84	301.284.051,97	2.590.260,00	2.377.211	Melebihi AB

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045



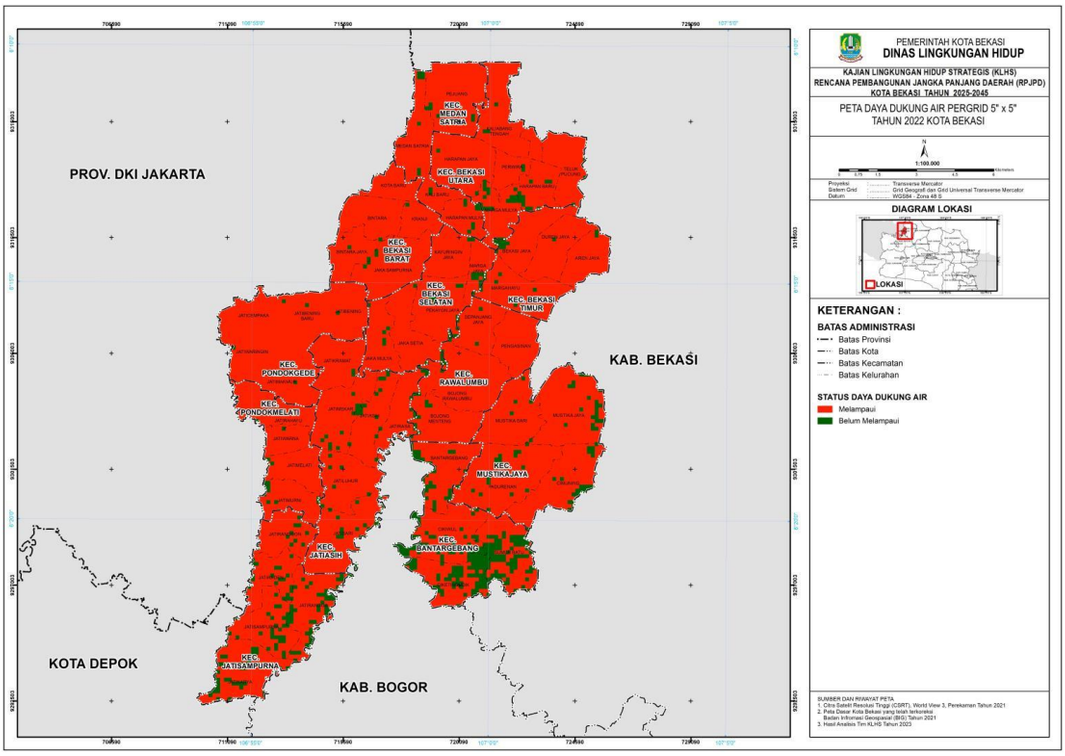
Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.21. Peta Kebutuhan Air di Kota Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.22. Peta Ketersediaan Air di Kota Bekasi



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.23. Peta Daya Dukung Air di Kota Bekasi

2.1.1.7. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen-komponen lingkungan hidup, baik komponen biota maupun komponen abiotik yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan atau sesuai dengan standard mutu lingkungan. Kualitas lingkungan umumnya dihitung secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibukota provinsi.

Indeks kualita lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan programprogram pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal (1) Membantu perumusan kebijakan; (2) Membantu dalam mendisain program lingkungan; (3) Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan, terutama yang berbasis daerah, diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan.

Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Bekasi selama kurun waktu 2010-2023 yang terbaik yaitu pada tahun 2020 sebesar 60,42 persen. Meskipun nilainya merupakan yang terbaik dibandingkan dua tahun diantaranya namun nilai tersebut masih tergolong dalam kategori “Kurang”.

Sementara itu, yang paling rendah selama kurun waktu tersebut yaitu pada tahun 2021 sebesar 42,36 persen dengan status waspada. Rincian nilai Indeks Lingkungan di Kota Bekasi pada tahun 2010-2023 disajikan pada **Tabel 2.14**, sementara kategori penilaian Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disampaikan pada **Tabel 2.15**. Ketetapan tersebut mengikuti ketetapan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagaimana yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Tabel 2.14. Persentase Indeks Lingkungan di Kota Bekasi Tahun 2010-2023

Tahun	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKLH	Kategori
2010	na	na	na	na	na
2011	na	na	na	na	na
2012	na	na	na	na	na
2013	na	na	na	na	na
2014	na	na	na	na	na
2015	na	na	na	na	na
2016	na	na	na	na	na
2017	na	na	na	na	na
2018	na	na	na	47,15	Waspada
2019	15,24	23,55	9,00	47,77	Waspada
2020	16,20	24,36	13,21	60,42	Kurang
2021	32,28	66,88	24,58	42,36	Waspada
2022	30,5	66,88	22,38	46,63	Waspada
2023	36,93	65,65	24,38	45,81	Waspada

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2020-2023

Tabel 2.15. Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

No	Kategori	Nilai
1	Unggul	x > 90
2	Sangat Baik	82 < x ≤ 90
3	Baik	74 < x ≤ 82
4	Cukup	66 ≤ x ≤ 74
5	Kurang	58 ≤ x < 66
6	Sangat Kurang	50 ≤ x< 58
7	Waspada	x < 50

Sumber Data: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2020-2023

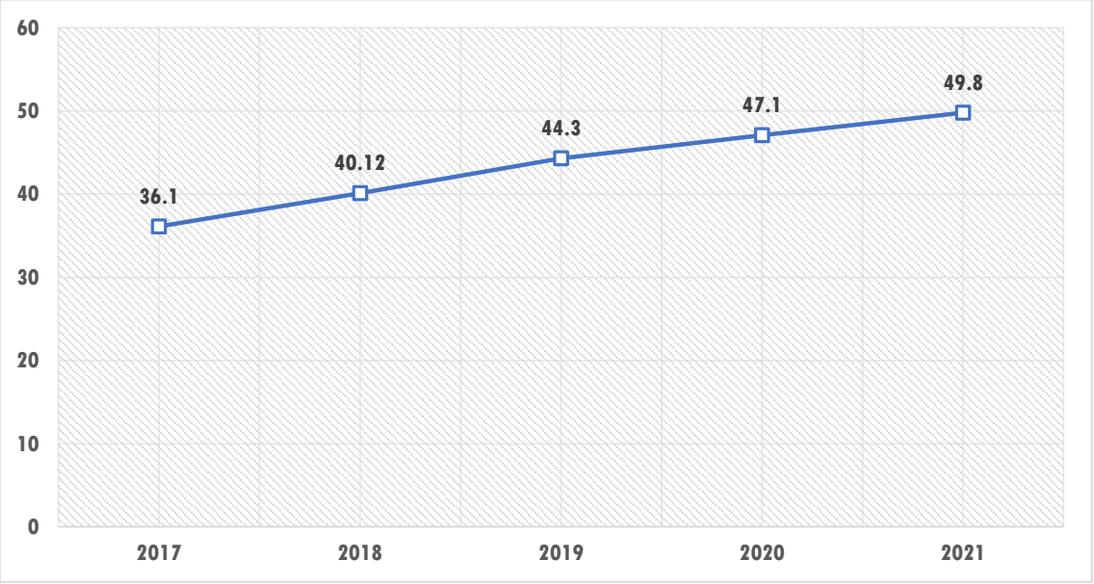
2.1.1.8. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

A. Perubahan Iklim

Fenomena perubahan Iklim terjadi karena adanya perubahan posisi bumi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), peningkatan konsentrasi GRK akibat aktivitas manusia menjadi penyebab utama perubahan iklim dan naiknya suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20.

Mengurangi emisi GRK merupakan sebuah tantangan yang cukup kompleks bagi pemerintah, dari mulai biaya investasi awal untuk teknologi bersih, kebijakan yang kurang mendukung, dan perubahan perilaku masyarakat. Maka dari itu diperlukan peran berbagai pihak untuk saling berkomitmen dan mengambil peran dalam mengurangi GRK. Indikator yang dapat diukur dalam melihat pernurunan GRK adalah indikator Persentasi Penurunan GRK. Nilai tersebut menjadi tolak ukur dalam mengatasi emisi GRK Kab/Kota, begitupun dengan Kota Bekasi.

Pada **Gambar 1.1** menunjukkan nilai persentasi penurunan GRK di Kota Bekasi, nilai persentasi emisi GRK dati tahun 2017 sebesar 36,1% meningkat sampai tahun 2021 diangka 49,8%, sehingga berdampak sekali pada perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida, hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi.



Gambar 2.24. Persentasi Penurunan Emisi GRK (%) Kota Bekasi Tahun 2017 – 2021

Akibat dari perubahan iklim sangat mempengaruhi siklus hujan serta meningkatkan kejadian kekeringan berkepanjangan dan jumlah curah hujan ekstrem. Saat kekeringan melanda, pasokan air menjadi langka. Sementara itu, kebalikannya, saat hujan dengan intensitas dan frekuensi tinggi terjadi dalam waktu lama, banjir pun terjadi di mana-mana. Selain banjir pada musim penghujan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa hingga tahun 2034 hampir seluruh wilayah Indonesia akan mengalami penurunan jumlah curah hujan tahunan.

Dampak perubahan iklim global tentunya di rasakan oleh Kota Bekasi, baik berupa kekeringan maupun berupa banjir. Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045, didapatkan nilai Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA) dan Indeks Keterpaparan Sensitifitas (IKS) untuk melihat tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim Kota Bekasi tahun 2022.

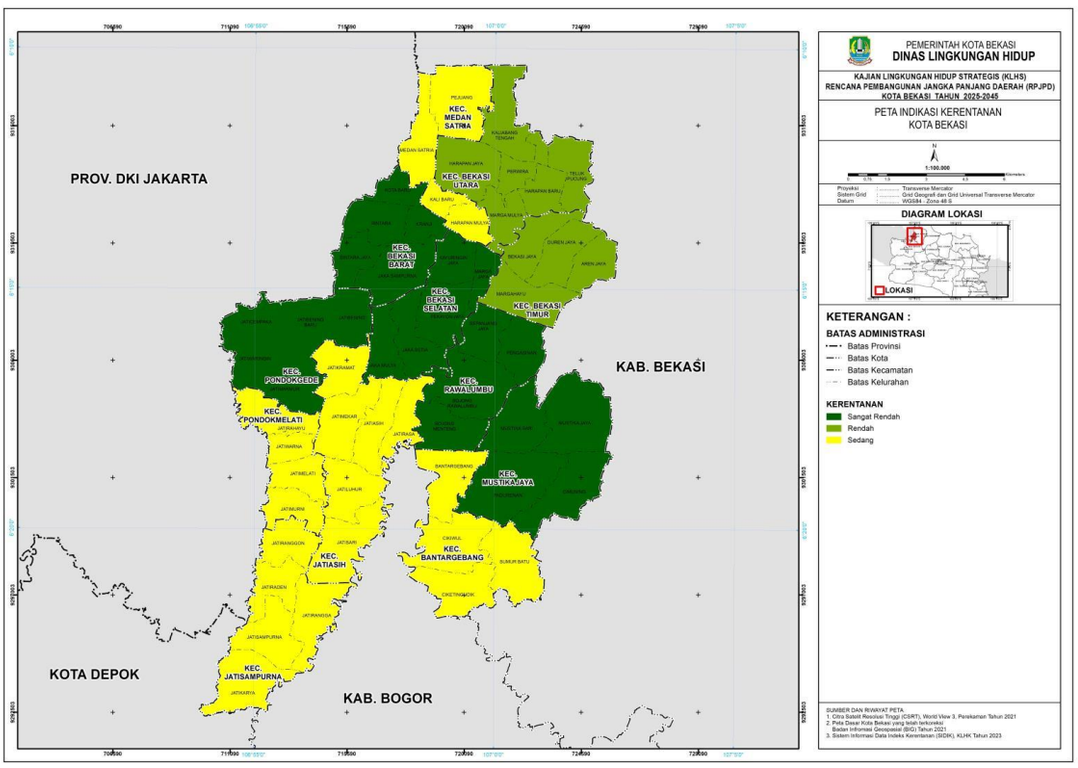
Menurut Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018, kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas Adaptasi untuk mengatasi dampak negatif. Tingkat kerentanan ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Tiga indikator tersebut digunakan untuk menghitung IKS dan IKA. Indeks Keterpaparan Sensitivitas (IKS) didapat dari Tingkat Keterpaparan dan Tingkat Sensitivitas sedangkan Indeks Kapasitas Adaptasi (IKA) didapat dari indikator-indikator kapasitas adaptasi.

Terdapat kelas Kerentanan, Risiko Banjir, Risiko Kering beserta hasil perhitungan nilai IKA dan IKS setiap kecamatan di Kota Bekasi pada **Tabel 2.16**. Berdasarkan nilai tersebut, Kecamatan Rawalumbu memiliki nilai IKA paling tinggi yaitu 0,77954 merupakan daerah yang paling tidak rentan terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan kecamatan lain. Nilai IKS tertinggi yaitu 0,5666 terdapat di Kecamatan Bekasi Timur yang berarti menjadi daerah paling rentan terhadap perubahan iklim. Risiko banjir tertinggi dengan nilai 3 terdapat di Kecamatan Jatisampurna, Pondokmelati, Jatiasih, Bantargebang, dan Medansatria. Risiko kering tertinggi terdapat di Kecamatan Jatisampurna, Pondokmelati, Jatiasih, Bantargebang, dan Medansatria dengan nilai 3. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan peta berikut:

Tabel 2.16. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2022

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Pondokgede	0,7259	0,3829	1	1	1
Jatisampurna	0,62802	0,4434	3	3	3
Pondokmelat	0,61094	0,3922	3	3	3
Jatiasih	0,68062	0,4639	3	3	3
Bantargebang	-	0,4181	3	3	3
Mustikajaya	0,71734	0,3832	1	1	1
Bekasi Timur	0,73998	0,5666	2	2	2
Rawalumbu	0,77954	0,4794	1	1	1
Bekasi Selata	0,76136	0,4581	1	1	1
Bekasi Barat	0,72302	0,3795	1	1	1
Medansatria	0,7197	0,5176	3	3	3
Bekasi Utara	0,71806	0,5419	2	2	2

Sumber: Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045



Sumber : Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2023
(Dokumen KLHS RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045)

Gambar 2.25. Peta Indeks Kerentanan Kota Bekasi

B. Ketahanan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi maka pemerintah daerah melakukan pengurukun Indeks Ketahanan Daerah. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan

penanggulangan bencana di daerah. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks ketahanan bencana Kota Bekasi, didapatkan data dua titik tahun yaitu tahun 2021 dengan nilai 0,44 dan tahun 2022 dengan nilai 0,33. Data tersebut menunjukan penurunan nilai indeks, yang artinya kapasitas penanggulangan bencana di Kota Bekasi menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, dan urbanisasi, yang berimbas pada timbulnya risiko bencana baru. Setelah mengetahui risiko bencana, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana.

Selain risiko bencana, dilihat juga berdasarkan tingkat kerawanan bencana, berikut analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menilai rawan bencana Banjir dan Gempa Bumi di Kota Bekasi.

1. Gempa Bumi

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)-BNPN menyimpulkan bahwa kejadian bencana di Indonesia lebih besar bencana hidrometeorologis dibandingkan dengan bencana geologis. Meskipun demikian, bencana geologis, khususnya gempa bumi dan tsunami pada kenyataannya banyak menimbulkan dampak yang cukup besar baik dari sisi korban dan kerugian ekonomi. Maka dari itu perlunya menghitung tingkat kerawanan kejadian bencana Gempa Bumi di Kota Bekasi.

Berdasarkan analisis rawan bencana Gempa Bumi, tabel berikut memperlihatkan kategori kawasan rawan bencana gempa bumi yang terjadi di Kota Bekasi Tahun 2023, yaitu terdiri atas kategori rendah, menengah, dan tinggi. Sebesar 90,37 persen kawasan di Kota Bekasi termasuk kategori menengah seluas 19.373,04 hektar. Kategori tinggi sebesar 9,39 persen atau seluas 1.879,19 hektar, sedangkan kategori rendah sebesar 0,24 persen atau 51,37 hektar, lihat gambar berikut. Dapat disimpulkan bahwa Kota Bekasi memiliki kawasan rawan bencana kelas menengah dengan luasan terbesar dibandingkan dengan kelas tinggi maupun rendah.

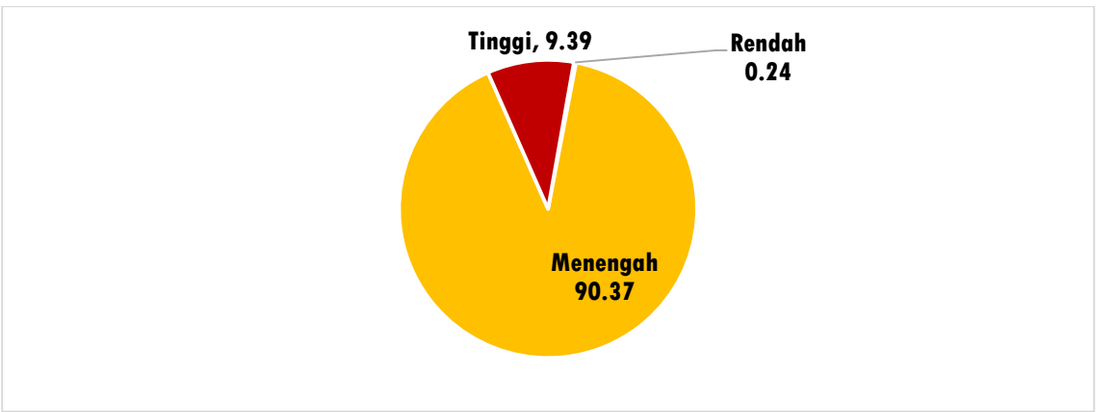
Jika dilihat berdasarkan kecamatan, luas terbesar dengan kelas tinggi berada di Kecamatan Bekasi Utara yang mencapai 1.131,93 hektar (dapat dilihat pada peta **Gambar 2.27**). Hal ini menunjukan dibutuhkan adanya rencana mitigasi bencana gempa sehingga bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Beberapa dampak gempabumi beserta bahaya ikutannya (seperti tsunami, keretakan tanah, dan kelongsoran lereng) yang ditimbulkan oleh gempabumi. Namun, tidak menutup kemungkinan luasan kecamatan terbesar di kelas menengah tetap waspada dan membutuhkan mitigasi bencana yang baik untuk meminimalisis kerugian, seperti di Kecamatan Mustikajaya yang mencapai 2.474,60 hektar

Tabel 2.17. Kawasan Rawan Gempa Bumi Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (hektar)			Total
		Rendah	Menengah	Tinggi	
1	Bantargebang		1.923,57		1.923,57
2	Bekasi Barat	36,18	1.453,22		1.489,40
3	Bekasi Selatan		1.580,04		1.580,04
4	Bekasi Timur		1.462,89		1.462,89

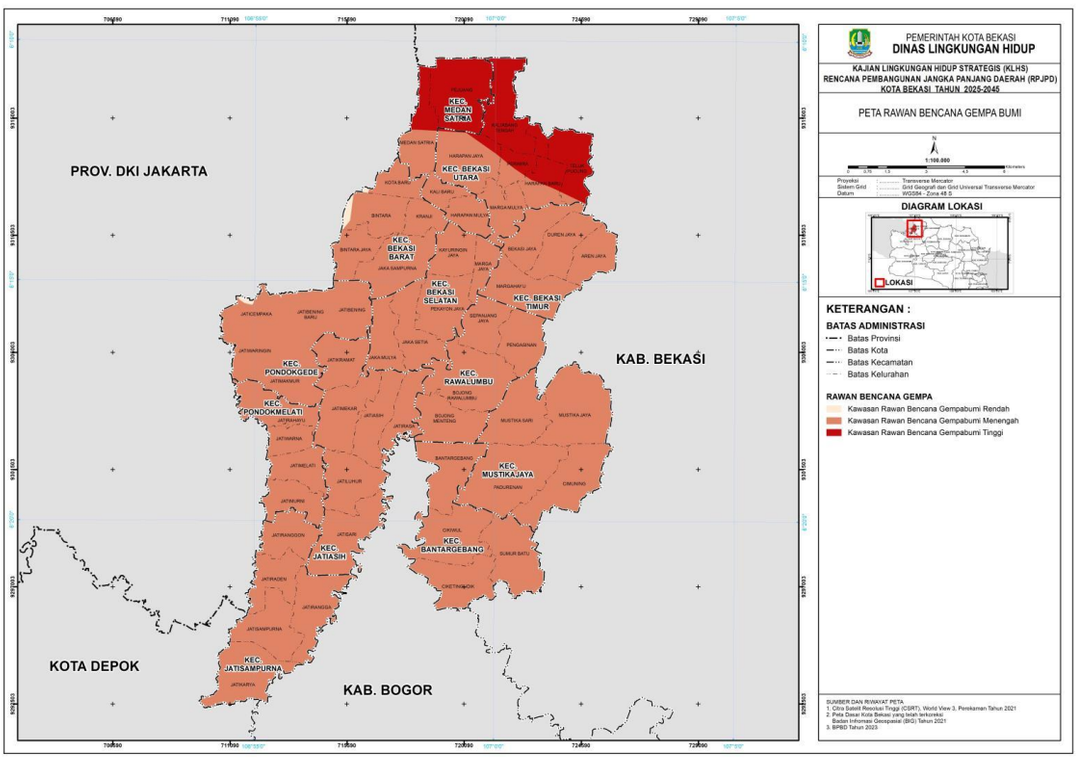
No	Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (hektar)			Total
		Rendah	Menengah	Tinggi	
5	Bekasi Utara		947,72	1.131,93	2.079,65
6	Jatiasih		2.425,32		2.425,32
7	Jatisampurna		2.018,68		2.018,68
8	Medansatria	1,54	572,14	747,25	1.320,92
9	Mustikajaya		2.474,60		2.474,60
10	Pondokgede	13,65	1.729,02		1.742,67
11	Pondokmelati		1.101,21		1.101,21
12	Rawalumbu		1.684,63		1.684,63
	Grand Total (ha)	51,37	19.373,04	1.879,18	21.303,59
	Persen (%)	0,24	90,37	9,39	100,00

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

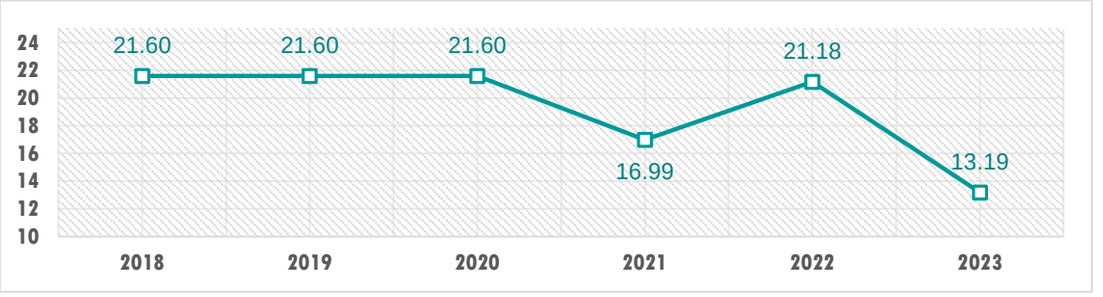
Gambar 2.26. Persentase Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bekasi Tahun 2022



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.27. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kota Bekasi

Berbeda dengan tingkat kerawanan bencana, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Gempa Bumi, Kota Bekasi mendapatkan nilai IRB dengan kelas risiko tinggi. Nilai IRB Gempa Bumi mendapat kelas risiko "Tinggi" dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, walaupun secara nilai mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2023 (**Gambar 2.28**). Penilaian IRB Gempa Bumi Kota Bekasi dapat menjadi acuan pemerintah daerah agar lebih memprioritaskan urusan wajib dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana. Upaya mengurangi nilai IRB akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasi fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

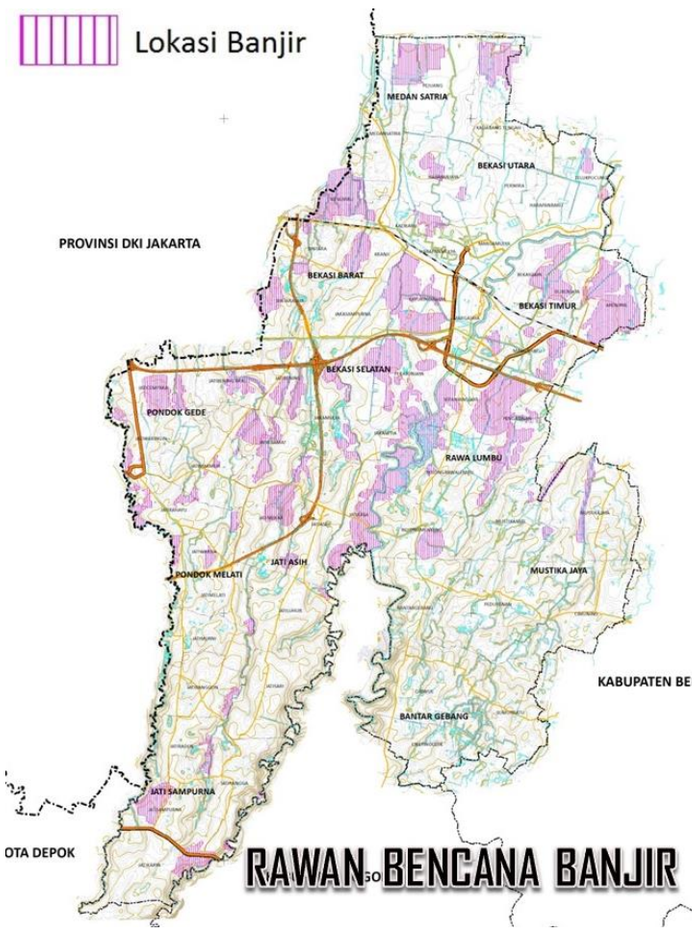


Sumber : Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 2.28. Grafik Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi Tahun 2018-2023

2. Banjir

Banjir yang terjadi di Kota Bekasi tergolong dalam banjir lokal dan banjir kiriman. Banjir lokal yang terjadi di Kota Bekasi terjadi akibat hujan yang jatuh di daerah Kota Bekasi tersebut berlangsung lama dengan curah hujan tinggi, sehingga limpahan air tidak tertampung oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas dari drainase yang ada. Selain banjir lokal, banjir di Kota Bekasi terjadi akibat di daerah lain terjadi hujan juga dengan curah hujan tinggi, kemudian volume air yang tinggi tersebut mengalir melalui Kali Bekasi hingga meluap dan membanjiri daerah disekitarnya, termasuk Kota Bekasi. Sebaran banjir di Kota Bekasi pada tahun 2020 disajikan pada **Gambar 2.29**.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Bekasi

Gambar 2.29. Sebaran Banjir di Kota Bekasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, daerah rawan banjir Kota Bekasi tersebar di berbagai kecamatan. Wilayah dengan genangan banjir paling luas berlokasi di Kecamatan Bekasi Timur seluas 137,5 ha dengan ketinggian banjir antara 30 cm hingga 1 m (durasi genangan: 3-24 jam). Jumlah kejadian banjir di Kota Bekasi pada tahun 2010-2022 dapat disajikan pada **Tabel 2.18**.

Tabel 2.18. Jumlah Kejadian Banjir Menurut Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2010-2022

No	Kecamatan	2010	2011**	2012*	2013*	2014**	2015*	2016*	2017*	2018**	2019*	2020*	2021*	2022*
1	Bekasi Utara	na	6	-	-	6	4	2	-	3	-	6	18	4
2	Bekasi Timur	na	3	-	-	4	3	2	-	4	-	8	16	4
3	Jati Asih	na	1	-	-	4	2	3	-	3	4	7	23	4
4	Bekasi Barat	na	4	-	-	5	3	-	-	5	1	19	14	4
5	Pondokgede	na	-	-	-	4	1	2	-	1	1	11	23	3
6	Rawalumbu	na	-	-	-	3	1	1	-	4	2	15	23	4
7	Medansatria	na	2	-	-	4	1	-	-	3	1	5	12	4
8	Mustikajaya	na	1	-	-	3	1	2	-	1	-	4	14	3
9	Bekasi Selatan	na	-	-	-	5	3	-	-	3	-	10	10	4
10	Pondokmelati	na	1	-	-	3	1	1	-	2	-	4	16	2
11	Jati Sampurna	na	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	7	1
12	Bantargebang	na	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	10	2
	Kota Bekasi	na	18	-	-	42	21	13	-	30	9	94	186	39

Keterangan: na = data tidak tersedia
Sumber:
** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Tahun 2023*
*** : Badan Pusat Statistik Kota Bekasi Tahun 2020*

Tabel 2.18 menunjukkan bahwa kejadian banjir di Kota Bekasi paling banyak terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yaitu hingga mencapai 94 dan 186 kejadian banjir pada masing-masing tahun. Tingginya jumlah kejadian banjir di Kota Bekasi pada tahun tersebut selain dipicu oleh topografi wilayah Kota Bekasi yang tergolong rendah, juga disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi di wilayah Kota Bekasi dan Bogor sehingga menyebabkan Kali/Sungai Bekasi meluap beserta lonjakan volume air dari Sungai Cileungsi dan Cikeas (Bogor) yang melewati muara Sungai Bekasi, serta rusaknya tanggul sungai dan sistem drainase yang belum dapat menampung luapan air sungai. Berbagai implementasi kebijakan penanggulangan banjir dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga pada tahun 2022 jumlah kejadian banjir cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, yaitu hanya sekitar 39 titik banjir.

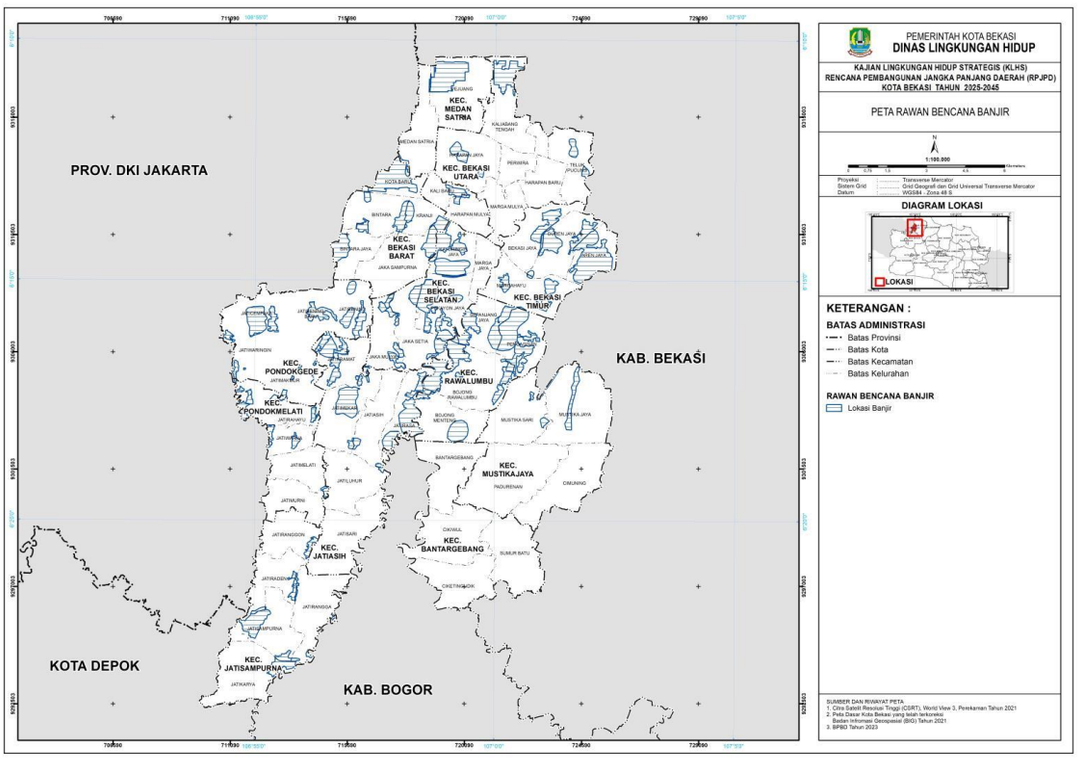
Berdasarkan tingkat kejadian bencana banjir diatas maka perlunya melalukan analisis kelas rawan bencana banjir. Hasil analisis KLHS RPJP Kota Bekasi Tahun 2025-2045, kawasan rawan bencana banjir di Kota Bekasi seluas 2.868,01 hektar atau sekitar 13,46 persen dari luas Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Selatan merupakan daerah yang paling luas kawasannya terkait bencana banjir yang mencapai 398,36 hektar atau 13, 89 persen dari total kawasan rawan bencana banjir Kota Bekasi. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel dan peta berikut. Adanya peristiwa banjir dapat juga dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Dengan frekuensi kejadian yang banyak, bencana ini juga memberikan dampak yang sangat besar terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak langsung kejadian bencana maupun dampak tidak langsung. Aktivitas manusia juga ikut memperburuk kondisi lingkungan, seperti perambahan hutan untuk perkebunan dan permukiman atau aktivitas pembangunan yang mempengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga.

Tabel 2.19. Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Bekasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Rawan Bencana Banjir (hektar)
1	Bantargebang	-
2	Bekasi Barat	375,89
3	Bekasi Selatan	398,36
4	Bekasi Timur	393,97
5	Bekasi Utara	146,48
6	Jatiasih	341,23

No	Kecamatan	Rawan Bencana Banjir (hektar)
7	Jatisampurna	159,10
8	Medansatria	163,87
9	Mustikajaya	54,01
10	Pondokgede	230,82
11	Pondokmelati	77,45
12	Rawalumbu	526,82
	Grand total	2.868,01

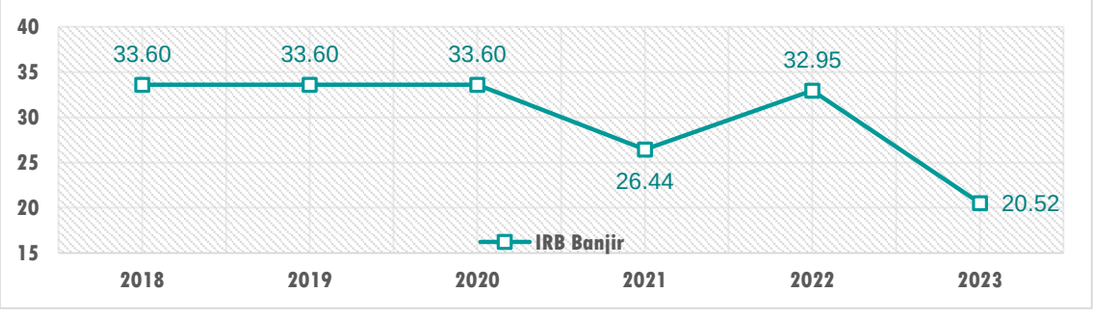
Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045



Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045

Gambar 2.30. Peta Rawan Bencana Banjir di Kota Bekasi

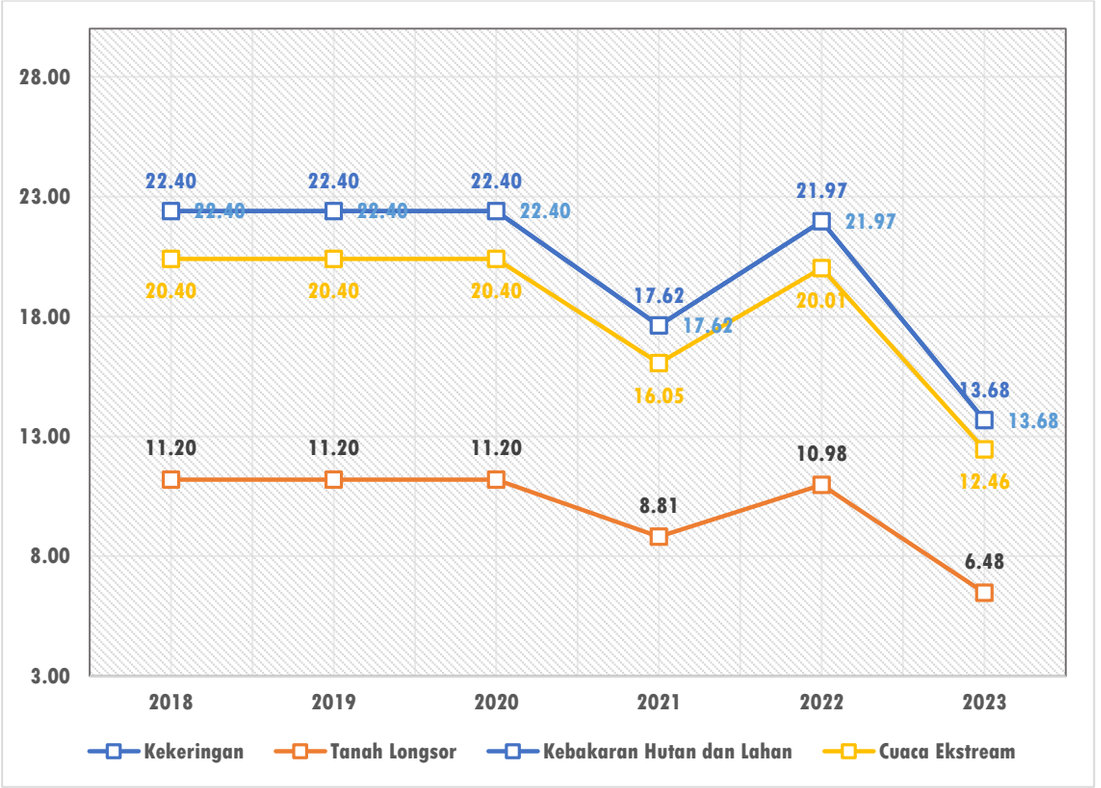
Sama halnya dengan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Banjir, berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Kota Bekasi mendapatkan nilai IRB dengan kelas risiko tinggi. Kota Bekasi konsisten menyandang kelas risiko tinggi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, walaupun secara nilai mengalami penurunan di tahun 2021 dan tahun 2023 (**Gambar 2.31**). Nilai IRB Banjir merupakan gambaran capaian upaya penanggulanan bencana di Kota Bekasi. Kelas risiko bencana banjir yang dinilai tinggi akan menjadi panduan pemerintah kota dalam mengambil kebijakan maupun menentukan prioritas dalam menanggulangi bencana banjir sehingga berdampak pada penurunan nilai IRB Banjir di Kota Bekasi.



Sumber : Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 2.31. Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2018-2023

Selain bencana banjir dan gempa bumi, nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi dihitung untuk beberapa kondisi bencana lainnya seperti bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, longsor, dan cuaca ekstream. Kelas risiko pada masing-masing bencana berbeda sesuai nilai IRB, dapat dilihat pada **Gambar 2.32**.



Sumber : Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018-2023

Gambar 2.32. Indeks Risiko Bencana Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Cuaca Ekstream Tahun 2018-2023

Berdasarkan nilai IRB Kota Bekasi (**Tabel 2.20**), semua bencana memiliki kelas risiko tinggi kecuali bencana tanah longsor yang memiliki kelas risiko sedang. Nilai IRB pada tahun 2021 dan tahun 2023 di semua bencana mengalami penurunan nilai namun tidak mengubah kelas risiko bencana. Nilai IRB sebagai gambaran tingkat risiko yang akan di alami oleh suatu daerah dengan melihat potensi kehilangan dan potensi kerugian dari bencana yang terjadi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana.

Tabel 2.20. Kelas Risiko Bencana di Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023

Tahun	Kekeringan	Kelas Risiko	Tanah Longsor	Kelas Risiko	Kebakaran hutan dan lahan	Kelas Risiko	Cuaca Ekstrem	Kelas Risiko
2018	22,40	Tinggi	11,20	Sedang	22,40	Tinggi	20,40	Tinggi
2019	22,40	Tinggi	11,20	Sedang	22,40	Tinggi	20,40	Tinggi
2020	22,40	Tinggi	11,20	Sedang	22,40	Tinggi	20,40	Tinggi
2021	17,62	Tinggi	8,81	Sedang	17,62	Tinggi	16,05	Tinggi
2022	21,97	Tinggi	10,98	Sedang	21,97	Tinggi	20,01	Tinggi
2023	13,68	Tinggi	6,48	Sedang	13,68	Tinggi	12,46	Tinggi

Sumber: Dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2018-2023

2.1.1.9. Rencana Struktur Wilayah Pengembangan

Rencana struktur wilayah pengembangan dibuat sebagai arah pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan dan sebagai arah pembentukan jaringan prasarana wilayah. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengarahkan Kota Bekasi memiliki sistem perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan perkotaan Jabodetabek dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang meliputi kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat). Sedangkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi termasuk pada Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur sebagai pengembangan kawasan perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan kebijakan nasional maupun provinsi maka perumusan struktur ruang Kota Bekasi dengan maksud untuk penciptaan pelayanan yang efektif dan efisien, kompak dan dinamis dalam suatu wilayah, dapat dilakukan melalui pembagian wilayah, yaitu Pusat Pelayanan Kota (PPK). Pusat Pelayanan Kota (PPK) menggambarkan suatu kawasan yang mempunyai satu kesatuan fungsi yang memainkan peran dan fungsi tertentu. Penetapan Pusat Pelayanan Kota (PPK), meliputi koridor Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani- koridor Jalan Siliwangi-Jalan Pekayon Raya-Jalan Perjuangan-Jalan Noer Ali- Jalan Muhtar Thabrani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat hiburan dan rekreasi dinamakan juga *Central Business District* (CBD) Kota Bekasi.

Sub Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatan, yang dialokasikan tersebar merata ke setiap ibu kota kecamatan dan di lokasi-lokasi konsentrasi kegiatan budi daya. Sub Pusat Pelayanan Kota, melayani sub-wilayah kota meliputi:

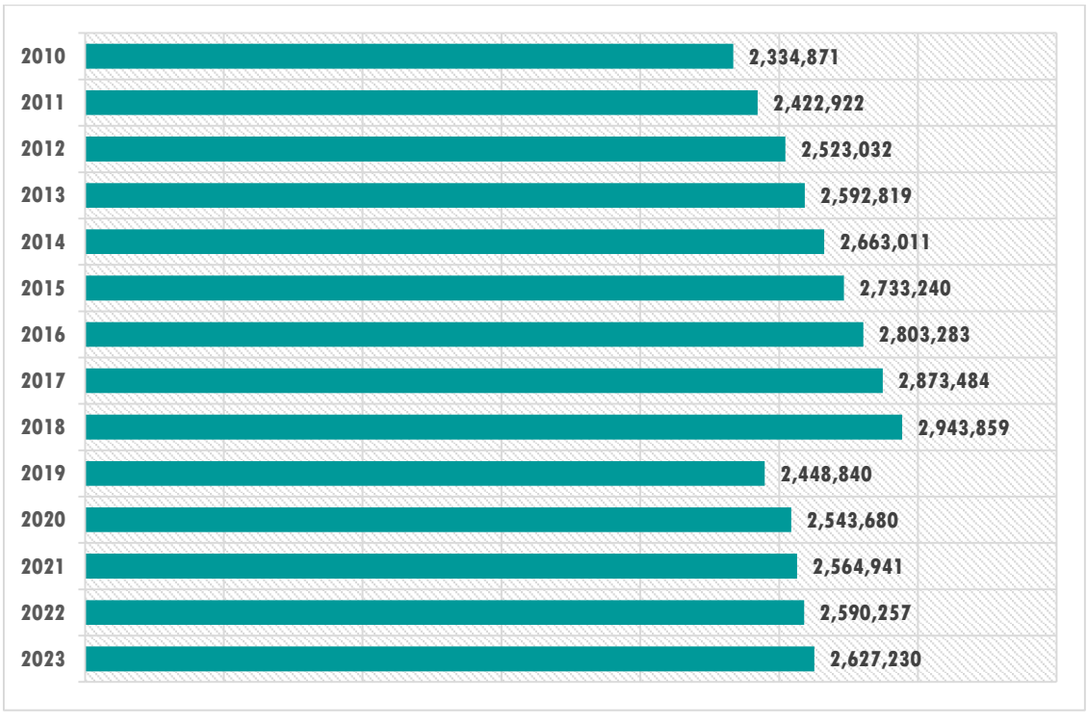
a. SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa;
c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan dan jasa;
d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan skala kecamatan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPST DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan "*buffer zone*" yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.

2.1.2. Demografi

Perkembangan penduduk Kota Bekasi semakin meningkat dilihat dari data 13 tahun terakhir (2010-2023) Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (Kota Bekasi Dalam Angka). Perkembangan jumlah penduduk Kota Bekasi sebagai Kota Metropolitan tentu harus menjadi perhatian, karena sebagai kota pendukung DKI Jakarta, harus mampu memberikan pelayanan yang mencukupi bagi penduduknya. Ditambah lagi penduduk yang tinggal tidak hanya penduduk lokal, melainkan adanya penduduk komuter atau penduduk yang bekerja di DKI Jakarta dan melakukan perjalanan pulang dengan *commuter line* menuju rumah hunian di Kota Bekasi. Pertambahan penduduk di Kota Jakarta merupakan awal mula pertambahan penduduk komuter di Kota Bekasi setelah ditetapkan sebagai kota penyangga pada tahun 1976. Menetapkan Kota Bekasi sebagai kota penyangga, salah satunya berperan sebagai kawasan permukiman, sedangkan kawasan industri dan kawasan pertanian sebagai penyedia kebutuhan dasar penduduk di pusat kota.

2.1.1.1. Jumlah dan laju Pertumbuhan penduduk

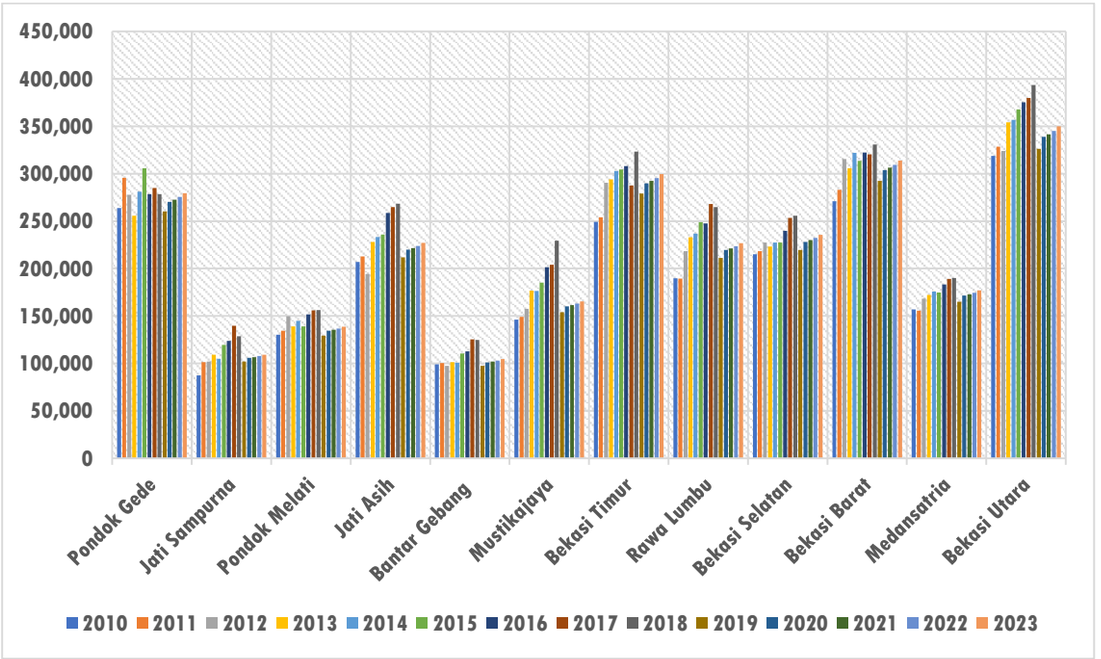
Gambar 2.33 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah penduduk relatif meningkat, walaupun pada tahun 2020 sempat turun dari tahun 2019, namun kembali naik di tahun 2021 dari 2.448.840 jiwa menjadi 2.543.680 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk berlanjut hingga pada tahun 2023 yang mencapai 2.627.230 jiwa.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.33. Jumlah Penduduk Kota Bekasi dari tahun 2010-2023

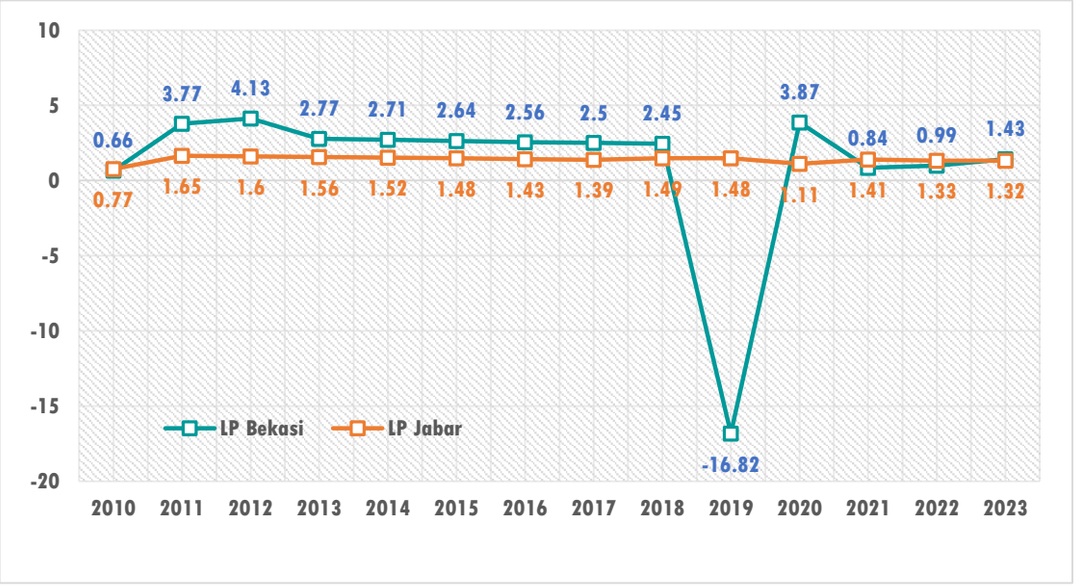
Jumlah penduduk yang relatif naik dari tahun ke tahun terjadi juga pada setiap data di kecamatan Kota Bekasi. Jumlah rata-rata penduduk terbesar berada pada Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah 350.066 jiwa, sedangkan jumlah rata-rata penduduk terkecil berada pada Kecamatan Bantar Gebang dengan jumlah 105.696 jiwa.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.34. Jumlah Penduduk per-Kecamatan di Kota Bekasi dari tahun 2010-2023

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Dengan bertambahnya angka tersebut tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan nilai laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2023, Provinsi Jawa Barat memiliki nilai Laju Pertumbuhan Penduduk lebih rendah dibandingkan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi, namun dari keduanya memiliki persamaan yaitu menunjukkan tren menurun. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2019 di Kota Bekasi hingga mencapai -16,82 persen, sedangkan penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat hingga mencapai 1,11 persen. Nilai tersebut menunjukkan angka pertumbuhan penduduk semakin berkurang, salah satu faktornya adalah meningkatnya angka migrasi penduduk serta adanya pandemi covid yang mengakibatkan tingginya angka kematian. Nilai laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi kembali naik di tahun 2020 dengan kenaikan 20,69 persen, kemudian kembali turun di tahun 2021 dengan nilai 0,84 persen, dan seterusnya nilai kembali naik dengan kenaikan 0,59 persen hingga tahun 2023.

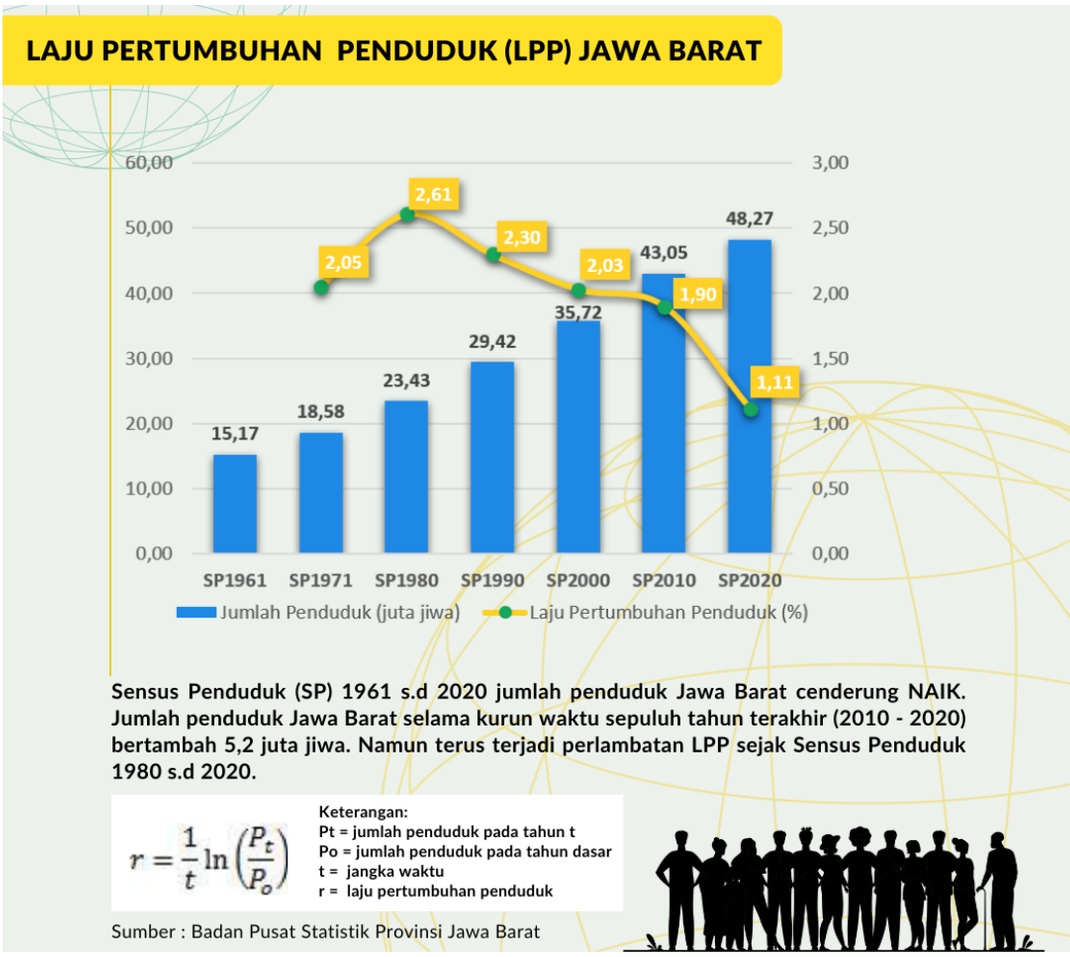


Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.35. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010–2023

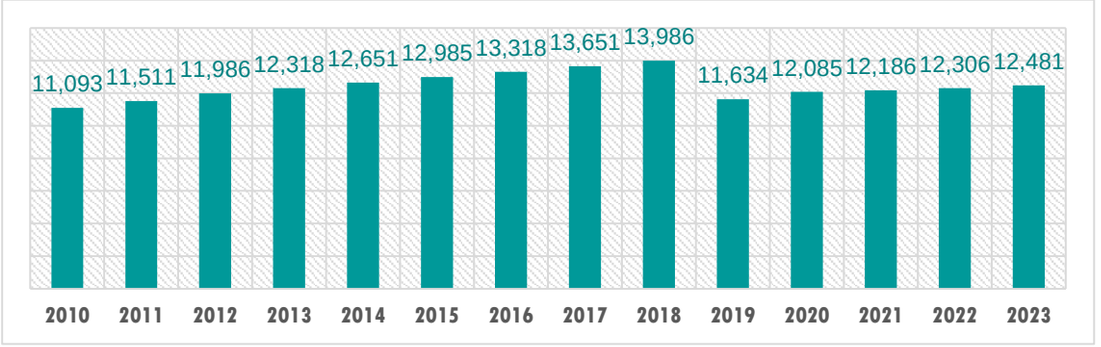
Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, umumnya faktor alami yaitu kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas) serta faktor nonalami yaitu migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas. Faktor Fersilitas di Kota Bekasi dipengaruhi oleh Angka Kelahiran Total (TFR) yang mengalami penurunan dari 2,01 pada sensus penduduk 2010 (SP2010) hingga sekarang mencapai 1,85 di sensus penduduk 2020 (SP2020), artinya terdapat kurang dari 2 anak yang dilahirkan perempuan di Kota Bekasi selama masa reproduksinya.

Faktor Mortalitas di Kota Bekasi dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi, dimana mencapai 10,80, atau bisa dikatakan sekitar 10 sampai 11 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian, mobilitas di Kota Bekasi sangat terlihat nyata pergerakan masyarakat hingga mencapai Angka migrasi seumur hidup Kota Bekasi 50,21%, artinya 50 dari 100 penduduk Kota Bekasi lahir di luar Kota Bekasi.



Selain ketersedian data Laju Pertumbuhan Penduduk dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga menyajikan data sensus penduduk dari tahun 1961 s.d 2020. Jika didasarkan data sensus, Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami tren yang menurun seperti Kota Bekasi. Namun, jumlah penduduk tetap bertambah dari kurun waktu 10 tahun terakhir. Penurunan nilai pertumbuhan penduduk tidak serta merta menyebabkan jumlah penduduk menjadi berkurang berdasarkan data sensus penduduk.

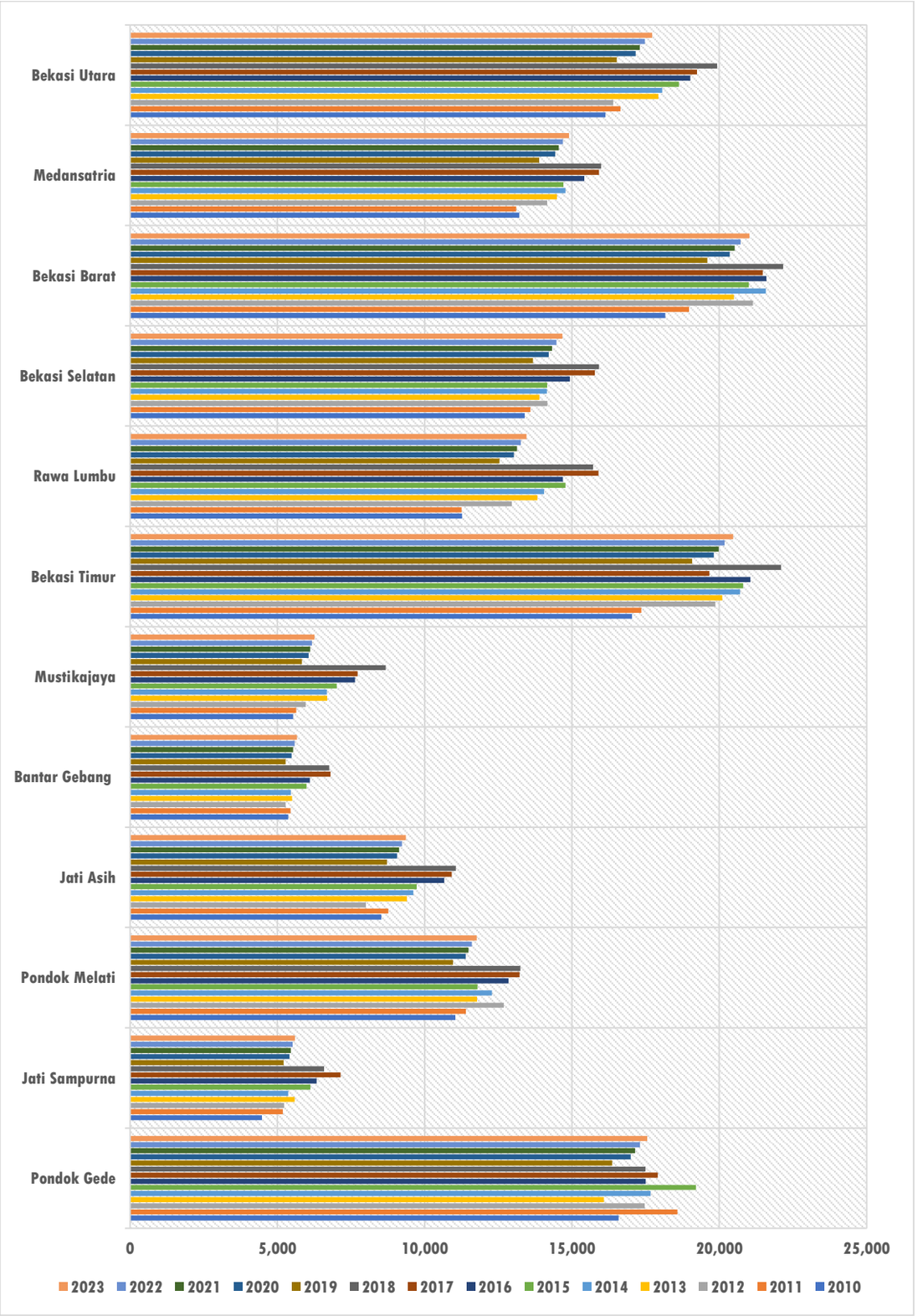
Tren jumlah penduduk per-tahun di Kota Bekasi hampir sama dengan nilai kepadatan penduduk yaitu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kota Bekasi merupakan kota dengan nilai kepadatan tinggi di setiap kecamatannya (Kota Bekasi Dalam Angka), hal itu terbukti dengan nilai Kepadatan penduduk dari tahun 2010 sampai dengan 2023 yang relatif mengalami kenaikan, walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan di 11.634 jiwa/km^2 namun trennya kembali naik hingga mencapai 12.481 jiwa/km^2 pada tahun 2023. Nilai kepadatan penduduk di Kota Bekasi pada tahun 2023 yang mencapai 12.481 jiwa/km^2 diartikan dengan rata-rata tiap km^2 dihuni oleh 12.000 jiwa. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 km. Semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

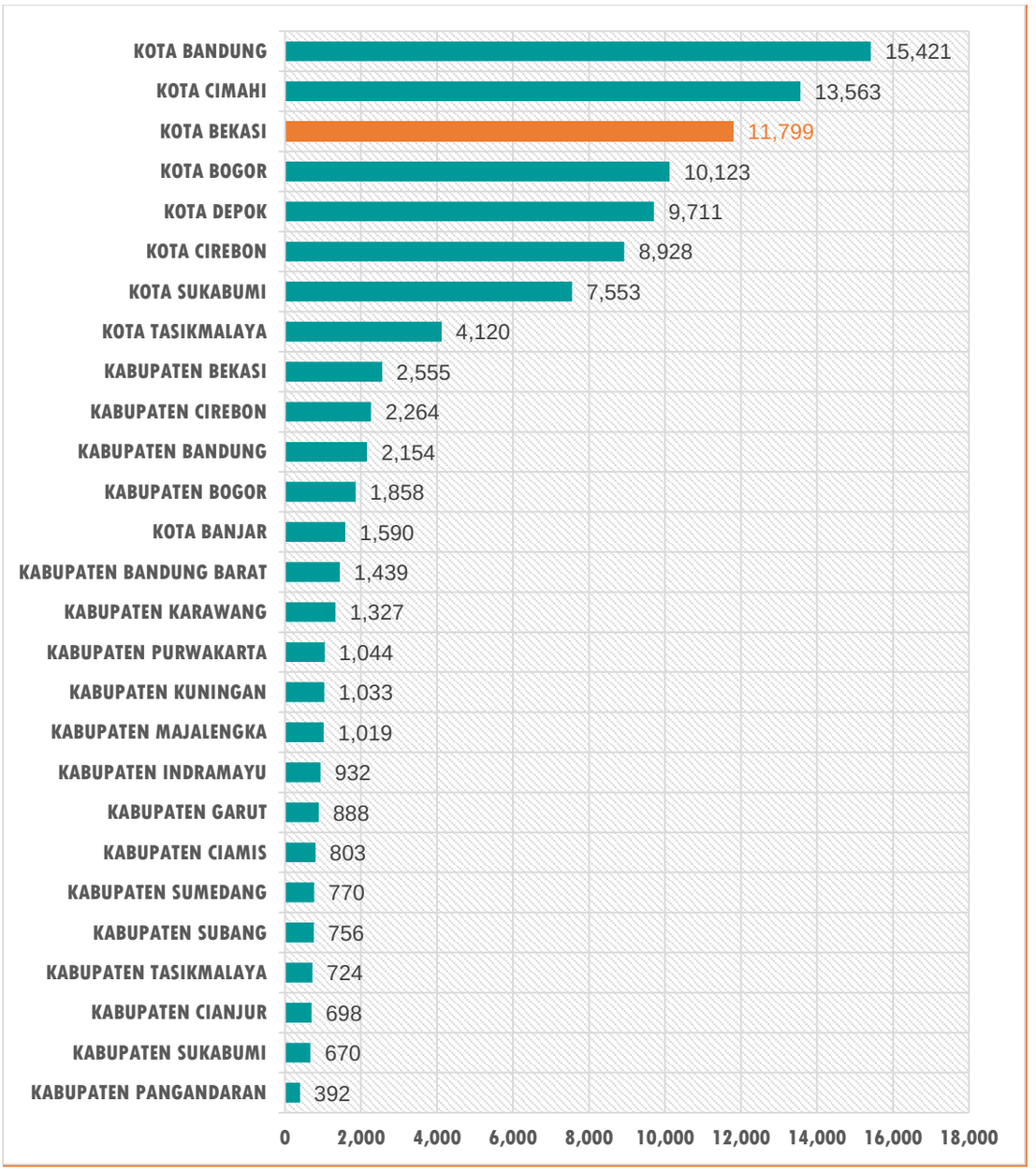
Gambar 2.36. Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Bekasi dari tahun 2010-2023

Kepadatan penduduk per-kecamatan di Kota Bekasi juga relatif naik, dengan rata-rata kepadatan penduduk terbesar yaitu di Kecamatan Bekasi Barat dengan 20.630 jiwa/km^2, dan rata-rata kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Jati Sampurna dengan 5.657 jiwa/km^2. Nilai rata-rata kepadatan penduduk per-kecamatan terbesar tidak sama dengan rata-rata jumlah penduduk per-kecamatan terbesar, hal tersebut dikarenakan nilai kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh luas administrasi kecamatan. Kecamatan Bekasi Barat dengan rata-rata jumlah penduduk terbesar memiliki luas administrasi kecamatan yang tidak terlalu luas dibandingkan dengan Kecamatan Jati Sampurna, sehingga Kecamatan Bekasi Barat dinilai lebih padat dibandingkan Kecamatan Jati Sampurna.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.37. Jumlah Kepadatan Penduduk per-Kecamatan di Kota Bekasi dari tahun 2010-2023



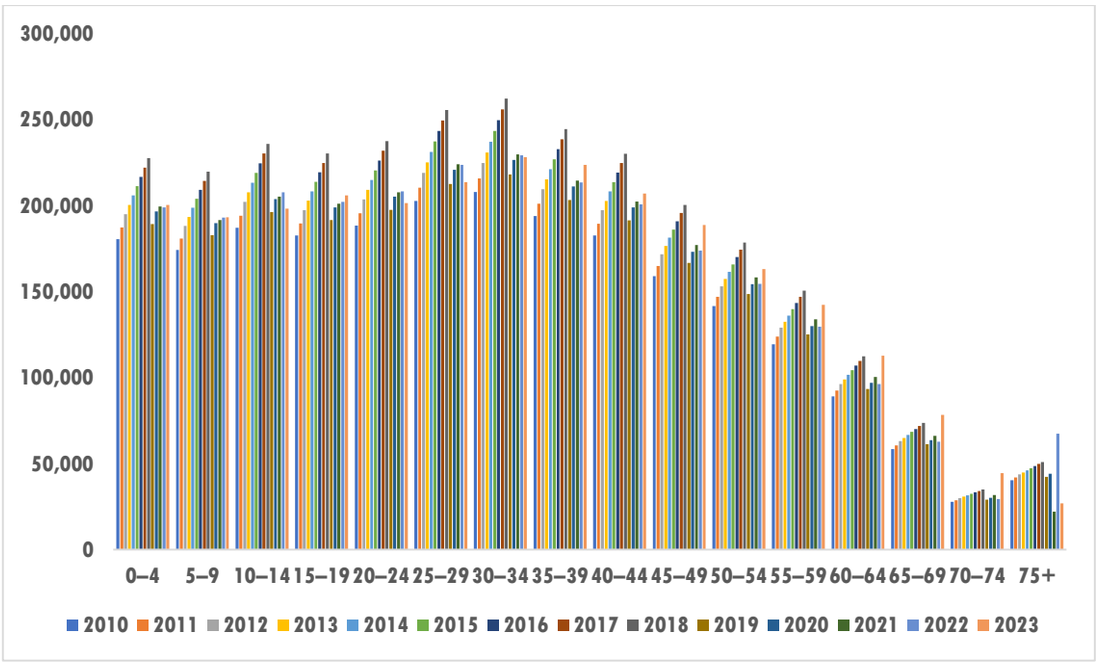
Sumber: https://data.jabarprov.go.id/id

Gambar 2.38. Sebaran Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2) setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan nilai kepadatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan Kota Bekasi menduduki peringkat ketiga dari 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai 11.799 jiwa/km^2 pada tahun 2023. Kepadatan penduduk Kota Bekasi berada di atas Kota Depok dan Kota Bogor dengan nilai 9.711 jiwa/km^2 dan 10.123 jiwa/km^2, dan berada di bawah Kota Cimahi dan Kota Bandung dengan nilai 13.563 jiwa/km^2 dan 15.421 jiwa/km^2.

2.1.1.2. Komposisi penduduk

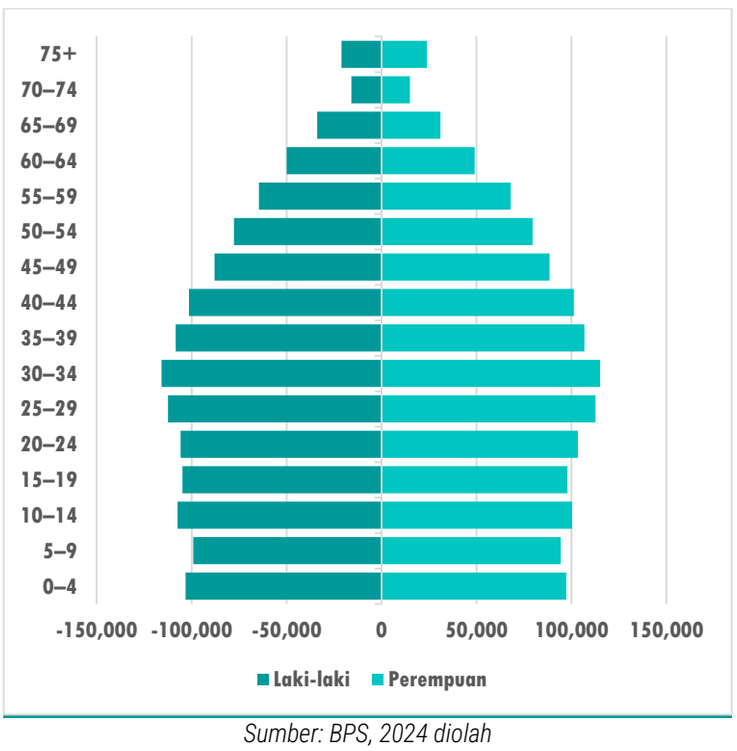
Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa tingkat kelahiran masih tinggi dengan angka kematian yang relatif rendah, maka penduduk berumur muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berumur tua. Semakin menuju lansia, jumlah penduduk menjadi berkurang, namun dari segala jenis golongan umur, jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk didominasi oleh penduduk umur 30-34 tahun, diikuti penduduk usia 35-39 tahun dan 25-29 tahun. Dari grafik yang ditampilkan pada di bawah ini dapat dikatakan bahwa piramida penduduk Kota Bekasi termasuk kategori ekspansif (muda) dimana katakteristiknya adalah sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, dan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.39. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bekasi dari Tahun 2010-2023

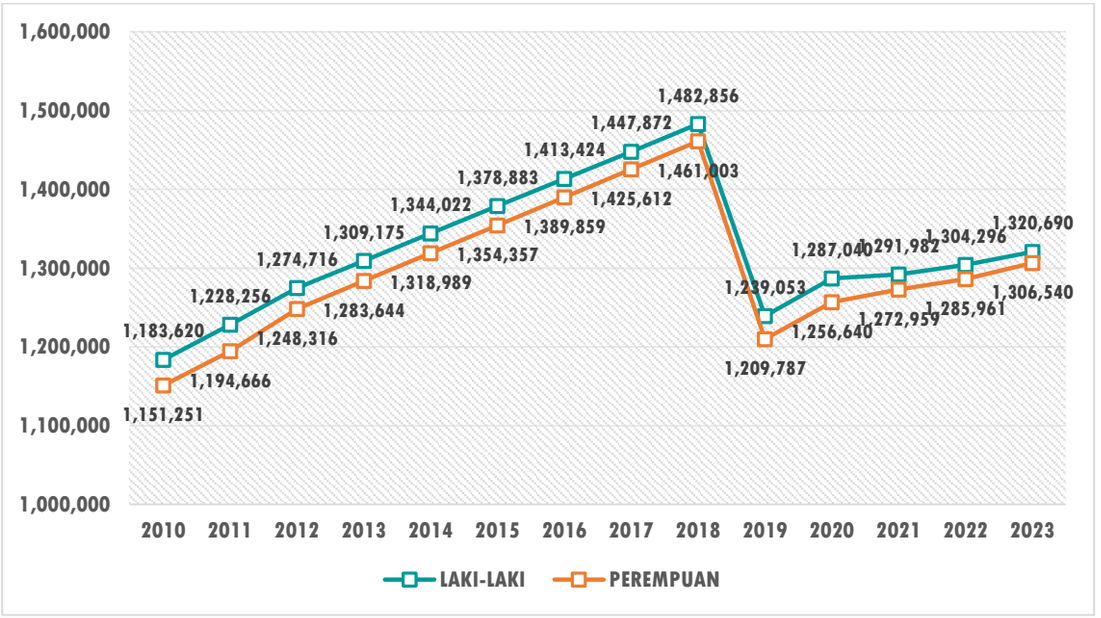
Jika melihat jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Bekasi tahun 2023, menunjukkan bentuk piramida pada **Gambar 2.40**. Piramida penduduk menunjukkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dari masing-masing jenis kelamin, dimana jumlah penduduk laki-laki di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Sumbu vertikal menunjukkan interval 4 tahunan, ditampilkan dari umur yang paling muda hingga yang paling tua. Bentuk piramida penduduk Kota Bekasi menunjukkan bentuk Piramida Ekspansif (Muda), dimana mempunyai karakteristik, seperti 1) jumlah penduduk usia muda lebih banyak berbanding terbalik dengan lanjut usia yang relatif sedikit; 2) angka kelahiran di Kota Bekasi lebih besar dari angka kematian; 3) pertumbuhan penduduk cepat; 4) membutuhkan banyak lapangan pekerjaan; dan 5) rasio ketergantungan besar. Rasio ketergantungan di Kota Bekasi mencapai 41,5 persen, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 41 orang yang tidak produktif.



Sumber: BPS, 2024 diolah

Gambar 2.40. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Bekasi tahun 2023

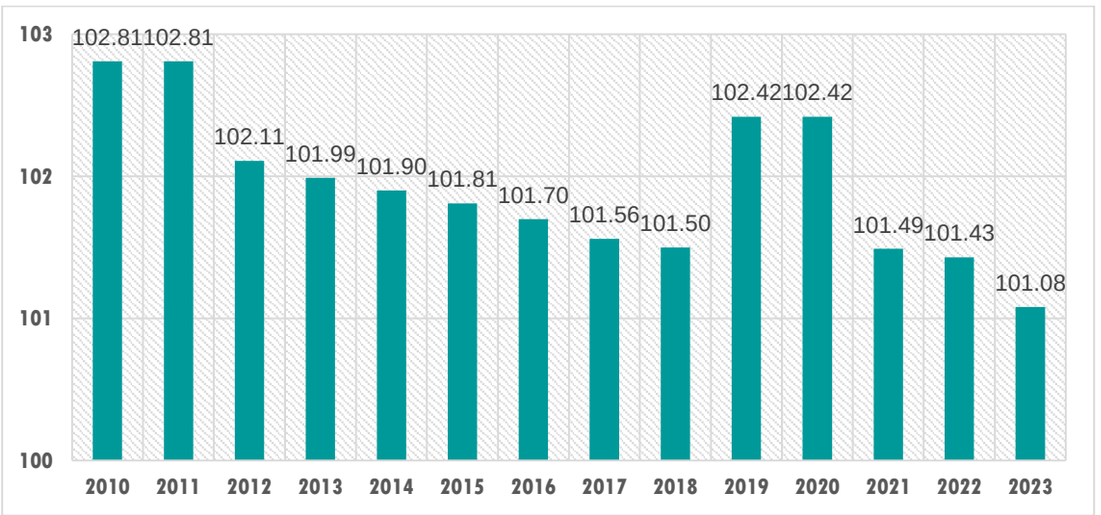
Berdasarkan jenis kelaminnya, komposisi penduduk Kota Bekasi di dominasi oleh laki-laki mencapai 1.482.856 jiwa di tahun 2018. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin mengalami tren yang meningkat, walaupun sempat menurun dari tahun 2018 menjadi 1.239.053 jiwa (laki-laki) dan 1.209.787 jiwa (perempuan) di tahun 2019. Kemudian trennya kembali meningkat hingga tahun 2023 mencapai 1.320.690 jiwa (laki-laki) dan 1.306.540 jiwa (perempuan).



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.41. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2023

Menghitung perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan ditunjukkan oleh nilai *sex ratio*. Nilai *sex ratio* di setiap tahun dan di setiap kecamatan pada tahun 2010-2023 memiliki nilai yang relatif menurun. Nilai *sex ratio* terendah terjadi di tahun 2023 yaitu 101,08 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 101 hingga 102 jiwa. Nilai *sex ratio* tertinggi terjadi di tahun 2010 dan 2011 yaitu 102,81 yang mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 102 hingga 103 jiwa.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Gambar 2.42. Jumlah *Sex Ratio* Penduduk Kota Bekasi dari Tahun 2010-2023

2.1.1.3. Masyarakat Adat

Tidak banyak yang tahu ditengah Kota Bekasi yang terkenal dengan julukannya kota metropolitan, ternyata memiliki kampung budaya yaitu Kampung Adat Kranggan. Kampung Adat Kranggan terletak di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang direstui oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk membangun kelurahan budaya. Hal

itu menciptakan momentum ketika Penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) oleh Kemendikbud, mengajukan penetapan Kelurahan Jatirangga menjadi Kelurahan Budaya Adat Kranggan sebagai salah satu target utama pemajuan kebudayaan di Kota Bekasi.

Keseharian masyarakat Kranggan masih sangat lekat dengan adat dan kebudayaan daerahnya yang merupakan sisa-sisa peradaban Kerajaan Pajajaran. Kampung Kranggan memiliki sejumlah warisan budaya turun temurun seperti upacara Babaritan serta pakaian dan rumah adat Kranggan. Babaritan memiliki makna bersyukur atas keselamatan serta keamanan dari masyarakatnya dalam menjalani kehidupan. Menurut Suta Tjamin, Tradisi ini punya arti 'ngababarkeun ririwit' yang artinya menghilangkan kesusahan, jadi memang tradisi ini untuk menghilangkan kesulitan di masyarakat.



https://www.goodnewsfromindonesia.id/

Terdapat 2 rumah adat di Kampung Kranggan yang masih berdiri kokoh hingga kini. Rumah bambu yang sudah dibangun sejak abad 14 tersebut masih dirawat oleh tokoh adat Kranggan. Di Kampung Adat Kranggan, terdapat tiga jenis rumah adat yang unik: tipe anjing tagog (anjing duduk), tipe jolopong atau simpai, serta tipe perahu tengkurep atau limas. Selain rumah adat, terdapat juga baju adat Kranggan bernama baju Cele. Baju ini memiliki motif sederhana yakni kotak-kotak kecil. Selain itu, terdapat dua kombinasi warna yakni hitam dan putih. Berbagai situs budaya juga banyak ditemukan di Kampung Kranggan, seperti Sumur Binong, Petilasan Raden Sanglai Senopati, Makam Raden Rangga, dan beberapa situs lainnya.

Masyarakat di Kampung Adat Kranggan masih mempertahankan teknologi tradisional yang sudah digunakan secara turun-temurun dalam pembuatan kerajinan bambu seperti bakul dan rakit, serta teknologi tradisional dalam pengasapan ikan cue yang sudah digunakan sejak abad 19. Kabarnya, Kranggan merupakan pemasok utama ikan cue untuk sebagian besar pasar di Bekasi, bahkan Jabodetabek. Tak heran, meski kehidupan di kampung tersebut masih terbilang tradisional, namun masyarakatnya terampil dan aktif melaksanakan kegiatan industri.



https://www.goodnewsfromindonesia.id/

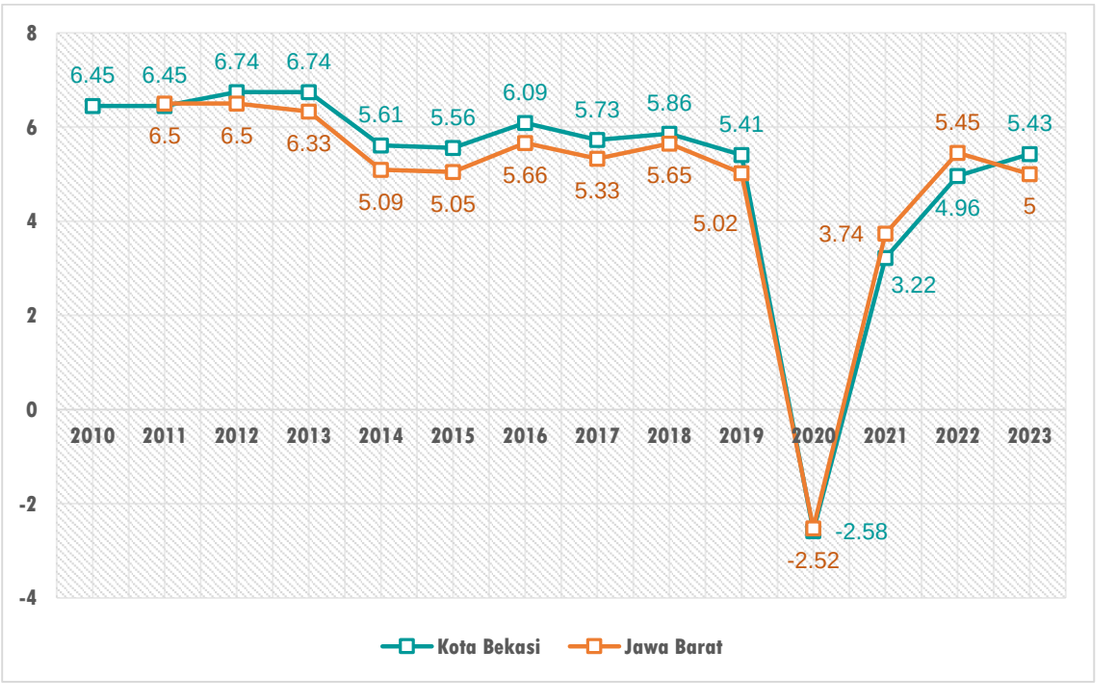
Semua keistimewaan Kampung Kranggan dengan kehidupan tradisionalnya menjadi alasan pemerintah kota bersama tim PPKD mencanangkan penetapan Kelurahan Jatirangga menjadi Kelurahan Budaya Adat Kranggan. Rencananya, penetapan Kampung Kranggan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 setelah SK Walikota siap terbit, namun terhalang oleh covid-19 sehingga rencana tersebut tertunda. Namun, dalam salah satu pidato Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di bulan Oktober tahun 2022 mengatakan Kampung Kranggan memang sudah dijadikan cagar budaya. Sejauh ini, sudah banyak cagar budaya yang telah dibuat Surat Keputusannya, dan telah dilakukan pemugaran, dan perawatan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukan oleh perubahan output suatu daerah yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Bekasi selalu meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, namun laju pertumbuhan justru mengalami fluktuatif pada tahun 2010-2023. Laju pertumbuhan mengalami penurunan pada periode tahun 2014 hingga 2015, tahun 2017, dan tahun 2019-2020. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir laju pertumbuhan Kota Bekasi berada di bawah posisi dari Provinsi Jawa Barat hanya pada tahun 2023 ccapaian PDRB ADHK Kota Bekasi berada diatas Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 5,43% (Kota Bekasi) dan 5% (Provinsi Jawa Barat). Disrupsi akibat pandemi Covid-19 perlahan diatasi oleh Kota Bekasi, hal ini terbukti dengan terus meningkatnya laju pertumbuhan PDRB ADHK dua tahun terakhir. Berikut adalah gambaran laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bekasi tahun 2010 hingga 2023.



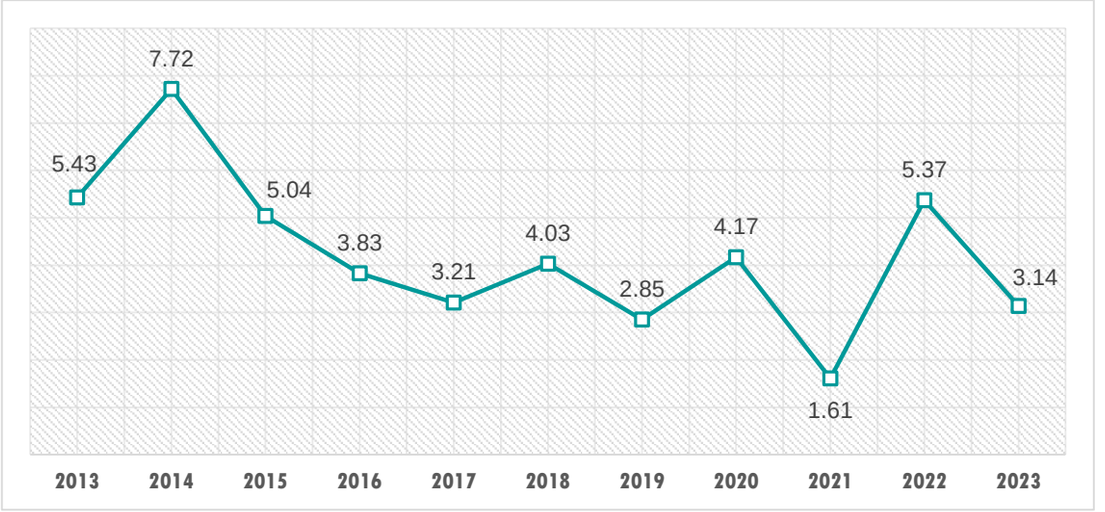
Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.43. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Persen)

2.2.1.2. Inflasi Daerah

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

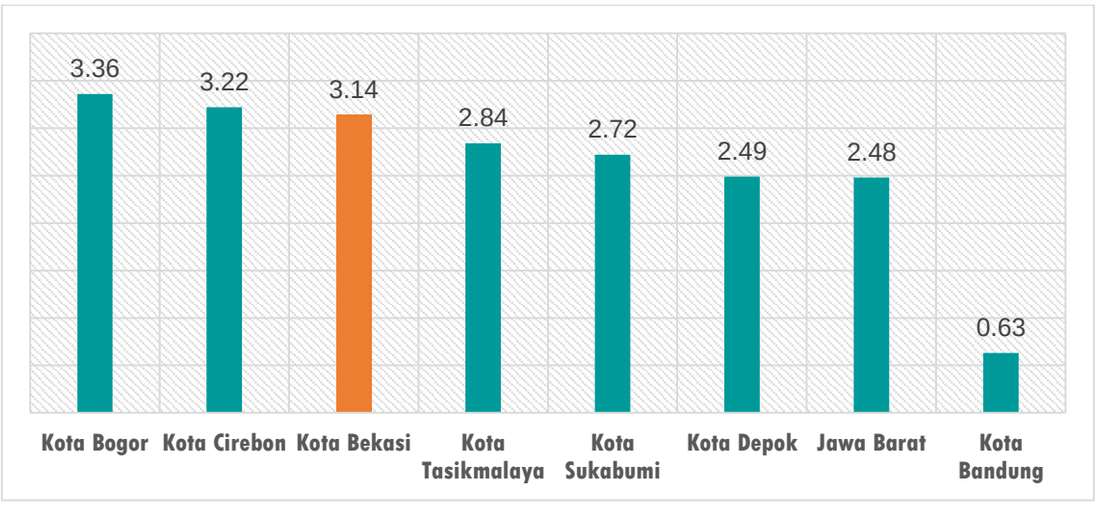
Inflasi Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2023 terus mengalami fluktuasi. Tercatat inflasi terendah Kota Bekasi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,61% sedangkan inflasi tertinggi Kota Bekasi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 7,72%. Inflasi di Kota Bekasi terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

Gambar 2.44. Inflasi Kota Bekasi Tahun 2013-2023 (%)

Apabila dilihat dalam konstelasi provinsi, nilai inflasi Kota Bekasi pada tahun 2023 berada di urutan ketiga besar jika dibandingkan dengan kota lain di Jawa Barat. Pada tahun 2023 inflasi Kota Bekasi sebesar 3,14%, nilai ini masih di bawah dua kota lain seperti Kota Bogor dan Kota Cirebon. Inflasi yang tinggi akan menjadi beban bagi semua pihak. Dengan adanya inflasi, maka daya beli suatu mata uang menjadi lebih rendah atau menurun. Dengan menurunnya daya beli mata uang, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik barang maupun jasa akan semakin rendah. Laju inflasi yang tidak stabil akan berdampak pada menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, tidak mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi, menghambat perencanaan pembangunan oleh pemerintah, merubah struktur APBD dan berbagai dampak negatif lain yang tidak kondusif bagi perekonomian secara keseluruhan.

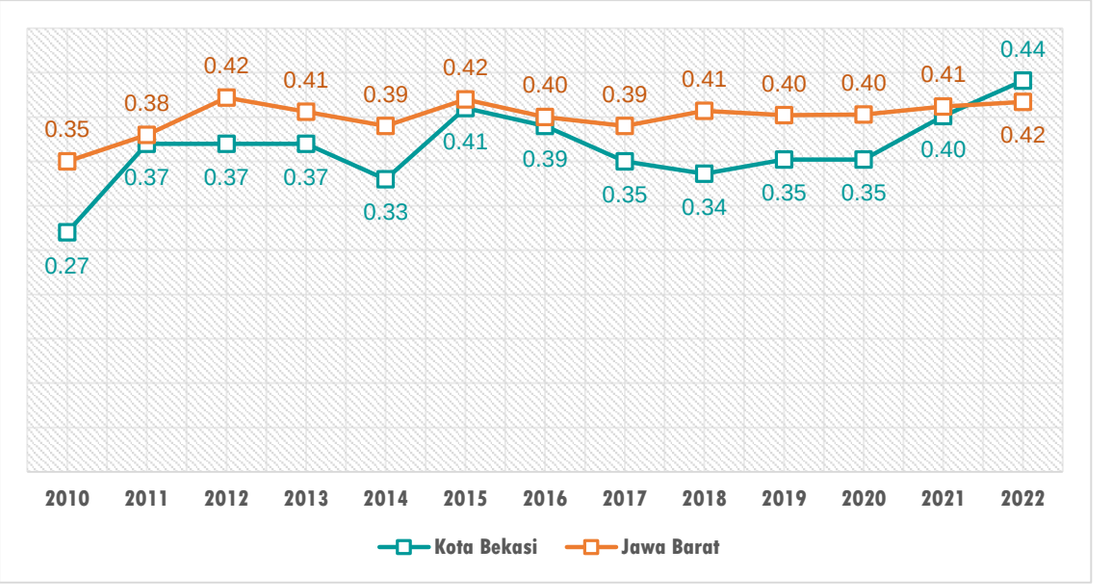


Sumber: BPS Provinsi Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.45. Inflasi Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

2.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah/negara. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 mengindikasikan ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kota Bekasi dari 2010 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi, nilai Indeks Gini Kota Bekasi menjadi yang tertinggi selama kurun waktu 2010-2022 yakni sebesar 0,44 angka tersebut juga berada di atas Indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Apabila dibandingkan dengan kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 nilai Indeks Gini Kota Bekasi berada di urutan 4 (empat) besar di bawah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan sebaran pendapatan masyarakat di Kota Bekasi masih tinggi di Provinsi Jawa Barat.

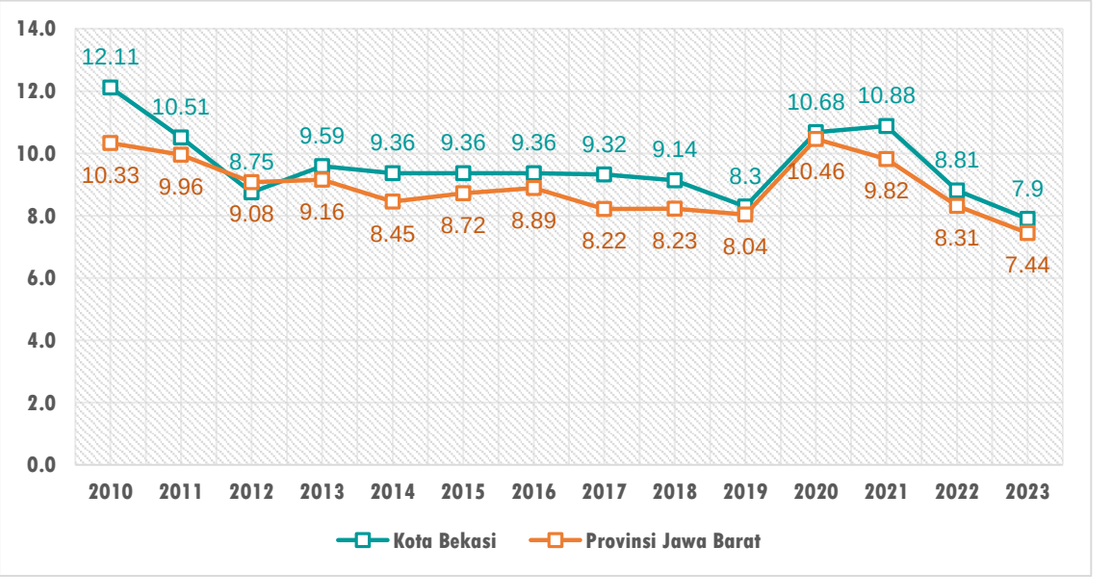


Sumber: BPS Kota Bekasi dan BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Gambar 2.46. Indeks Gini Kota Bekasi dan Jawa Barat tahun 2010-2022

2.2.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bekasi selama kurun waktu 2010-2023 masih di atas Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 7,9 persen, angka ini turun dari pada tahun 2022 yang mencapai 8,81 persen. Berikut adalah tingkat pengangguran terbuka Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2023.



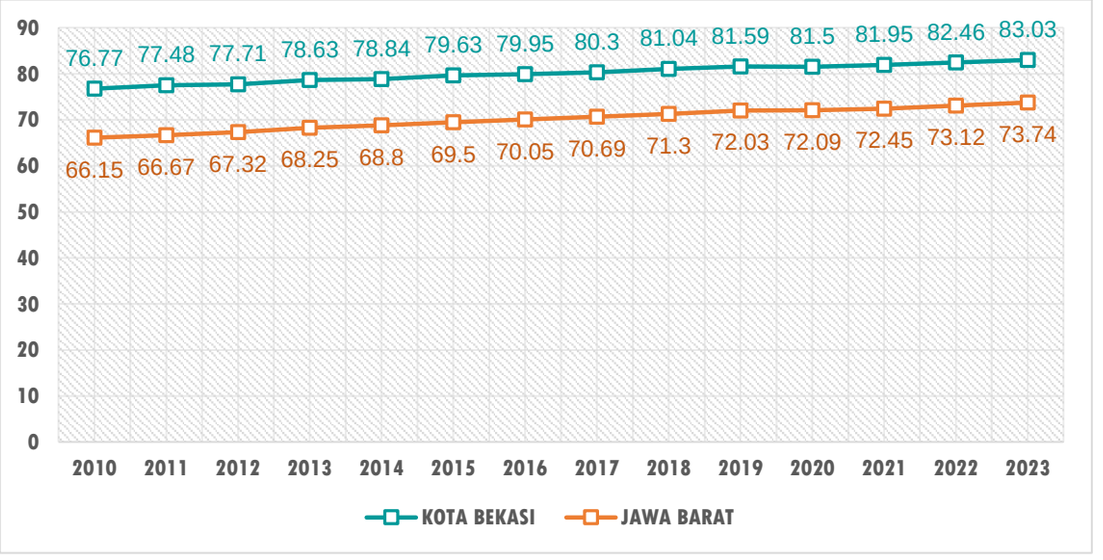
Sumber: BPS Kota Bekasi, 2010-2022, BPS Provinsi Jawa Barat, 2010-2023

Gambar 2.47. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Persen)

2.2.1.5. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan kunci bagi kemakmuran suatu bangsa. Pembangunan manusia merupakan pola yang diterapkan dalam rencana manusia untuk meningkatkan peluang agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. IPM digunakan untuk mengukur nilai manusia pada suatu wilayah dalam sebuah proses pembangunan untuk memperoleh dan mengakses pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan harapan hidup.

Selama kurun waktu 2010-2022 berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat di Kota Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka IPM Kota Bekasi. Angka IPM Kota Bekasi selama kurun waktu 2010-2023 selalu berada di atas angka IPM Provinsi Jawa Barat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern terutama pada wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan.



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024, BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.48. Perkembangan IPM Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPM, komponen pembentuk IPM seperti usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari nilai IPM yang terus mengalami peningkatan, angka IPM tertinggi terjadi pada tahun 2023. Angka ini dihasilkan dari komponen perhitungan IPM metode baru. Berikut adalah tabel komponen penyusun IPM dengan metode baru.

Tabel 2.21. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Bekasi Tahun 2010-2023

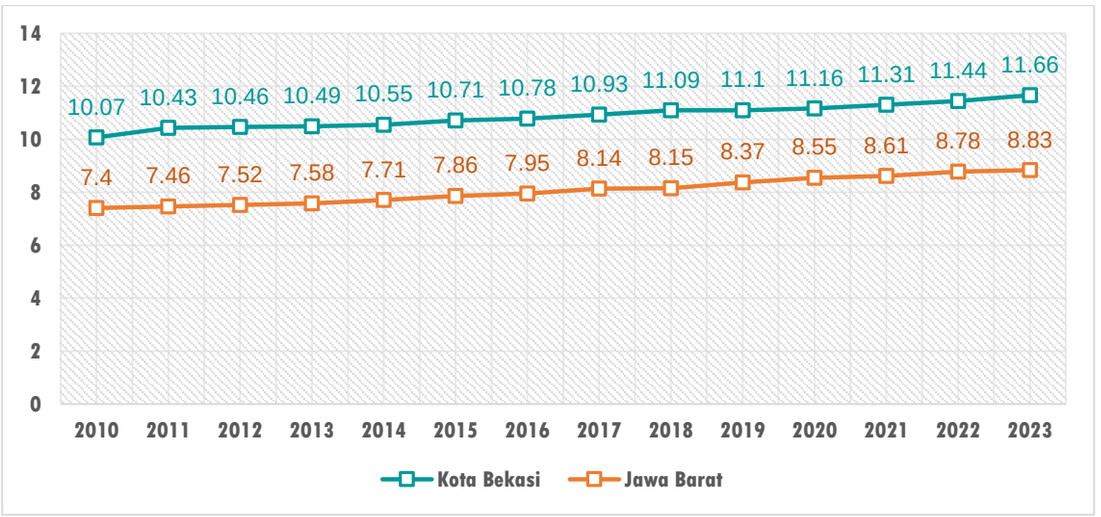
Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
UHH (tahun)	74,12	74,13	74,15	74,17	74,18	74,48	74,55	74,63	74,76	74,89	75,01	75,27	75,6	75,86
HLS (tahun)	12,13	12,36	12,43	13,2	13,28	13,36	13,47	13,51	13,76	13,99	14	14,1	14,11	14,12
RLS (tahun)	10,07	10,43	10,46	10,49	10,55	10,71	10,78	10,93	11,09	11,1	11,16	11,31	11,44	11,66
PPP (orang)	14.164	14.187	14.342	14.475	14.558	15.116	-	15.378	15.755	16.157	15.776	15.903	16.239	16.480
IPM	76,77	77,48	77,71	78,63	78,84	79,63	79,95	80,3	81,04	81,59	81,5	81,99	82,52	83,06
Pertumbuhan (%)	76,76	0,92	0,3	1,18	0,27	1	0,4	0,44	0,92	0,68	-0,11	0,6	0,65	0,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

1. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar RLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah Kota Bekasi mencapai 11,66 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk Kota Bekasi usia 15 tahun ke atas sudah menempuh 11,66 tahun masa sekolah atau hampir menyelesaikan pendidikan setara kelas XII SMA. Angka tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai 8,83 tahun di tahun 2023. Berikut grafik perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2010 hingga tahun 2023.



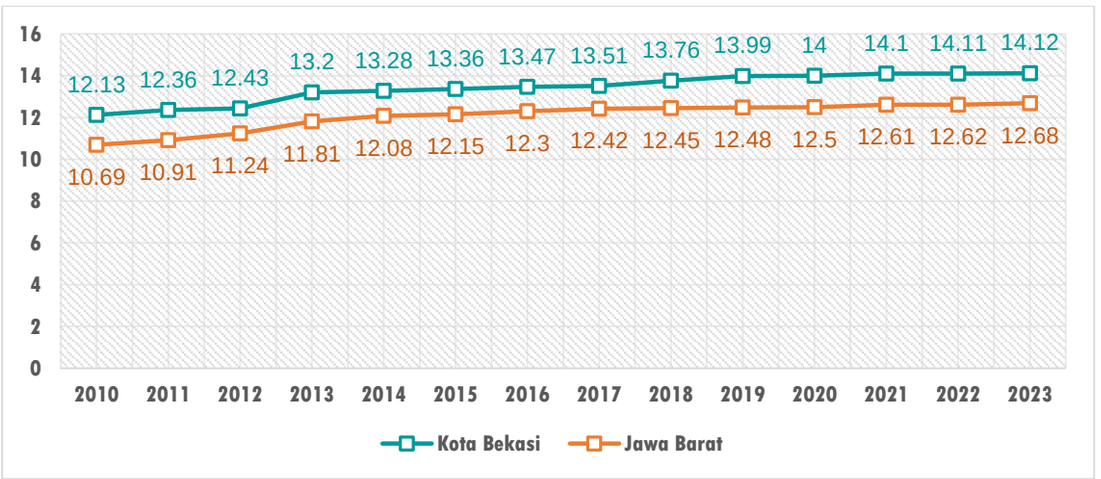
Sumber: BPS, Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.49. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Tahun)

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggantikan komponen Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun.

Harapan lama sekolah Kota Bekasi dari tahun 2010 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah Kota Bekasi mencapai 14,12 tahun. Angka ini masih berada di atas Provinsi Jawa Barat, dimana harapan lama sekolahnya mencapai 12,68 tahun. Berikut adalah grafik harapan lama sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2023.



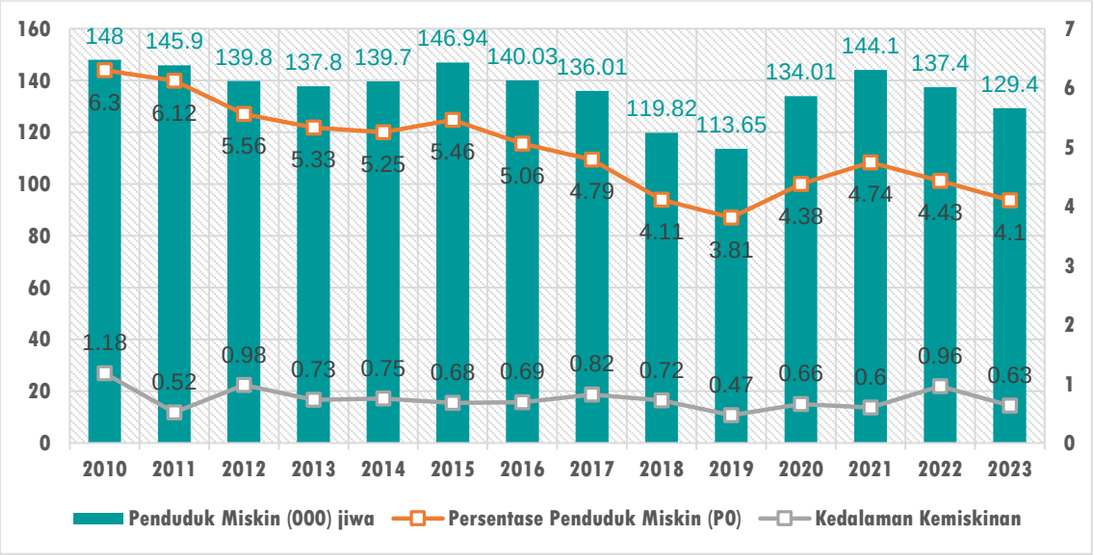
Sumber: BPS, Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.50. Harapan Lama Sekolah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Tahun)

2.2.1.6. Kemiskinan

Dilihat secara *time series*, persentase penduduk miskin Kota Bekasi cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010-2023 meskipun pada kurun waktu 2020-2021 persentase kemiskinan di Kota Bekasi mengalami kenaikan. Persentase kemiskinan di Kota Bekasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,81 persen, sedangkan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2010, yakni sebesar 6,3 persen. Kedalaman kemiskinan di Kota Bekasi juga terus mengalami penurunan selama tahun 2010-2023, kedalaman kemiskinan terendah terjadi pada tahun 2019 dan tertinggi pada tahun

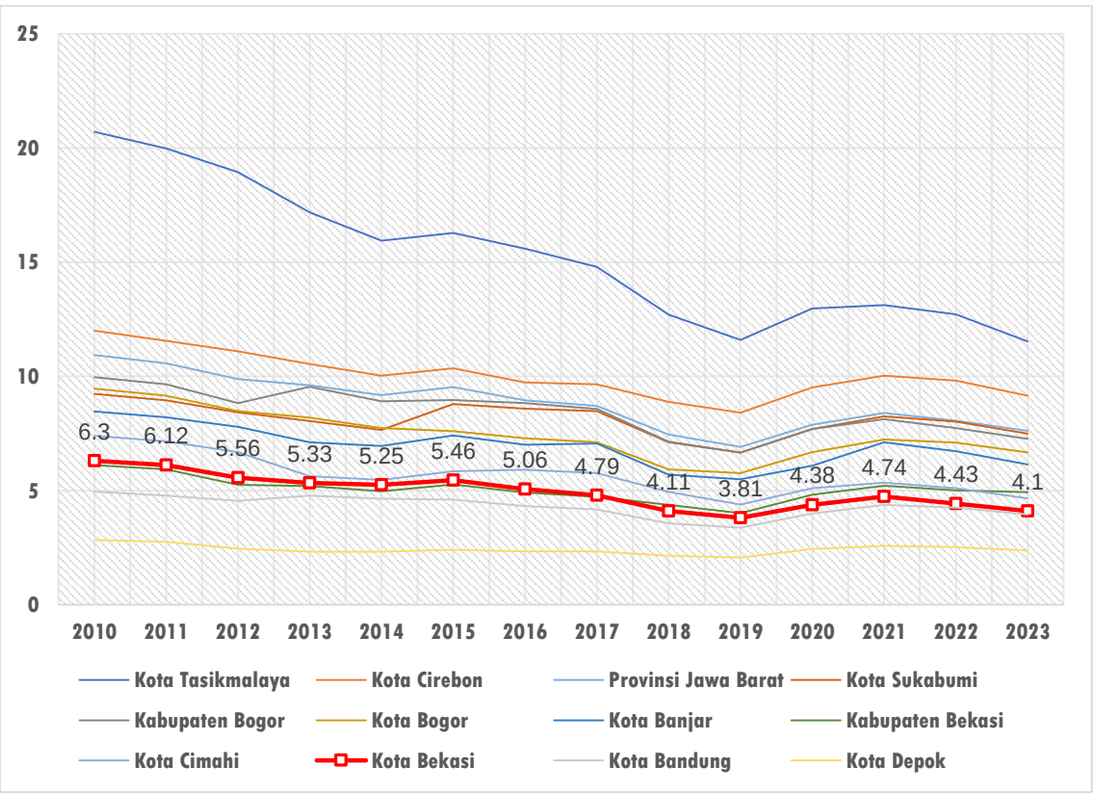
2010. Jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi juga mengalami fluktuasi meskipun pasca Covid-19 jumlah penduduk miskin di Kota Bekasi terus menurun. Jumlah penduduk Miskin tertinggi terjadi di tahun 2010 dan terendah di tahun 2019. Berikut adalah gambar jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, dan kedalaman kemiskinan di Kota Bekasi tahun 2010-2022.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.51. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Kedalaman Kemiskinan di Kota Bekasi Tahun 2010-2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten, Kota, dan Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskin Kota Bekasi dalam kurun waktu 2010-2023 berada di tiga terendah. *Trend* persentase penduduk miskin Kota Bekasi jauh lebih baik daripada tetangga daerah seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Persentase penduduk miskin daerah perkotaan di Jawa Barat tertinggi berada di Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon. Kota dengan penduduk miskin terendah di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Depok dan Kota Bandung.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

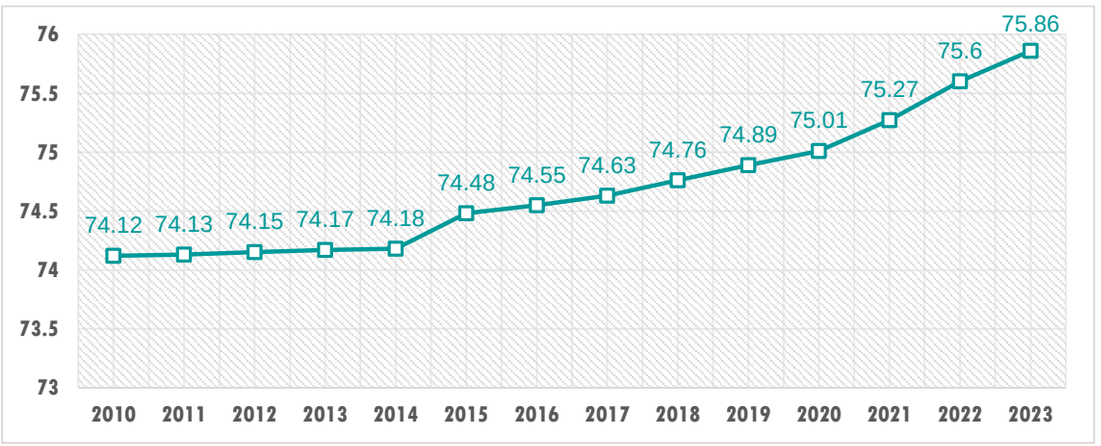
Gambar 2.52. Persentase Penduduk Miskin Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Keluarga Sehat

Angka usia harapan hidup (*age specific rate*) penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, maka usia harapan hidup akan rendah. Usia harapan hidup di negara-negara maju relatif tinggi karena tingkat kesehatan ibu dan bayinya pada umumnya juga tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan ibu dan bayi.

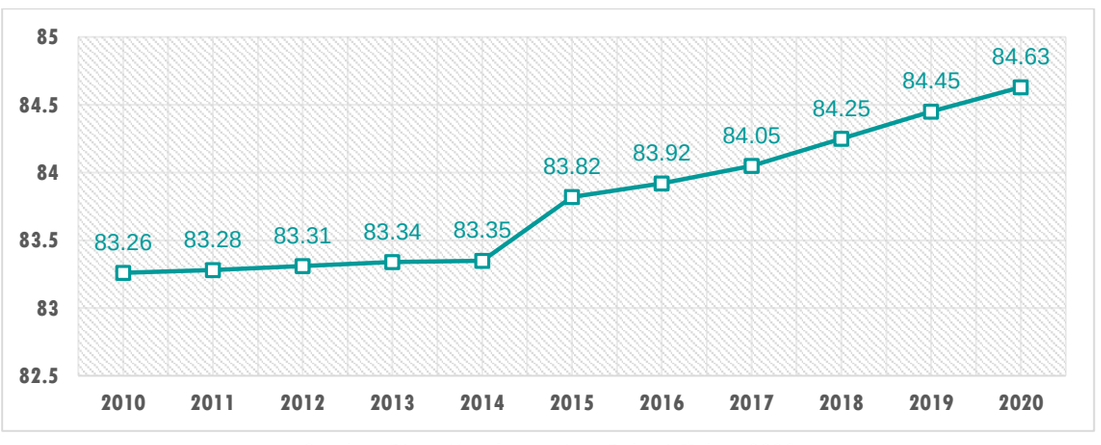
Usia harapan hidup di Kota Bekasi pada tahun 2023 mencapai 75,86 tahun. Hal Ini berarti bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 75,86 tahun. Angka tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Barat yang mencapai 73,80 tahun. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2023, pertambahan angka usia harapan hidup Kota Bekasi rata-rata sebesar 0,26 per tahun. Berikut adalah grafik usia harapan hidup Kota Bekasi tahun 2010 hingga tahun 2023.



Sumber: BPS, Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.53. Usia Harapan Hidup Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Tahun)

Indeks Kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga Kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal, dan angka harapan hidup. Nilai indeks Kesehatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pelayanan publik kesehatan di Kota Bekasi, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar tidak terjadi kesenjangan Kesehatan dan pemerataan kualitas Kesehatan di seluruh wilayah Kota Bekasi. Indeks kesehatan Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Indeks Kesehatan tertinggi di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 84,63 dan terendah pada tahun 2010 yakni sebesar 83,26. Berikut adalah data indeks kesehatan Kota Bekasi tahun 2010-2020.



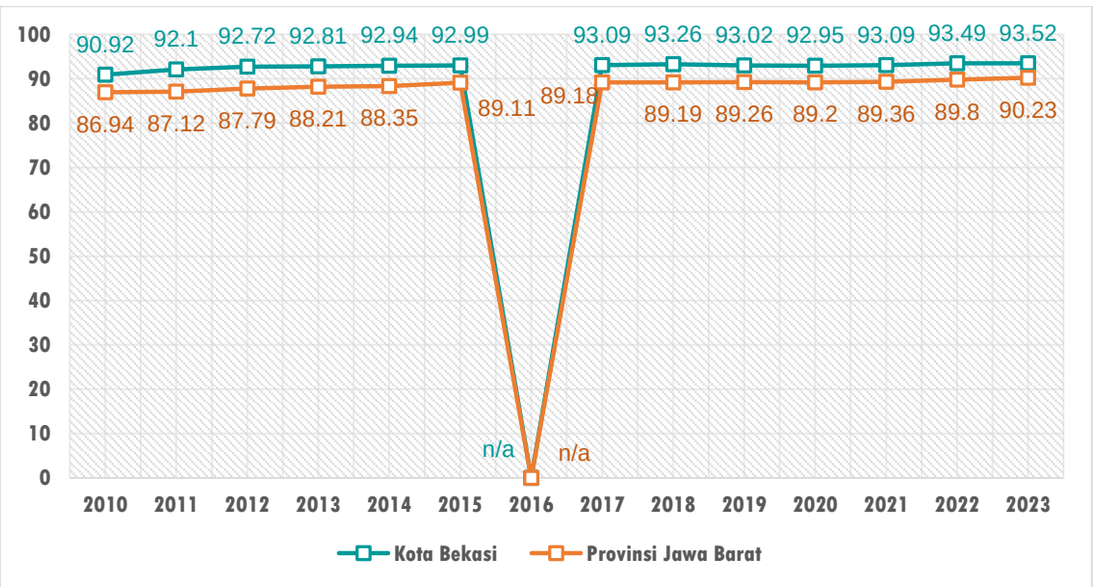
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tahun 2020

Gambar 2.54. Indeks Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2010-2020

2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan

Peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari kedua kelompok ini memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Pemuda seringkali diidentifikasi sebagai sumber energi, kreativitas, dan inovasi. Partisipasi aktif mereka dalam pembangunan dapat membawa gagasan segar dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, merupakan kontributor ekonomi yang signifikan. Perempuan terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan seringkali menjadi tulang punggung keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan di tingkat keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, membawa perspektif yang beragam dan mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG dapat mengukur tingkat ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Interpretasi IPG yaitu semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara Pembangunan antara Perempuan dengan laki-laki. Namun jika semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi dari tahun 2010 hingga tahun 2023 selalu berada diatas angka capaian Provinsi Jawa Barat. Bahkan IPG Kota Bekasi berada diurutan lima besar dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Daerah dengan IPG tertiggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Capaian IPG Kota Bekasi tahun 2023 sebesar 93,52 meningkat 0,03 angka dari tahun 2022. Berikut adalah data perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2023.

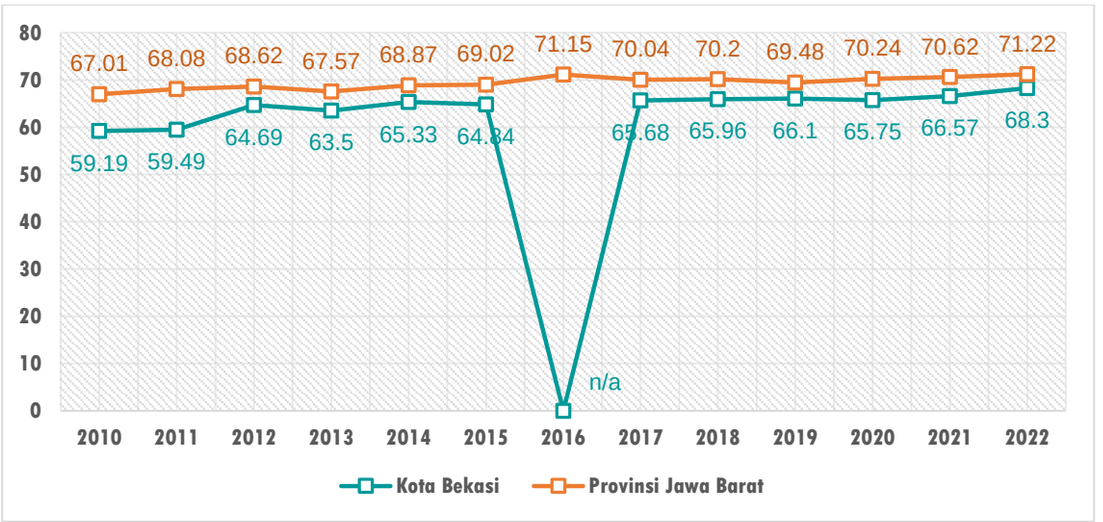


Sumber: BPS, Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.55. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. IDG dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan, khususnya bidang ekonomi dan politik. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan, maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan gender yang lebih baik. Selain itu, IDG juga dapat membantu dalam memantau kemajuan yang dicapai dalam mencapai kesetaraan gender.

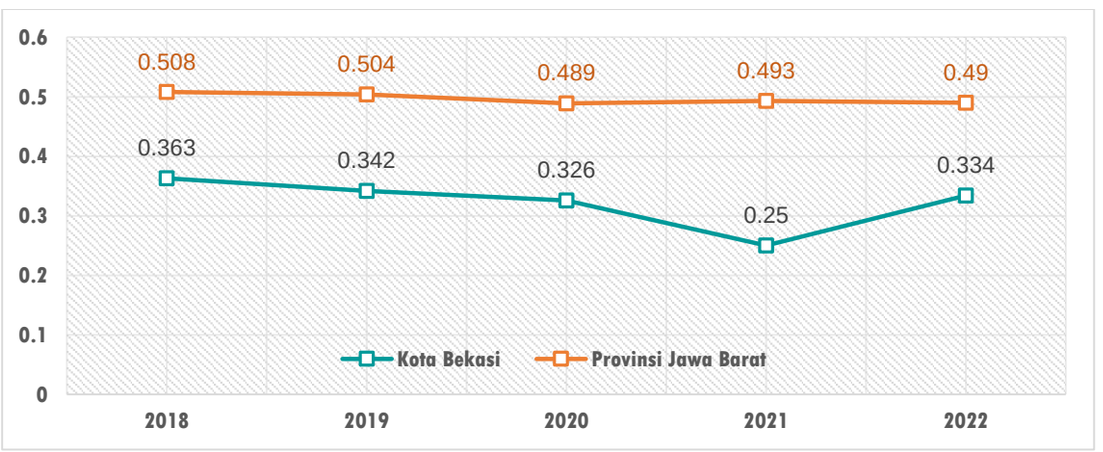
Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah (IDG<50); sedang (50≤IDG<60); tinggi (60≤IDG≤80); sangat tinggi (IDG>80). Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bekasi terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 IDG Kota Bekasi sebesar 68,3, angka tersebut menjadi angka tertinggi sejak tahun 2010 hingga tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, IDG Kota Bekasi selalu berada di bawah provinsi. Berikut adalah data perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bekasi dengan Provinsi Jawa Barat.



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.56. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2022

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks ini memiliki sistem skor dengan rentang skala 0 hingga 1, dengan skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar dan skor 1 menunjukkan tercapainya kesetaraan.



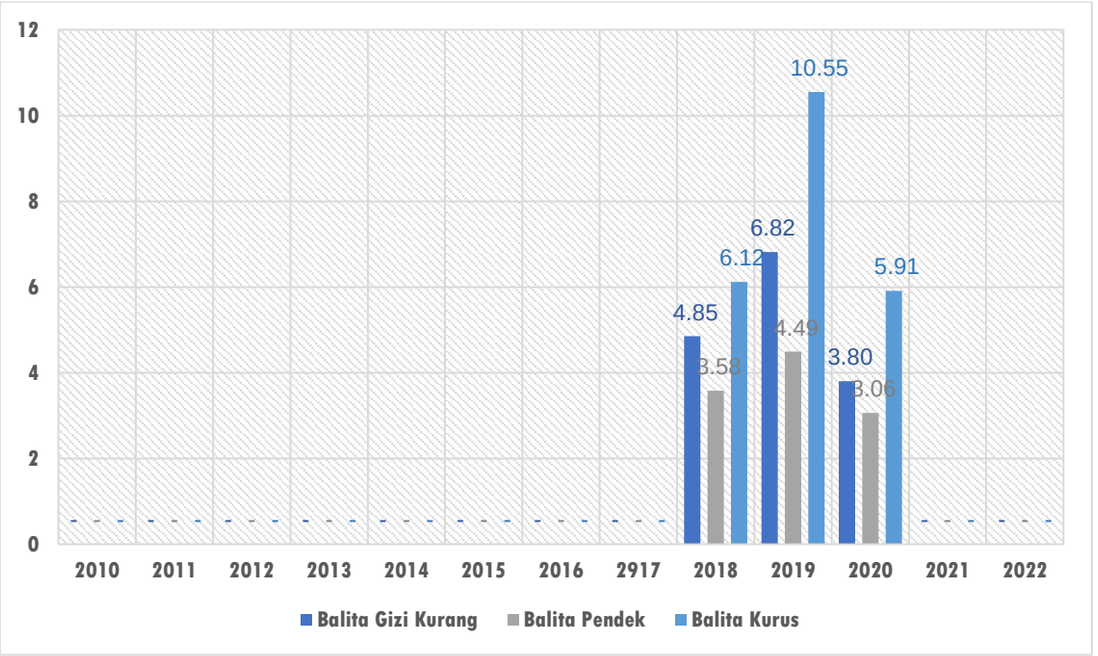
Sumber: BPS, Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.57. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar di atas IKG di Kota Bekasi mengalami fluktuasi, terlebih di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.084 menjadi 0.334 dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini berarti ketimpangan gender di Kota Bekasi semakin memburuk. Padahal, IKG di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perbaikan dengan turun sebesar 0.003 menjadi 0.49 di tahun 2022. Meskipun IKG Kota Bekasi mengalami peningkatan di tahun 2022, ketimpangan gender Kota Bekasi masih menjadi yang terbaik keempat setelah Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kota Banjar.

2.2.2.3. Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu kondisi dimana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi (malnutrisi), atau dengan kata lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat, dan kalori. Gizi buruk merupakan bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang mengkonsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang mengakibatkan gangguan pencernaan atau penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Kelaparan yang lama bisa berujung pada status gizi buruk. Masalah gizi buruk merupakan sindrom kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga serta juga berkaitan dengan aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Prevalensi Balita gizi kurang (indeks BB/U), Balita pendek (indeks TB/U), dan Balita kurus (indeks BB/TB) di Kota Bekasi tahun 2020 meningkat cukup tajam dibandingkan tahun 2019 dan 2018. Berikut adalah data prevalensi status gizi balita di Kota Bekasi tahun 2018-2020.



Sumber: Profil Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Juni 2022

Gambar 2.58. Prevalensi Status Gizi Balita Kota Bekasi Tahun 2018-2020

Prevalensi gizi kurang di Kota Bekasi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,12% dari 134.537 Balita yang ditimbang, ditemukan sebanyak 8.228 Balita yang mengalami gizi kurang. Prevalensi ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019, prevalensi gizi kurang sebesar 3,58% dan tahun 2018 sebesar 4,85%. Prevalensi gizi kurang tertinggi yaitu di wilayah Puskesmas Ciketing Udik (13,08%), diikuti Puskesmas Jaka Setia (12,03%), dan Puskesmas Karang Kitri (11,46%), serta Puskesmas Bintara Jaya (11,14%). Sedangkan Puskesmas dengan prevalensi gizi kurang paling rendah adalah Puskesmas Teluk Pucung (0,26%), Kali Abang Tengah (0,78%), dan Puskesmas Harapan Baru (0,84%).

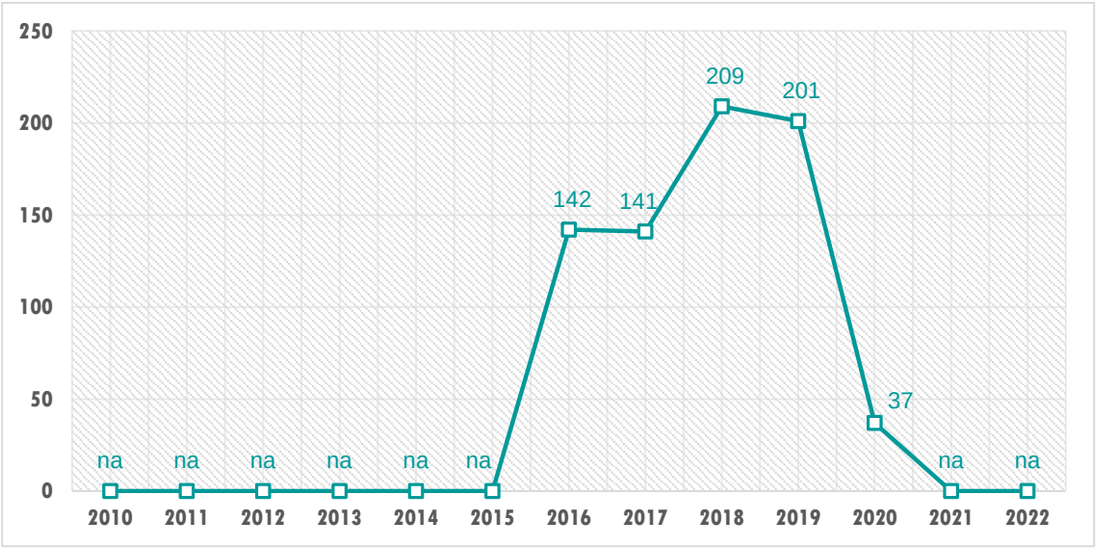
Peningkatan prevalensi juga terjadi pada prevalensi Balita pendek (*stunting*), dengan peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 2020 prevalensi Balita *stunting* di Kota Bekasi yaitu sebesar 10,55 % (14.194 Balita *stunting* dari 134.537 Balita yang diukur tinggi badannya). Prevalensi ini meningkat dari 4,94 % pada tahun 2019 dan 6,82% di tahun 2018.

Dilihat berdasarkan wilayahnya, prevalensi Balita *stunting* tahun 2020 tertinggi di wilayah Puskesmas Harapan Baru dengan prevalensi (22%), diikuti Puskesmas Bintara (21,70%), dan Puskesmas Jati Bening Baru (20,15%). Sedangkan wilayah Puskesmas dengan prevalensi Balita *stunting* paling rendah adalah Puskesmas Jati Bening (0,65%), Puskesmas Kali Abang Tengah (1,15%), serta Puskesmas Pekayon Jaya (2,36%).

Prevalensi Balita kurus (indeks berat badan per tinggi badan) juga mengalami peningkatan dari 3,80 tahun 2018 dan 3,06 tahun 2019, meningkat prevalensinya menjadi 5,91% (dari 134.537 Balita yang diukur terdapat 7.954 Balita kurus). Prevalensi Balita kurus tertinggi di Puskesmas Ciketing Udik (18,40%), diikuti Puskesmas Bintara Jaya (13,98%), dan Puskesmas Sumur Batu (13,59%). Sedangkan prevalensi Balita kurus paling rendah di Puskesmas Pengasinan, pada Puskesmas ini tidak terdapat satu orang pun Balita kurus. Puskesmas dengan prevalensi balita kurus yang rendah lainnya adalah Puskesmas Teluk Pucung (0,16%) dan Puskesmas Kali Abang Tengah (0,27%).

Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau ideal. Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat memengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua. Terlebih dengan adanya pandemi yang melanda, dimana banyak para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, usaha-usaha banyak yang tutup sehingga mempersulit perekonomian di masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi juga konsumsi makanan pada Balita.

Anak yang kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan sehingga mempengaruhi status kesehatannya di kemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal juga digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk.

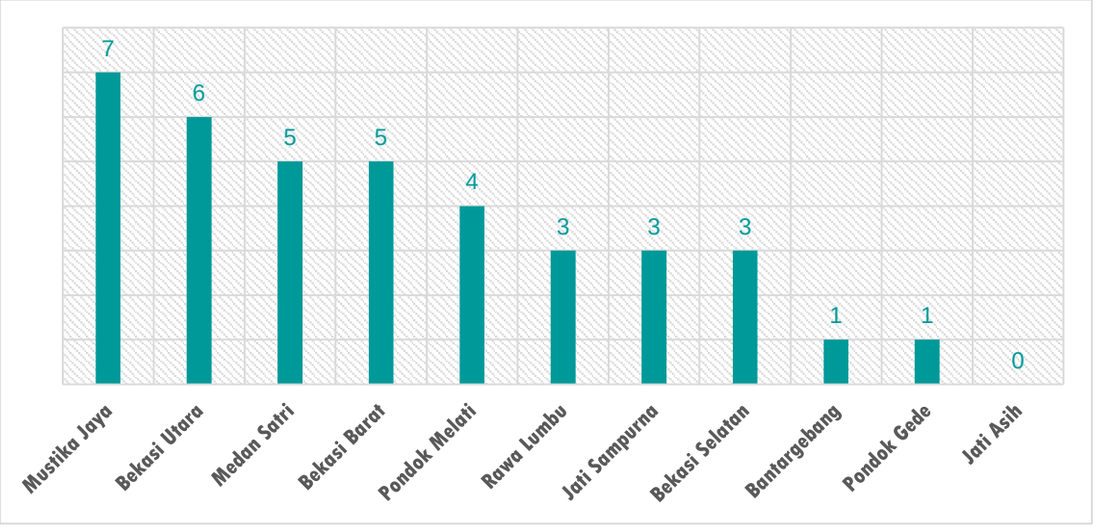


Sumber: Profil Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Juni 2022

Gambar 2.59. Jumlah Kasus Gizi Buruk Kota Bekasi Tahun 2016-2020 (orang)

Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap jumlah kasus gizi buruk di Kota Bekasi. Pada tahun 2018 kasus gizi buruk di Kota Bekasi sebanyak 209 orang kemudian turun menjadi 201 orang pada tahun 2019 serta menjadi 37 orang pada tahun 2020. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk menanggulangi gizi buruk, antara lain: penyuluhan, konsultasi, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita dan pengobatan atau rujukan bagi balita gizi buruk dengan penyakit penyerta. Di samping itu dilakukan Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) bagi seluruh petugas gizi puskesmas dan pengelola Rumah Bersalin dan pelatihan IMD dan ASI Eksklusif bagi petugas gizi, KIA dan Promosi Kesehatan sebagai bentuk penanggulangan gizi buruk

jangka panjang. Meskipun untuk sosialisasi secara langsung ke masyarakat pada tahun 2020 masih terkendala dengan masih banyaknya kasus Covid-19 di Kota Bekasi.



Sumber: Profil Kesehatan Kota Bekasi Tahun 2020, Dinkes Kota Bekasi, Juni 2022

Gambar 2.60. Jumlah Kasus Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2020 (Kasus)

Pada tahun 2020 ditemukan kasus gizi buruk terbanyak di Kecamatan Mustika Jaya (7 kasus), diikuti Kecamatan Bekasi Utara (6 kasus), dan Kecamatan Bekasi Timur dan Medan Satria (masing-masing 5 kasus). Sedangkan Kecamatan Jati Asih adalah kecamatan yang tidak ditemukan kasus gizi buruk di tahun 2020.

2.2.2.4. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga aktif merupakan bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh desa siaga adalah sebagai berikut (Departemen Kesehatan, 2006):

1. Memiliki 1 (satu) orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa.
2. Memiliki minimal 1 (satu) bangunan pos kesehatan desa (poskesdes) beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan minimal:
    - Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) serta faktor-faktor risikonya.
    - Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KLB serta kekurangan gizi.
    - Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
    - Pelayanan kesehatan dasar, sesuai dengan kompetensinya.
    - Kegiatan pengembangan seperti promosi kesehatan, kadarzi, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), penyehatan lingkungan, dan lain-lain.

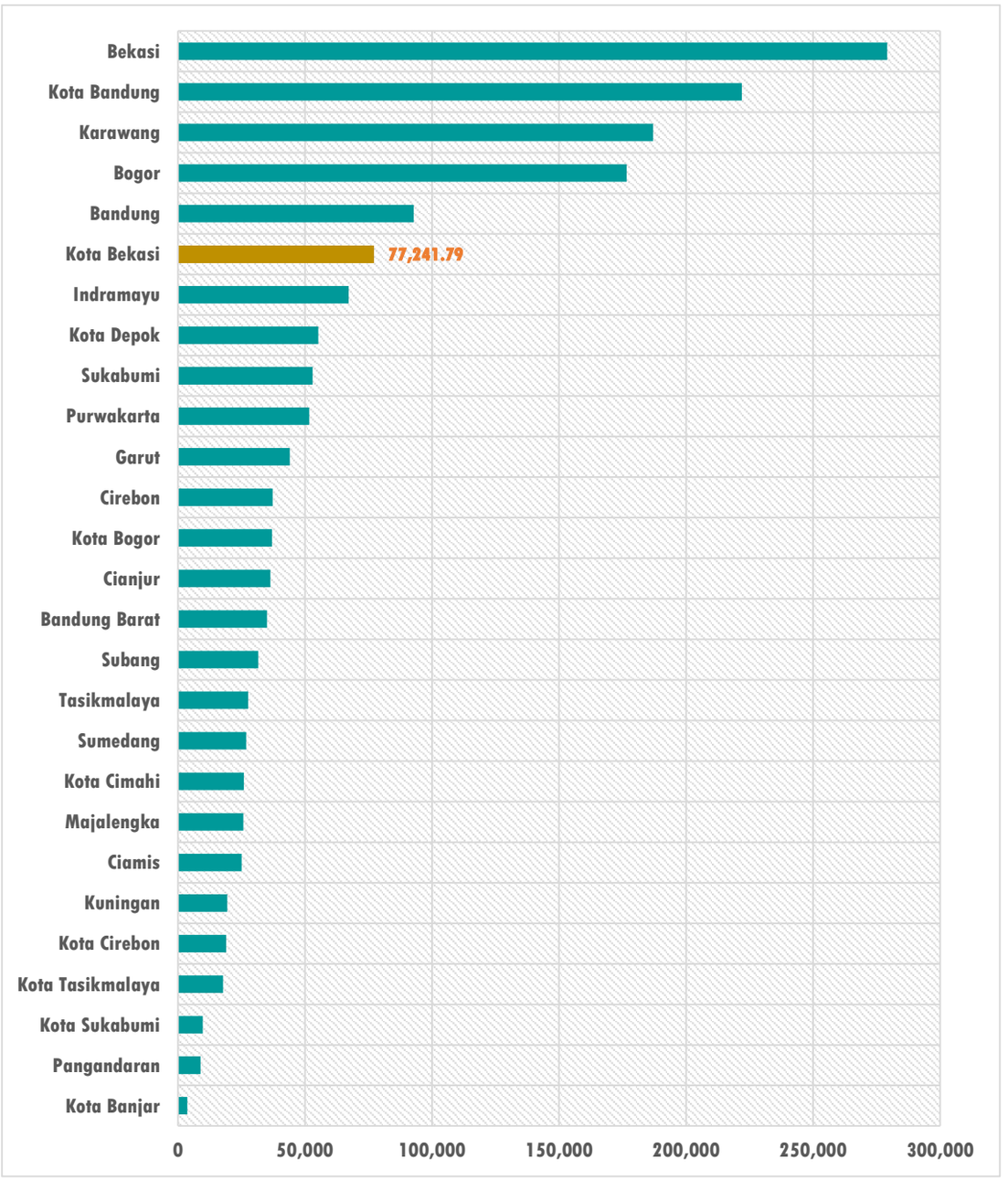
Di Kota Bekasi, ketersediaan data mengenai cakupan desa/kelurahan siaga maupun desa/kelurahan siaga aktif masih minim. Merujuk pada Profil Kesehatan Kota Bekasi 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi, di Kota Bekasi pada tahun 2020 terdapat 54 kelurahan siaga, terdiri dari 8 kelurahan kategori pratama, 25 kelurahan kategori madya, 20 kelurahan kategori utama dan 1 kelurahan kategori mandiri.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

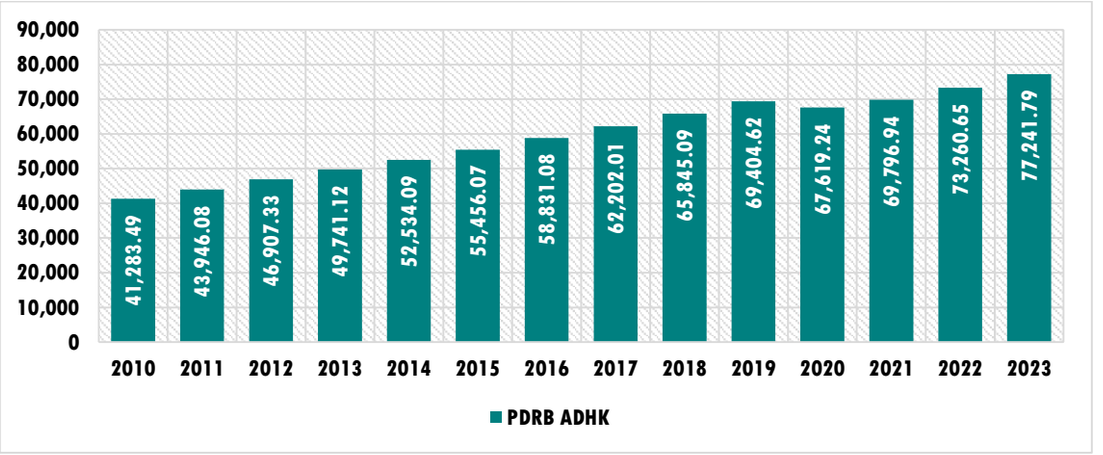
Kedudukan ekonomi di Kota Bekasi dapat dilihat dengan melakukan analisis perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bekasi dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. PDRB Kota Bekasi berada di peringkat ke 6 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2023 adalah sebesar 77.241,79 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa PDRB Kota Bekasi masih di bawah lima kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yakni Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung. PDRB digunakan untuk mengukur pendapatan yang timbul karena adanya kegiatan produksi. Data PDRB menjadi penting dan krusial mengingat fungsi dari komponen PDRB mampu mengidentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian di daerah. Setiap indikator ini dapat menjadi tolok ukur yang menggambarkan kondisi kesejahteraan dan pemerataan aspek ekonomi di suatu wilayah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Gambar 2.61. Kedudukan Ekonomi Kota Bekasi terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 berdasarkan PDRB ADHK (miliar rupiah)

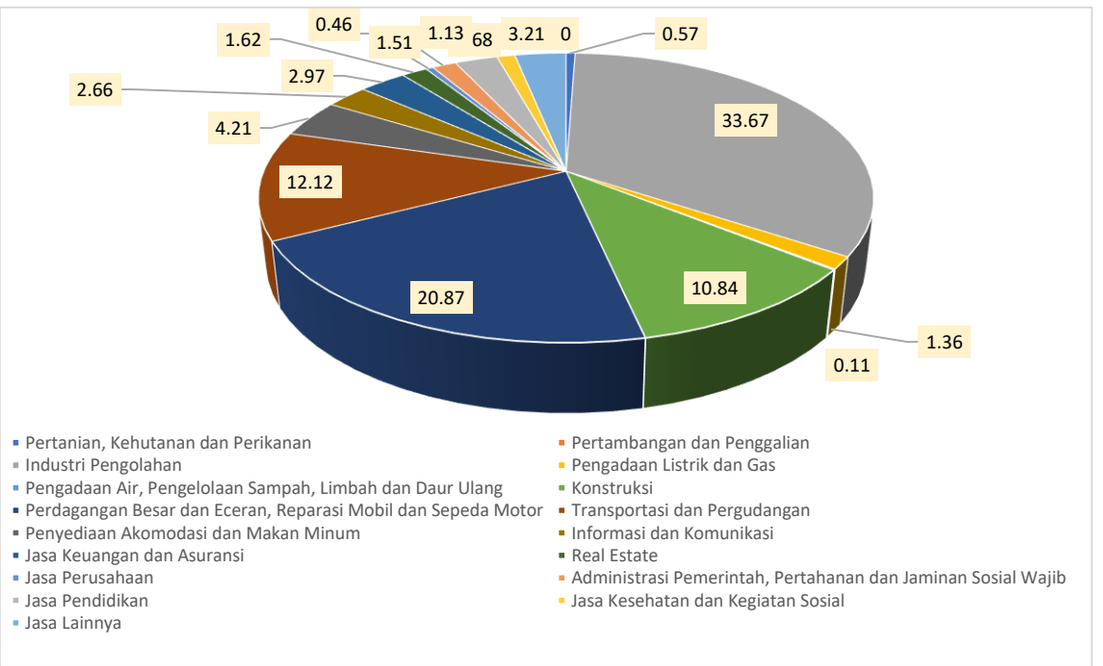
Apabila dilihat dari pertumbuhannya, PDRB di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2019. Penurunan laju PDRB di Kota Bekasi terjadi pada tahun 2020 yakni dari 69.404,62 miliar rupiah di tahun 2019 kemudian menurun menjadi 67.619,24 miliar rupiah pada tahun 2020. Penurunan PDRB terjadi akibat adanya pandemi Covid19, hal ini tidak hanya berdampak pada Kota Bekasi tetapi seluruh wilayah di Indonesia.



Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2011-2024

Gambar 2.62. Total PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (Miliar Rupiah)

Dalam rangka pembangunan daerah, diperlukan penentuan prioritas kebijakan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan pembangunan ekonomi yaitu dengan melalui analisis struktur ekonomi secara menyeluruh. Kota Bekasi memiliki struktur ekonomi yang bervariasi dimana sektor yang menyumbangkan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Bekasi pada tahun 2023 adalah Industri Pengolahan yakni sebesar 33,67%. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang menjadi penyumbang PDRB terbesar sejak tahun 2010-2023 di Kota Bekasi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi pada tahun 2023 yakni sebesar 20.87%. Sektor penyumbang kontribusi terbesar ketiga pada tahun 2023 adalah sektor transportasi dan pergudangan (12,12%) , sementara kontibutor terbesar keempat terhadap PDRB Kota Bekasi tahun 2023 adalah Konstruksi (10,84%).



Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 2024

Gambar 2.63. Kontribusi PDRB ADHB Kota Bekasi Tahun 2023

Kota Bekasi merupakan kota strategis di kawasan Jabodetabek yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta, sehingga gabungan sektor jasa dan perdagangan sangat berkembang pesat di Kota Bekasi. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi, distribusi PDRB pada sektor jasa dan perdagangan di Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 31,32 persen. Distribusi PDRB pada sektor jasa dan perdagangan tersebut antara lain penggabungan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,87 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,97 persen, jasa perusahaan sebesar 0,46 persen, jasa pendidikan sebesar 2,68 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,13 persen, serta jasa lainnya sebesar 3,21 persen. Namun demikian, kontribusi PDRB dari gabungan sektor jasa dan perdagangan masih berada di bawah sektor industri pengolahan yang telah mencapai hampir sekitar 34 persen.

Tabel 2.22. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi Tahun 2010-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	338,63	330,21	324,37	327,35	321,98	324,00	329,27	330,55	337,24	346,09	350,02	355,34	361,15	381,09
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	16.410,21	17.097,93	17.734,78	18.348,25	19.008,17	19.633,57	20.450,19	21.423,43	22.411,22	23.242,49	22.982,68	23.702,88	24.887,26	26.028,68
Pengadaan Listrik dan Gas	900,27	885,39	974,88	1.066,93	1.143,19	1.022,52	1.081,09	841,20	809,58	808,02	689,76	712,98	761,66	770,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,52	35,48	38,25	40,89	43,07	45,21	48,09	51,64	54,38	57,16	63,15	69,10	72,55	76,35
Konstruksi	3.242,42	3.561,80	3.992,58	4.678,49	5.330,10	5.877,04	6.407,34	7.073,07	7.748,12	8.500,32	7.758,95	7.964,58	8.048,29	8.630,72
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.696,41	10.384,35	11.271,58	11.878,56	12.261,39	12.858,30	13.583,48	14.326,49	15.129,51	15.905,23	14.995,18	15.416,39	15.873,87	16.351,95
Transportasi dan Pergudangan	3.589,98	4.006,35	4.274,40	4.451,00	4.779,80	5.199,58	5.463,65	5.799,08	6.117,54	6.596,75	6.467,19	6.580,91	7.604,01	8.465,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.356,99	1.467,03	1.572,66	1.723,11	1.872,97	2.027,23	2.248,29	2.450,12	2.681,40	2.751,72	2.612,51	2.635,07	2.844,35	3.058,54
Informasi dan Komunikasi	682,29	777,53	885,12	964,59	1.130,44	1.333,00	1.526,91	1.694,67	1.848,18	2.000,60	2.672,20	2.888,17	2.982,50	3.196,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.041,05	1.130,11	1.219,01	1.376,62	1.417,68	1.523,15	1.698,55	1.788,20	1.884,30	1.924,41	1.935,47	2.006,19	2.000,72	2.009,52
Real Estate	678,97	732,89	792,59	845,33	894,26	958,04	1.021,45	1.091,85	1.167,45	1.255,84	1.262,77	1.425,72	1.437,13	1.481,96
Jasa Perusahaan	153,91	173,83	190,98	207,37	225,68	241,88	262,86	285,16	309,49	330,34	283,38	289,61	318,95	346,52
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	934,31	973,42	1.029,81	1.039,27	1.045,43	1.065,46	1.086,60	1.098,70	1.117,11	1.127,35	1.057,71	1.088,75	1.088,68	1.088,77
Jasa Pendidikan	707,72	757,85	856,71	935,57	1.057,28	1.165,19	1.254,04	1.365,23	1.461,79	1.541,22	1.576,77	1.616,62	1.681,42	1.805,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408,19	438,67	468,84	512,29	557,73	618,02	679,65	747,48	807,45	888,14	844,85	942,36	959,24	997,53
Jasa Lainnya	1.109,61	1.193,24	1.280,80	1.345,51	1.444,91	1.563,58	1.689,58	1.835,13	1.960,34	2.128,95	2.066,35	2.102,26	2.338,88	2.553,47
Jumlah	41.283,49	43.946,08	46.907,33	49.741,13	52.534,09	55.456,07	58.831,08	62.202,01	65.845,09	69.404,62	67.619,24	69.796,94	73.260,65	77.241,79

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

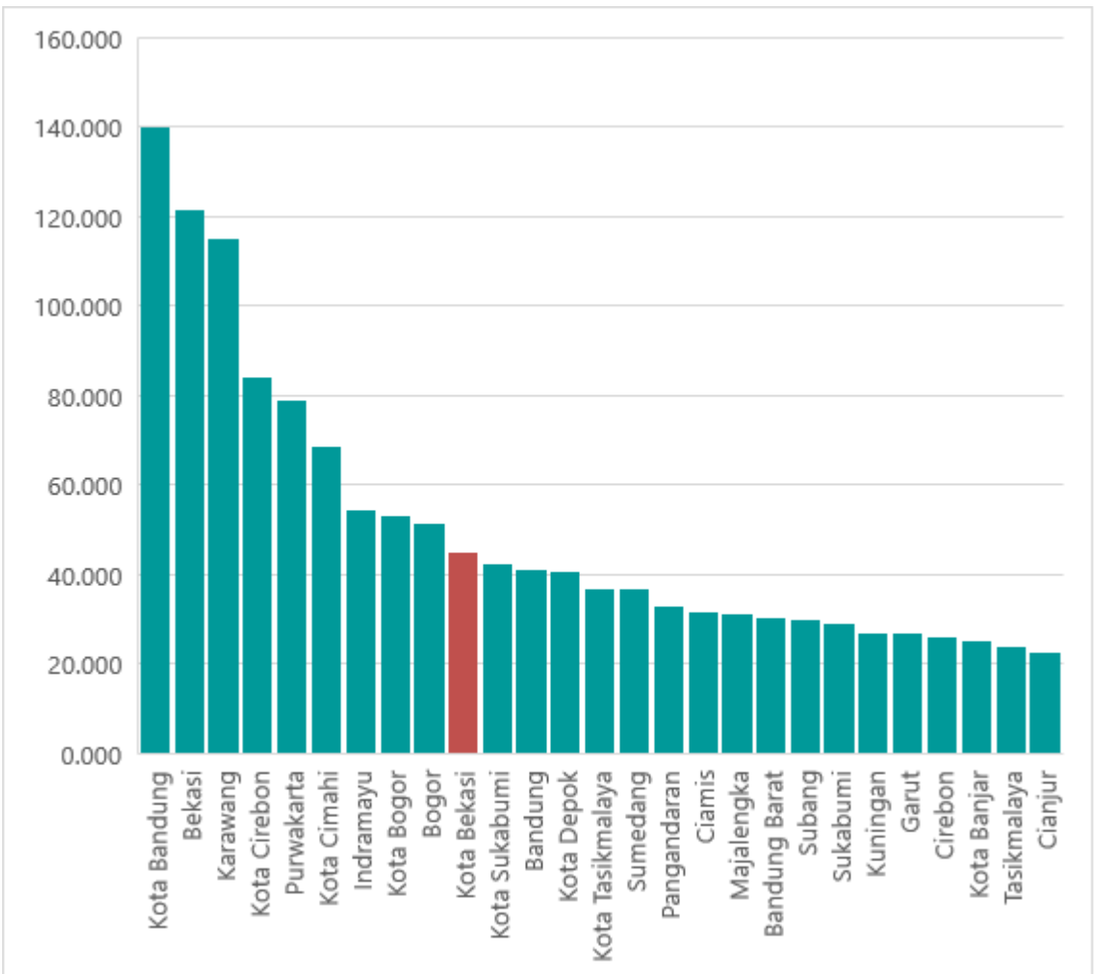
Tabel 2.23. Distribusi PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2023 (persen)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,82	0,75	0,68	0,67	0,65	0,62	0,61	0,59	0,59	0,56	0,59	0,57	0,57	0,57
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	**39,75**	**39**	**37,71**	**36,34**	**36,05**	**35,22**	**34,61**	**34,34**	**33,87**	**33,3**	**33,79**	**34,00**	**33,89**	**33,67**
Pengadaan Listrik dan Gas	2,18	2,26	2,56	2,69	3,08	2,73	2,66	1,94	1,74	1,62	1,42	1,4	1,43	1,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,1	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	**7,85**	**7,96**	**8,66**	**9,49**	**10,09**	**10,48**	**10,7**	**11**	**11,53**	**11,99**	**11,17**	**11,03**	**10,61**	**10,84**
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	**23,49**	**23,64**	**24,05**	**24,15**	**23,01**	**22,76**	**22,54**	**22,6**	**22,51**	**22,53**	**22,07**	**21,87**	**21,47**	**20,87**
Transportasi dan Pergudangan	**8,7**	**8,98**	**8,76**	**8,93**	**9,34**	**10,02**	**10,02**	**10,18**	**10,06**	**10,08**	**10,08**	**10,05**	**11,11**	**12,12**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	**3,29**	**3,33**	**3,33**	**3,39**	**3,49**	**3,58**	**3,81**	**3,88**	**4,07**	**4,07**	**4,05**	**3,99**	**4,16**	**4,21**
Informasi dan Komunikasi	1,65	1,69	1,73	1,75	1,79	1,91	2,01	2,06	2,07	2,07	2,79	2,85	2,69	2,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,52	2,58	2,7	2,88	2,79	2,84	3,03	3,09	3,12	3,05	3,13	3,22	3,19	2,97
Real Estate	1,64	1,68	1,68	1,66	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,58	1,65	1,77	1,7	1,62
Jasa Perusahaan	0,37	0,4	0,4	0,41	0,43	0,43	0,44	0,45	0,46	0,49	0,44	0,43	0,45	0,46
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	2,32	2,33	2,21	2,08	2,02	1,95	1,98	1,95	1,84	1,77	1,77	1,63	1,51
Jasa Pendidikan	1,71	1,68	1,78	1,84	2	2,11	2,19	2,3	2,39	2,57	2,8	2,78	2,7	2,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1	0,98	0,98	0,99	1,02	1,08	1,11	1,12	1,17	1,16	1,26	1,18	1,13
Jasa Lainnya	2,69	2,66	2,59	2,53	2,56	2,59	2,69	2,81	2,87	3	3	2,91	3,12	3,21
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

2.3.1.2. PDRB per Kapita

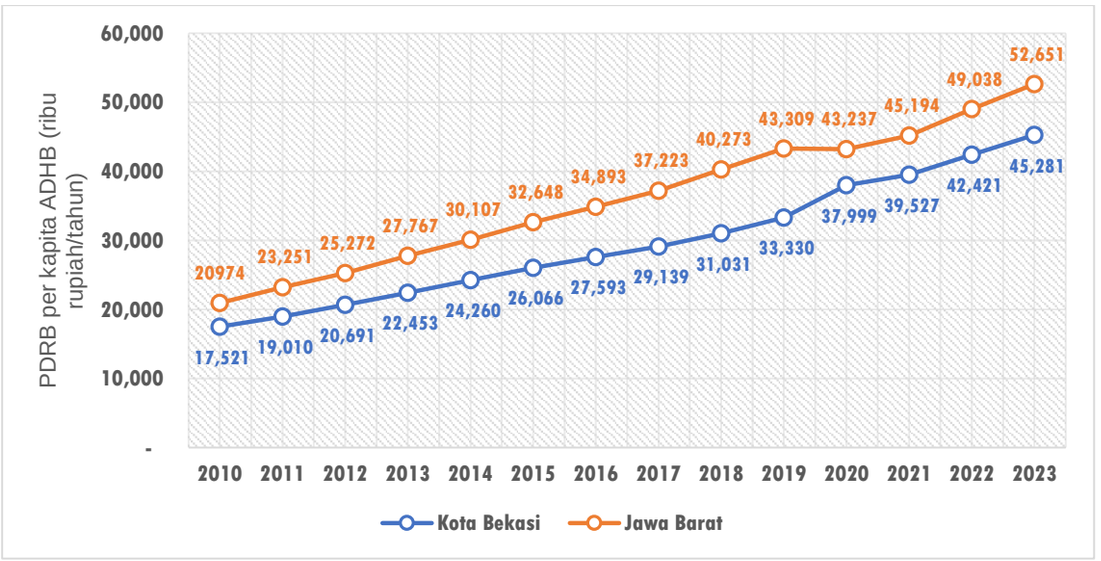
PDRB per Kapita merupakan pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah orang yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per Kapita mencerminkan pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, dan dapat memprediksi tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut di masa yang akan datang. PDRB per Kapita juga diasumsikan sebagai pendapatan per kapita, sehingga setiap peningkatan perkembangan daya beli penduduk, dianggap setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan inflasi. PDRB dengan PDRB per kapita memiliki sifat yang sejalan dalam bidang kemakmuran masyarakat. Kedua komponen tersebut merupakan komponen yang menggambarkan bahwa semakin tinggi PDRB ataupun PDRB per Kapita maka semakin sejahtera masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Apabila dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2010-2023, PDRB Kota Bekasi selalu berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2023 PDRB per Kapita Kota Bekasi sebesar 45.281 ribu rupiah per tahun, angka tersebut menjadikan Kota Bekasi berada di urutan ke-10 capaian PDRB per Kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu di bawah Kota Bandung pada posisi pertama, Kabupaten Bekasi pada posisi kedua, Kabupaten Karawang pada posisi ketiga, Kota Cirebon pada posisi keempat, Kabupaten Purwakarta pada posisi kelima, Kota Cimahi pada posisi keenam, Kabupaten Indramayu pada posisi ketujuh, Kota Bogor pada posisi kedelapan, dan Kabupaten Bogor pada posisi kesembilan.



Sumber: BPS Provinsi Jawwa Barat Tahun 2024

Gambar 2.64. PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (ribu rupiah)

Pada periode tahun 2010 hingga 2023, PDRB per kapita Kota Bekasi terus mengalami peningkatan, dari 17.521 pada tahun 2010 menjadi 45.281 pada tahun 2023. Posisi PDRB per kapita Kota Bekasi selama 13 tahun terakhir masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Perkembangan PDRB per kapita di Kota Bekasi pada tahun 2010 hingga 2023, secara lebih detil disajikan pada gambar berikut.

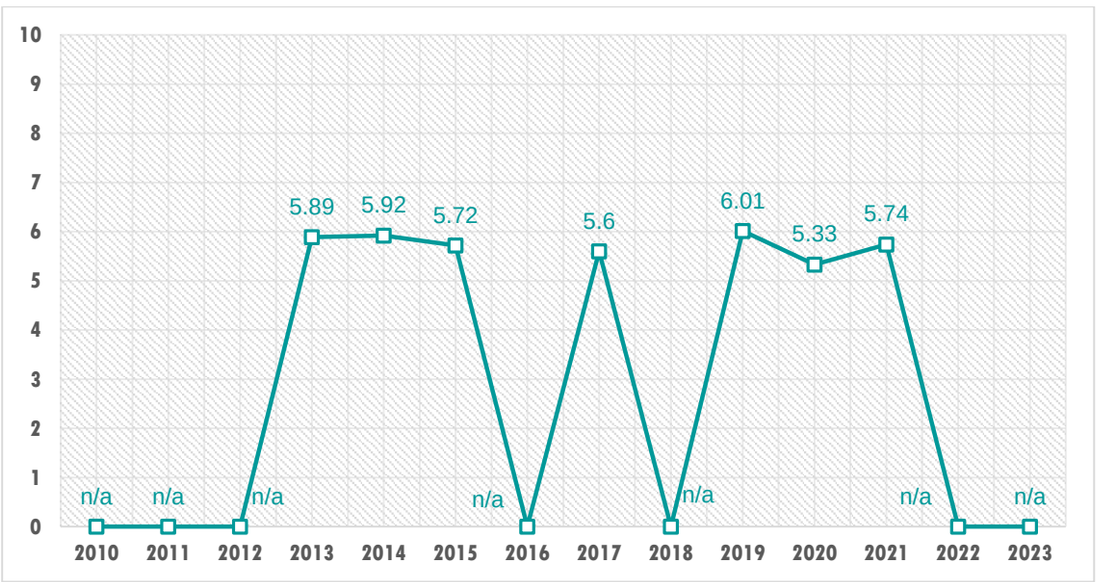


Sumber: BPS Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.65. PDRB per Kapita Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Ribu Rupiah per Tahun)

2.3.1.3. Indeks Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif berperan penting dalam menciptakan dan menghasilkan kesejahteraan dan kesempatan yang luas bagi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks Ekonomi Inklusif, disebut juga dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, merupakan indeks untuk mengukur tingkat inklusifitas pembangunan suatu wilayah, termasuk Kota Bekasi yang berada pada level kota. Indeks Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan suatu wilayah dengan berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks ini memiliki tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (pilar 1), pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan (pilar 2), dan perluasan akses dan kesempatan (pilar 3). Masing-masing pilar utama tersebut terdiri atas sub pilar dan indikator yang terkait. Perkembangan Indeks Ekonomi Inklusif di Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Gambar 2.66. Indeks Ekonomi Inklusif Kota Bekasi Tahun 2010-2023

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Ekonomi Inklusif di Kota Bekasi berkisar antara 5-6, dengan nilai indeks tertinggi sebesar 6,01 pada tahun 2019 dan indeks terendah sebesar 5,33 pada tahun 2020. Nilai Indeks Ekonomi Inklusif di Kota Bekasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat *pandemic COVID-19*, sehingga roda perekonomian dan pembangunan ekonomi di Kota Bekasi

menurun. Selanjutnya pada tahun 2021, pembangunan ekonomi di Kota Bekasi mulai bangkit kembali dengan ditunjukkannnya nilai Indeks Ekonomi Inklusif yang meningkat hingga mencapai 5,74. Peningkatan nilai Indeks Ekonomi Inklusif perlu terus diupayakan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi hingga di masa depan dengan memperhatikan dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan, serta perluasan terhadap akses dan kesempatan bagi masyarakat. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perlu dilakukan dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan infrastruktur ekonomi. Selanjutnya, upaya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebagai langkah untuk meningkatkan Indeks Ekonomi Inklusif salah satunya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bekasi dengan menghapus ketimpangan dari segi pendapatan, gender, maupun wilayah, serta pengentasan kemiskinan. Perluasan akses dan kesempatan juga perlu dilakukan agar mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta membentuk institusi keuangan agar terwujud keuangan yang inklusif.

2.3.1.4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari aspek penataan ruang. RTH untuk kawasan perkotaan wajib dialokasikan sebesar 20 persen dari total tutupan lahannya, baik yang bersifat privat maupun publik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka *(open spaces)* suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut, yaitu: keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Data persentase RTH di Kota Bekasi dari tahun 2010–2022 terus mengalami peningkatan, baik RTH privat, RTH publik, dan RTH total. Dalam lima tahun terakhir, persentase RTH total di Kota Bekasi mengalami peningkatan dari 11,64 persen pada tahun 2018 menjadi 12,16 persen pada tahun 2022. Luas RTH di Kota Bekasi perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Upaya peningkatan luas RTH juga diperlukan untuk mewujudkan Ekonomi Hijau, salah satunya dengan memenuhi target luas RTH sebesar 30 persen pada tahun 2045. Rincian persentase RTH di Kota Bekasi dari tahun 2010-2022 disajikan pada tabel berikut.

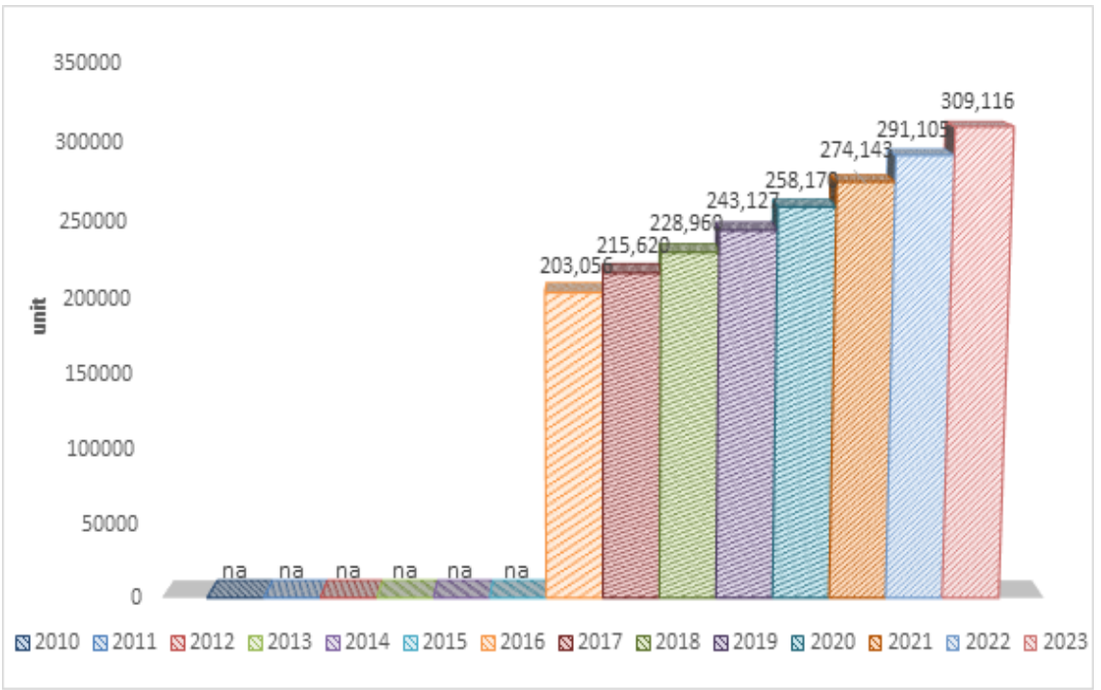
Tabel 2.24. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi Tahun 2010-2022

No	RTH	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Ruang Terbuka Hijau Privat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7,88	7,96	8,04	8,12	8,2
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,76	3,81	3,86	3,91	3,96
	RTH Total	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11,64	11,77	11,90	12,03	12,16

Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber Data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2023, LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2023

2.3.1.5. Jumlah UMKM

Bidang industri di Kota Bekasi didukung juga oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikembangkan oleh Masyarakat setempat. Pada tahun 2021, total UMKM di Provinsi Jawa Barat mencapai 6.257.390 unit. Kota Bekasi menempati urutan ke-10 dalam pendistribusian jumlah UMKM di wilayah Provinsi Jawa Barat. Distribusi jumlah UMKM di Kota Bekasi sebesar 4.4 persen dengan jumlah UMKM sekitar 274.143 unit. Perkembangan jumlah UMKM dari tahun 2010 hingga 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.67**.



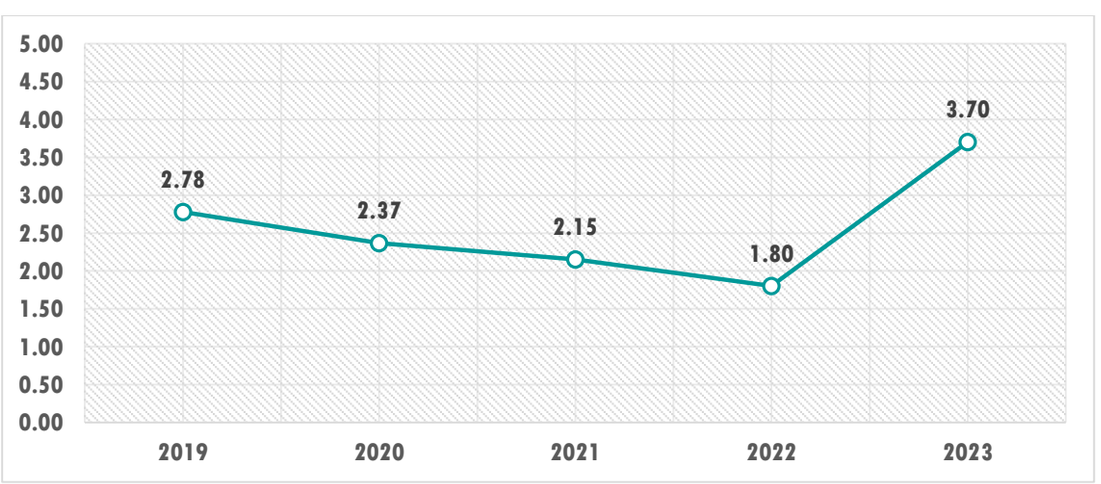
Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2023

Gambar 2.67. Jumlah UMKM di Kota Bekasi Tahun 2010-2023

Jumlah UMKM di Kota Bekasi terus meningkat dari 203.056 unit di tahun 2016, menjadi 309.116 unit di tahun 2023. Peningkatan jumlah UMKM di Kota Bekasi selama delapan tahun terakhir sebesar 106.060 unit atau sekitar 52,23 persen selama tahun 2016 hingga tahun 2023.

2.3.1.6. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di suatu daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar menunjukkan jumlah orang yang berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Kewirausahaan berperan penting dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga perkembangan nilai rasio kewirausahaan di masa depan perlu menjadi perhatian Kota Bekasi. Rasio kewirausahaan di Kota Bekasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2024 diolah dari data BPS Kota Bekasi, 2024

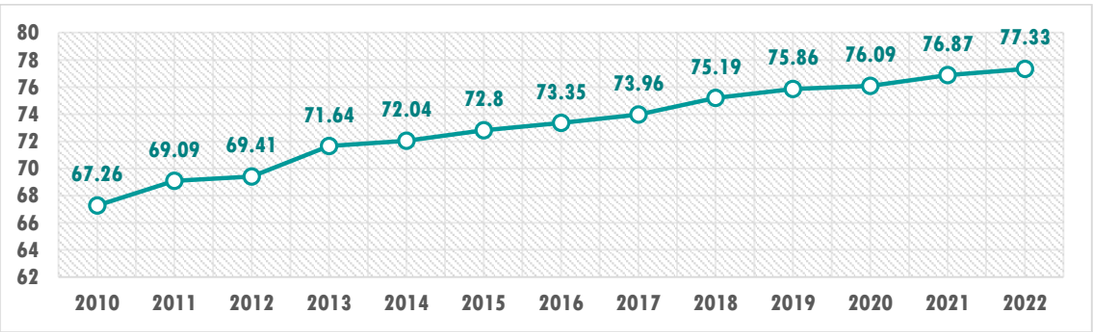
Gambar 2.68. Rasio Kewirausahaan Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Rasio kewirausahaan di Kota Bekasi cenderung terus menurun dari 2,78 pada tahun 2019 menjadi 1,80 pada tahun 2022. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, sehingga rasio kewirausahaan Kota Bekasi mencapai 3,70. Peningkatan rasio kewirausahaan ini perlu dijaga agar nilai rasio tersebut tidak kembali menurun bahkan perlu ditingkatkan agar daya saing ekonomi Kota Bekasi di masa depan dapat terus unggul. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan rasio kewirausahaan adalah dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti peningkatan UMKM.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan menjadi salah satu komponen penting yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini juga mencerminkan hasil pembangunan bidang pendidikan, termasuk kualitas sumber daya manusia yang juga menentukan tingkat produktivitas suatu wilayah. Perkembangan Indeks Pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2010 hingga 2022 adalah sebagai berikut.



Keterangan: data tahun 2023 belum tersedia
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SiMantap Disdik

Gambar 2.69. Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2010-2022

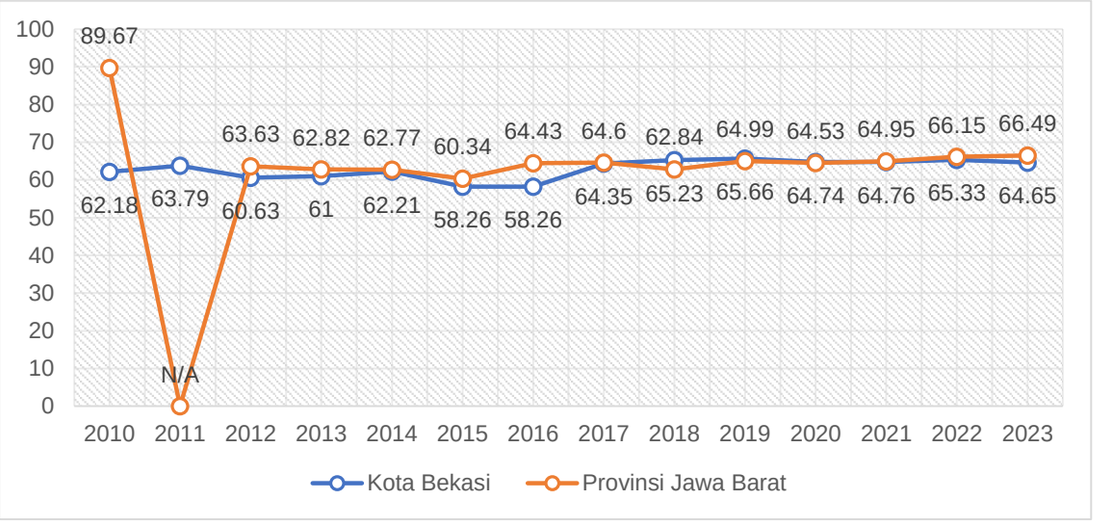
Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata Indeks Pendidikan di Kota Bekasi terus meningkat dari 67,26 pada tahun 2010 menjadi 77,33 pada tahun 2022. Indeks pendidikan di Kota Bekasi dalam 12 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Peningkatan indeks pendidikan di Kota Bekasi perlu terus ditingkatkan agar sumber daya manusia di daerah ini memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan hingga di masa depan.

2.3.2.2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

IPLM menjadi salah satu indikator kinerja kunci dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perpustakaan, sehingga perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan literasi masyarakat. Pada tahun 2023, pencapaian nilai IPLM Kota Bekasi sebesar 51,79 dan tergolong dalam kategori sedang. Namun demikian, nilai IPLM Kota Bekasi pada tahun 2023 tersebut masih berada di bawah IPLM provinsi dan nasional, yaitu masing-masing secara berurutan sebesar 60,02 dan 64,48. Adanya gap terhadap pembangunan literasi perlu ditingkatkan dan harus segera diselesaikan, mengingat target IPLM nasional di akhir 2024 adalah sebesar 71,4. Berdasarkan data Kemendikbud dan BPS 2022, jumlah penduduk usia sekolah Kota Bekasi mencapai 512.704 jiwa dan jumlah penduduk usia Perguruan Tinggi sebesar 39.112 jiwa. Dengan semakin meningkatnya penduduk usia sekolah dan penduduk usia Perguruan Tinggi di Kota Bekasi serta tuntutan peningkatan IPLM di masa depan, maka diperlukan regulasi dan anggaran daerah terkait dengan perpustakaan. Kebijakan anggaran perpustakaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan berdampak langsung terhadap terselenggaranya pelayanan perpustakaan, khususnya di Kota Bekasi. Adanya dukungan anggaran dalam regulasi akan meningkatkan 7 unsur pembangun literasi masyarakat, sehingga akan mendorong peningkatan nilai IPLM Kota Bekasi. Melalui regulasi tersebut, diharapkan pelaksanaan perpustakaan akan berjalan dengan baik sehingga literasi masyarakat Kota Bekasi menjadi meningkat.

2.3.2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja atau berada dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun. Rentang usia tersebut termasuk ke dalam rentang usia produktif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2010-2023 mengalami fluktuatif, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bekasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 66,49. Berikut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2023.

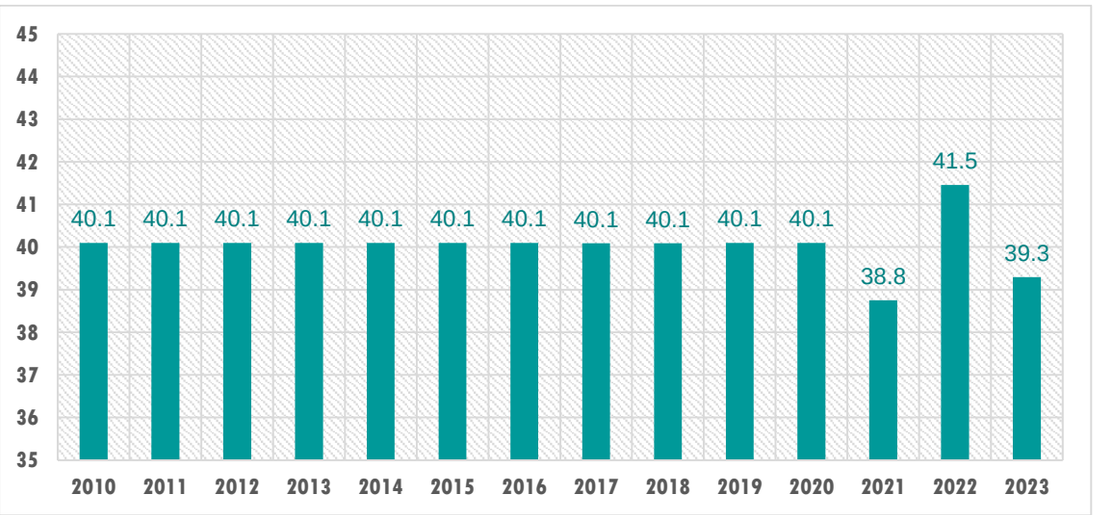


Sumber: BPS Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat

Gambar 2.70. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023 (Persen)

2.3.2.4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah yang diperlukan untuk menunjang daya saing daerah. Rasio ketergantungan penduduk berperan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun dan merupakan penduduk usia kerja. Sementara itu, penduduk yang tidak produktif adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun yang masih bergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggung (belum produktif) dan penduduk yang berusia di atas 64 tahun yang telah melewati masa pensiun atau masa produktifnya untuk bekerja. Rasio ketergantungan di Kota Bekasi pada tahun 2010-2023 dapat dilihat pada **Gambar 2.71**.



Sumber: BPS Kota Bekasi tahun 2011-2024, hasil analisis 2024

Gambar 2.71. Angka Ketergantungan Penduduk di Kota Bekasi Tahun 2010-2023

Angka ketergantungan penduduk di Kota Bekasi selama tahun 2010 hingga 2020 cenderung statis, yaitu 40,1. Pada tahun 2022, angka ketergantungan penduduk di Kota Bekasi menempati urutan tertinggi yaitu mencapai 41,5. Rentang angka ketergantungan di Kota Bekasi selama 13 tahun terakhir antara 38,8 hingga 41,5. Hal ini menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk menanggung kehidupan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif cenderung sama kondisinya selama 13 tahun terakhir, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang signifikan.

Angka ketergantungan Kota Bekasi sekitar 38,8-41,5, berada di bawah rasio ketergantungan Jawa Barat dan Indonesia yang berkisar antara 43-47 dan 45-48. Rendahnya angka ketergantungan di Kota Bekasi disebabkan karena kota ini memiliki daya tarik sebagai tujuan urbanisasi, sehingga banyak masyarakat yang kembali ke kampung halamannya ketika memasuki usia tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk yang rendah di Kota Bekasi memberikan dampak positif dari segi aspek daya saing, sebab SDM yang produktif lebih tinggi dari SDM yang menjadi tanggungan, sehingga menjadi kekuatan dan potensi ekonomi yang baik bagi Kota Bekasi.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Infrastruktur dan Sarana Transportasi

Transportasi darat menjadi bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan perekonomian. Wilayah yang memiliki jaringan angkutan darat memadai akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang *remote* (terpencil). Mengingat peran transportasi dalam mendukung aktivitas perekonomian merupakan hal yang penting, maka diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran tentang infrastruktur dan sarana transportasi, seperti infrastruktur jalan, jumlah kendaraan, serta rasio panjang jalan terhadap kendaraan, khususnya di Kota Bekasi.

2.3.3.1.1 Infrastruktur Jalan

Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat, sebab memiliki fungsi strategis sebagai penghubung satu daerah dengan daerah lain. Jalan menjadi penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sehingga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2020-2023, Kota Bekasi sebagian besar dilalui oleh jalan kabupaten sekitar 99 persen, yaitu 4.459,28 km. Berdasarkan tingkat kewenangannya, panjang jalan di Kota Bekasi pada tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.25. Panjang jalan di Kota Bekasi berdasarkan tingkat kewenangan

Jenis jalan	Tahun 2020-2023
Negara	15.88
Provinsi	21.07
Kabupaten	4,459.28

Sumber: BPS Kota Bekasi Tahun 20200-2023

Panjang jalan di Kota Bekasi berdasarkan jenis permukaan jalan pada tahun 2010-2023 disajikan pada **Tabel 2.26** berikut ini.

Tabel 2.26. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan (km) Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi

Tahun	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya (Tidak Dirinci)	Total
2010	312,3	0	0	0	**312,3**
2011	1.324,6	0	0	0	**1.324,6**
2012	1.324,6	0	0	0	**1.324,6**
2013	1.324,6	0	0	0	**1.324,6**

Tahun	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya (Tidak Dirinci)	Total
2014	1.185,3	0	0	0	1.185,3
2015	1.324,6	0	0	0	1.324,6
2016	1.324,6	0	0	0	1.324,6
2017	4.428,79	16,51	15,61	0	4.460,91
2018	4.463,85	16,64	15,74	0	4.496,22
2019	4.513,84	16,82	15,92	0	4.546,58
2020	4.432,22	5,14	21,92	0	4.459,28
2021	4.432,22	5,14	21,92	0	4.459,28
2022	4.432,22	5,14	21,92	0	4.459,28
2023	4.432,22	5,14	21,92	0	4.459,28

Sumber: Data tahun 2010-2016 = BPS Provinsi Jawa Barat 2011-2017; 2017-2022 = BPS Kota Bekasi, 2018-2023

Jenis permukaan jalan di Kota Bekasi terdiri atas aspal, kerikil, dan tanah. Pada tahun 2010-2023, jalan yang telah diaspal terus meningkat dari 312,3 km di tahun 2010 menjadi 4.432,22 km di tahun 2023. Pada tahun 2020 hingga 2023, Kota Bekasi didominasi oleh jalan beraspal sekitar 99,4 persen atau sepanjang 4.432,22 km. Proyek pengaspalan jalan perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah setempat mengingat peran jalan dalam pembangunan ekonomi wilayah cukup signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2023, jalan yang tidak beraspal berupa jalan tanah dan kerikil, yang secara berurutan sekitar 0,5 persen atau sepanjang 21,92 km dan 0,1 persen atau sepanjang 5,14 km. Jalan yang berkerikil mengalami penurunan pada periode tahun 2020-2023 jika dibandingkan dengan periode tahun 2017-2019. Jalan yang berkerikil pada rentang tahun 2017-2019 sepanjang 16,51-16,82 km, sementara pada periode tahun 2020-2023 jalan yang berkerikil telah menurun menjadi 5,14 km.

Kondisi jalan di Kota Bekasi terbagi atas empat tipe, yaitu jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Jalan yang memiliki kondisi baik dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam dan selama dua tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan. Jalan dengan kondisi sedang diartikan sebagai jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40-60 km per jam dan selama satu tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan. Pada kondisi rusak, jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam dan perlu perbaikan pondasi jalan. Selanjutnya untuk jalan rusak berat, maka jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 0-20 km per jam. Panjang jalan di Kota Bekasi berdasarkan kondisinya dapat dilihat pada **Tabel 2.27.**

Tabel 2.27. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kota Bekasi pada Tahun 2010-2023

Kondisi jalan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat	Total
2010	232,8	79,5	0	0	312,3
2011	1.125,9	0	198,7	0	1.324,6
2012	1.125,9	0	198,7	0	1.324,6
2013	1.125,9	0	198,7	0	1.324,6
2014	704,6	0	222,4	0	927,0
2015	1.125,9	0	198,7	0	1.324,6
2016	1.125,9	0	198,7	0	1.324,6
2017	n/a	n/a	n/a	n/a	4.460,91
2018	4.329,9	112,58	24,25	29,54	4.496,22
2019	4.382,8	109,6	24,5	29,7	4.546,6
2020	3.199,91	837,00	353,81	68,56	4.459,28
2021	3.199,91	837,00	353,81	68,56	4.459,28
2022	3.305,84	881,79	126,51	145,14	4.459,28
2023	3.333,64	923,46	126,25	75,93	4.459,28

Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2011-2017 dan 2018-2022, BPS Kota Bekasi, 2021-2024

Pada periode tahun 2010-2023, kondisi jalan pada kategori baik di Kota Bekasi terus meningkat dari 232,8 km di tahun 2010 menjadi 3.333,64 km di tahun 2023. Pada tahun 2023, jalan di Kota Bekasi sebagian besar dalam kondisi baik, yaitu sekitar 75 persen atau sepanjang 3.333,64 km. Jalan dengan kondisi sedang sebesar 21 persen, yaitu sepanjang 923,46 km. Namun demikian, pada tahun 2023 masih terdapat jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat sebesar 5 persen, dengan rincian: jalan yang rusak sepanjang 126,25 km atau sekitar 3 persen dan jalan yang rusak berat sepanjang 75,93 km atau 2 persen dari total panjang jalan Kota Bekasi.

2.3.3.1.2 Jumlah Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu sarana penting dari subsektor angkutan darat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat, atau jenis kendaraan bermotor lainnya menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi darat. Kondisi ini sejalan dengan mobilitas penduduk yang juga semakin tinggi, terutama Kota Bekasi yang berada di kawasan megapolitan. Berdasarkan data statistik, jenis kendaraan bermotor di Kota Bekasi terdiri atas sedan dan jeep, bus dan microbus, truk dan light truk, alat berat, dan sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada **Tabel 2.28.**

Tabel 2.28. Jumlah Kendaraan Berdasarkan Jenis Kendaraan pada Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi

Tahun	Jenis kendaraan					
	Alat berat	Bus, Microbus	Sedan, jeep, minibus/ station wagon	Sepeda motor, scooter	Truck, pick up	Total
2010	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2011	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2012	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2013	10	2.61	188.284	923.068	31.084	**1.145.056**
2014	4	2.927	239.344	1.101.478	39.281	**1.383.034**
2015	4	2.947	260.390	1.167.197	42.013	**1.472.551**
2016	5	3.037	286.306	1.259.146	45.484	**1.593.978**
2017	5	3.109	302.306	1.344.217	47.875	**1.697.512**
2018	4	2.870	307.235	1.250.955	48.377	**1.609.441**
2019	4	2.765	310.635	1.251.694	49.867	**1.614.965**
2020	4	2.611	295.283	1.186.853	49.129	**1.533.880**
2021	3	2.494	296.114	1.160.088	49.917	**1.508.616**
2022	3	2.331	300.651	1.147.706	51.445	**1.502.136**
2023	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	**n/a**

Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021-2023; BPS Kota Bekasi 2011-2024

Jumlah kendaraan di Kota Bekasi meningkat dari 1,145 juta unit di tahun 2013 menjadi 1,50 juta unit di tahun 2022. Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang paling banyak digunakan masyarakat setempat, dengan jumlah sekitar 923.068 unit di tahun 2013 menjadi 1.147.706 unit pada tahun 2022. Sementara itu, sedan dan jeep menjadi kendaraan roda empat yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi, yaitu berkisar antara 188 ribu unit (tahun 2010) menjadi sekitar 300 ribu unit (pada tahun 2017 hingga 2022).

Selanjutnya, jumlah kendaraan berdasarkan kepemilikan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan pemerintah. Jumlah kendaraan berdasarkan kepemilikan dapat dilihat pada **Tabel 2.29.**

Tabel 2.29. Jumlah Kendaraan (Unit) Berdasarkan Kepemilikan pada Tahun 2010-2023 di Kota Bekasi

Tahun	Jenis Kendaraan Berdasarkan Kepemilikan			Total
	Dinas	Pribadi	Umum	
2010	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2011	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2012	n/a	n/a	n/a	**n/a**
2013	3.257	1.124.556	17.243	**1.145.056**
2014	3.473	1.358.912	20.649	**1.383.034**
2015	3.864	1.447.567	21.120	**1.472.551**
2016	4.239	1.568.683	21.056	**1.593.978**
2017	4.585	1.671.699	21.228	**1.697.512**
2018	4.233	1.583.689	21.519	**1.609.441**
2019	4.085	1.588.645	22.235	**1.614.965**
2020	3.990	1.509.177	20.713	**1.533.880**
2021	3.913	1.485.223	19.480	**1.508.616**
2022	3.777	1.479.209	19.150	**1.502.136**
2023	n/a	n/a	n/a	**n/a**

Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021-2023; BPS Kota Bekasi 2011-2024

Tabel 2.29 menunjukkan bahwa berdasarkan kepemilikannya, kendaraan pribadi menempati urutan tertinggi sekitar 1,697 juta unit pada tahun 2017. Untuk melayani kebutuhan transportasi publik di darat, Kota Bekasi telah mencatat jumlah kendaraan umum sebesar 19.150 unit di tahun 2022. Kendaraan bermotor yang paling sedikit kepemilikannya adalah kendaraan milik pemerintah, yaitu sekitar 3-4 ribuan unit.

2.3.3.1.3 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Salah satu indikator penting dalam menganalisis kinerja transportasi darat adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Informasi rasio ini dianalisis dengan menggunakan data total panjang jalan (km) menurut tingkat kewenangan (jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten) dalam satuan kilometer dibandingkan dengan jumlah kendaraan (dalam satuan unit). Perbandingan antara panjang jalan dan jumlah kendaraan di Kota Bekasi disajikan pada **Tabel 2.33.**

Tabel 2.30. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Bekasi pada Tahun 2010-2023

Tahun	Panjang jalan (km)	Jumlah kendaraan (unit)	Rasio (km/unit)
2010	n/a	n/a	n/a
2011	n/a	n/a	n/a
2012	n/a	n/a	n/a
2013	1.360,24	1.145.056	0,0012
2014	1.360,24	1.383.034	0,0010
2015	1.360,24	1.472.551	0,0009
2016	1.360,24	1.593.978	0,0009
2017	4.460,91	1.697.512	0,0026
2018	4.496,22	1.609.441	0,0028
2019	4.546,58	1.614.965	0,0028
2020	4.496,23	1.533.880	0,0029
2021	4.496,23	1.508.616	0,0030
2022	4.496,23	1.502.136	0,0030
2023	n/a	n/a	n/a

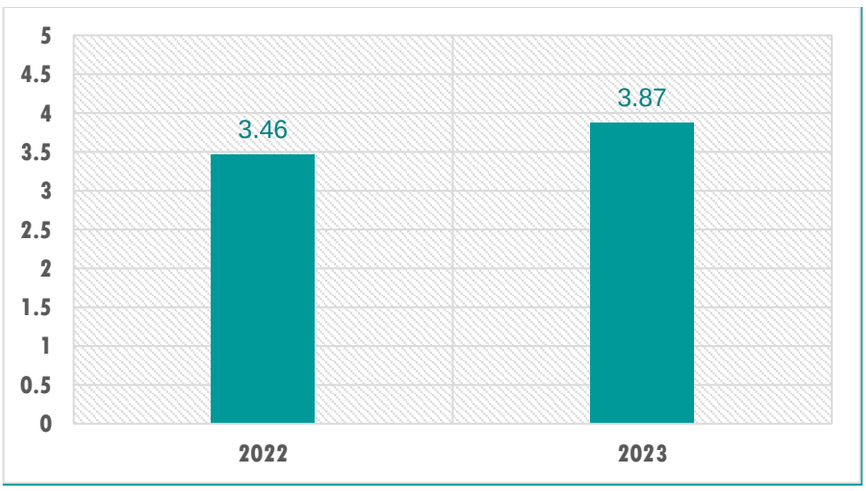
Keterangan: n/a = data tidak tersedia
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021-2023; BPS Kota Bekasi 2011-2024

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga 2022 berkisar antara 0,0009 hingga 0,003 km/unit, dengan panjang jalan sejauh 1.360,24 km hingga 4.496,23 km dan jumlah kendaraan berkisar antara 1,145 juta hingga 1,697 juta unit. Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kapasitas jalan untuk menampung jumlah kendaraan tergolong sangat rendah. Jumlah kendaraan yang berada di Kota Bekasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada. Rasio yang rendah ini berpotensi menimbulkan titik kemacetan di beberapa lokasi Kota Bekasi.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut.



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional 2023-2024

Gambar 2.72. Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bekasi Tahun 2022-2023

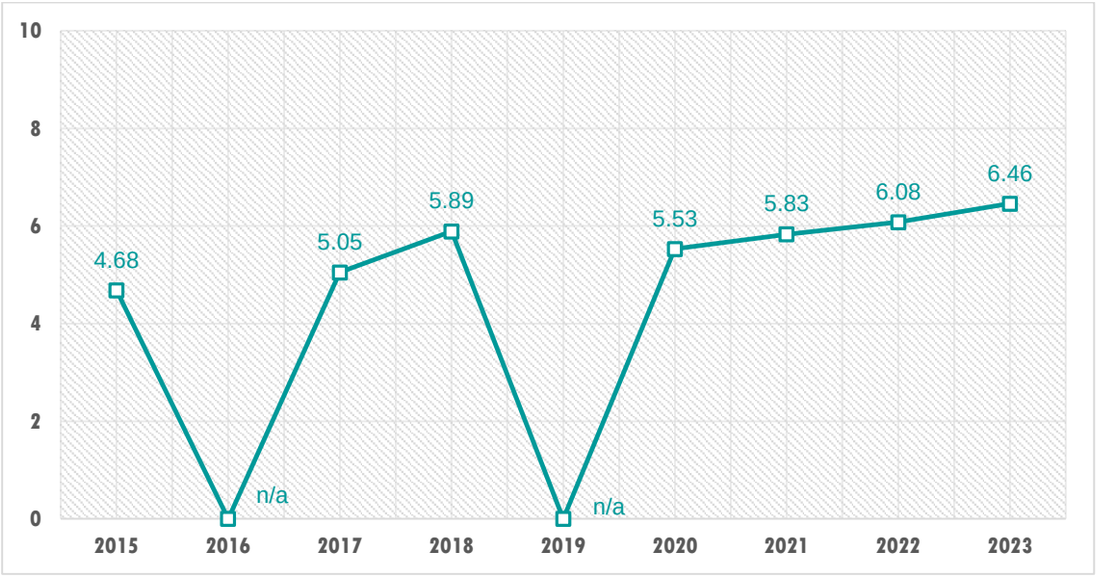
Skor IDSD Kota Bekasi meningkat dari 3,46 menjadi 3,87. Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah di Kota Bekasi mencapai angka 3,87. IDSD Kota Bekasi berada di atas IDSD Provinsi Jawa Barat yang skornya sebesar 3,76 dan juga berada di atas skor IDSD nasional yang skornya sebesar 3,44. Di samping itu, skor IDSD Kota Bekasi juga berada di atas rata-rata skor IDSD kabupaten dan kota di Jawa Barat, dengan rata-rata IDSD sebesar 3,46.

2.3.4.2. Indeks Kota Toleran

Toleransi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, kebiasaan, maupun fisik. Sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap individu dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Penilaian toleransi masyarakat di sebuah kota dapat dilihat dari kinerja pemerintahnya dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Penilaian tersebut selanjutnya disajikan dalam sebuah nilai Indeks Kota Toleran (IKT). Secara definitive Kota Toleran dijabarkan sebagai kota yang memiliki nilai-nilai toleransi pada setiap aspek seperti visi dan rencana pembangunan secara inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan yang rendah, serta memiliki upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mempertimbangkan tiga hal yaitu:

a. paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi;
b. hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional; dan
c. tata kelola pemerintahan yang inklusif.

SETARA Institute merupakan organisasi non-pemerintah yang melakukan perhitungan IKT di Indonesia sejak tahun 2015. Hingga tahun 2023 telah dilakukan penilaian IKT sebanyak 7 kali, kecuali tahun 2016 dan 2019 yang memang tidak dilakukan pengukuran. Selama periode tahun tersebut nilai IKT untuk Kota Bekasi berkisar antara 4,68 sampai 5,89 dengan predikat yang terus meningkat. Pada awal penilaian IKT Kota Bekasi berada pada urutan kedua terbawah (93 dari 94) dari seluruh kota yang dinilai. Sejak saat itu Kota Bekasi terus mengalami peningkatan predikat, diawali dari tahun 2017 yang berada pada posisi 53 hingga tahun 2023 yang berhasil mencapai peringkat ke-2 nasional setelah Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bekasi telah berhasil melakukan inovasi dan terobosan dalam merawat nilai-nilai toleransi baik dilingkungan masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk regulasi, program, hingga pengalokasian anggaranya. Berikut disajikan dinamika nilai IKT di Kota Bekasi tahun 2015 hingga 2023 (**Gambar 2.73**).



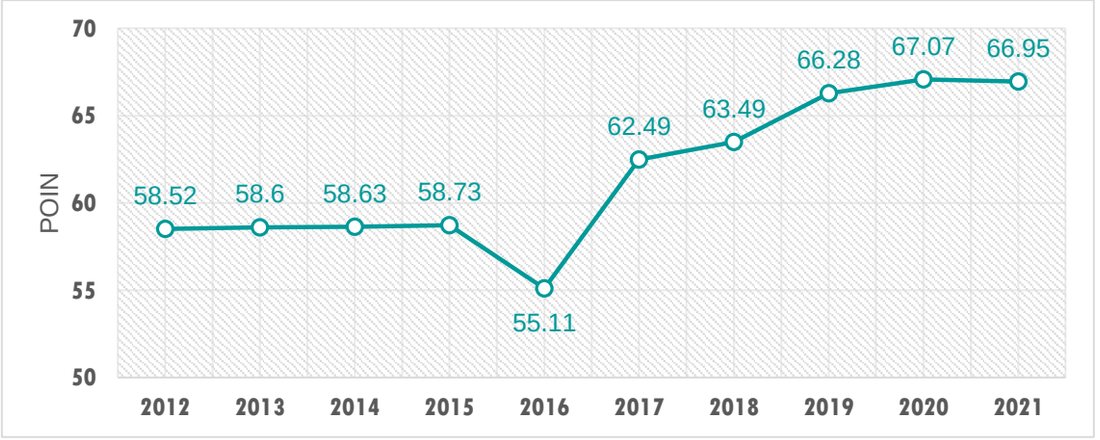
Sumber: Indeks Kota Toleran Tahun 2023 - Setara Institute, 2024
Keterangan: n/a = data tidak tersedia

Gambar 2.73. Indek Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2017-2023

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana instansi mampu memenuhi target yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja instansi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil evaluasi tersebut akan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun juga menggarisbawahi perlunya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja di masa mendatang. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi harapan masyarakat.



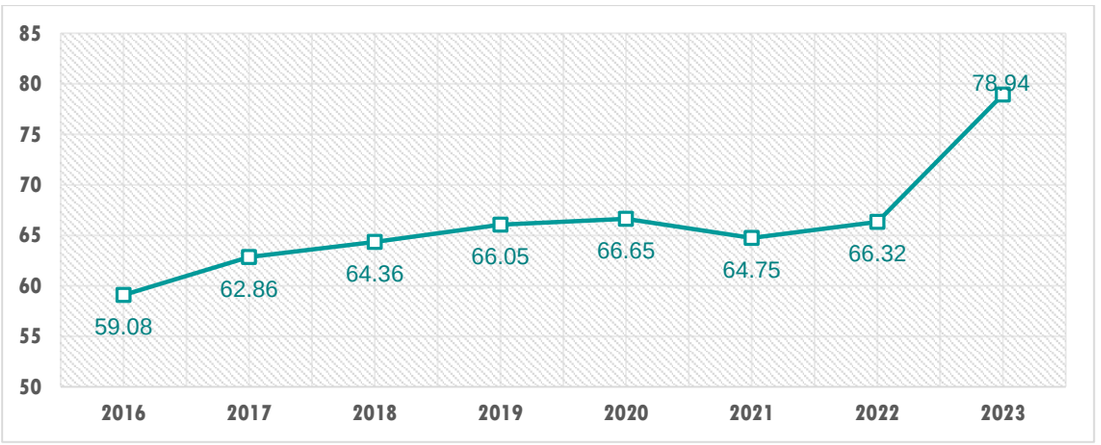
Sumber: Kementrian PAN-RB RI, 2012-2021

Gambar 2.74. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012-2021

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bekasi menunjukkan tren yang positif dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Kondisi tersebut terlihat pada **Gambar 2.74**, dimana hasil penilaian yang diperoleh pada tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitasnya masih rendah dan mendapat predikat CC. Dalam hal ini masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki khusunya dalam transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Bekasi telah membuktikan komitmennya untuk melakukan perbaikan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik sehingga hasil penilaian tersebut pada tahun 2016 hingga 2021 meningkat menjadi cukup akuntabel dengan predikat B. Predikat tersebut menilai bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Instansi dengan predikat ini dinilai telah mampu memenuhi sebagian besar kriteria yang diharapkan, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Meskipun telah dilakukan langkah-langkah positif oleh instansi pemerintah Kota Bekasi, namun masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi, seperti predikat A atau AA.

2.4.2. Reformasi Birokrasi

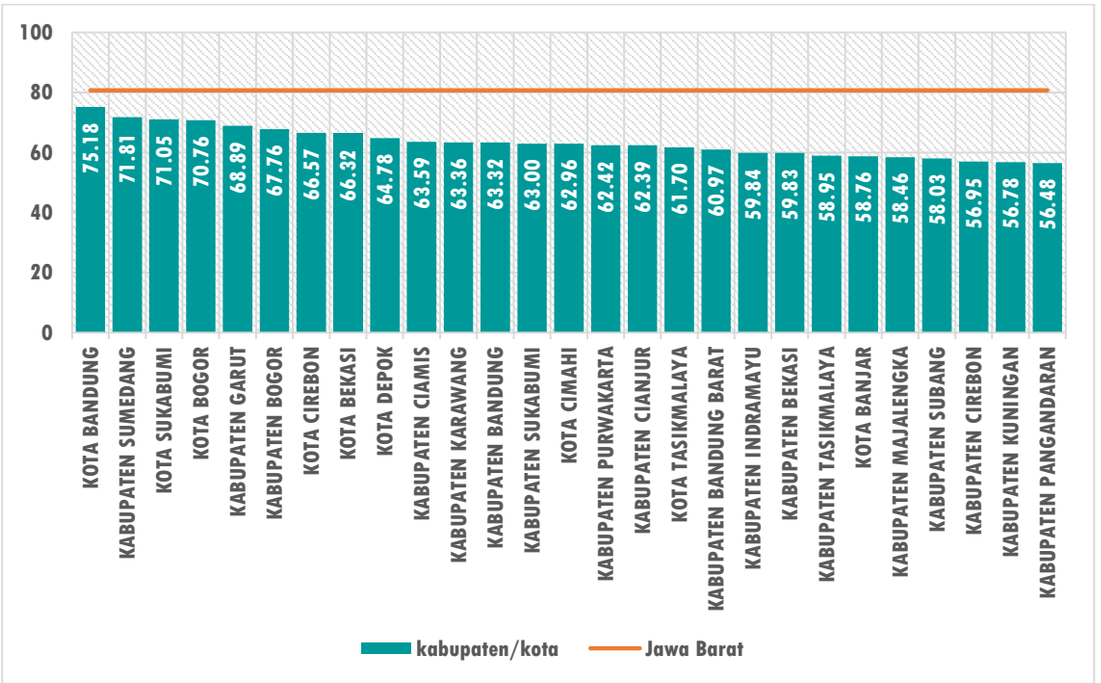
Reformasi birokrasi diperlukan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi yang baik. Tidak hanya pada kegiatan yang bersifat administratif namun juga yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat terutama dalam bidang pelayanan publik. Manfaat reformasi birokrasi bagi pemerintah secara khusus dapat mendorong dalam meningkatkan kinerja dan mencegah tindakan penyimpangan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sementara bagi masyarakat tentunya akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah melalui kegiatan partisipasi serta mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam menghitung Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) diantaranya adalah: (i) Kualitas perumusan dan penetapan kebijakan; (ii) Kualitas kinerja pelaksanaan kebijakan; (iii) Kualitas kinerja pelayanan publik; (iv) Kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (v) Kualitas penguatan kapasitas kelembagaan; (vi) Kualitas tata Kelola pemerintahan; (vii) Kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan; dan (viii) kualitas budaya organisasi. Keseluruhan aspek tersebut akan menghasilkan nilai indeks yang selanjutnya akan dijadikan dasar penilaian reformasi birokrasi dari kategori sangat tidak baik hingga baik.



Sumber: KLHS RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016; Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022; Keputusan Walt Kota Bekasi Nomor: 060/Kep.213-Org/V/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024

Gambar 2.75. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2016-2023

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Bekasi secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Pada tahun 2016-2018 Kota Bekasi mendapatkan predikat cukup baik (CC), dimana masih perlu banyak perbaikan namun pada hal-hal yang tidak mendasar. Kondisi tersebut terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2019-2022 yang memperoleh predikat baik (B) dengan sedikit perbaikan. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat kembali hingga mendapat predikat BB dengan nilai indeks sebesar 78,94 poin. Dinamika nilai indeks reformasi birokrasi Kota Bekasi disajikan pada **Gambar 2.75**.



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat No 26 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2026

Gambar 2.76. Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Kota Bekasi menempati urutan ke-8 pada tahun 2022 di lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam memperoleh Indek Reformasi Birokrasi dengan nilai indeks sebesar 66,32 (B). Untuk meningkatkan peringkat tersebut diperlukan upaya dengan menerapkan birokrasi yang adaptif sesuai dengan perkembangan global yang mampu merespon dengan cepat perubahan dinamika sosial di kalangan masyarakat. Reformasi ini diharapkan mampu merubah birokrasi yang dulunya berbasis aturan menjadi birokrasi yang mengarah pada masa depan yang mampu menguatkan kinerja, memiliki

dampak yang lebih besar, kolaboratif, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Kondisi ini tentunya akan mendukung Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan kategori sangat baik (A) pada tahun 2022. Perbandingan nilai indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar 2.76**.

2.4.3. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Salah satu perwujudan reformasi birokrasi pada pemerintahan Kota Bekasi juga dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan secara profesional dari pemeriksa keuangan daerah terkait kewajaran laporan keuangan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan lainnya. Adapun penilaian tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi yang relevan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap publik. Adapun hasil penilaian opini tersebut digolongkan menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Hasil penilaian opini BPK terhadap Kota Bekasi mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2023. Sejak tahun 2017 hingga 2021 Kota Bekasi mendapat nilai WTP yang merupakan peringkat terbaik untuk sistem keuangan pemerintah daerah. Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan telah sesuai dalam semua hal. Sementara pada tahun 2022-2023 menurun menjadi WDP. Meskipun pemerintah Kota Bekasi telah berupaya memperbaiki keuangan daerahnya namun BPK masih menemukan permasalahan yang signifikan terhadap beberapa hal. Dengan demikian maka perlu usaha keras agar dapat berubah menjadi WTP kembali.

Tabel 2.31. Perkembangan Opini BPK terhadap LKPD Kota Bekasi tahun 2017-2022

No	Tahun	Opini BPK
1	2017	WTP
2	2018	WTP
3	2019	WTP
4	2020	WTP
5	2021	WTP
6	2022	WDP
7	2023	WDP

Sumber: BPK RI, 2023

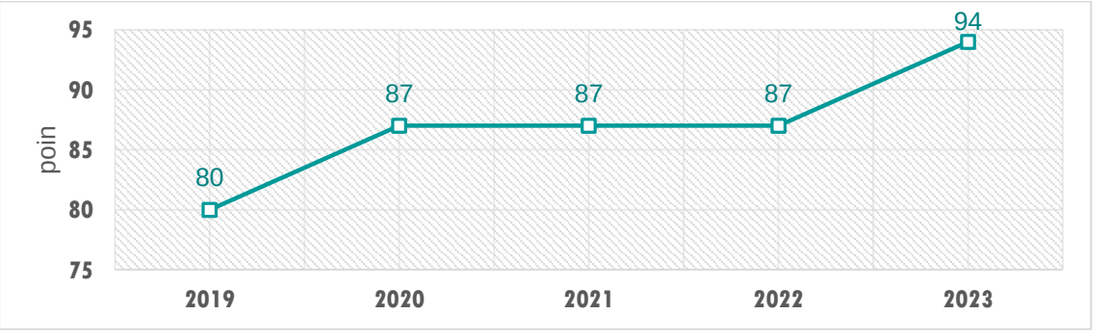
2.4.4. Pencegahan Korupsi

Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kota Bekasi telah menjadi perhatian utama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegiatan yang berindikasi dan berpotensi merusak sistem tata Kelola pemerintahan yang baik. Praktek korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat laten sehingga harus diantisipasi sejak dini melalui peningkatan pengawasan. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai sosialisasi tentang gratifikasi, saber pungli, penanganan benturan kepentingan, dan kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN dan LHKASN.

Penilaian pencegahan korupsi di Kota Bekasi dapat dilihat melalui Indeks Pencegahan Korupsi (MCP). Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya untuk memperkuat tata Kelola pemerintahan dalam mencegah korupsi. Adapun dinamika nilai Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) di Kota Bekasi disajikan pada grafik berikut.

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terjadi dinamika pencegahan korupsi di Kota Bekasi sejak nilai Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) diluncurkan. Diawali pada tahun 2019 dengan nilai indeks

sebesar 80 poin. (sangat baik) dan terus meningkat dengan status yang sama. Nilai Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) tinggi menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang kuat dalam mencegah korupsi. Harapan dari adanya penilaian Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) di Kota Bekasi yaitu agar dapat meningkatkan pencegahan korupsi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kepercayaan publik.



Sumber: KPK RI, 2023

Gambar 2.77. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Kota Bekasi Tahun 2019-2023

2.4.5. Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pelayanan publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi. Penilaiam IPP didasarkan pada enam aspek yaitu (i) Kebijakan pelayanan; (ii) Profesionalisme SDM; (iii) Sarana dan Prasarana; (iv) Sistem informasi dan komunikasi; (v) Konsultasi dan pengaduan; dan (vi) Inovasi. Saat ini di Kota Bekasi peningkatan kualitas pelayanan publik belum merata di selurut OPD. Beberapa perangkat daerah telah mampu memberikan pelayanan yang baik, namun disisi lain masih terdapat perangkat yang belum memuaskan publik.

Secara umum pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi telah berhasil mendapat predikat kualitas tertinggi zona hijau kategori A dengan nilai 91,86 poin dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan oleh OMBUSDMAN RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian yang diberikan tersebut meliputi aspek pelayanan dalam bidang kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan, dan sosial kemasyarakatan. Prestasi yang diperoleh ini merupakan bukti nyata bahwa Kota Bekasi mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dalam mempertahankan predikat dan pelayanan maksimal Pemerintah Kota Bekasi akan terus berupaya untuk melakukan evaluasi dalam penerapan pelayanan serta meningkatkan program yang sudah berjalan.

Penilaian pelayanan publik tidak hanya dinilai dari sisi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, namun juga dapat dilihat dari kepuasan masyarakat. Melalui hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diselenggarakan internal oleh Unit Penyelenggara Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi semester I tahun 2023, secara umum Pemerintah Kota Bekasi memperoleh predikat baik dengan nilai IKM 85,99 poin. Hasil ini telah selaras dengan penilaian IPP dari sisi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Secara rinci berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor: 067/Kep.552.1/Setda.Org/VII/2022 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bekasi Semester 1 Tahun 2022 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dari survei yang telah dilaksanakan oleh 95 Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi pada tahun 2022 diketahui rata-rata baik (dengan nilai rata-rata 85,79) dan terdapat 8 (delapan) Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mendapat nilai kinerja pelayanan sangat baik, sebagaimana tertera di dalam **Tabel 2.32** berikut.

Tabel 2.32. Unit Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Nilai Sangat Baik pada Semester 1 Tahun 2022

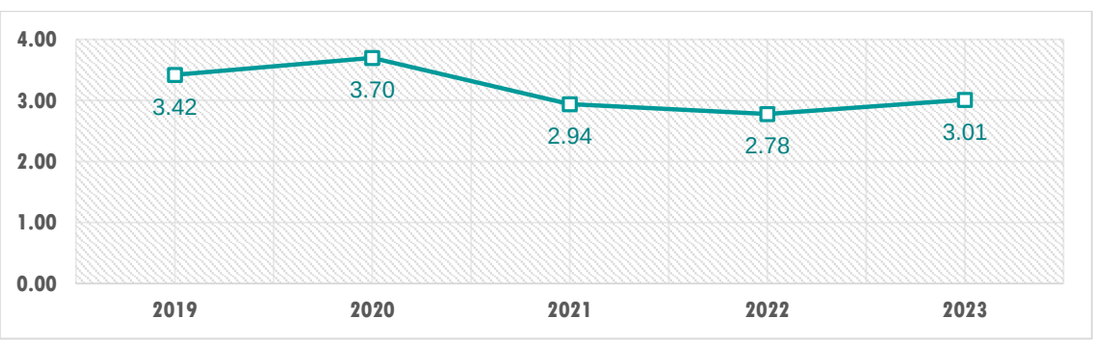
No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai IKM Semester 1 Tahun 2022	Kinerja Pelayanan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,74	Sangat Baik
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	92,34	Sangat Baik
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	91,77	Sangat Baik
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	88,79	Sangat Baik
5	Kecamatan Jatisampurna	90,1	Sangat Baik
6	RSUD Kelas D Jatisampurna	92,04	Sangat Baik
7	RSUD Kelas D Pondokgede	97,71	Sangat Baik
8	Puskesmas Sumurbatu	94,44	Sangat Baik

Sumber: Setda Kota Bekasi, 2022

2.4.6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Salah satu upaya dalam mewujudkan reformasi birokrasi pada sistem pemerintahan yaitu dengan membuat komitmen dan perencanaan di bidang teknologi dan komunikasi (TIK). Hal tersebut dapat ditempuh melalui modernisasi birokrasi pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK). Pemanfaatan teknologi dan komunikasi (TIK) di pemerintahan atau yang disebut sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mendukung fungsi dan layanan yang ada dalam pemerintahan saat ini. Kualitas SPBE dalam sistem pemerintahan dapat diukur dengan nilai indeks SPBE. Semakin tinggi nilai indeks SPBE menunjukkan sistem tersebut semakin baik dalam pelaksanaanya. Predikat indeks SPBE dimulai dari status kurang hingga memuaskan.

Kota Bekasi dalam menjalankan SPBE secara umum selalu mendapat predikat baik, meskipun poin yang diperoleh fluktuatif. Pada tahun 2020 Kota Bekasi sempat mendapatkan predikat SPBE sangat baik dengan nilai indeks sebesar 3,70 poin, namun setelah itu mengalami penurunan menjadi predikat baik hingga tahun 2023. Kondisi tersebut tentunya akan menjadi bahan evaluasi agar dapat meningkatkan predikatnya kembali. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah Kota Bekasi berkomitmen dalam mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang inovatif dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Harapanya dengan langkah tersebut kualitas dan jangkauan layanan publik kepada masyarakat akan meningkat. Komitmen tersebut telah tercermin dari kecenderungan nilai indeks SPBE yang diperoleh pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 0,23 poin dari tahun sebelumnya. Dinamika nilai indeks SPBE Kota Bekasi tahun 2019-2023 disajikan pada **Gambar 2.78**.

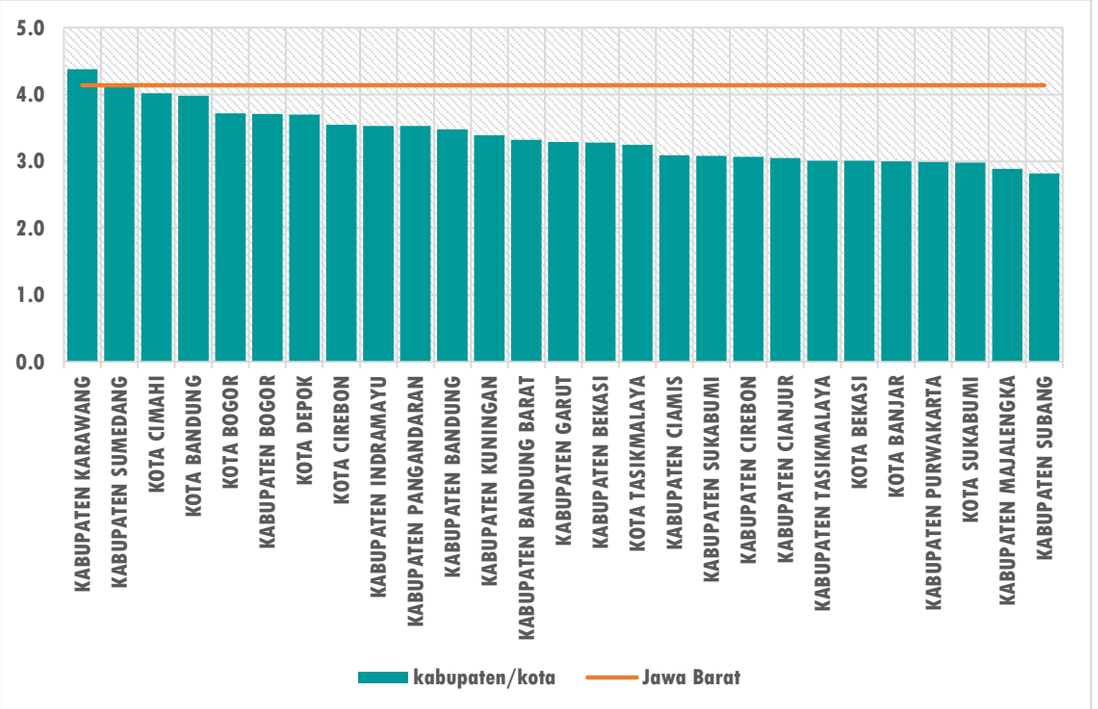


Sumber: Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Gambar 2.78. Indeks SPBE Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Upaya Kota Bekasi dalam meningkatkan predikat indeks SPBE diharapkan dapat mengubah posisi Kota Bekasi saat ini di Provinsi Jawa Barat yang menempati urutan ke-22 dari 27 kabupaten/kota yang ada. Selain upaya yang bersifat perbaikan sistem pemerintahan juga diperlukan upaya yang

bersifat teknis. Langkah pertama yang perlu diperbaiki yaitu perbaikan arsitektur SPBE yang berkaitan dengan bisnis proses, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan, dan skala serta kompleksitas sistem. Perubahan predikat SPBE Kota Bekasi juga akan mendukung predikat SPBE Provinsi Jawa Barat dalam mempertahankan atau meningkatkan prestasinya saat ini. Secara lengkap nilai indeks SPBE di seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.79 berikut.



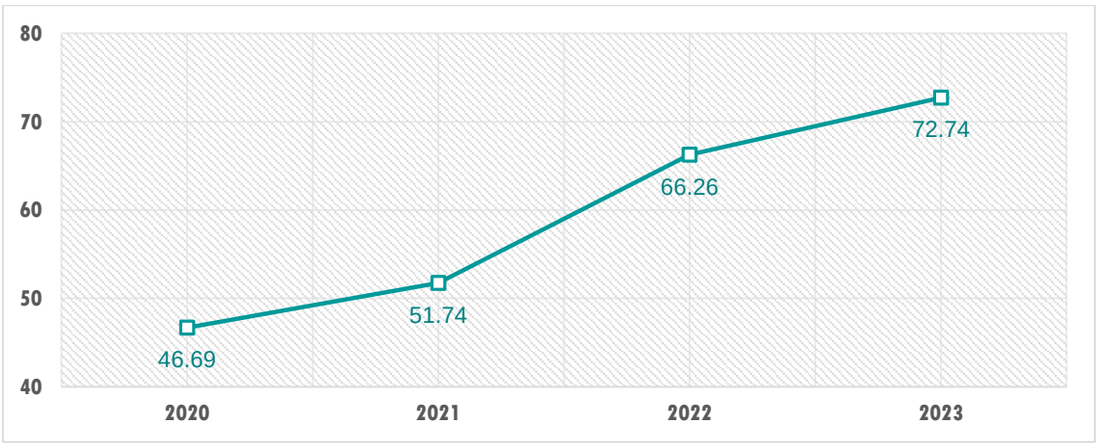
Sumber: Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Gambar 2.79. Perbandingan Indeks SPBE Tahun 2023

2.4.7. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja. Inovasi tersebut dapat dilakukan dalam sistem tata kelola pemerintah, pelayanan publik, dan segala urusan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainya. Setiap pemerintah daerah wajib melakukan inovasi agar dapat memiliki daya saing yang lebih baik dengan daerah sekitarnya. Selain itu juga dapat mempercepat pembangungan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Prestasi daerah dalam meningkatkan inovasi dapat diukur dengan indeks inovasi daerah. Adapun predikat yang diberikan kepada suatu daerah dimulai dari sangat inovatif hingga tidak inovatif. Penilaian ini dilakukan untuk pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota.

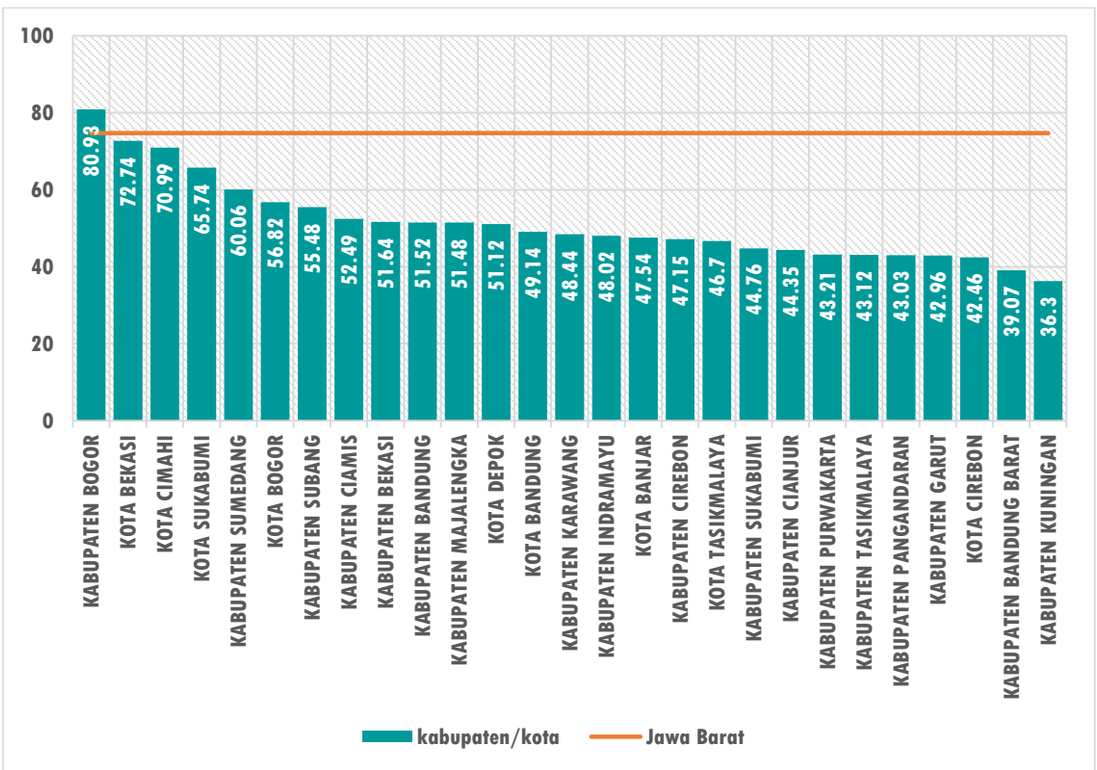
Pemerintah Kota Bekasi selama empat tahun terakhir telah menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan inovasi daerah. Sejak tahun 2020 terlihat nilai indeks inovasi daerah yang diperoleh selalu meningkat dan mendapat predikat kota sangat inovatif. Hasil penilaian tahun 2022 dalam ajang *Innovation Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri mampu membawa Kota Bekasi dalam mendapat penghargaan sebagai Kota Terinovatif 5 besar di Indonesia. Jenis inovasi yang selalu diunggulkan pemerintah Kota Bekasi yaitu pelayanan adminduk secara online, jemput bola pelayanan kependudukan bagi lansia dan disabilitas, layanan kesehatan berbasis online, dan pemberdayaan UMKM yang melibatkan kaum difabel. Perkembangan nilai indeks inovasi daerah di Kota Bekasi dari tahun 2020-2023 disajikan pada Gambar 2.80.



Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2023

Gambar 2.80. Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2020-2023

Selanjutnya, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan kinerjanya yang baik di lingkungan kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dengan menempati urutan kedua daerah yang mendapatkan nilai indeks inovasi daerah tertinggi. Nilai indeks yang diperoleh sebesar 72,74 poin, selisih 8,19 poin dengan Kabupaten Bogor yang menempati urutan pertama kabupaten yang sangat inovatif di Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, pemerintah Kota Bekasi masih perlu terus meningkatkan usaha kearah yang lebih baik dalam mewujudkan kota yang lebih inovatif. Usaha ini juga diperlukan untuk mempertahankan prestasi yang saat ini diperoleh. Adapun usaha yang dapat dilakukan tidak hanya sebatas inovasi dalam sistem tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik namun juga dalam urusan birokrasi yang akan menjadi budaya sehari-hari di setiap instansi pemerintahan. Budaya inovasi yang kuat yang terbentuk secara organik dalam menjalankan birokrasi dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bekasi mendatang. Berikut **Gambar 2.81** disajikan nilai indeks inovasi daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor.400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023

Gambar 2.81. Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

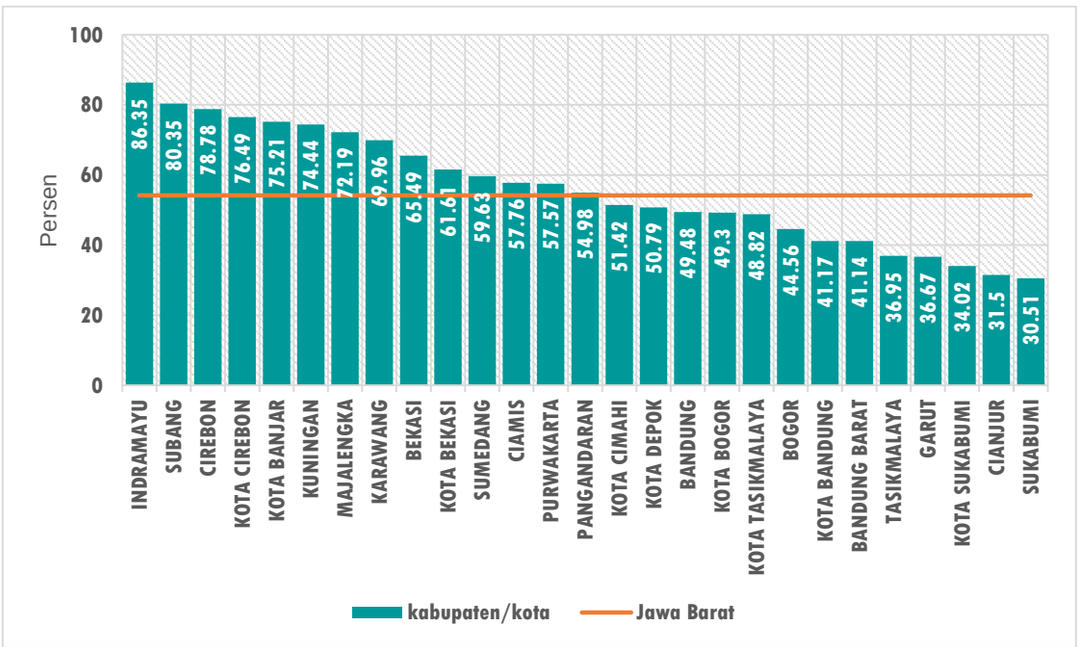
2.4.8. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman merupakan bagian dari indikator urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun pelayanan dasar dalam infrastruktur perumahan dan permukiman yang harus dipenuhi diantaranya hunian layak, sanitasi aman, dan air minum layak.

Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan ruang yang cukup bagi penghuninya. Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah hunian yang telah layak bagi penduduk Kota Bekasi dalam satuan persen. Adapun kriteria hunian layak ini meliputi:

i. Keamanan bangunan, dimana secara konstruksi memiliki bangunan yang kokoh dan tahan terhadap bencana alam, memiliki akses dan sirkulasi udara yang baik, serta aman dari resiko kebakaran dan gangguan Listrik;
ii. Kecukupan luas bangunan, standar minimal yang ditetapkan yaitu 7,2 m^2 per orang;
iii. Memiliki akses air minum yang layak; dan
iv. Lingkungan didukung dengan sistem sanitasi yang memadai.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan hunian layak di Kota Bekasi sebesar 61,61 persen, berada pada urutan ke-10 dari 27 kabupaten/kota. Masih terdapat gap sebesar 38,39 persen untuk mencapai kondisi hunian yang ideal bagi penduduk Kota Bekasi. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang lebih besar oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan melibatkan banyak pihak termasuk swasta dalam menciptakan hunian yang lebih baik lagi. Meskipun demikian jumlah persentase rumah tangga hunian layak di Kota Bekasi masih lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Jawa Barat (54,17 persen).



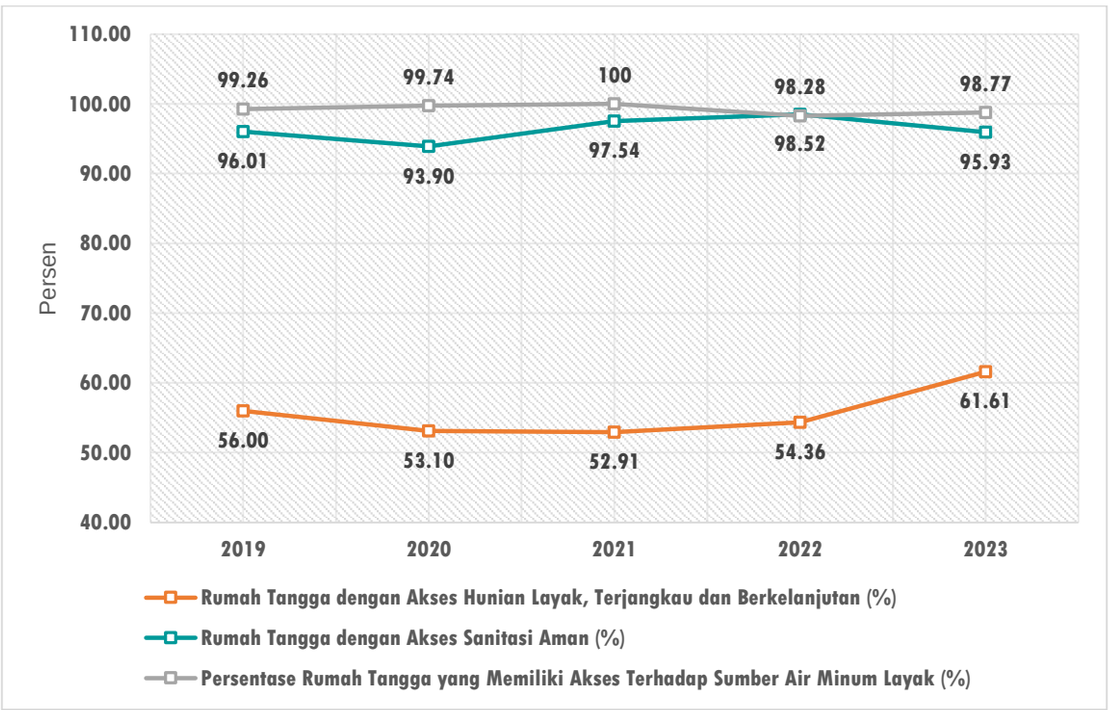
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.82. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2023

Dalam menciptakan hunian yang layak diperlukan dukungan infrastruktur lainya seperti sistem sanitasi dan akses terhadap air minum. Adapun kriteria sanitasi aman ini didukung oleh kondisi dimana setiap rumah telah memiliki jamban pribadi yang terhubung dengan tangki septik sehingga tidak mencemari lingkungan. Sanitasi yang aman akan dapat mendukung kesehatan masyarakat, menghindarkan dari penyakit, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kondisi rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Bekasi sejak tahun 2019 hingga 2023 terpantau mengalami fluktuasi yang tidak signifikan, namun secara umum masih dalam kriteria baik karena jumlahnya selalu di atas 90 persen. Kondisi tahun 2023 jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman

sebesar 95,93 persen. Hal ini berarti hampir 96 persen rumah tangga di Kota Bekasi kondisi sanitasinya sudah baik, meskipun demikian masih diperlukan usaha sedikit lagi untuk mencapai kondisi rumah tangga yang ideal dari aspek sanitasi bagi seluruh rumah tangga di Kota Bekasi.

Aspek selanjutnya yaitu akses terhadap sumber air minum yang layak. Dinamika yang terlihat dari tahun 2019 sampai 2021selalu dalam kondisi baik dengan jumlah diatas 95 persen, bahkan pada tahun 2021 mencapai 100 persen. Kondisi saat ini jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak di Kota Bekasi mencapai 98,77 persen. Hal ini berarti sudah hampir keseluruhan rumah tangga di Kota Bekasi telah mendapatkan kemudahan dalam mengakses sumber air yang layak untuk minum. Pemerintah hanya perlu menambah sedikit usaha untuk mencapai 100 persen. Dinamika terhadap tiga infrastruktur utama dalam mendukung lingkugan perumahan dan permukiman di Kota Bekasi disajikan pada Gambar 2.83



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Gambar 2.83. Persentase infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman di Kota Bekasi tahun 2019-2023

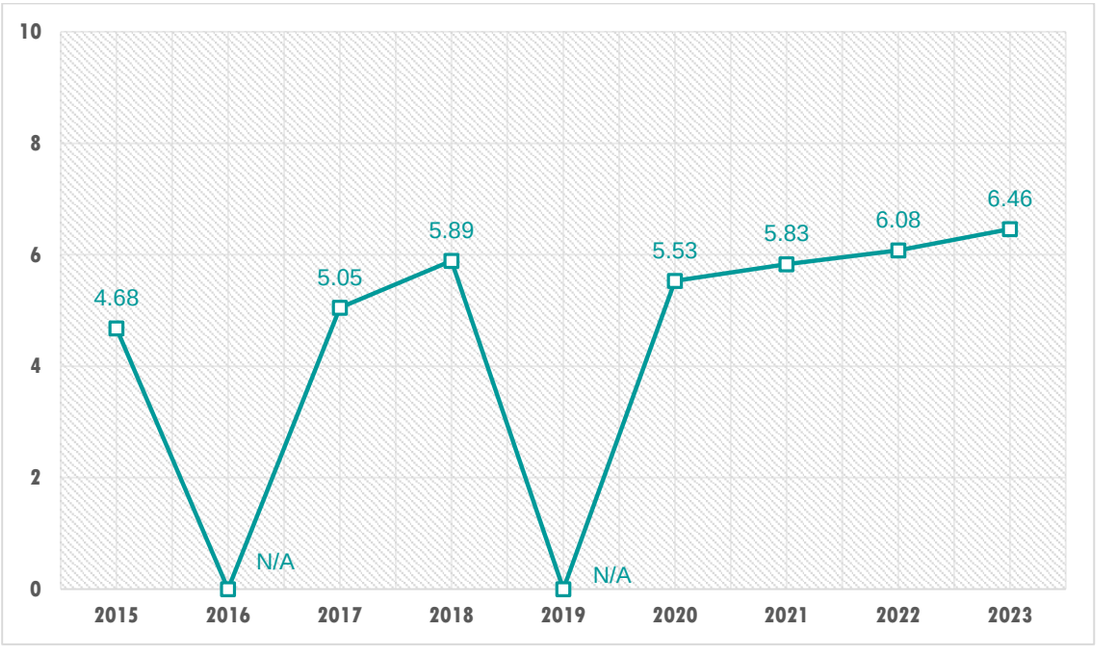
2.4.9. Indeks Kota Toleran

Toleransi memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat untuk menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, kebiasaan, maupun fisik. Sikap toleransi yang dimiliki oleh setiap individu dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Penilaian toleransi masyarakat di sebuah kota dapat dilihat dari kinerja pemerintahnya dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial. Penilaian tersebut selanjutnya disajikan dalam sebuah nilai Indeks Kota Toleran (IKT). Secara definitive Kota Toleran dijabarkan sebagai kota yang memiliki nilai-nilai toleransi pada setiap aspek seperti visi dan rencana pembangunan secara inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/keyakinan yang rendah, serta memiliki upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mempertimbangkan tiga hal yaitu:

d. paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi;
e. hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional; dan
f. tata kelola pemerintahan yang inklusif.

SETARA Institute merupakan organisasi non-pemerintah yang melakukan perhitungan IKT di Indonesia sejak tahun 2015. Hingga tahun 2023 telah dilakukan penilaian IKT sebanyak 7 kali, kecuali

tahun 2016 dan 2019 yang memang tidak dilakukan pengukuran. Selama periode tahun tersebut nilai IKT untuk Kota Bekasi berkisar antara 4,68 sampai 5,89 dengan predikat yang terus meningkat. Pada awal penilaian IKT Kota Bekasi berada pada urutan kedua terbawah (93 dari 94) dari seluruh kota yang dinilai. Sejak saat itu Kota Bekasi terus mengalami peningkatan predikat, diawali dari tahun 2017 yang berada pada posisi 53 hingga tahun 2023 yang berhasil mencapai peringkat ke-2 nasional setelah Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bekasi telah berhasil melakukan inovasi dan terobosan dalam merawat nilai-nilai toleransi baik dilingkungan masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk regulasi, program, hingga pengalokasian anggaranya. Berikut disajikan dinamika nilai IKT di Kota Bekasi tahun 2015 hingga 2023 (**Gambar 2.84**).

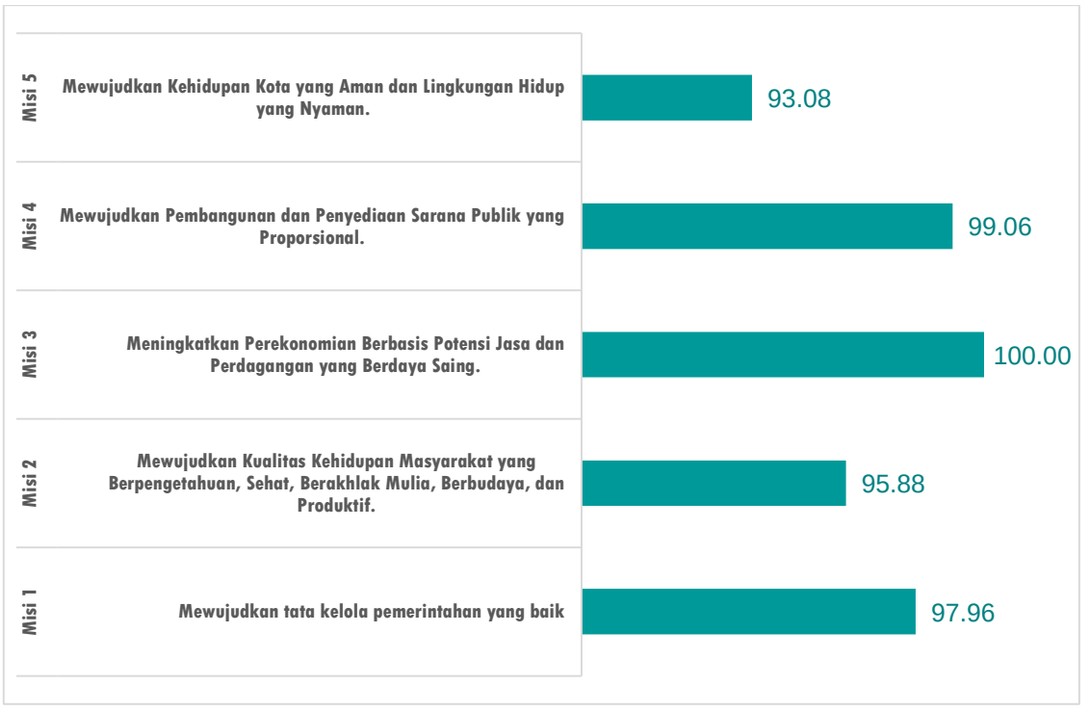


Sumber: Indeks Kota Toleran Tahun 2023 - Setara Institute, 2024

Gambar 2.84. Indek Kota Toleran Kota Bekasi Tahun 2017-2023

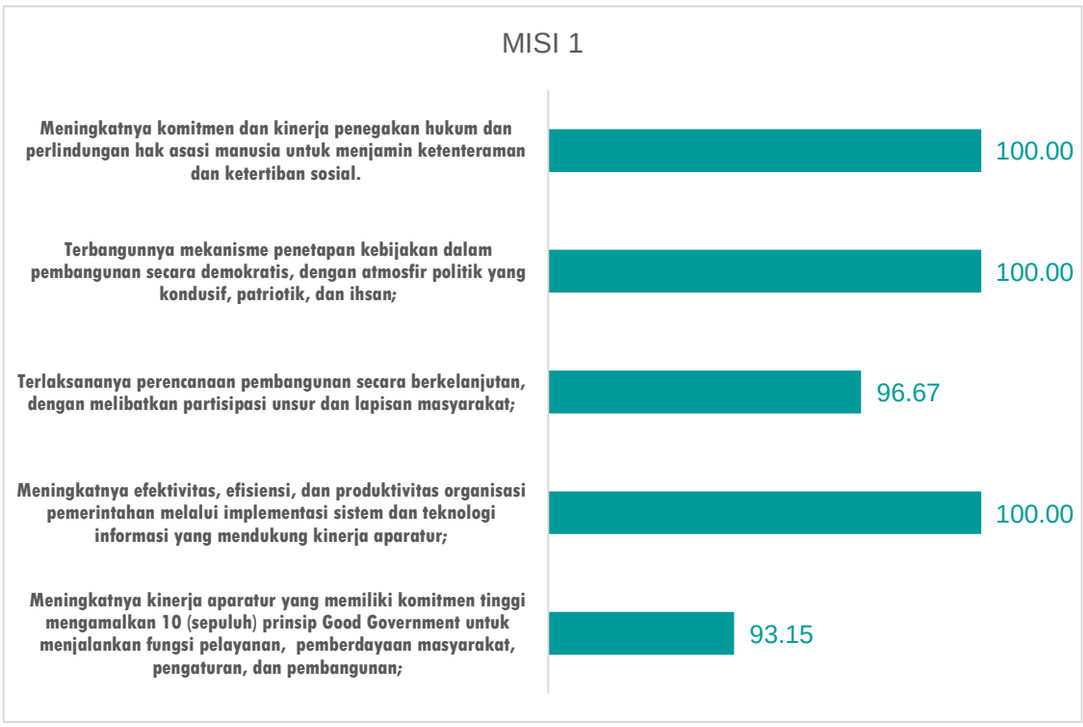
2.5. Hasil Evaluasi RPJP Daerah Kota Bekasi 2005-2025

Salah satu kajian dokumen untuk menunjang keselarasan yaitu dengan menelaah hasil evaluasi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025. Terdapat beberapa bagian penting yang dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 salah satunya adalah apakah semua misi yang ada di dalam RPJPD telah berhasil dilaksanakan dan memenuhi target capaian. Dari lima misi yang ada dalam RPJPD Tahun 2005-2025, hampir semua misi menunjukkan capaian di atas 95 persen. Satu misi yang berada di bawah misi lainnya yaitu Misi 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Kota yang Aman dan Lingkungan Hidup yang Nyaman. Namun misi tersebut masih menunjukkan nilai yang baik karena berada dinilai 93,08 persen.



Gambar 2.85. Capaian Indikator Berdasarkan Misi

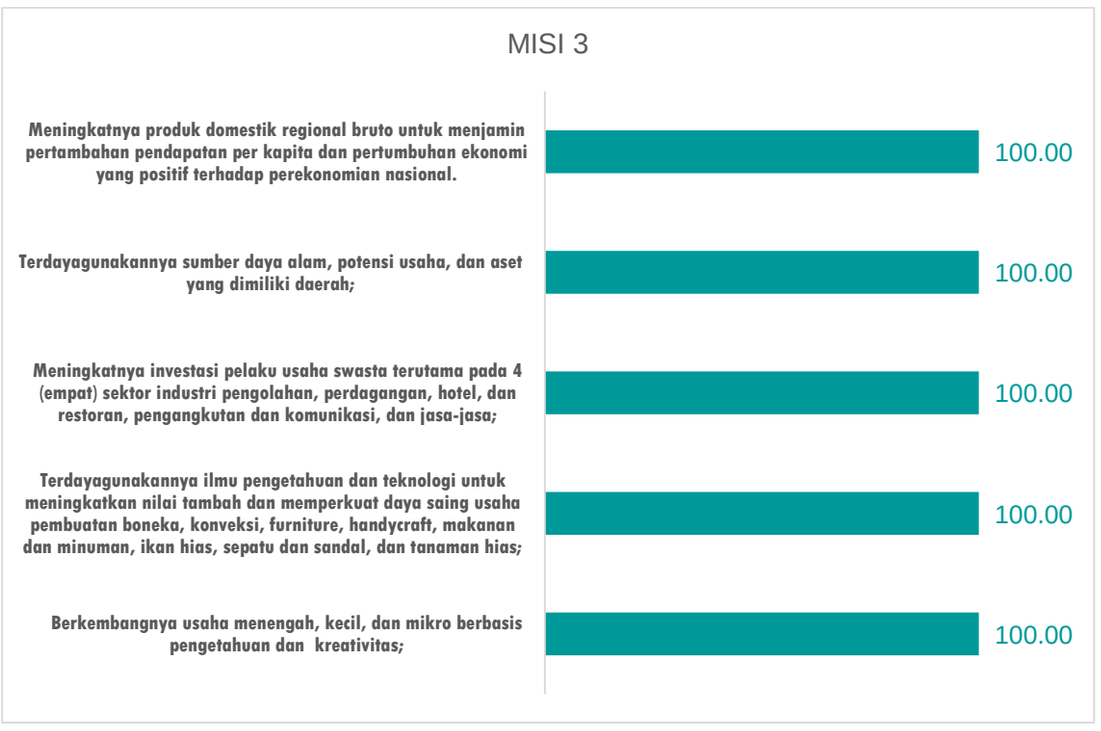
Masing-masing misi memiliki sejumlah sasaran pokok yang disertai dengan indikator operasional yang dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Terdapat 37 sasaran pokok yang tersebar di lima misi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025. Dari 37 sasaran pokok tersebut, hampir semua sasaran pokok memiliki nilai pencapaian di atas 80 persen. Hanya satu sasaran pokok yang memiliki nilai capaian sebesar 74,14 persen yaitu sasaran pokok Terkendalinya Potensi Dan Dampak Lingkungan Hidup yang berada pada Misi 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Kota yang Aman dan Lingkungan Hidup yang Nyaman. Walaupun memiliki nilai capaian yang baik, namun isu lingkungan hidup perlu menjadi perhatian penting dalam rumusan RPJPD selanjutnya. Capaian sasaran pokok berdasarkan masing-masing misi, selanjutnya ditunjukkan pada gambar-gambar berikut.



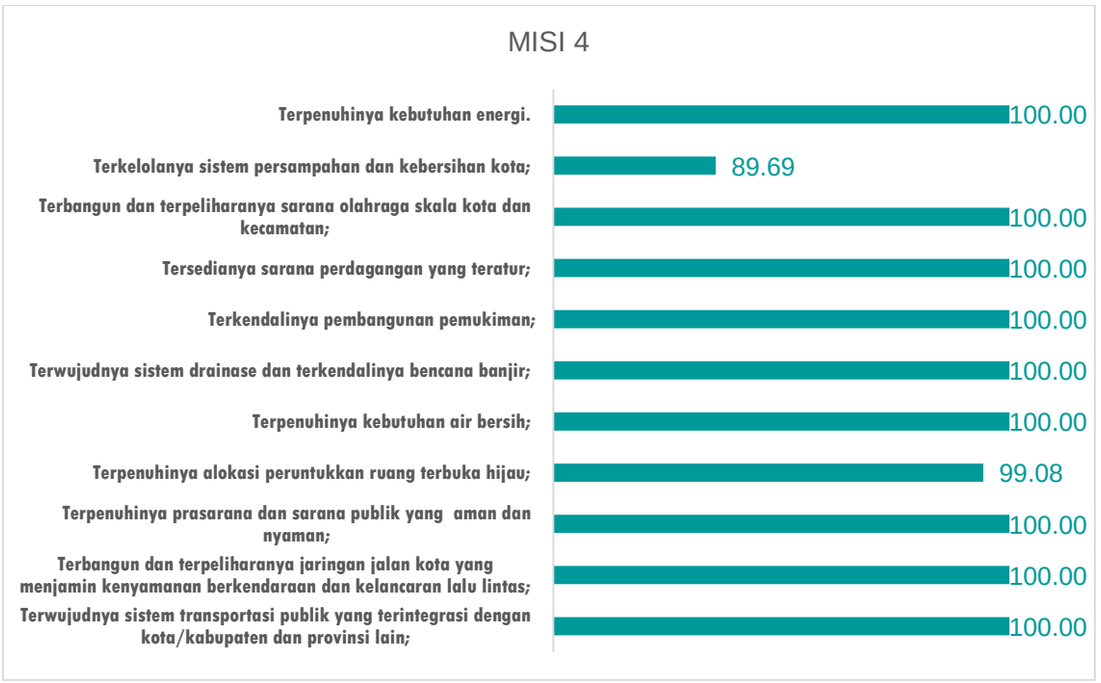
Gambar 2.86. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 1



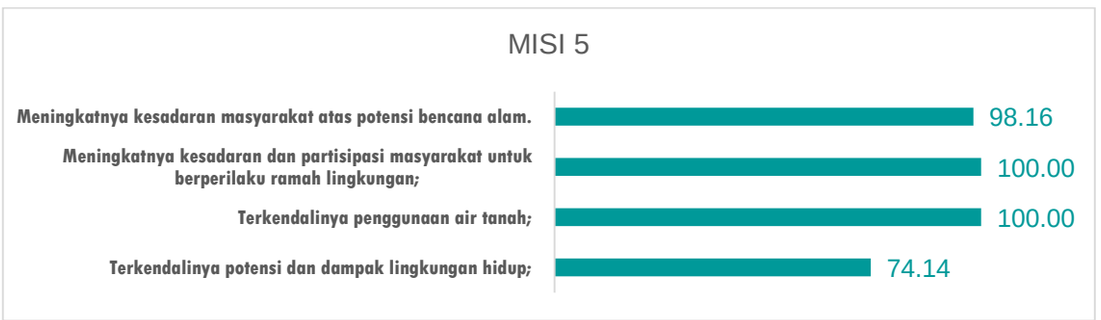
Gambar 2.87. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 2



Gambar 2.88. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 3



Gambar 2.89. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 4



Gambar 2.90. Capaian Sasaran Pokok pada Misi 5

Selain menunjukkan ketercapaian pada sasaran pokok dan misi, hasil evaluasi mencermati juga permasalahan atas hasil pencapaian secara keseluruhan pelaksanaan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025. Terdapat lima permasalahan umum sebagai berikut:

1. Penerjemahan visi dan misi RPJPD ke dalam RPJMD masih belum optimal. Banyaknya indikator kinerja yang tidak diakomodir secara kontinu dalam setiap periode RPJMD. Terdapat potensi pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang menghambat pencapaian sasaran pokok dan kebijakan RPJPD.
2. Meskipun Bekasi termasuk daerah yang memiliki Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang tinggi, pendanaan pembangunan masih menjadi masalah. Pelaksanaan visi dan misi RPJPD terhambat karena keterbatasan anggaran.
3. Perubahan kewenangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) mempengaruhi capaian kinerja RPJPD. Beberapa kewenangan yang awalnya menjadi kewenangan Kota Bekasi beralih ke tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan perubahan ini, pemenuhan capaian sasaran kebijakan pada kewenangan yang berpindah ini tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
4. Keterbatasan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi capaian kinerja. Berakibat menyulitkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menentukan target kinerja serta pengukuran capaian kinerja.
5. Dampak pandemik ini sangat luas yang pada akhirnya memaksa Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan refocusing anggaran belanja pemerintah. Fokus pada penanganan pandemik ini, memperlambat pencapaian target kebijakan dalam RPJPD.

Atas permasalahan di atas, dirumuskan rekomendasi yang meliputi rekomendasi umum dan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi umum yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan sektor pembangunan ekonomi berbasis jasa masih perlu dilanjutkan. Pengembangan ekonomi ini kedepannya tentu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi kreatif.
2. Untuk menjaga konsistensi antara RPJPD dan RPJMD, dibutuhkan instrumen untuk melihat seberapa konsisten visi dan misi calon kepala daerah dengan sasaran dan arah kebijakan RPJPD. Selain itu, diperlukan formulasi indeks untuk indikator-indikator dari pemerintah pusat.
3. Pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan, pemberdayaan ini utamanya untuk memperkuat kesadaran masyarakat terkait beberapa tema seperti: mitigasi lingkungan, keamanan digital, toleransi dan kerukunan.
4. Penguatan kebijakan Bekasi Sehat dengan semakin mengoptimalkan indikator-indikator dan urusan terkait.
5. Selain pertumbuhan ekonomi, fokus berikutnya adalah terkait lingkungan hidup. Kota Bekasi termasuk daerah yang berpotensi mengalami resiko lingkungan yang cukup tinggi. Karenanya, isu ini perlu menjadi perhatian khusus pada RPJPD periode berikutnya.
6. Penyusunan misi, sasaran dan arah kebijakan pada periode RPJPD berikutnya perlu lebih memperhatikan kebijakan nasional dan internasional, terutama terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Karena, belum semua dari 17 TPB terakomodir dalam RPJPD Bekasi.
7. Kebijakan *smart city* perlu mendapat perhatian khusus pada RPJPD periode berikutnya. Kebijakan ini sebagai upaya mengadopsi perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Selanjutnya rekomendasi diberikan hasil evaluasi terhadap kebijakan yaitu terhadap masing-masing misi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.33. Rekomendasi Kebijakan

NO	REKOMENDASI KEBIJAKAN TERHADAP MISI	
MISI 1	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	
1	Penguatan *e-government*	Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan nasional yang sejak beberapa tahun telah dicanangkan baik di level pusat maupun daerah. Perkembangan teknologi serta budaya daring yang telah terbentuk di masa Pandemi Covid 19 menjadikan SPBE sebagai sebuah keharusan di masa depan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi perlu semakin mengintensifkan implementasi SPBE ke depannya.
2	Penguatan sistem beban dan penilaian kinerja	Dalam upaya mengefektifkan pencapaian kinerja pemerintahan, dibutuhkan model pengukuran kinerja yang lebih detail. Bukan hanya pada level institusi, namun juga pada tingkat individual. Beban kerja masing-masing individu perlu dirumuskan dengan jelas. Hal ini sebagai respon terhadap perubahan dalam sistem ASN dimana jabatan struktural pada level eselon 4 dan level eselon 3 akan diganti dengan jabatan fungsional. Dengan beban kerja yang jelas pada setiap individu, mekanisme kerja dengan pola jabatan fungsional ini akan semakin mudah dan efektif.
3	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Keterbatasan SDM dan minimnya anggaran dalam beberapa tahun ke depan tampaknya akan tetap dialami oleh Pemerintah Kota Bekasi. Karena itu, untuk mengoptimalkan capaian pembangunan, partisipasi masyarakat harus semakin diperkuat. Partisipasi masyarakat ini bukan hanya pada tahap perencanaan, namun juga pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
MISI 2	**Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Produktif**	
1	Optimalisasi pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan	Penguatan pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan dengan memenuhi standar mutu dan standar layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2	Penguatan komunitas dan organisasi pemuda	Komunitas dan organisasi pemuda menjadi wadah pengembangan bakat dan minat pemuda di Bekasi. Intensifikasi pembinaan akan melahirkan bakat bakat yang dapat

NO	REKOMENDASI KEBIJAKAN TERHADAP MISI	
		mengharumkan nama Kota Bekasi melalui prestasi berskala provinsi, nasional dan internasional.
MISI 3	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Jasa Dan Perdagangan Yang Berdaya Saing	
1	Memperkuat perekonomian berbasis sektor jasa dan perdagangan	Posisi Kota Bekasi sebagai penyangga Jakarta tetap menjadi potensi besar untuk sektor jasa dan perdagangan. Karenanya, pengembangan di kedua sektor ini perlu terus menjadi perhatian.
2	Optimalisasi Pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan pengetahuan masyarakat, perkembangan teknologi dan perubahan budaya masyarakat telah melahirkan potensi baru dalam ekonomi kreatif.
MISI 4	Mewujudkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Publik yang Proporsional	
1	Penguatan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana sebagai daya ungkit ekonomi	Pembangunan sarana prasarana ke depan perlu lebih diintegrasikan dengan upaya menjaring investasi. Sarana dan prasarana yang dibangun direncanakan dan diarahkan pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.
2	Penguatan sarana dan prasarana transportasi terpadu	Keberadaan MRT dan LRT di Kota Bekasi perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem transportasi terpadu. Dengan cara ini, aktivitas perekonomian di Kota Bekasi akan semakin berkembang.
MISI 5	Mewujudkan Kehidupan Kota yang Aman dan Lingkungan Hidup yang Nyaman	
1	Mitigasi perubahan iklim	Perubahan iklim dalam beberapa tahun ke depan perlu diantisipasi. Langkah-langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan multistakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah
2	Peningkatan kualitas udara, air dan tanah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Bekasi masih belum optimal. Karenanya, langkah-langkah pengurangan pencemaran udara, air dan tanah perlu dilakukan.

Bagian lain yang menjadi masukan penting evaluasi RPJPD terhadap penyusunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 adalah usulan tindak lanjut yang melekat pada masing-masing misi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Peningkatan target sesuai tuntutan reformasi birokrasi dan target nasional, dan SDGs
2. Penyempurnaan target kinerja dan penghitungan kinerja
3. Pelatihan berkala pada OPD terkait penyusunan dan pelaporan indikator kinerja yang diukur dalam SAKIP
4. Penyempurnaan sistem informasi dan sosialisasi pembuktian kegiatan melalui *evidence output* dan proses
5. Mengakomodir indikator EPPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ke dalam dokumen RPJMD di periode berikutnya
6. Optimalisasi infrastruktur pelayanan dan penguatan SDM
7. Penguatan sistem pengukuran kinerja masing-masing OPD serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kegiatan OPD
8. Memperluas partisipasi masyarakat terutama sektor usaha dan kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah
9. Pemetaan dan penyederhanaan peraturan daerah
10. Model sosialisasi yang lebih inovatif
11. Sosialisasi rutin kepada masyarakat

MISI 2 Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Produktif

1. Peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal
2. Penguatan pendataan anak putus sekolah serta optimalisasi skema penjangkauan untuk menyekolahkan kembali anak yang putus sekolah, memaksimalkan pendidikan kesetaraan (PKBM)

3. Melanjutkan program BOS, memperkuat database siswa serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Agama
4. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan
5. Penguatan fasilitas kesehatan dan sumberdaya manusia bidang kesehatan
6. Penguatan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal
7. Penguatan database pemuda, penguatan penjaringan bakat pemuda
8. Kerjasama dengan berbagai pihak untuk pembinaan pemuda di Bekasi
9. Pemberdayaan kelurahan dan kecamatan untuk menjangkau komunitas kreatif
10. Penguatan kerja sama dengan lembaga pembina olahraga
11. Penguatan sekolah dan organisasi masyarakat untuk pembinaan olahraga
12. Mainstreaming kesetaraan gender dalam program pembangunan daerah
13. Memperkuat kerjasama dengan pihak terkait untuk perlindungan perempuan dan anak, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat
14. Memprioritaskan agenda pembangunan pada penanganan PPKS terutama yang terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM)
15. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelibatan organisasi masyarakat
16. Menyesuaikan indikator kinerja dengan kewenangan yang didesentralisasikan
17. Program deradikalisasi
18. Pembinaan dan penyadaran publik
19. Pemulihan ekonomi menjadi prioritas
20. Penguatan UMKM dan sektor usaha lainnya untuk menciptakan lapangan kerja
21. Penguatan program dan kegiatan yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan

MISI 3 Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdaya saing

1. Prioritas pembangunan pada penguatan UMKM serta Peningkatan fasilitasi bagi UMKM Kota Bekasi dalam hal intermediasi dengan perusahaan, permodalan, dan peningkatan kapasitas UMKM
2. Prioritas pembangunan pada penguatan UMKM serta mendorong kerjasama UMKM dengan usaha skala menengah dan besar
3. Menggalakkan pelatihan masyarakat dengan memanfaatkan balai pelatihan
4. Memberikan fasilitas kemudahan investasi bagi dunia usaha
5. Melakukan evaluasi dan kajian kebutuhan pembentukan BUMD
6. Mendorong sektor usaha yang berkontribusi pada PAD
7. Mendorong sektor usaha yang berkontribusi pada PDRB
8. Memfasilitasi penguatan sektor jasa
9. Pengawasan intensif terhadap harga kebutuhan pokok pemicu inflasi

MISI 4 Mewujudkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Publik yang Proporsional

1. Penguatan kelembagaan yang fokus dalam pengembangan sistem transportasi angkutan umum massal
2. Relokasi lokasi terminal regional ke tempat yang lebih representatif
3. Diperlukan penanganan dan pengaturan rekayasa lalu lintas yang terpadu dari semua *stakeholder* terkait sehingga tercipta sistem jaringan angkutan umum transportasi massal yang terintegrasi
4. Pemeliharaan jalan berkala serta pengaturan jalur kendaraan berat
5. Intensifikasi pembebasan sempadan jalan untuk pembangunan trotoar dan drainase pemeliharaan jalan berkala serta pengaturan jalur kendaraan berat
6. Prioritas pada pembangunan infrastruktur sanitasi dan air minum
7. Pemeliharaan infrastruktur jalan dan marka jalan
8. Reviu dan pemutakhiran tata ruang

9. Prioritas pada pembangunan PSU dan intensifikasi serah terima perumahan dari pengembang
10. Peningkatan kualitas dan kemudahan layanan publik
11. Pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi RTH
12. Sosialisasi dan intensifikasi penggunaan air berbasis jaringan perpipaan
13. Penguatan kelurahan dan kecamatan untuk pengawasan air bersih non PDAM
14. Sosialisasi dan intensifikasi penggunaan air berbasis jaringan perpipaan
15. Penguatan infrastruktur drainase
16. Pemeliharaan 2 tower rusunawa yang sudah terbangun
17. Penguatan kerjasama dengan pengembang untuk penataan kawasan permukiman
18. Bantuan kepada masyarakat dan fasilitasi kemudahan pinjaman
19. Pengelolaan memakai pola manajemen yang modern
20. Sosialisasi dan pengalihan bertahap pasar tradisional ke pasar rakyat bersih berbasis modern
21. Selalu mensyaratkan TPS limbah B3 dalam rencana pembangunan
22. Melakukan pentahapan pembangunan-pembangunan TPS3R yang sudah direncanakan
23. Sinkronisasi dengan indikator kinerja provinsi dan pemerintah pusat

MISI 5 Mewujudkan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Publik yang Proporsional

1. Penguatan kebijakan ramah lingkungan
2. Dukungan kebijakan mobil listrik ataupun kendaraan ramah lingkungan
3. Pengendalian sampah dan kualitas air sungai
4. Mengurangi penggunaan air tanah dengan mensyaratkan pembangunan menggunakan air permukaan
5. *Early warning system* bencana seperti banjir dan gempa
6. Memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat
7. Melakukan pelatihan secara berkala dan pemenuhan kebutuhan sarana penanggulangan bencana

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1. Tren Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Data kependudukan merupakan data yang sangat penting utamanya mengenai jumlah penduduk saat ini dan yang akan datang. Kependudukan sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan dan pembangunan saat ini maupun yang akan datang. Semua perencanaan pembangunan sangat ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran, dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Jumlah penduduk yang dibutuhkan tidak hanya berupa data saat ini, melainkan data yang lampau, sehingga dapat memprediksikan data jumlah penduduk yang akan datang atau biasa dikatakan dengan proyeksi penduduk.

Data penduduk 13 tahun terakhir (data tahun 2010 s.d tahun 2023) menjadi dasar dalam perhitungan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistika, kemudian proyeksi penduduk dihitung berdasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan 13 tahun terakhir. Perhitungan proyeksi dilakukan setiap tahun dari tahun 2024 sampai dengan 2045, namun yang ditunjukkan hanya perhitungan pada setiap periode seperti di tahun 2025, 2030, 2035, 2040, hingga 2045 serta tahun dasar/eksisiting di tahun 2023.

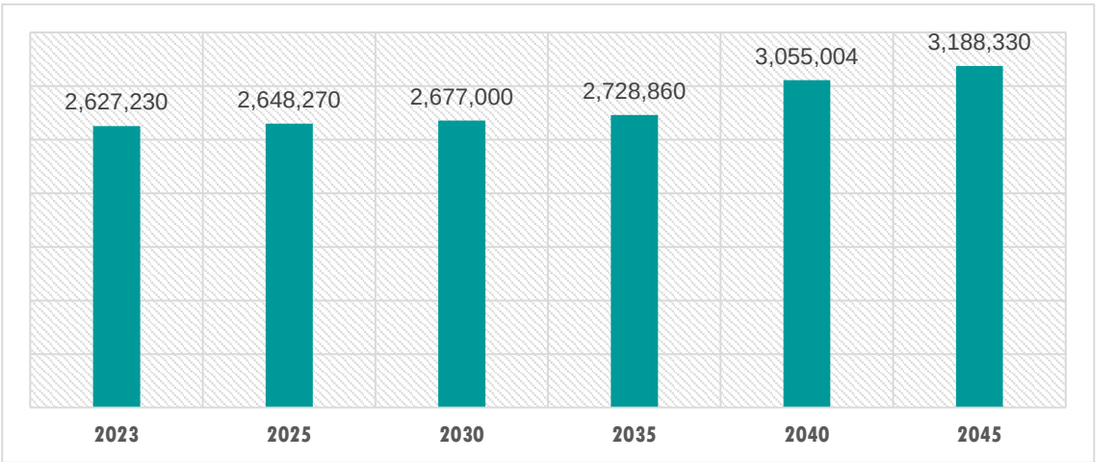
Berdasarkan data proyeksi penduduk, jumlah penduduk hingga tahun 2045 menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang naik, artinya setiap tahunnya di Kota Bekasi mengalami kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2.627.230 jiwa hingga pada tahun 2045 jumlah penduduk bertambah menjadi 3.188.330 jiwa. Beberapa faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan penduduk yang kian naik di Kota Bekasi salah satunya, adanya angka kelahiran dan angka perpindahan penduduk yang kian naik. Sebagaimana diketahui bahwa Kota Bekasi sebagai pendukung DKI Jakarta, berfungsi sebagai penyedia layanan jasa, utamanya adalah jasa perumahan sebagai kawasan hunian para kaum commuter dan layanan dasar sosial-ekonomi masyarakat. Maka tidak heran jika banyaknya perpindahan penduduk/urbanisasi para kaum commuter yang bekerja di DKI Jakarta menjadikan Kota Bekasi sebagai pilihan utama dalam menentukan tempat tinggal sementara, bahkan sampai menetap.

Tabel 2.34. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Penduduk tahun 2023 (orang)	Proyeksi penduduk (orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
2.627.230	2.648.270	2.677.000	2.728.860	3.055.004	3.188.330

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.91. Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Proyeksi jumlah penduduk Kota Bekasi jika dilihat berdasarkan tingkat kecamatan sangat beragam, namun tetap menunjukan tren yang naik di setiap kecamatan. Penambahan jumlah penduduk terbesar hingga tahun 2045 terjadi pada Kecamatan Bekasi Utara sampai dengan 74.757 jiwa, sedangkan penambahan terkecil di tahun 2045 terjadi pada Kecamatan Bantar Gebang sebanyak 22.285 jiwa.

Tabel 2.35. Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Kecamatan	Penduduk tahun 2023 (orang)	Proyeksi penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pondok Gede	279.411	281.651	284.711	290.232	324.914	339.095
Jati Sampurna	109.273	110.148	111.343	113.500	127.066	132.611
Pondokmelati	138.812	139.922	141.438	144.176	161.410	168.453
Jati Asih	227.150	228.969	231.452	235.935	264.134	275.661
Bantar Gebang	104.442	105.275	106.407	108.458	121.431	126.727
Mustikajaya	165.355	166.679	168.486	171.749	192.277	200.668
Bekasi Timur	299.484	301.886	305.173	311.097	348.266	363.469
Rawa Lumbu	226.733	228.549	231.031	235.508	263.654	275.160
Bekasi Selatan	235.689	237.575	240.148	244.796	274.058	286.017
Bekasi Barat	313.790	316.303	319.734	325.927	364.882	380.805
Medansatria	177.067	178.485	180.421	183.916	205.897	214.883

Kecamatan	Penduduk tahun 2023 (orang)	Proyeksi penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Bekasi Utara	350.024	352.827	356.656	363.566	407.017	424.780
Kota Bekasi	2.627.230	2.648.270	2.677.000	2.728.860	3.055.004	3.188.330

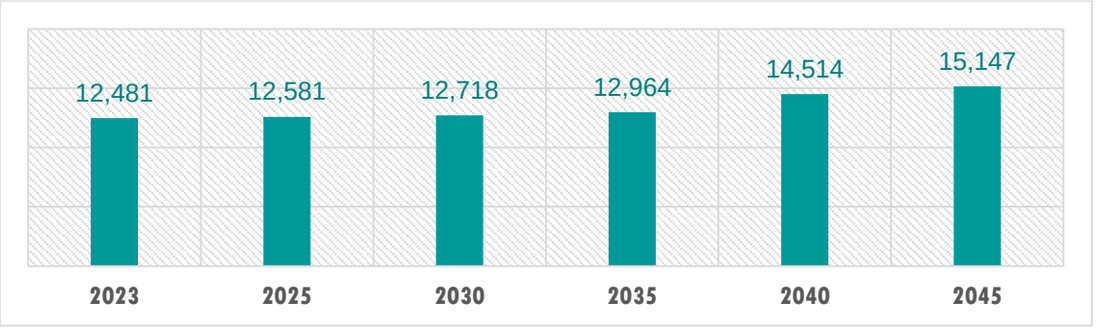
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Selain dari jumlah penduduk, pergerakan penduduk bisa dilihat dari **Distribusi penduduk. Distribusi penduduk** adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat diketahui dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Berdasarkan data proyeksi kepadatan penduduk, hingga tahun 2045 menunjukkan tren yang naik, Kota Bekasi akan semakin padat pada 20 tahun mendatang. Meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Bekasi seiring dengan terus bertambahnya populasi, sementara luas wilayah Kota Bekasi sulit mengalami pertambahan.

Tabel 2.36. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2)

Kepadatan Penduduk tahun 2023 (jiwa/km^2)	Proyeksi Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)				
	2025	2030	2035	2040	2045
12.481	12.581	12.718	12.964	14.514	15.147

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.92. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2)

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk setiap kecamatan, distribusi penduduk setiap wilayah kecamatan tidak merata. Salah satu faktor distribusi penduduk yang belum merata adalah pembangunan di beberapa wilayah belum merata, serta fasilitas sarana dan prasarananya belum sepenuhnya dapat menunjang kehidupan halayak. Perlunya pemerataan distribusi penduduk agar dapat mengurangi angka kepadatan penduduk, salah satunya melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk.

Tabel 2.37. Proyeksi Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (jiwa/km^2)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk tahun 2023 (jiwa/km^2)	Proyeksi Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pondok Gede	17.556	17.696	17.889	18.236	20.415	21.306
Jati Sampurna	5.592	5.637	5.698	5.808	6.503	6.786
Pondokmelati	11.764	11.859	11.987	12.219	13.680	14.277
Jati Asih	9.358	9.433	9.535	9.720	10.881	11.356
Bantar Gebang	5.664	5.709	5.771	5.882	6.586	6.873
Mustikajaya	6.260	6.310	6.378	6.502	7.279	7.597
Bekasi Timur	20.465	20.629	20.854	21.258	23.798	24.837

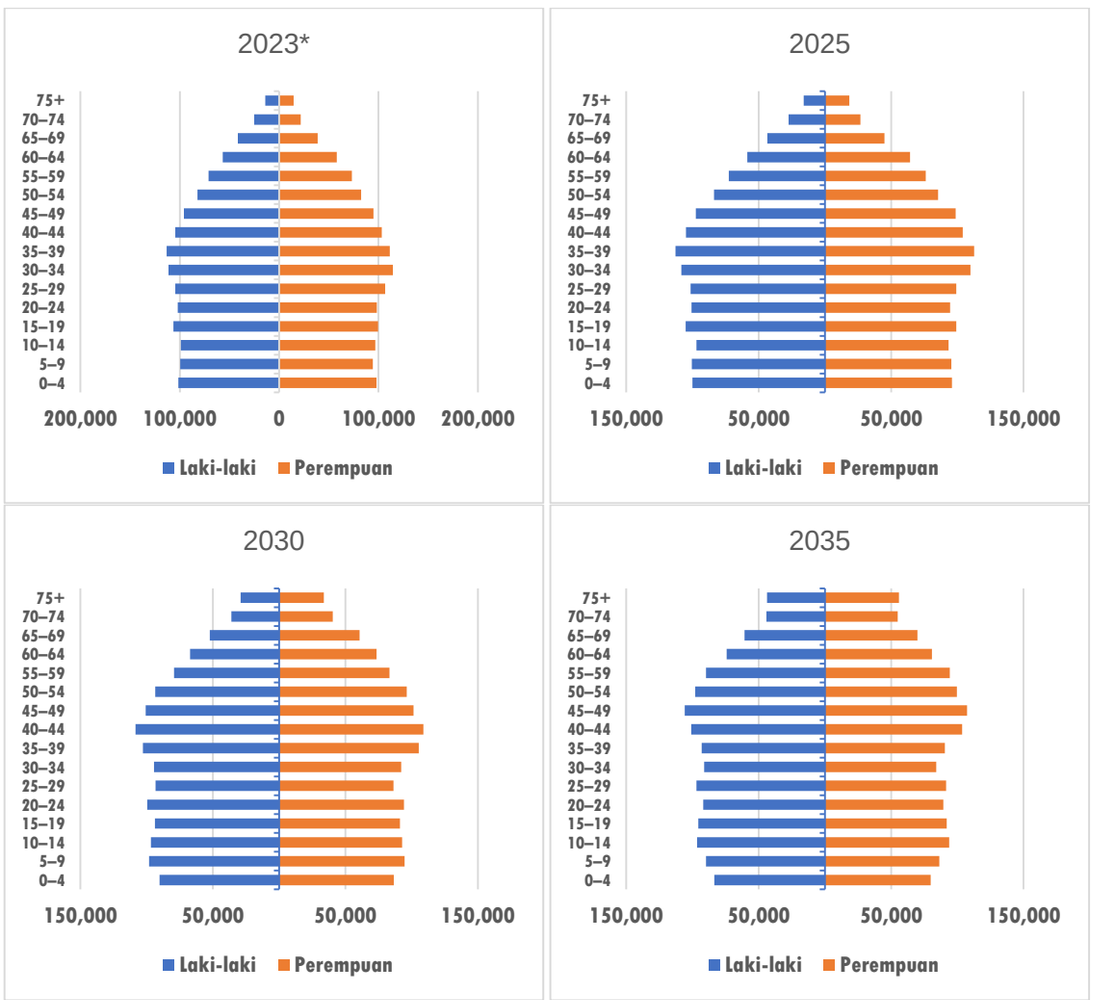
Kecamatan	Kepadatan Penduduk tahun 2023 (jiwa/km^2)	Proyeksi Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Rawa Lumbu	13.454	13.562	13.709	13.974	15.644	16.327
Bekasi Selatan	14.674	14.792	14.952	15.241	17.063	17.808
Bekasi Barat	21.022	21.190	21.420	21.835	24.445	25.512
Medansatria	14.901	15.021	15.184	15.478	17.327	18.084
Bekasi Utara	17.724	17.866	18.060	18.409	20.610	21.509
Kota Bekasi	12.481	12.581	12.718	12.964	14.514	15.147

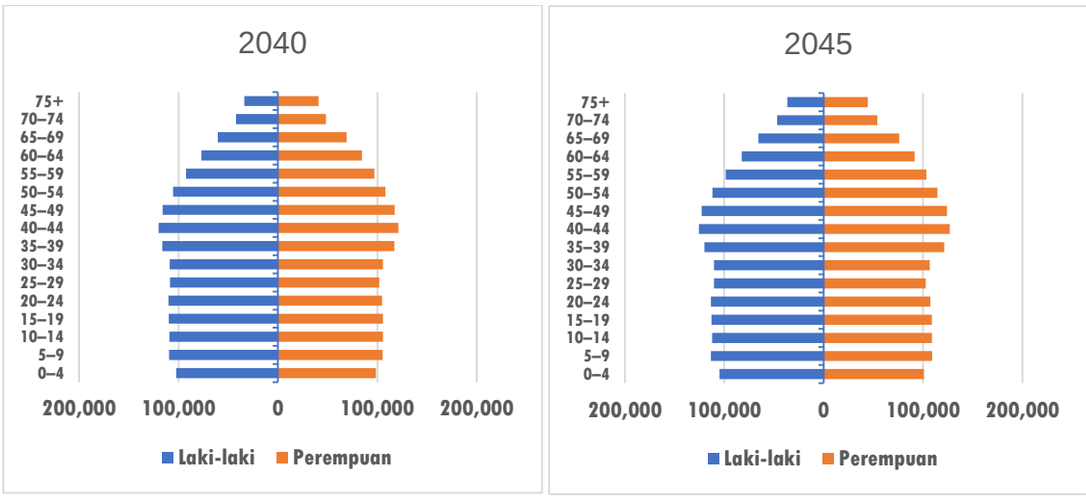
Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.1.2. Tren Struktur Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan usia berbanding lurus dengan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, setiap tahunnya jumlah penduduk bertambah. Proporsi penduduk berdasarkan usia di Kota Bekasi lebih didominasi oleh usia dibawah 65 tahun pada tahun 2023 (**Gambar 2.93**). Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah bentuk piramida ekspansif (muda,) yang diartikan dengan jumlah penduduk usia muda lebih banyak berbanding terbalik dengan lanjut usia yang relatif sedikit. Bisa dikatakan angka kelahiran di Kota Bekasi lebih besar dari angka kematian; pertumbuhan penduduk cepat; sehingga membutuhkan banyak lapangan pekerjaan; dan rasio ketergantungannya besar.

Jika digambarkan kondisi piramida ekspansif Kota Bekasi pada tahun eksisting 2023 dan berdasarkan hasil proyeksi di tahun 2025, 2030, 2035, 2040, hingga 2045 ditunjukkan pada **Gambar 2.93**.





Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.93. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045

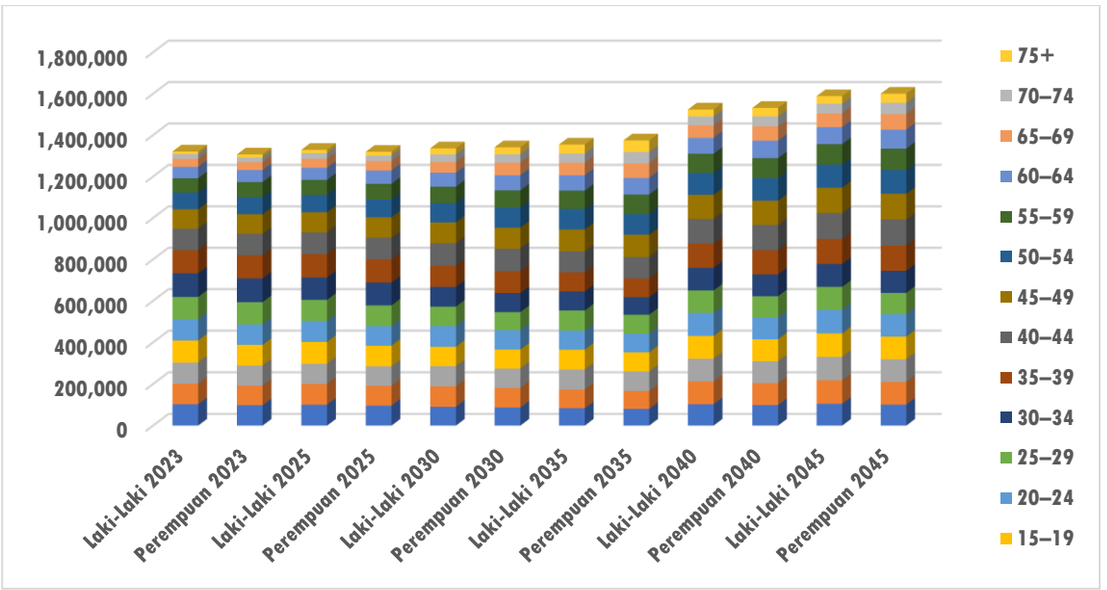
Jika dilihat berdasarkan data proyeksi penduduk menurut kelompok umur, jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan usia tidak produktif. Usia produktif adalah penduduk dengan rentang usia 14-64 tahun, sedangkan usia tidak produktif terdiri dari usia muda 0-14 tahun dan usia tua/lanjut usia (65+ tahun). Persentase usia produktif di tahun proyeksi 2025-2045 berada di rentang 68-72 persen, sedangkan persentase usia muda berada di rentang 19-23 persen, dan persentase usia tua/lanjut usia berada pada rentang 6-11 persen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bonus demografi di Kota Bekasi masih tetap berlangsung sampai dengan tahun 2045. Bonus demografi diartikan dengan jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.38. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023 (orang)	Proyeksi penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 tahun	591.560	582.050	559.390	529.580	630.745	648.985
15-64 tahun	1.886.160	1.889.510	1.865.450	1.870.130	2.129.378	2.215.946
>65 tahun	149.510	176.710	252.160	329.150	294.882	323.399
Angka Ketergantungan	39,29	40,16	43,50	45,92	43,47	43,88

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tren penduduk berdasarkan kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) cenderung turun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2035, namun naik kembali hingga tahun 2045. Hasil prediksi, usia produktif (15-64 tahun) di tahun 2045 mencapai 69 persen untuk perempuan dan 70 persen untuk laki-laki. Persentase tersebut lebih lebih besar dibandingkan usia muda (0-14 tahun) berkisar 20 persen untuk perempuan dan 21 persen untuk laki-laki, bahkan usia tua/lanjut usia yang hanya memiliki 11 persen untuk perempuan dan 9 persen untuk laki-laki.

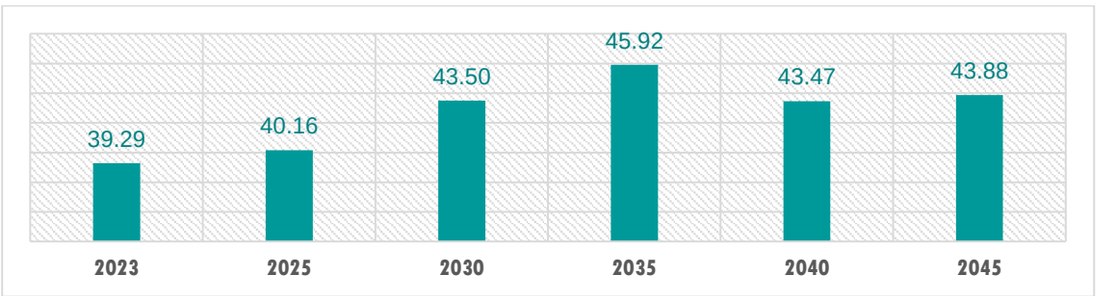


Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.94. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Usia Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, Kota Bekasi lebih didominasi oleh usia muda dibandingkan usia tua/lanjut usia sehingga rasio ketergantungannya besar. Rasio ketergantungan umumnya diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja suatu wilayah, atau bisa dikatakan sebagai perbandingan jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan >65 tahun dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin besar beban yang harus di tanggung oleh penduduk usia produktif karena sebagian dari pendapatannya digunakan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kota Bekasi mencapai 39,29 persen di tahun 2023, artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 39 orang yang tidak produktif. Berdasarkan tren proyeksi yang sudah dilakukan, rasio ketergantungan memiliki tren yang naik, walaupun sempat turun di tahun 2040 menjadi 43,47 persen dan kembali naik di tahun 2045 dengan 43,88 persen. Prediksi rasio ketergantungan Kota Bekasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2045 dikatakan meningkat dengan penambahan 4,59 persen. Nilai rasio ketergantungan 43,88 di tahun 2045 diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 43 orang yang tidak produktif. Rasio ketergantungan yang tinggi dengan kecenderungan semakin meningkat merupakan faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Kenaikan rasio ketergantungan sebesar 1 persen akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 persen. Karena semakin tinggi nilai rasio ketergantungan suatu daerah, menggambarkan tingginya ketergantungan penduduk usia non produktif.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2.95. Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Bekasi Tahun 2025-2045

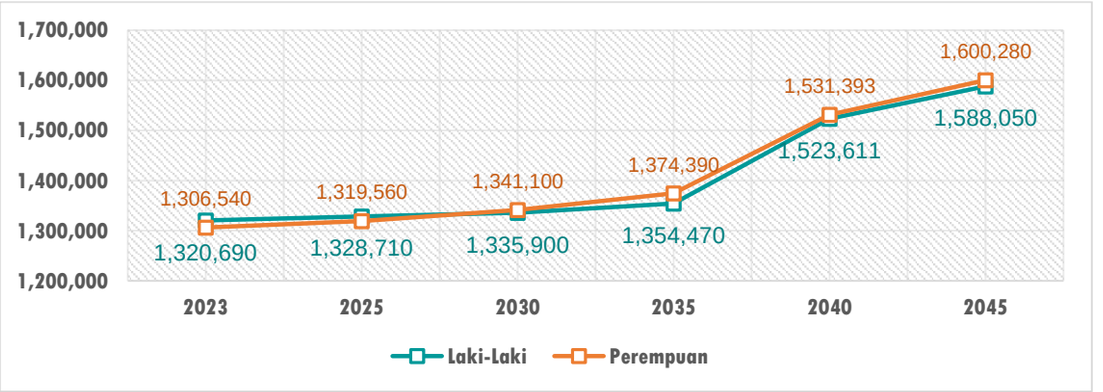
Penduduk berdasarkan jenis kelamin, di tahun 2023 Kota Bekasi di dominasi oleh laki-laki dengan 1.320.690 jiwa. Berbeda dengan eksisting, hasil proyeksi menunjukkan di tahun 2030 sampai dengan 2045 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nilai tersebut akan

mempengaruhi nilai *sex ratio* yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Nilai *sex ratio* Kota Bekasi memiliki tren yang menurun dari tahun 2023 dengan nilai 101,08 hingga di tahun 2045 menjadi 99,24. Dengan demikian, pada tahun 2045 mengindikasikan bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 99 hingga 100 jiwa.

Tabel 2.39. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk tahun 2023 (orang)	Proyeksi penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	1.320.690	1.328.710	1.335.900	1.354.470	1.523.611	1.588.050
Perempuan	1.306.540	1.319.560	1.341.100	1.374.390	1.531.393	1.600.280
Rasio	101,08	100,69	99,61	98,55	99,49	99,24

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Sumber: Hasil Analisis 2024

Gambar 2.96. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2025-2045

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1. Rumah atau Tempat Tinggal dan Permukiman

Jumlah penduduk di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi yang semakin bertambah baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, mengindikasikan besarnya kebutuhan akan pelayanan publik dan perlindungan sosial khususnya bagi penduduk kelompok rentan. Untuk itu perlu upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi penduduk melalui kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang menunjang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya melalui pemenuhan akan hunian atau perumahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1), bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ketersediaan rumah/stok rumah di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketersediaan rumah di Kota Bekasi saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan (toponimi) tahun 2022, jumlah rumah di Kota Bekasi mencapai 731.107 unit, dengan jumlah rumah terbanyak yaitu di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 91,076 unit atau sekitar 12,46% dari jumlah keseluruhan unit rumah di Kota Bekasi.

Berdasarkan jumlah rumah hasil identifikasi lapangan tahun 2023, maka dilakukanlah perhitungan proyeksi jumlah rumah untuk melihat seberapa banyak jumlah rumah pada masa yang akan datang. Perhitungan proyeksi jumlah rumah bisa dikatakan sebagai informasi seberapa banyak kebutuhan rumah di masa yang akan datang untuk memenuhi pertumbuhan penduduk yang kian naik. Perhitungan perkiraan jumlah rumah didasarkan pada nilai proyeksi jumlah penduduk, sedangkan perhitungan gap rumah didasarkan pada selisih nilai perkiraan jumlah rumah tahun yang akan datang dengan nilai jumlah rumah eksisting pada tahun 2023, sehingga didapatkan nilai gap positif dan nilai

gap negatif. Gap negatif artinya jumlah rumah pada tahun proyeksi mengalami penurunan dari jumlah rumah di tahun eksisting (2023), sedangkan gap positif artinya jumlah rumah pada tahun tersebut mengalami kenaikan dari jumlah rumah di tahun eksisting (2023).

Tabel 2.40. Proyeksi Jumlah Rumah dan Gap Rumah di Kota Bekasi

Perkiraan Jumlah Rumah (1 KK=4 Jiwa)

Kecamatan	Tahun	Perkiraan Penduduk (jiwa)	Perkiraan Jml Rumah	Jml Rumah (2022)	Gap Rumah (tahun)
Kec. Bekasi Utara	2023 (Eksisting)	350.024		91.076	
	SPM 2023		87.506		-3.570
	2025	352.827	88.207		-2.869
	2030	356.656	89.164		-1.912
	2035	363.566	90.891		-185
	2040	407.017	101.754		10.678
	2045	424.780	106.195		15.119
Kec. Bekasi Timur	2023 (Eksisting)	299.484		61.232	
	SPM 2023		74.871		13.639
	2025	301.886	75.472		14.240
	2030	305.173	76.293		15.061
	2035	311.097	77.774		16.542
	2040	348.266	87.067		25.835
	2045	363.469	90.867		29.635
Kec. Jatiasih	2023 (Eksisting)	227.150		80.465	
	SPM 2023		56.787		-23.678
	2025	228.969	57.242		-23.223
	2030	231.452	57.863		-22.602
	2035	235.935	58.984		-21.481
	2040	264.134	66.033		-14.432
	2045	275.661	68.915		-11.550
Kec. Bekasi Barat	2023 (Eksisting)	313.790		64.901	
	SPM 2023		78.448		13.547
	2025	316.303	79.076		14.175
	2030	319.734	79.933		15.032
	2035	325.927	81.482		16.581
	2040	364.882	91.220		26.319
	2045	380.805	95.201		30.300
Kec. Pondokgede	2023 (Eksisting)	279.411		73.418	
	SPM 2023		69.853		-3.565
	2025	281.651	70.413		-3.005
	2030	284.711	71.178		-2.240
	2035	290.232	72.558		-860
	2040	324.914	81.229		7.811
	2045	339.095	84.774		11.356
Kec. Rawalumbu	2023 (Eksisting)	226.733		58.009	
	SPM 2023		56.683		-1.326
	2025	228.549	57.137		-872
	2030	231.031	57.758		-251
	2035	235.508	58.877		868
	2040	263.654	65.913		7.904
	2045	275.160	68.790		10.781
Kec. Medansatria	2023 (Eksisting)	177.067		41.734	
	SPM 2023		44.267		2.533
	2025	178.485	44.621		2.887
	2030	180.421	45.105		3.371
	2035	183.916	45.979		4.245
	2040	205.897	51.474		9.740
	2045	214.883	53.721		11.987
Kec. Mustikajaya	2023 (Eksisting)	165.355		77.522	

Kecamatan	Tahun	Perkiraan Penduduk (jiwa)	Perkiraan Jml Rumah	Jml Rumah (2022)	Gap Rumah (tahun)
	SPM 2023		41.339		-36.183
	2025	166.679	41.670		-35.852
	2030	168.486	42.122		-35.400
	2035	171.749	42.937		-34.585
	2040	192.277	48.069		-29.453
	2045	200.668	50.167		-27.355
Kec. Bekasi Selatan	2023 (Eksisting)	235.689		55.625	
	SPM 2023		58.922		3.297
	2025	237.575	59.394		3.769
	2030	240.148	60.037		4.412
	2035	244.796	61.199		5.574
	2040	274.058	68.514		12.889
	2045	286.017	71.504		15.879
Kec. Pondokmelati	2023 (Eksisting)	138.812		40.590	
	SPM 2023		34.703		-5.887
	2025	139.922	34.981		-5.609
	2030	141.438	35.360		-5.230
	2035	144.176	36.044		-4.546,058
	2040	161.410	40.352		-238
	2045	168.453	42.113		1.523
Kec. Jati Sampurna	2023 (Eksisting)	109.273		51.067	
	SPM 2023		27.318		-23.749
	2025	110.148	27.537		-23.530
	2030	111.343	27.836		-23.231
	2035	113.500	28.375		-22.692
	2040	127.066	31.766		-19.301
	2045	132.611	33.153		-17.914
Kec. Bantargebang	2023 (Eksisting)	104.442		35.468	
	SPM 2023		26.111		-9.357
	2025	105.275	26.319		-9.149
	2030	106.407	26.602		-8.866
	2035	108.458	27.114		-8.354
	2040	121.431	30.358		-5.110
	2045	126.727	31.682		-3.786
KOTA BEKASI	2023 (Eksisting)	2.627.230		731.107	
	SPM 2023		656.808		-74.300
	2025	2.648.270	662.068		-69.040
	2030	2.677.000	669.250		-61.857
	2035	2.728.860	682.215		-48.892
	2040	3.055.004	763.751		32.644
	2045	3.188.330	797.082		65.975

Sumber: Riview Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota bekasi, 2022 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan nilai gap rumah pada tabel di atas, menunjukkan jumlah hasil proyeksi pada tahun periode pertama hingga ketiga menunjukkan adanya pengurangan jumlah rumah yang diperkirakan berdasarkan proyeksi kependudukan. Jumlah rumah yang bernilai positif menunjukkan jumlah rumah yang bertambah dari tahun eksisting, hal tersebut terjadi di periode keempat sampai dengan kelima (20 tahun yang akan datang).

Laju pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya di Kota Bekasi, sehingga berimplikasi pada peningkatan kebutuhan fasilitas, utamanya adalah kebutuhan perumahan. Kebutuhan perumahan yang semakin banyak tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang semakin sedikit. Keterbatasan lahan selanjutnya berdampak pada tingginya harga tanah sehingga sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa pemerintah turut menjamin hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan rumah susun dalam bentuk rumah sederhana dan sewa sebagai upaya memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat. Maka dari itu, salah satu tujuan pembangunan rumah susun adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Hal ini berlaku juga pada masyarakat yang memilih migrasi ke Kota Bekasi dan menjadi kaum *commuter*.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kepadatan penduduk sampai dengan 2045, rumah susun menjadi alternatif rumah tinggal, jika melihat jumlah penduduk dan kepadatannya selalu bertambah setiap tahun. Melihat kebutuhan tersebut, maka Kebutuhan Rumah Susun dikelaskan menjadi 3, yaitu Alternatif, Disarankan, dan Disyaratkan. Kelas tersebut dikelompokkan berdasarkan jumlah penduduk:

Jumlah penduduk:

< 150 jiwa = Rendah → Alternatif
151-200 = Sedang → Disarankan
200-400 = Tinggi → Disyaratkan
> 400 = Sangat Padat → Disyaratkan

Kebutuhan Rumah Susun di Kota Bekasi atas dasar pengelompokan 3 kelas di atas, didapatkan kelas Alternatif untuk tingkat kebutuhan rumah susun di Kota Bekasi walaupun pada tahun 2045 sudah beralih menjadi Disarankan, yang artinya masih tergolong kelas kepadatan rendah menuju sedang, sedangkan untuk pengelompokan di setiap kecamatan berbeda-beda. Bagi kecamatan dengan jumlah penduduk dengan kelas kepadatan rendah memiliki kelas Alternatif, sedangkan kelas kepadatan tinggi mempunyai kelas Disyaratkan, seperti di Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Barat.

Tabel 2.41. Proyeksi Kebutuhan Rumah Susun di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Tahun	Perkiraan Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk	Kelas Kep adatan Penduduk	Kebutuhan Rumah Susun
1	Kec. Bekasi Utara	2023 (Eksisting)	350.024	177	SEDANG	DISARANKAN
		2025	352.827	179	SEDANG	DISARANKAN
		2030	356.656	181	SEDANG	DISARANKAN
		2035	363.566	184	SEDANG	DISARANKAN
		2040	407.017	206	TINGGI	DISYARATKAN
		2045	424.780	215	TINGGI	DISYARATKAN
2	Kec. Bekasi Timur	2023 (Eksisting)	299.484	205	TINGGI	DISYARATKAN
		2025	301.886	206	TINGGI	DISYARATKAN
		2030	305.173	209	TINGGI	DISYARATKAN
		2035	311.097	213	TINGGI	DISYARATKAN
		2040	348.266	238	TINGGI	DISYARATKAN
		2045	363.469	248	TINGGI	DISYARATKAN
3	Kec. Jatiasih	2023 (Eksisting)	227.150	94	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	228.969	94	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	231.452	95	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	235.935	97	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	264.134	109	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	275.661	114	RENDAH	ALTERNATIF
4	Kec. Bekasi Barat	2023 (Eksisting)	313.790	210	TINGGI	DISYARATKAN
		2025	316.303	212	TINGGI	DISYARATKAN
		2030	319.734	214	TINGGI	DISYARATKAN
		2035	325.927	218	TINGGI	DISYARATKAN
		2040	364.882	244	TINGGI	DISYARATKAN
		2045	380.805	255	TINGGI	DISYARATKAN
5	Kec. Pondokgede	2023 (Eksisting)	279.411	176	SEDANG	DISARANKAN

No	Kecamatan	Tahun	Perkiraan Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk	Kelas Kep adatan Penduduk	Kebutuhan Rumah Susun
		2025	281.651	177	SEDANG	DISARANKAN
		2030	284.711	179	SEDANG	DISARANKAN
		2035	290.232	182	SEDANG	DISARANKAN
		2040	324.914	204	TINGGI	DISYARATKAN
		2045	339.095	213	TINGGI	DISYARATKAN
6	Kec. Rawalumbu	2023 (Eksisting)	226.733	135	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	228.549	136	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	231.031	137	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	235.508	140	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	263.654	156	SEDANG	DISARANKAN
		2045	275.160	163	SEDANG	DISARANKAN
7	Kec. Medansatria	2023 (Eksisting)	177.067	149	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	178.485	150	SEDANG	DISARANKAN
		2030	180.421	152	SEDANG	DISARANKAN
		2035	183.916	155	SEDANG	DISARANKAN
		2040	205.897	173	SEDANG	DISARANKAN
		2045	214.883	181	SEDANG	DISARANKAN
8	Kec. Mustikajaya	2023 (Eksisting)	165.355	63	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	166.679	63	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	168.486	64	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	171.749	65	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	192.277	73	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	200.668	76	RENDAH	ALTERNATIF
9	Kec. Bekasi Selatan	2023 (Eksisting)	235.689	147	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	237.575	148	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	240.148	150	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	244.796	152	SEDANG	DISARANKAN
		2040	274.058	171	SEDANG	DISARANKAN
		2045	286.017	178	SEDANG	DISARANKAN
10	Kec. Pondokmelati	2023 (Eksisting)	138.812	118	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	139.922	119	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	141.438	120	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	144.176	122	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	161.410	137	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	168.453	143	RENDAH	ALTERNATIF
11	Kec. Jati Sampurna	2023 (Eksisting)	109.273	56	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	110.148	56	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	111.343	57	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	113.500	58	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	127.066	65	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	132.611	68	RENDAH	ALTERNATIF
12	Kec. Bantargebang	2023 (Eksisting)	104.442	57	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	105.275	57	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	106.407	58	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	108.458	59	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	121.431	66	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	126.727	69	RENDAH	ALTERNATIF
	KOTA BEKASI	2023 (Eksisting)	2.627.230	125	RENDAH	ALTERNATIF
		2025	2.648.270	126	RENDAH	ALTERNATIF
		2030	2.677.000	127	RENDAH	ALTERNATIF
		2035	2.728.860	130	RENDAH	ALTERNATIF
		2040	3.055.004	145	RENDAH	ALTERNATIF
		2045	3.188.330	151	SEDANG	DISARANKAN

Sumber: BPS, (2011-2024) dan Hasil Analisis, 2024

2.6.2.2. Analisis Kebutuhan Sarana Sanitasi

Sanitasi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyakit yang menitikberatkan pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Upaya kesehatan lingkungan ditunjukkan guna mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan lingkungan dapat dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian pada lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Usaha dalam menciptakan lingkungan yang sehat bisa dilakukan dengan memperhatikan fasilitas baik dalam lingkungan individu maupun lingkungan umum. Fasilitas dalam menciptakan lingkungan sehat salah satunya dengan menyediakan sarana prasarana pendukung lingkungan. Sarana dan prasarana pendukung yang akan dibahas, salah satunya adalah kebutuhan kran umum dengan kebutuhan airnya, kebutuhan MCK keluarga, MCK komunal dan Tangki Septik serta menghitung timbulan air limbah.

A. Kebutuhan Kran Umum

Pemenuhan kebutuhan air bersih di lingkungan hunian merupakan prioritas utama. Penyediaan air bersih di kota dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan memanfaatkan air baku. Air baku bersumber dari air tanah, air permukaan, air hujan, dan mata air. Pemanfaatan air tanah sebagai suplai air bersih terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh pelayanan jaringan induk PDAM Kota kedalaman air tanah. Tidak terpenuhinya air bersih di wilayah-wilayah yang tidak dilewati oleh perpipaan PDAM, dibutuhkan kran umum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Berdasarkan hasil proyeksi, didapatkan kebutuhan air kran umum sebagai berikut pada Tabel 2.42. Kebutuhan kran umum mengacu pada jumlah penduduk, dengan asumsi kebutuhan air setiap orang sebanyak 30 liter per hari menurut SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Bertambahnya jumlah penduduk maka asumsi kebutuhan kran umum akan semakin bertambah.

Tabel 2.42. Proyeksi Kebutuhan Kran Umum dan Kebutuhan Air Kran Umum di Kota Bekasi

No	Kecamatan	Tahun	Perkiraan penduduk (jiwa)	Penyediaan kran umum	Kebutuhan air kran umum (30 ltr/orang/hari)
A	KOTA BEKASI	2023 (Eksisting)	2.627.230	-	-
		SPM 2023		10.509	78.816.900
		2025	2.648.270	10.593	79.448.100
		2030	2.677.000	10.708	80.310.000
		2035	2.728.860	10.915	81.865.800
		2040	3.055.004	12.220	91.650.130
		2045	3.188.330	12.753	95.649.894
1	Kec. Bekasi Utara	2023 (Eksisting)	350.024	-	-
		SPM 2023		1.411	10.584.809
		2025	352.827	1.411	10.584.809
		2030	356.656	1.427	10.699.667
		2035	363.566	1.454	10.906.973
		2040	407.017	1.628	12.210.511
		2045	424.780	1.699	12.743.406
2	Kec. Bekasi Timur	2023 (Eksisting)	299.484	-	-
		SPM 2023		1.208	9.056.583
		2025	301.886	1.208	9.056.583
		2030	305.173	1.221	9.155.191
		2035	311.097	1.244	9.332.910
		2040	348.266	1.393	10.447.991
		2045	363.469	1.454	10.904.060
3	Kec. Jatiasih	2023 (Eksisting)	227.150	-	-
		SPM 2023		909	6.814.500
		2025	228.969	916	6.869.063

No	Kecamatan	Tahun	Perkiraan penduduk (jiwa)	Penyediaan kran umum	Kebutuhan air kran umum (30 ltr/orang/hari)
		2030	231.452	926	6.943.553
		2035	235.935	944	7.078.036
		2040	264.134	1.057	7.924.010
		2045	275.661	1.103	8.269.818
4	Kec. Bekasi Barat	2023 (Eksisting)	313.790	-	-
		SPM 2023		1.255	9.413.710
		2025	316.303	1.265	9.489.092
		2030	319.734	1.279	9.592.015
		2035	325.927	1.304	9.777.815
		2040	364.882	1.460	10.946.448
		2045	380.805	1.523	11.424.163
5	Kec. Pondokgede	2023 (Eksisting)	279.411	-	-
		SPM 2023		1.118	8.382.334
		2025	281.651	1.127	8.449.517
		2030	284.711	1.139	8.541.334
		2035	290.232	1.161	8.706.954
		2040	324.914	1.300	9.747.428
		2045	339.095	1.356	10.172.865
6	Kec. Rawalumbu	2023 (Eksisting)	226.733	-	-
		SPM 2023		907	6.801.990
		2025	228.549	914	6.856.483
		2030	231.031	924	6.930.923
		2035	235.508	942	7.065.249
		2040	263.654	1.055	7.909.607
		2045	275.160	1.101	8.254.812
7	Kec. Medansatria	2023 (Eksisting)	177.067	-	-
		SPM 2023		708	5.312.020
		2025	178.485	714	5.354.557
		2030	180.421	722	5.412.636
		2035	183.916	736	5.517.482
		2040	205.897	824	6.176.923
		2045	214.883	860	6.446.492
8	Kec. Mustikajaya	2023 (Eksisting)	165.355	-	-
		SPM 2023		661	4.960.641
		2025	166.679	667	5.000.360
		2030	168.486	674	5.054.584
		2035	171.749	687	5.152.480
		2040	192.277	769	5.768.310
		2045	200.668	803	6.020.042
9	Kec. Bekasi Selatan	2023 (Eksisting)	235.689	-	-
		SPM 2023		943	7.070.681
		2025	237.575	950	7.127.259
		2030	240.148	961	7.204.446
		2035	244.796	979	7.343.879
		2040	274.058	1.096	8.221.729
		2045	286.017	1.144	8.580.501
10	Kec. Pondokmelati	2023 (Eksisting)	138.812	-	-
		SPM 2023		555	4.164.349
		2025	139.922	560	4.197.674
		2030	141.438	566	4.243.143
		2035	144.176	577	4.325.273
		2040	161.410	646	4.842.285
		2045	168.453	674	5.053.591
11	Kec. Jati Sampurna	2023 (Eksisting)	109.273	-	-

No	Kecamatan	Tahun	Perkiraan penduduk (jiwa)	Penyediaan kran umum	Kebutuhan air kran umum (30 ltr/orang/hari)
		SPM 2023		437	3.278.198
		2025	110.148	441	3.304.452
		2030	111.343	445	3.340.300
		2035	113.500	454	3.405.010
		2040	127.066	508	3.811.966
		2045	132.611	530	3.978.326
12	Kec. Bantargebang	2023 (Eksisting)	104.442	-	-
		SPM 2023		418	3.133.266
		2025	105.275	421	3.158.250
		2030	106.407	426	3.192.207
		2035	108.458	434	3.253.739
		2040	121.431	486	3.642.922
		2045	126.727	507	3.801.818
	KOTA BEKASI	2023 (Eksisting)	2.627.230	-	-
		SPM 2023		10.509	78.816.900
		2025	2.648.270	10.593	79.448.100
		2030	2.677.000	10.708	80.310.000
		2035	2.728.860	10.915	81.865.800
		2040	3.055.004	12.220	91.650.130
		2045	3.188.330	12.753	95.649.894

Sumber: BPS, (2011-2024) dan Hasil Analisis, 2024

B. Proyeksi Kebutuhan MCK

Pembangunan sarana sanitasi bisa terdiri dari kamar mandi, cuci, dan kakus (MCK) harus memenuhi persyaratan MCK yang sehat, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan persampahan. Berdasarkan perhitungan proyeksi timbulan air limbah, nilai timbulan limbah domestik lebih besar dibandingkan timbulan limbah non domestik, maka perlunya menghitung kebutuhan sarana sanitasi MCK keluarga dan MCK komunal serta kebutuhan Tangki Septik guna meningkatkan hasil pengolahan air limbah rumah tangga.

Berdasarkan Buku Saku Petunjuk Konstruksi Sanitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah pemakaian MCK keluarga maksimum bisa dipakai untuk 6 orang, sedangkan jumlah pemakaian MCK komunal minimum untuk 6 KK. Berbeda dengan Tangki Septik, pemakaian yang disarankan maksimum untuk 50 jiwa. Jumlah minimum maupun maksimum yang disarankan sesuai kebutuhan jumlah penduduk di Kota Bekasi, maka dihasilkan proyeksi kebutuhan MCK keluarga, MCK komunal dan Tangki Septik. Namun, untuk kebutuhan MCK komunal bisa disesuaikan dengan budaya wilayah setempat, sehingga kebutuhan MCK komunal bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Lain halnya dengan MCK keluarga, kebutuhan MCK keluarga sangat penting untuk mengurangi tingkat pencemaran dari limbah domestik (rumah tangga), dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah MCK keluarga akan meningkat. Berikut kebutuhan jumlah sarana sanitasi, MCK keluarga, MCK komunal dan Tangki Septik dari tahun 2025-2045.

Tabel 2.43. Kebutuhan Sarana Sanitasi di Kota Bekasi pada Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Jml KK	MCK Keluarga	MCK Komunal	Tangki Septik
1	Kec. Bekasi Utara	2023 (Eksisting)	350.024				
		SPM 2023		87.506	58.337	14.584	7.000
		2025	352.827	88.207	58.804	14.701	7.057
		2030	356.656	89.164	59.443	14.861	7.133
		2035	363.566	90.891	60.594	15.149	7.271
		2040	407.017	101.754	67.836	16.959	8.140
		2045	424.780	106.195	70.797	17.699	8.496
2	Kec. Bekasi Timur	2023 (Eksisting)	299.484				
		SPM 2023		74.871	49.914	12.478	5.990

No	Kecamatan	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Jml KK	MCK Keluarga	MCK Komunal	Tangki Septik
		2025	301.886	75.472	50.314	12.579	6.038
		2030	305.173	76.293	50.862	12.716	6.103
		2035	311.097	77.774	51.850	12.962	6.222
		2040	348.266	87.067	58.044	14.511	6.965
		2045	363.469	90.867	60.578	15.145	7.269
3	Kec. Jatiasih	2023 (Eksisting)	227.150				
		SPM 2023		56.787	37.858	9.465	4.543
		2025	228.969	57.242	38.161	9.540	4.579
		2030	231.452	57.863	38.575	9.644	4.629
		2035	235.935	58.984	39.322	9.831	4.719
		2040	264.134	66.033	44.022	11.006	5.283
		2045	275.661	68.915	45.943	11.486	5.513
4	Kec. Bekasi Barat	2023 (Eksisting)	313.790				
		SPM 2023		78.448	52.298	13.075	6.276
		2025	316.303	79.076	52.717	13.179	6.326
		2030	319.734	79.933	53.289	13.322	6.395
		2035	325.927	81.482	54.321	13.580	6.519
		2040	364.882	91.220	60.814	15.203	7.298
		2045	380.805	95.201	63.468	15.867	7.616
5	Kec. Pondokgede	2023 (Eksisting)	279.411				
		SPM 2023		69.853	46.569	11.642	5.588
		2025	281.651	70.413	46.942	11.735	5.633
		2030	284.711	71.178	47.452	11.863	5.694
		2035	290.232	72.558	48.372	12.093	5.805
		2040	324.914	81.229	54.152	13.538	6.498
		2045	339.095	84.774	56.516	14.129	6.782
6	Kec. Rawalumbu	2023 (Eksisting)	226.733				
		SPM 2023		56.683	37.789	9.447	4.535
		2025	228.549	57.137	38.092	9.523	4.571
		2030	231.031	57.758	38.505	9.626	4.621
		2035	235.508	58.877	39.251	9.813	4.710
		2040	263.654	65.913	43.942	10.986	5.273
		2045	275.160	68.790	45.860	11.465	5.503
7	Kec. Medansatria	2023 (Eksisting)	177.067				
		SPM 2023		44.267	29.511	7.378	3.541
		2025	178.485	44.621	29.748	7.437	3.570
		2030	180.421	45.105	30.070	7.518	3.608
		2035	183.916	45.979	30.653	7.663	3.678
		2040	205.897	51.474	34.316	8.579	4.118
		2045	214.883	53.721	35.814	8.953	4.298
8	Kec. Mustikajaya	2023 (Eksisting)	165.355				
		SPM 2023		41.339	27.559	6.890	3.307
		2025	166.679	41.670	27.780	6.945	3.334
		2030	168.486	42.122	28.081	7.020	3.370
		2035	171.749	42.937	28.625	7.156	3.435
		2040	192.277	48.069	32.046	8.012	3.846
		2045	200.668	50.167	33.445	8.361	4.013
9	Kec. Bekasi Selatan	2023 (Eksisting)	235.689				
		SPM 2023		58.922	39.282	9.820	4.714
		2025	237.575	59.394	39.596	9.899	4.752
		2030	240.148	60.037	40.025	10.006	4.803
		2035	244.796	61.199	40.799	10.200	4.896
		2040	274.058	68.514	45.676	11.419	5.481
		2045	286.017	71.504	47.669	11.917	5.720
10	Kec. Pondokmelati	2023 (Eksisting)	138.812				
		SPM 2023		34.703	23.135	5.784	2.776
		2025	139.922	34.981	23.320	5.830	2.798
		2030	141.438	35.360	23.573	5.893	2.829
		2035	144.176	36.044	24.029	6.007	2.884
		2040	161.410	40.352	26.902	6.725	3.228

No	Kecamatan	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Jml KK	MCK Keluarga	MCK Komunal	Tangki Septik
		2045	168.453	42.113	28.076	7.019	3.369
11	Kec. Jati Sampurna	2023 (Eksisting)	109.273				
		SPM 2023		27.318	18.212	4.553	2.185
		2025	110.148	27.537	18.358	4.590	2.203
		2030	111.343	27.836	18.557	4.639	2.227
		2035	113.500	28.375	18.917	4.729	2.270
		2040	127.066	31.766	21.178	5.294	2.541
		2045	132.611	33.153	22.102	5.525	2.652
12	Kec. Bantargebang	2023 (Eksisting)	104.442				
		SPM 2023		26.111	17.407	4.352	2.089
		2025	105.275	26.319	17.546	4.386	2.106
		2030	106.407	26.602	17.734	4.434	2.128
		2035	108.458	27.114	18.076	4.519	2.169
		2040	121.431	30.358	20.238	5.060	2.429
		2045	126.727	31.682	21.121	5.280	2.535
	KOTA BEKASI	2023 (Eksisting)	2.627.230				
		SPM 2023		656.808	437.872	109.468	52.545
		2025	2.648.270	662.068	441.378	110.345	52.965
		2030	2.677.000	669.250	446.167	111.542	53.540
		2035	2.728.860	682.215	454.810	113.703	54.577
		2040	3.055.004	763.751	509.167	127.292	61.100
		2045	3.188.330	797.082	531.388	132.847	63.767

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.6.2.3. Analisis Kebutuhan Sarana Persampahan

Tingginya eskalasi urbanisasi di Kota Bekasi menjadikan Pemerintah Kota Bekasi dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu pelayanan yang harus bisa dipenuhi adalah penanggulangan kebersihan lingkungan permukiman terutama terkait dengan persampahan. Persoalan sampah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat. Oleh sebab itu penanggulangan sampah perlu upaya bersama dalam penanganannya, apabila diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Dalam kapasitas Pemerintah Kota Bekasi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seyogyanya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik.

Kota Bekasi memiliki tempat pembuangan sampah terbesar di Asia Tenggara, tempat pembuangan sampah ini merupakan tempat pembuangan akhir bukan hanya untuk Kota Bekasi saja tetapi juga daerah tetangga seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu pengelolaan persampahan yang baik dan terpadu merupakan hal yang fundamental mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangannya. Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbal baliknya.

Penduduk Kota Bekasi sebagian besar membuang sampah pada bak sampah setempat dan kemudian dikelola oleh usaha persampahan setempat dan dibuang pada transfer depo, kemudian menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk mengelola sampah dari transfer depo ke tempat pembuangan akhir. Bak sampah rumah tangga maupun perkantoran dan pertokoan di depan bangunan banyak yang tidak dilengkapi dengan penutup, sehingga menyebarkan bau tidak sedap. Belum dipisahkannya antara sampah organik dan sampah anorganik baik dari pengumpulan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian Penelitian Daya Tampung dan Daya Dukung Hidup Di sekitar TPA Bantargebang pada akhir tahun 2020 diperkirakan terjadi kelebihan muatan (*overload*) dengan ketinggian sampah lebih dari 30 meter, karena jumlah sampah yang masuk tidak sebanding dengan luas lahan yang ada. Operasional TPA Sumur Batu untuk sementara dengan sistem ditumpuk dan dipadatkan, akan tetapi hal ini tidak dapat berlangsung lama mengingat masa layanan yang relatif

pendek. Untuk kelanjutan TPA Sumur Batu dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang sesuai, salah satunya dengan melakukan *landfill mining*. Dengan memperhatikan ketersediaan lahan eksisting dan memaksimalkan ketinggian sampah tahun 2010 dimana ketinggian maksimal sampah adalah 30 meter, maka dapat disimpulkan bahwa lahan eksisting seluas 3,13 ha, secara kondisi mampu menampung sampai dengan akhir tahun 2020, dan masa layanan TPA selama 2 tahun 4 bulan 8 hari.

Perkembangan produksi sampah di Kota Bekasi setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama sampah yang bersumber dari permukiman, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain sehingga kebutuhan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah perlu terpenuhi dengan baik. Sehingga pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga perlu dilakukan secara masif. Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah serta proyeksi timbulan sampah di Kota Bekasi lebih lengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44. Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan Kota Bekasi Tahun 2025 –2045

Kecamatan	Keterangan	2023	Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)				
			2025	2030	2035	2040	2045
Pondok Gede	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	55.882	56.330	56.942	58.046	64.983	67.819
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	112	113	114	116	130	136
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Jati Sampurna	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	21.855	22.030	22.269	22.700	25.413	26.522
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	1	1	1	1	51	53
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Pondok Melati	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	27.762	27.984	28.288	28.835	32.282	33.691
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	56	56	57	58	65	67
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Jati Asih	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	45.430	45.794	46.290	47.187	52.827	55.132
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	91	92	93	94	106	110
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Bantar Gebang	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	45.430	45.794	46.290	47.187	52.827	55.132
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	91	92	93	94	106	110
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Mustikajaya	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	20.888	21.055	21.281	21.692	24.286	25.345
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	42	42	43	43	49	51
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Bekasi Timur	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	33.071	33.336	33.697	34.350	38.455	40.134
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	66	67	67	69	77	80
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Rawa Lumbu	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	59.897	60.377	61.035	62.219	69.653	72.694
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	120	121	122	124	139	145
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Bekasi Selatan	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	45.347	45.710	46.206	47.102	52.731	55.032
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	91	91	92	94	105	110
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Bekasi Barat	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	62.758	63.261	63.947	65.185	72.976	76.161
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	126	127	128	130	146	152
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Medansatria	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	525.446	529.654	535.400	545.772	611.001	637.666
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	1.051	1.059	1.071	1.092	1.222	1.275

Kecamatan	Keterangan	2023	Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)				
			2025	2030	2035	2040	2045
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Bekasi Utara	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	70.005	70.565	71.331	72.713	81.403	84.956
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	140	141	143	145	163	170
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	1	1	1	1	1	1
Kota Bekasi	Rumah (5 jiwa): Tong Sampah	525.446	69.961	70.719	72.088	80.705	84.227
	RW (2500 jiwa): Bak sampah kecil	1.051	1.059	1.071	1.092	1.222	1.275
	Kecamatan (120.000 jiwa): Bak sampah besar	12	12	12	12	12	12

Sumber: Hasil Analisis, 2023
**Angka Proyeksi*
*** Jumlah TPA sudah melebihi daya tampung*

Tabel 2.45. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	2.627.230	2.648.270	2.677.000	2.728.860	3.055.004	3.188.330
Proyeksi Timbulan Sampah (m³/hari)	6.568.075	6.620.675	6.692.500	6.822.150	7.637.510	7.970.825

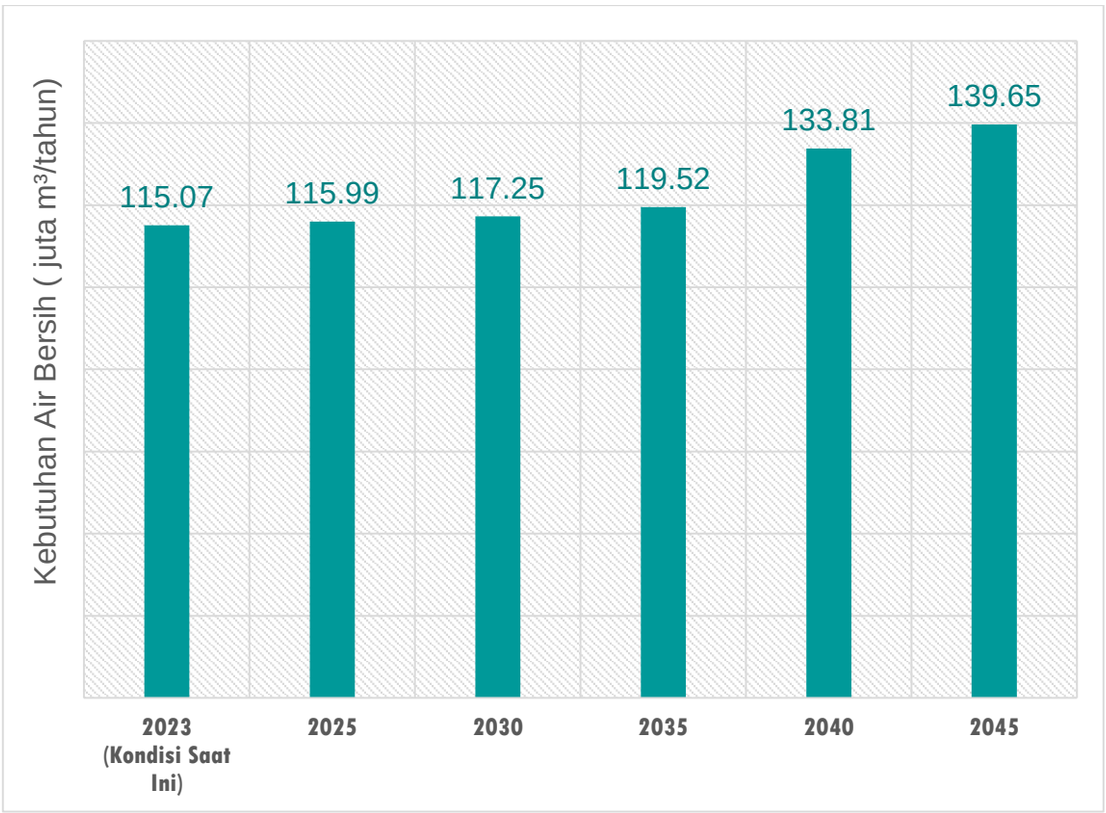
Sumber: Hasil Analisis, 2023
**Angka Proyeksi*

2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih adalah sumber daya utama bagi kelangsungan hidup manusia sehari-hari. Air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia yang menjadi salah satu poin penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable *Development Goals/SDGs*) sehingga diperlukan untuk menyokong pilar pembangunan lingkungan. Penyediaan air bersih perlu diperhatikan dengan baik dalam perencanaan dan pembangunan wilayah perkotaan, seperti di Kota Bekasi.

Penyediaan kebutuhan air bersih di Kota Bekasi, khususnya air minum, dikelola oleh dua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu PDAM Tirta Bhagasasi dan PDAM Tirta Patriot. Pada perencanaan dan pembangunan wilayah perkotaan, diperlukan proyeksi yang berkaitan dengan air bersih. Proyeksi yang berhubungan dengan prasarana air bersih di Kota Bekasi didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk hingga 20 tahun ke depan. Analisis kebutuhan air bersih di masa depan menjadi elemen utama perencanaan pada jaringan air bersih yang harus diperhatikan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Pada perencanaan pembangunan jangka panjang ini, proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Bekasi dilakukan setiap lima tahun hingga tahun 2045, yaitu dimulai pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, hingga 2045. Hasil proyeksi terhadap kebutuhan air bersih di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih terus meningkat hingga tahun 2045 seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pada tahun 2025 kebutuhan air bersih di Kota Bekasi diperkirakan sekitar 115,07 juta m³/tahun dan kebutuhan air bersih di Kota Bekasi secara agregat akan terus meningkat hingga 139,65 juta m³/tahun pada tahun 2045.

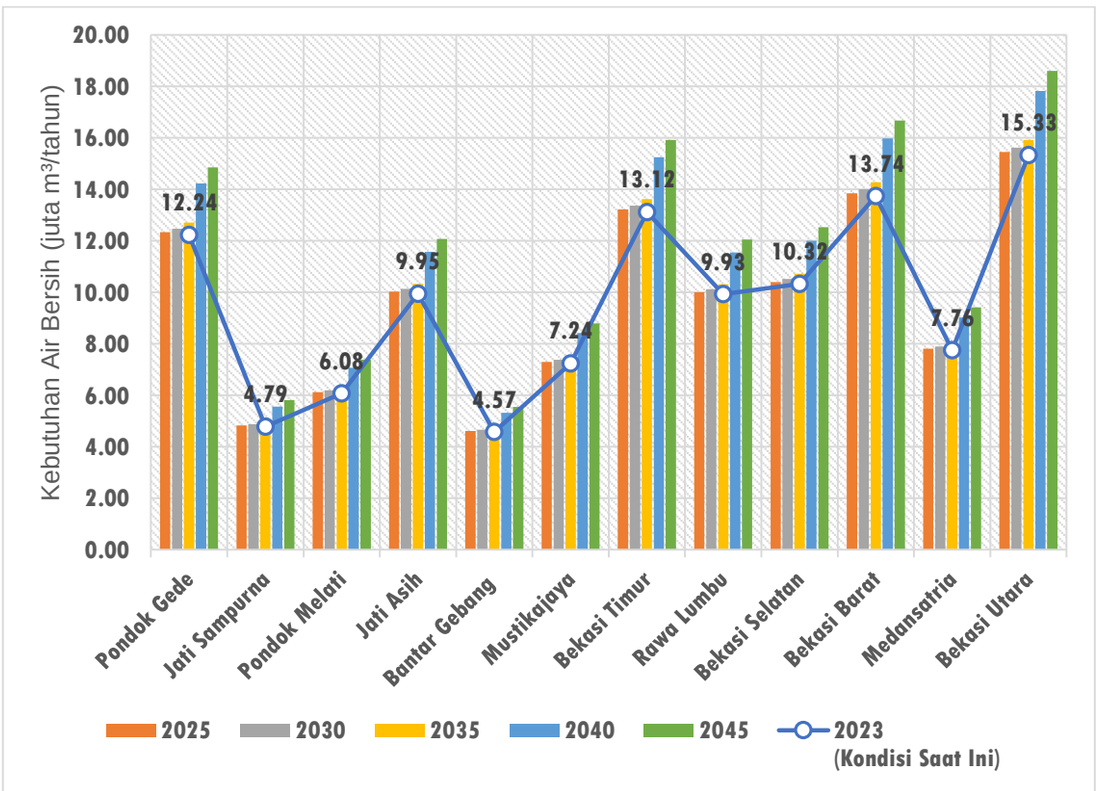
Secara lebih detil, proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Bekasi disajikan pada **Gambar 2.97** sebagai berikut.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.97. Proyeksi kebutuhan air bersih (juta m³/tahun) di Kota Bekasi

Selanjutnya, untuk proyeksi kebutuhan air bersih menurut kecamatan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.98. Proyeksi kebutuhan air bersih (juta m³/tahun) di Kota Bekasi menurut kecamatan

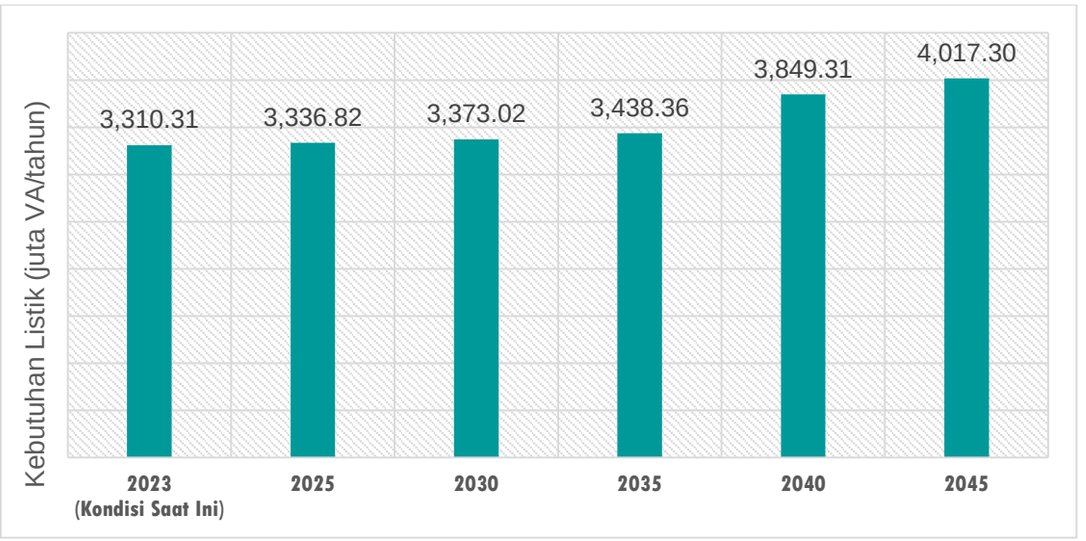
Berdasarkaan gambar di atas, Kecamatan Bekasi Uttara merupakan kecamatan di Kota Bekasi yang memerlukan keebutuhan airr bersih tertingggi dalam 20 tahun ke depan.

2.6.2.5. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Listrik merupakan infrastruktur yang penting untuk mendukung pembangunan wilayah. Penyediaan listrik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bertugas untuk menyediakan pasokan listrik secara nasional, termasuk di Kota Bekasi. Proyeksi yang berkaitan dengan listrik sangat penting untuk diperhatikan, khususnya dalam perencanaan dan pengembangan wilayah perkotaan seperti di Kota Bekasi. Di samping itu, energi listrik memiliki peran penting dalam pembangunan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Listrik menjadi sumber energi utama bagi kebutuhan manusia, baik untuk kegiatan komersial, kegiatan industri, maupun kegiatan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan industri, listirk berperan penting dalam proses produksi yang sebagian besar menggunakan peralatan elektronik dan mesin-mesin industri. Pada kawasan permukiman, energi listrik juga penting untuk pemenuhan kebutuhan penerangan, khususnya penerangan jalan. Pasokan listrik perlu dilakukan secara aman dan efisien ke berbagai kawasan permukiman, termasuk perumahan, pabrik, gedung-gedung komersial dan pemerintahan, dan area publik lainnya. Jaringan listrik yang menjadi komponen utama diantaranya sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Pentingnya manfaat energi listrik juga perlu selaras dengan ketersediaan sumber energi pembangkit listrik, sehingga kelestarian sumber energi listrik ini perlu dijaga melalui program strategis yang mampu menunjang penyediaan energi listrik secara optimal, efisien, terjangkau, dan berkelanjutan. Identifikasi terhadap kebutuhan listrik suatu wilayah di masa mendatang menjadi salah satu cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

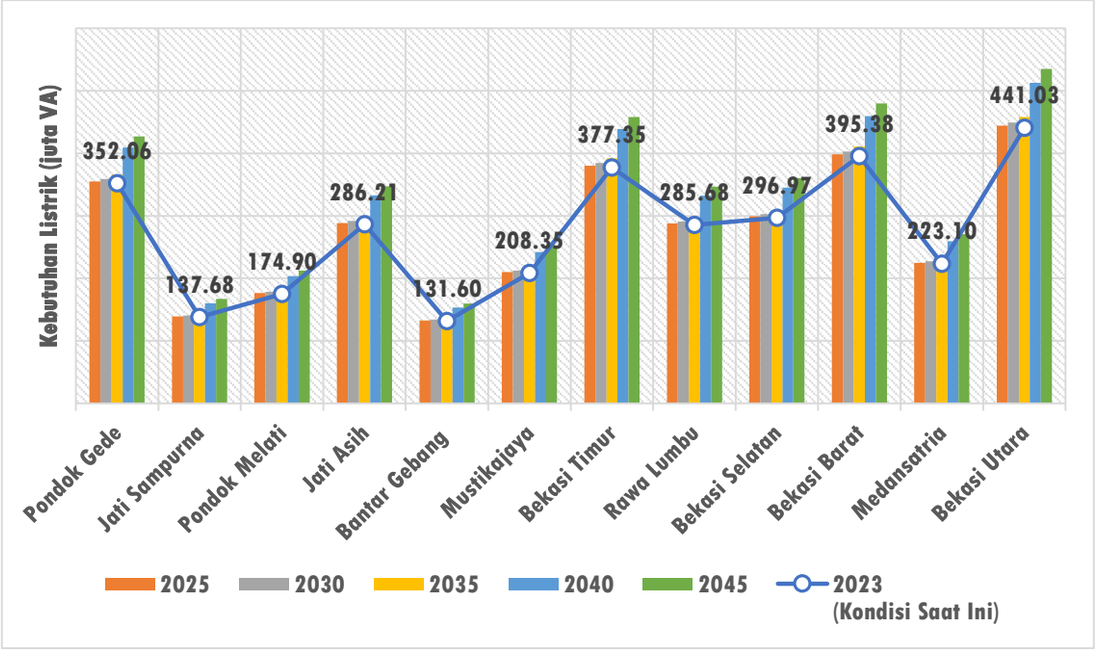
Proyeksi yang berkaitan dengan kelistrikan di Kota Bekasi untuk 20 tahun mendatang didasarkan pada proyeksi perkembangan jumlah penduduk. Secara detil, kebutuhan listrik di Kota Bekaasi dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berrikut.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.99. Proyeksi kebutuhan listrik (juta VA/tahun) di Kota Bekasi

Berdasarkan gambar di atas, kebutuhan listrik di Kota Bekasi terus mengalami peningkattan dalam 20 tahun ke depan, hingga tahun 2045, kebutuhan listrik mencapai 4.017 juta VA/tahun. Peningkatan kebutuhan listrik di Kota Bekasi di masa mendatang perlu diimbangi dengan langkah-langkah strategis dari Pemerintah Kota Bekasi setempat untuk mengatasi terbatasnya sumber energi listrik, sehingga peluang terjadinya krisis energi listrik di masa depan dapat diantisipasi dan dicegah secara optimal. Selanjutnya, kebutuhan listrik per kecamatan didetilkan sebagai berikut.

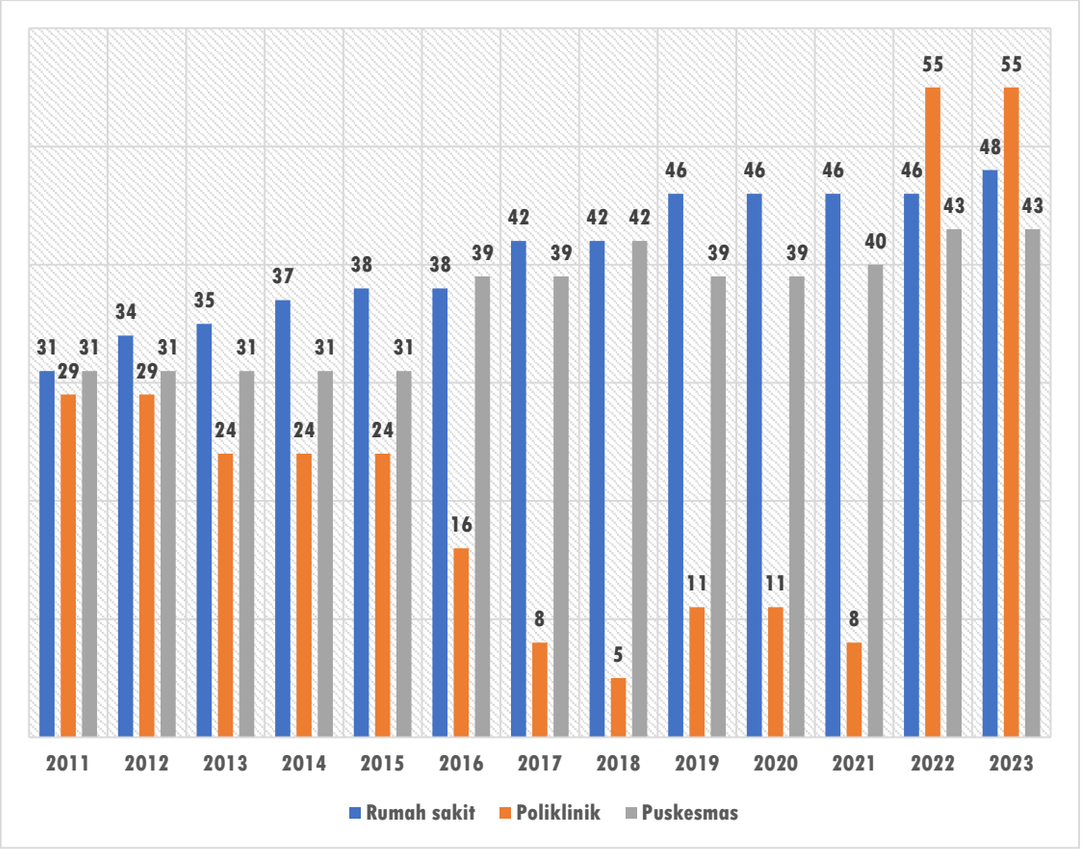


Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.100. Proyeksi kebutuhan listrik (juta VA/tahun) di Kota Bekasi menurut kecamatan

2.6.2.6. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu pokok utama dalam menciptakan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Secara umum ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Bekasi saat ini telah terpenuhi. Berdasarkan data tahun 2023 sejumlah fasilitas kesehatan telah tersebar diseluruh kecamatan, dimana jumlah rumah sakit sebanyak 48 unit, poliklinik 55 unit, puskesmas 43 unit, dan apotek 53 unit. Peningkatan jumlah rumah sakit di Kota Bekasi diikuti dengan penambahan jumlah tempat tidurnya. Pada tahun 2020 dengan 46 rumah sakit terdapat 5.133 tempat tidur, kondisi tersebut masih relevan hingga tahun 2023 karena jumlah rumah sakitnya justru meningkat. Berdasarkan ketentuan WHO, sebaiknya tersedia 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2023 tercatat 2.627.230 jiwa, dengan ketentuan WHO tersebut pemerintah Kota Bekasi hanya perlu menyediakan 2.627 tempat tidur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan rumah sakit saat ini telah mencukupi kebutuhan penduduknya, bahkan mengacu pada perkiraan jumlah penduduk tahun 2045 (3.188.330 jiwa) kondisi jumlah tempat tidur di rumah sakit masih surplus. Setiap kecamatan di Kota Bekasi telah memiliki fasilitas kesehatan baik rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, puskesmas, maupun poliklinik dengan jumlah tempat tidur yang memadai. Fasilitas kesehatan di Kota Bekasi ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

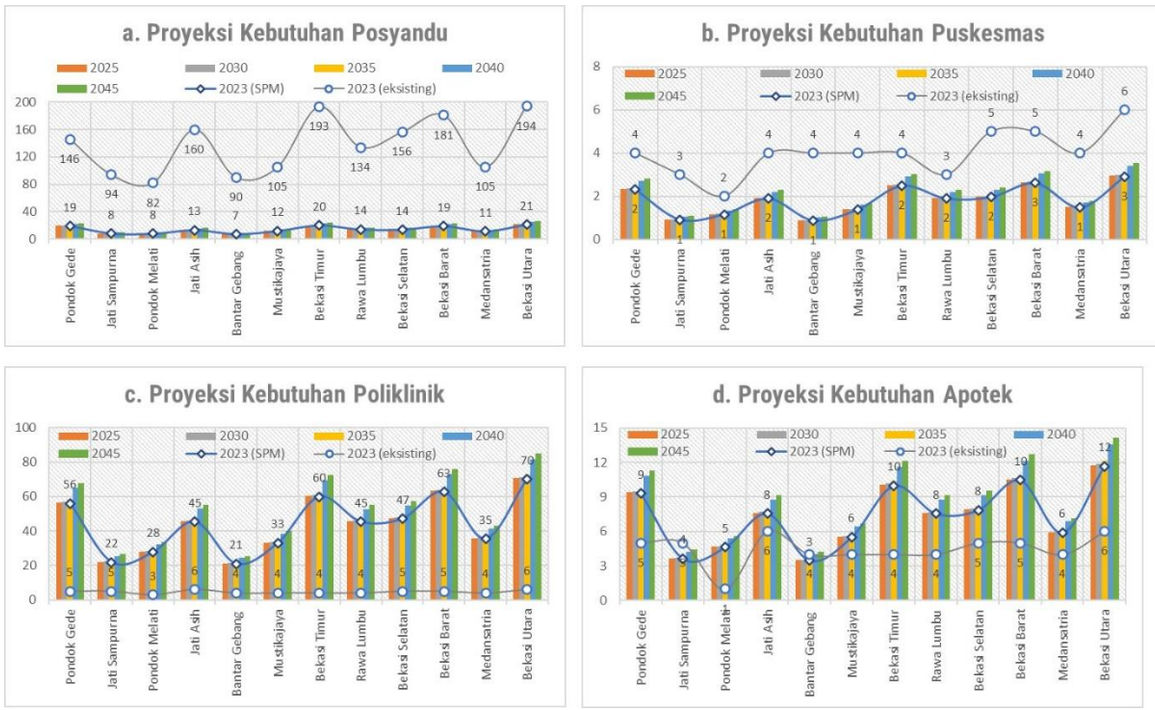


Sumber: Profil kesehatan Kota Bekasi, 2020; Kota Bekasi Dalam Angka, 2012-2024

Gambar 2.101. Jumlah fasilitas kesehatan Kota Bekasi tahun 2011-2023

Pertambahan penduduk di Kota Bekasi yang terus meningkat setiap tahun menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan. Salah satu mekanisme penyediaan sarana kesehatan yaitu dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang dilayani. Dalam hal ini apabila jumlah penduduk meningkat maka ketersediaan fasilitas juga perlu di tambah. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Bekasi dihitung dengan mengacu pada dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Berdasarkan dokumen tersebut terdapat enam fasilitas kesehatan (posyandu, balai pengobatan warga, balai kesehatan ibu dan anak, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek) yang setidaknya terdapat di kawasan perkotan. Masing-masing fasilitas kesehatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Posyandu, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Balai Pengobatan Warga, berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
3. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
4. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyembuhan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan penyakit;
5. Puskesmas Pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; dan
6. Apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.102. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan (a) Posyandu, (b) Puskesmas, (c) Tempat praktek dokter/Poliklinik, (d) Apotek/Rumah Obat di Kota Bekasi tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

Fasilitas posyandu di peruntukkan bagi balita umur 0-5 tahun. Sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 tahun 2004, setidaknya dalam 1.250 balita terdapat satu unit posyandu. Pada tahun 2023 tercatat jumlah balita di Kota Bekasi sebanyak 29.485 balita, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut memerlukan 168 unit posyandu. Namun demikian, berdasarkan data eksisting tahun 2023 ketersediaan posyandu aktif di Kota Bekasi sebanyak 1.615 unit yang tersebar diseluruh kecamatan maupun kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan posyandu di Kota Bekasi telah melebihi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya, mengacu pada hasil proyeksi jumlah balita di Kota Bekasi dari tahun 2025-2045 diperkirakan dengan jumlah posyandu yang ada saat ini masih sangat mencukupi hingga tahun 2045 (**Gambar 2.102**. **a**). Begitu juga dengan kebutuhan puskesmas di Kota Bekasi yang diperkirakan jumlahnya masih mencukupi hingga tahun 2045. Puskesmas disediakan untuk seluruh penduduk, dengan rasio 1: 120.000. Ketersediaan puskesmas pada tahun 2023 berdasarkan data BPS sebanyak 48 unit, sementara berdasarkan perhitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk puskesmas di Kota Bekasi sebanyak 22 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan puskesmas di Kota Bekasi telah memenuhi SPM. Ketersediaan puskesmas di Kota Bekasi saat ini diperkirakan masih bisa melayani penduduk hingga tahun 2045 meskipun jumlah penduduknya telah bertambah (**Gambar 2.102**. **b**).

Kondisi yang berbeda untuk hasil proyeksi kebutuhan tempat praktek dokter atau poliklinik yang cenderung ketersediaanya masih dibawah SMP. Ketersediaan poliklinik saat ini sebanyak 55 unit, sedangkan untuk memenuhi SPM rasio yang ditetapkan sebanyak 1: 5.000. Berdasarkan ketetapan tersebut maka kebutuhan tempat praktek dokter atau poliklinik sebanyak 525 unit sehingga terdapat kekurangan sebanyak 470 unit. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2045 dimana ketersediaan tempat praktek dokter atau poliklinik belum memenuhi SPM (**Gambar 2.102**. **c**). Meskipun demikian fasilitas layanan kesehatan bagi penduduk Kota Bekasi masih bisa didukung melalui ketersediaan rumah sakit maupun puskesmas yang cenderung lebih banyak ketersediaanya, bahkan untuk melayani penduduk telah melebihi SPM.

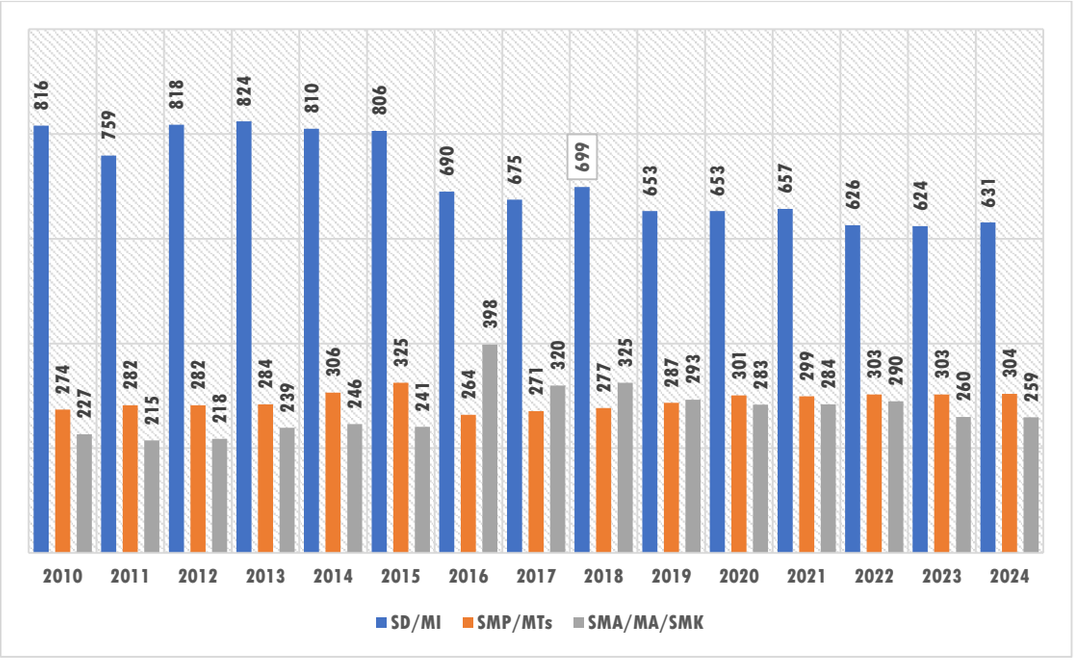
Selanjutnya untuk ketersediaan apotek kondisinya tidak jauh berbeda dengan tempat praktek dokter atau poliklinik, dimana jumlah eksisting masih berada di bawah SPM. Keberadaan apotek di Kota Bekasi tahun 2023 tercatat sebanyak 53 unit, sementara berdasarkan perhitungan SPM dengan

perbandingan 1:30.000 memerlukan apotek sebanyak 525 unit. Kondisi tersebut diprediksi terus berlangsung hingga tahun 2045 namun tidak selalu terjadi di setiap kecamatan (**Gambar 2.102. d**). Kondisi ini tidak terlalu menjadi masalah bagi Kota Bekasi dikarenakan saat ini telah banyak alternatif dalam pembelian obat.

2.6.2.7. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan elemen penting dalam mendukung proses belajar yang berkualitas. Infrastruktur tersebut terdiri dari fasilitas fisik (sekolah, ruang kelas, laboratorium) dan fasilitas non-fisik (teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kurikulum, dan tenaga pengajar). Ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dapat meningkatkan kualitas, mutu, dan daya saing daerah dalam menciptakan SDM yang berkualitas.

Ketersediaan infrastruktur pendidikan di Kota Bekasi mengalami dinamika dalam hal jumlahnya. Jumlah sekolah SD/MI secara umum dari tahun 2010-2024 mengalami penurunan sebesar 185 unit, sementara untuk sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing mengalami peningkatan sebesar 30 dan 32 unit. Secara lebih detil dinamika ketersediaan sekolah untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA disajikan pada **Gambar 2.103**.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2024; Kota Bekasi Dalam Angka 2010-2024

Gambar 2.103. Jumlah fasilitas pendidikan Kota Bekasi tahun 2010-2024

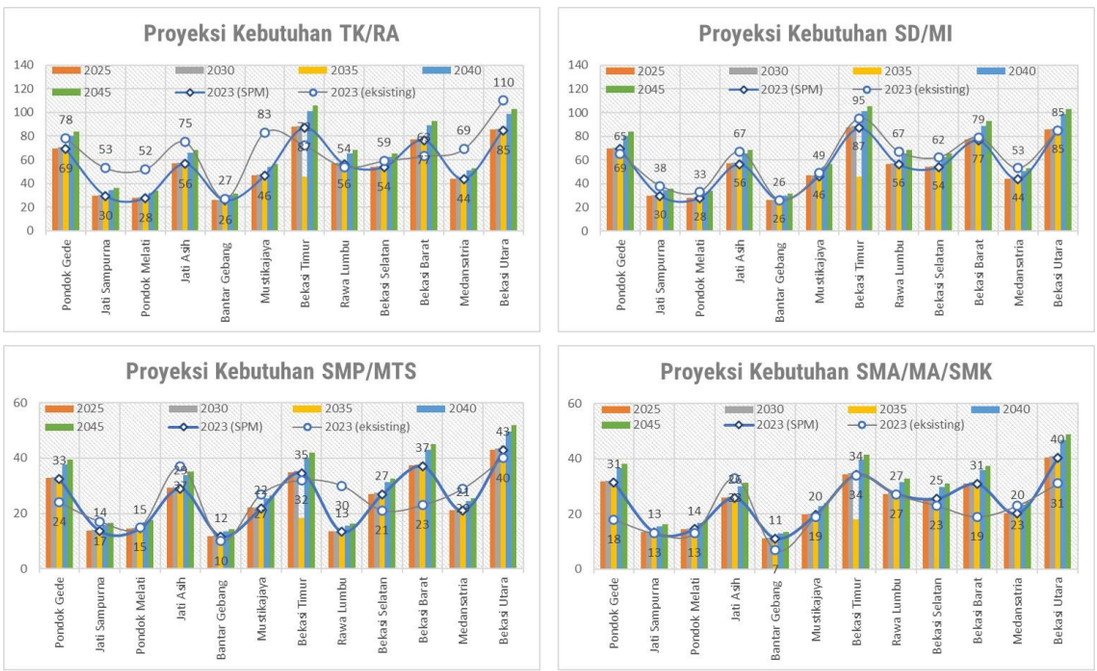
Perencanaan kebutuhan sarana pendidikan dilakukan untuk memenuhi fasilitas dasar yang diperlukan oleh penduduk Kota Bekasi di bidang pendidikan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang terbentuk. Perhitungan proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan di Kota Bekasi mengacu pada dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menghitung proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan yaitu berdasarkan standar kebutuhan sarana pendidikan per jumlah penduduk kelompok usia sekolah dan jumlah rombongan belajarnya. Standar baku untuk kelompok TK/RA dan SD/MI setiap sekolah terdiri dari 360 peserta didik dengan 9 rombongan belajar, SMP/MTs dan SMA terdiri dari 720 peserta didik dan 18 rombongan belajar.

Hasil analisis proyeksi kebutuhan infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa untuk sekolah TK/RA ketersediaannya telah memenuhi SPM. Jumlah sekolah TK yang ada pada tahun 2023 tercatat sebanyak 795 unit, sementara hasil perhitungan SPM sebanyak 657 unit. Pada tahun 2045 dengan mengikuti perkembangan jumlah penduduk diperkirakan kebutuhan sekolah TK/RA sebanyak 798 unit, sehingga pemerintah Kota Bekasi hanya perlu menambah 3 unit sekolah lagi.

Kondisi yang sama juga untuk kebutuhan sekolah SD/MI, dimana hasil perhitungan SPM tahun 2023 diperlukan sebanyak 657 unit, sementara berdasarkan data BPS jumlah sekolah SD/MI yang tercatat saat ini sebanyak 719 unit. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan sekolah mencapai 764 unit. Pemerintah Kota masih perlu menambahkan sebanyak 79 unit sekolah SD/MI.

Hal serupa juga masih terjadi untuk kebutuhan sekolah tingkat SMP/MTs, dimana hasil perhitungan SPM tahun 2023 diperlukan sebanyak 299 sekolah. Sementara kondisi eksisting menunjukkan sekolah yang ada saat ini sebanyak 305 unit. Tahun 2045 diperkirakan Kota Bekasi memerlukan 363 unit sekolah SMP, MTs. Maka dari itu pemerintah Kota Bekasi masih perlu berusaha untuk memenuhi sebanyak 58 unit sekolah.

Pada tingkat SMA/MA kebutuhan sekolah tahun 2023 sesuai SPM sebanyak 295 unit, sementara sekolah yang tersedia saat ini sebanyak 260 sehingga masih kurang sekitar 34 unit sekolah. Dikarenakan sekolah tingkat SMA/MA merupakan kewenangan pemerintah provinsi maka pemerintah Kota Bekasi tidak sepenuhnya bertanggungjawab dalam memenuhi kekurangan tersebut namun akan tetap terlibat dan mendudkung program dari provinsi. Pada tahun 2045 diperkirakan kebutuhan sekolah SMA/MA meningkat menjadi 356 unit, sehingga pemerintah perlu menambahkan sebanyak 96 unit lagi. Secara lebih detil hasil perhitungan proyeksi kebutuhan sekolah di Kota Bekasi disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 2.104. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan (a) TK/RA, (b) SD/MI, (c) SMP/MTS (d) SMA/MA/MTS di Kota Bekasi tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kota Bekasi merupakan salah satu bagian dari berkembangnya perkotaan di Indonesia yang secara umum menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Pesatnya pertumbuhan perkotaan di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk di dalamnya, yang menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di Kawasan ASEAN. Didukung oleh jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang besar, sejak 2008 Indonesia merupakan satu- satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 1,3 triliun pada tahun 2022. Lebih lanjut, Indonesia masuk ke dalam kelompok negara yang berpotensi berkembang pesat bersama dengan negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Hal ini didorong oleh pasar domestik Indonesia yang besar

seiring dengan pertumbuhan kelompok kelas menengah. Hampir setengah dari populasi Indonesia berada di daerah perkotaan dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas konsumsi karena besarnya jumlah permintaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan perkotaan dengan mendalami isu dan tantangan perkotaan di masa depan, juga dengan strategi dan arah kebijakan yang dapat dilakukan. RPJPN 2025-2045 memiliki Visi yaitu Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi yang terdiri dari tiga Transformasi Indonesia (Misi 1 Transformasi Sosial, Misi 2 Transformasi Ekonomi, Misi 3 Transformasi Tata Kelola), dua Landasan Transformasi (Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi), dan tiga Kerangka Implementasi (Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan). Dari ke delapan misi tersebut, RPJPN 2025-2045 menempatkan isu perkotaan ke dalam tiga misi yaitu pada Misi 2 (IE 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi), Misi 6, dan Misi 7.

Isu dan tantangan pembangunan ke depan dalam RPJPN 2025-2045 terutama yang berkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan diantaranya adalah jumlah dan peranan perkotaan di masa depan sebagai pusat pertumbuhan akan terus meningkat dan menuntut perencanaan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan di Indonesia yang hanya mencapai 1,4 (1 persen pertumbuhan penduduk menaikkan pertumbuhan PDB per kapita perkotaan sebesar 1,4 persen). Sementara itu, tingkat urbanisasi dalam 10 tahun terakhir mencapai 0,67 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

2.7.1.1. Kota Bekasi dalam Persepktif Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur

A. Kota Bekasi dalam Perspektif RTRWN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks tata ruang nasional adalah sebagai berikut:

1) Sistem Perkotaan
   Kota Bekasi termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) pada Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan kategori II.C.3, yaitu Tahap Pengembangan Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional melalui Revitalisasi Kota-kota yang Telah Berfungsi.
2) Jalan Bebas Hambatan
   Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota, jalur Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan kategori II/6, yaitu Tahap Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan.
3) Wilayah Sungai
   Termasuk Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane meliputi Provinsi Banten-DKI Jakarta-Jawa Barat, dengan kategori (II-IV/A), yaitu Tahap Pengembangan Perwujudan Sistem Jaringan SDA.
4) Kawasan Andalan
   Kawasan Jabodetabekpunjur dengan kegiatan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan panas bumi.
5) Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat), dengan kategori (II/A/ 1), yaitu Tahap Pengembangan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi.

B. Kota Bekasi dalam Perspektif RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur, kedudukan Kota Bekasi dalam konteks Jabodetabekpunjur sebagai berikut:

1) Kawasan Perkotaan Bekasi di Kota Bekasi meliputi seluruh wilayah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang mencakup Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Jati Sampurna, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pondok Melati, dan Kecamatan Rawa Lumbu;
2) Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan.
3) Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai:
    a) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
    b) pusat perdagangan dan jasa skala regional;
    c) pusat pelayanan kesehatan;
    d) pusat pelayanan pendidikan tinggi;
    e) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
    f) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
4) Jaringan Jalan Arteri Primer:
    a) jalan Sultan Agung (Bekasi);
    b) jalan Sudirman (Bekasi);
    c) jalan A. Yani (Bekasi);
    d) jalan Cut Mutia (Bekasi);
    e) jalan Juanda (Bekasi)
5) Terminal:
    a) terminal Penumpang A Jatiasih di Kecamatan Jatiasih;
    b) terminal Penumpang B Pondok Gede di Kecamatan Pondok Gede dan Terminal Bekasi di Kecamatan Bekasi Timur pada Kota Bekasi;
    c) terminal Barang Rawa Pasung di Kecamatan Medan Satria dan Terminal Barang Bantar Gebang di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi;
6) Sistem Jaringan Perkeretaapian:
    a) Jaringan jalur kereta api perkotaan diantaranya berupa *Commuter Line*, *Light Rapid Transit* dan *Mass Rapid Transit*,
        - jalur kereta api Manggarai-Jatinegara-Bekasi-Cikarang (Manggarai-Cikarang);
        - jalur angkutan massal berbasis rel Cawang-Bekasi Timur;
    b) Stasiun kereta api antarkota yaitu Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi;
    c) Stasiun Commuter Line Stasiun Rawa Bebek dan Stasiun Kranji di Kecamatan Bekasi Barat, serta Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi;
    d) Stasiun Light Rapid Transit Stasiun Jatibening dan Stasiun Cikunir di Kecamatan Pondok Gede, serta Stasiun Bekasi Barat di Kecamatan Bekasi Selatan pada Kota Bekasi;
    e) Stasiun *Mass Rapid Transit* Stasiun Bekasi di Kecamatan Bekasi Selatan pada Kota Bekasi;
7) Sistem Jaringan Energi:

a) Pembangkit Tenaga Listrik, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi Tambun-inc (Bekasi-Cibinong);
b) Pembangkit Tenaga Listrik, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Gardu Induk Pondok Kelapa di Kecamatan Bekasi Barat, Gardu Induk Poncol di Kecamatan Bekasi Timur, Gardu Induk Sukatani, Gardu Induk Halim, dan Gardu Induk Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara, Gardu Induk Bekasi II/ Summarecon di Kecamatan Medan Satria, Gardu Induk Tambun di Kecamatan Mustika Jaya, Gardu Induk Jatirangon dan Gardu Induk Jatirangon II di Kecamatan Pondok Melati, serta Gardu Induk Jatiwaringin II di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

8) Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sentral Telepon Otomat (STO) di Kota Bekasi;

9) Sistem Jaringan Sumber Daya Air,
a) Sumber Air,
Situ Rawa Pulo di Kecamatan Jatisampurna, serta Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Lumbu di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi;
b) Sistem Pengendalian Banjir,
Situ Rawa Pulo di Kecamatan Jatisampurna, serta Situ Rawa Gede dan Situ Rawa Lumbu di Kecamatan Rawa Lumbu pada Kota Bekasi;

10) Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan,
a) SPAM Jaringan Perpipaan
- IPA Cikeas di Kecamatan Jatisampurna, IPA JatibeningBaru di Kecamatan Pondok Gede, IPA Mustikajaya di Kecamatan Mustika Jaya, IPA Poncol dan IPA Tambun Utara di Kecamatan Bekasi Timur,
- IPA Pondok Ungu di Kecamatan Medan Satria,
- IPA Rawalumbu di Kecamatan Rawalumbu, serta
- IPA Teluk Buyung di Kecamatan Bekasi Utara pada Kota Bekasi

b) Unit Air Minum Kota Bekasi

11) Sistem Jaringan Drainase,
Sungai Blencong di DAS Blencong pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, serta Kabupaten Bekasi clan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

12) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik,
IPAL Bekasi Utara di Kecamatan Bekasi Utara dan IPAL Bantar Gebang di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi;

13) Sistem Persampahan
TPA Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang pada Kota Bekasi;

14) Sempadan Sungai
Sungai Sunter, Sungai Cakung, Sungai Blencong, dan Sungai Bekasi di Kota Bekasi;

15) Kawasan imbuhan air tanah Jakarta mencakup wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagian wilayah Kota Depok, serta Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

2.7.1.2. Kota Bekasi dalam RTRW Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Kota Bekasi dalam perspektif Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1) Penataan Ruang Daerah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia.

2) Sistem Pusat Permukiman
   PKN, yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yaitu Kawasan Perkotaan Bodebek;

3) Rencana Struktur Ruang:
   a) sistem jaringan transportasi;
   b) sistem jaringan jalan;
      - jalan umum;
      - jalan arteri
        1. Jalan Sultan Agung (Kota Bekasi);
        2. Jalan Sudirman (Kota Bekasi);
        3. Jalan A. Yani (Kota Bekasi);
        4. Jalan Cut Mutia (Kota Bekasi);
        5. Jalan Juanda (Kota Bekasi);
      - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
        1. Jalan Siliwangi (Kota Bekasi);
      - Jalan tol;
        1. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2B Marga JayaTambun) (JB17) (rencana);
        2. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Koneksi Tol Wiyoto Wiyono) (JB17);
        3. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Jaka Sampurna-Jalan Hasibuan) (JB17) (rencana);
      - terminal penumpang Tipe A di Kota Bekasi;
      - terminal barang di Kota Bekasi; dan
   c) sistem jaringan kereta api;
      - Stasiun Kereta Api di Kota Bekasi
      - Stasiun penumpang angkutan umum masal berbasis rel (*Light Rail Transit* dan/atau *Mass Rapid Transit*) di Kota Bekasi
   d) sistem jaringan energi;
      - jaringan minyak dan gas bumi di Kota Bekasi;
      - jaringan gas perkotaan di Kota Bekasi;
      - pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Daerah Kota Bekasi;
   e) sistem jaringan sumber daya air; dan
      - WS Ciliwung-Cisadane;
   f) sistem jaringan prasarana lainnya
      - Jaringan dan Bangunan Sumber Daya Air
        1. Bendungan di Kota Bekasi
   g) Sistem Persampahan
      - TPA Bantargebang di Kota Bekasi;

4) Kawasan Strategis
   a) KSN Perkotaan Jabodetabek-Punjur dengan sektor unggulan agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata.
   b) Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan dan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja.

2.7.1.3. Sistem Pusat Kegiatan RTRW Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kota Bekasi sebagai pusat pertumbuhan tercermin dalam:

1) Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2) Rencana Struktur Ruang

   a) Sistem Pusat Pelayanan Kota

      (1) Penetapan PPK, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Rawalumbu dan Bekasi Selatan yang meliputi kawasan Jalan Sudirman-Juanda-Cut Meutia-Ahmad Yani dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan tinggi, pusat perdagangan, pusat hiburan dan rekreasi.

      (2) Penetapan SPPK meliputi:
         a. SPPK Pondok Gede berada di sekitar Kelurahan Jatiwaringin mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jaticempaka, Jatibening Baru, Jatibening, Jatiwaringin, Jatimakmur dengan fungsi pusat pemerintahan, perdagangan skala grosir dan retail berkelompok, pusat jasa dan pusat pendidikan;
         b. SPPK Bekasi Utara berada di sekitar di Kelurahan Perwira mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kaliabang Tengah, Harapan Jaya, Perwira, Teluk Pucung, Harapan Baru, Margamulya dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat perdagangan;
         c. SPPK Jatisampurna berada di sekitar Kelurahan Jatikarya mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Jatisampurna, Jatirangga, Jatiraden, Jatikarya, Jatiranggon, dengan fungsi pelayanan utama sebagai pusat permukiman skala besar, pusat perdagangan;
         d. SPPK Mustikajaya berada di sekitar Kelurahan Pedurenan mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Mustikajaya, Mustikasari, Pedurenan, Cimuning dengan fungsi pusat pemerintahan, pusat industri dan jasa pergudangan, pusat permukiman skala besar, pusat prasarana persampahan (TPPAS DKI Bantargebang), dengan penyediaan pembangunan "*buffer zone*" yang dapat berupa taman kota, tempat pemakaman umum, dan lain-lain.

      (3) Penetapan PPL yang merupakan pusat pelayanan pemerintahan dan perdagangan dengan skala pelayanan kelurahan dan/atau lingkungan perumahan, meliputi Kecamatan Medan Satria berpusat di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Rawalumbu berpusat di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi Selatan berpusat di Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Barat berpusat di Kelurahan Bintara, Kecamatan Jatiasih berpusat di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Pondok Melati berpusat di Kelurahan Jatiwarna dan Kecamatan Bantargebang berpusat di Kelurahan Bantargebang.

   b) Sistem Jaringan Prasarana

      (1) pengembangan sistem transportasi darat;
      Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi:

         a. rencana pembangunan jalan (*commitment plan*) regional strategis yang melintasi atau berada di Kota Bekasi, yaitu:
            1. pengembangan jaringan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu/Becakayu melalui koridor Kalimalang-Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Agus Salim;
            2. pembangunan jalan tol Jatiasih-Setu;
            3. pembangunan jalan bebas hambatan dalam kota, JORR 2 dari Cibubur-Cileungsi-Setu-Babelan sampai ruas JORR I di daerah cakung;
            4. pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung;

5. pelebaran jalan dan pembangunan jalan baru ruas jalan Bekasi Raya (Jl. Pejuang-Jl Kaliabang-Hingga Cikarang);
6. pelebaran jalan Siliwangi;
7. pembangunan jalur busway dari Setu (JORR 2)-Jl. Siliwangi-Tol Bekasi-Jakarta.

b. rencana pengembangan jaringan jalan dalam kota, dilakukan dengan peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru, yaitu:
   1. peningkatan fungsi dan kapasitas jalan Arteri Primer: Jl. Hankam Raya, Jl. Jatiwaringin, Jl. Cikunir, Jl. Kodau, Jl. Perjuangan;
   2. peningkatan kapasitas jalan Arteri Sekunder poros Barat-Timur: Jl. Swantatra, Jl. Pasar Rebo, Jl. Jole, Jl. KH. Noer Alie, Jl. Hasibuan, Jl. Chairil Anwar, Jl. Terusan IGN Rai, Jl. Pangeran Jayakarta, Jl. M Tabrani, Jl. Raya Pejuang, Jl. Lingkar Utara, Jl. Ir Juanda, Jl. Pangkalan II, Jl. Bayan;
   3. peningkatan kapasitas jalan Arteri Sekunder poros Utara-Selatan: Jl. Pengasinan, Jl. Mustikasari, Jl. Joyomartono, Jl. Pahlawan, Jl. Pemuda, Jl, Pekayon, Jl. Caman Jatibening, Jl. Jatimakmur, Jl. Kaliabang Tengah;
   4. pembangunan jalan Arteri poros Barat-Timur: Jl. Bojong Menteng-Jatiasih; Jl. KH Noer Alie sisi selatan, Jl. Surya Mandala;
   5. pembangunan jalan Arteri poros Utara-Selatan: Jl. Tambun-Cimuning; Jl. Cimuning-Sumur Batu (cinyosog).

c. rencana penanganan persimpangan sebidang dan tidak sebidang, meliputi:
   1. pengembangan persimpangan interchange Jalan Ahmad Yani;
   2. pengembangan persimpangan interchange JORR-Jalan Hankam Raya;
   3. pengembangan persimpangan interchange JORR-Jalan Jatikramat;
   4. pengembangan jalan layang Pahlawan-Joyomartono;

d. rencana pengembangan terminal meliputi:
   1. pembangunan terminal regional di sekitar Kebantenan Kecamatan Jatiasih yang memiliki akses terhadap jaringan regional JORR I dan JORR 2;
   2. peningkatan fungsi terminal di Kecamatan Pondokgede menjadi Terminal Tipe B;
   3. pengembangan Terminal Tipe C di Teluk Pucung, Sumber Arta, dan di Kecamatan Jatisampurna;
   4. pembangunan terminal barang di Bantargebang dan Medan Satria.

(2) pengembangan sistem jaringan energi gas dan listrik;
   a. rencana jaringan pipa distribusi gas, meliputi pengembangan pelayanan gas melalui jaringan pipa untuk kawasan industri, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
   b. penataan jaringan energi gas melalui jaringan terpadu bawah tanah;
   c. penataan jaringan listrik di kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota melalui jaringan terpadu bawah tanah;
   d. penataan dan pengamanan jaringan listrik yang ada di kawasan perumahan.

(3) pengembangan sistem telekomunikasi;

   a. penataan jaringan telekomunikasi di kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota melalui jaringan terpadu bawah tanah;
   b. pengembangan BTS terpadu;
   c. pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kota

(4) pengembangan sistem jaringan sumber daya air;

   a. Sungai lintas kabupaten/kota, meliputi Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Bekasi, Kali Sunter, Kali Cakung dengan rencana pengelolaan: pengamanan tanggul dan GSS,

pembangunan folder, pemanfaatan sebagai sumber air baku, serta peningkatan kerjasama antar wilayah;

b. Situ meliputi Situ Rawalumbu, Situ Rawa Gede, dan Situ Rawa Pulo dengan rencana pengelolaan: normalisasi, pengamanan aset, revitalisasi, kegiatan pariwisata dan pengendalian banjir;
c. Saluran Tarum Barat (Kalimalang) sebagai sumber utama air baku untuk air minum, yang dialirkan melalui Saluran Sekunder Bekasi Tengah, Bekasi Utara, dan Bekasi Pangkal untuk sistem jaringan air minum.

(5) pengembangan infrastruktur kota.

a. Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendali banjir
    1. menata ulang struktur hirarki drainase dan mengintegrasikan saluran drainase pada daerah-daerah yang baru dikembangkan;
    2. optimalisasi fungsi saluran primer dan rehabilitasi saluran sekunder;
    3. pemeliharaan dan pengembangan saluran tersier;
    4. pengembalian fungsi situ-situ sebagai sistem retensi di Kelurahan Bojong Rawalumbu (Situ Rawalumbu), Kelurahan Bojongmenteng (Situ Rawa Gede) dan Situ Rawa Pulo;
    5. pembangunan sistem tampungan air di sepanjang saluran primer dan sekunder di kawasan Harapan Baru Regensi, kawasan Taman Permata Cikunir, Situ Uwong, kawasan Puri Gading, Bendung Cikeas, kawasan Rawa Pulo, Kelurahan Pengasinan, kawasan Rawa Pasung, kawasan Rawa Lele, Jati Bening 2, Situ Jati Bening, kawasan Kompleks Kodam Jaya, kawasan Bumi Bekasi 3, Situ Rawalumbu, Saluran Rawalumbu Hulu, PHP Narogong, Rawa Gede, Cipendawa dan Desa Jatimulya;
    6. pembuatan dan/atau peninggian tanggul banjir untuk mengendalikan banjir dengan kala ulang yang besar;
    7. penyediaan tampungan air di perumahan baru yang tidak memiliki badan air penerima melalui kerjasama dengan pihak pengembang;
    8. pembuatan sumur resapan di kawasan peruntukan perumahan, industri, serta perdagangan dan jasa;
    9. membuat bangunan pintu klep dan pompa untuk mengatasi arus balik;
    10. pengendalian dan penertiban bangunan pada sempadan sungai;
    11. mempertahankan fungsi kawasan peresapan air;
    12. normalisasi kali lama di hilir Kali Bekasi dan integrasi sistem jaringan drainase pengendali banjir Kota Bekasi dengan Banjir Kanal Timur (BKT);
    13. meningkatkan kerjasama pembangunan prasarana pengendalian banjir dengan pemerintah daerah sekitar melalui pembuatan program pembangunan bersama.

b. Rencana penyediaan air minum;
    1. pengembangan dan perluasan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), yaitu:
        - IPA Pondok Ungu Kecamatan Medan Satria di Kelurahan Pejuang;
        - IPA Teluk Buyung Kecamatan Bekasi Utara di Kelurahan Margamulya;
        - IPA Poncol Kecamatan Bekasi Timur di Kelurahan Margahayu;
        - IPA Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu di Kelurahan Pengasinan;
        - IPA Cikeas Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih;
        - IPA Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya;
        - IPA Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede.
    2. penyediaan air minum, yaitu:

- penyediaan air minum sampai tahun 2014 terpusat pada kawasan pusat kota;
- penyediaan air minum sampai dengan tahun 2031 akan dikembangkan sampai ke seluruh wilayah dengan tingkat pelayanan rata-rata mencapai 55% dan tingkat kebocoran maksimal 25%

c. Rencana pengembangan pengelolaan sampah
   1. pengembangan pengelolaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sumur Batu, meliputi:
      - peningkatan kapasitas sarana dan prasarana di TPPAS Sumur Batu;
      - pengembangan industri pengolahan sampah modern dan terpadu secara bertahap;
      - pelaksanaan *clean development mechanism* (CDM) yang mekanismenya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota;
      - pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah sebagai sumber energi.
   2. pengelolaan sampah dilakukan melalui:
      - sistem desentralisasi dengan pembangunan Stasiun Pengumpul Antara (SPA);
      - melaksanakan 3R;
      - pemberdayaan kelompok masyarakat;
      - peningkatan sarana dan prasarana berbasis teknologi terbarukan.
   3. meningkatkan kerjasama regional dalam penanganan sampah secara bersama.

d. Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah,
   1. pengolahan air limbah domestik berupa lumpur tinja secara terpusat diarahkan pada skala perumahan dan/atau kelurahan melalui perpipaan;
   2. pembangunan IPAL Terpadu Bekasi Utara untuk mengolah air limbah industri di wilayah sekitar Bekasi Utara dan Medan Satria dengan kapasitas minimal 1.000 m^3/hari;
   3. IPAL Terpadu Bantargebang untuk mengolah air limbah industri di sekitar Bantargebang dengan kapasitas minimal 1.000 m^3/hari;
   4. pembangunan instalasi pengolahan limbah B3 termasuk limbah medis diarahkan di Bantargebang dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

e. Rencana pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi pemerataan pelayanan penerangan jalan umum (PJU) pada seluruh lingkungan permukiman, jalan protokol, jalan penghubung, taman serta pusat aktifitas masyarakat dengan memperhatikan estetika kota.

f. Rencana jalur evakuasi bencana, meliputi lokasi rawan banjir dengan menggunakan jaringan jalan eksisting yang terdekat dan mudah dicapai menuju lokasi evakuasi bencana yang sudah ditetapkan;

g. Rencana sistem pemadam kebakaran
   1. membangun pos pemadam kebakaran dengan lokasi tersebar minimal satu di setiap SPPK;
   2. membangun hidran-hidran air tersebar secara merata disepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan;
   3. membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran khususnya di kawasan permukiman; dan
   4. meningkatkan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

2.7.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah

Walaupun masih bersifat umum, namun baik isu, tantangan dan arah kebijakan perkotaan yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dapat menjadi acuan bagaimana kota-kota di Indonesia termasuk Kota Bekasi, dapat menangkap dan menelaahnya sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di wilayahnya masing-masing. Selain isu perkotaan, RPJPN 2025-2045 memberikan arahan kewilayahan yang dibagi ke dalam tujuh pulau besar (Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), dimana setiap kabupaten/kota yang terdapat di dalamnya dapat menelaah arah pembangunan yang dapat berpengaruh terhadap wilayahnya.

RPJPN 2025-2045 pada bagian arah kebijakan transformasi ekonomi, wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor" Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi" melalui kebijakan, yang salah satunya berupa "Pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Bekasi-Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri *consumer goods* dan *general manufacture*).

Arah kebijakan landasan transformasi RPJPN 2025-2045 berupa ketahanan sosial budaya dan ekologi, didalamnya meliputi penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat lokal terhadap ancaman perubahan iklim seperti rob dan abrasi, termasuk perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 tahunan.

Kota Bekasi sebagai bagian dari kawasan perkotaan di Pulau Jawa memiliki karakteristik yang mencirikan karakteristik Pulau Jawa. Wilayah Jawa merupakan pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi dibanding pulau lain di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja usia muda yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pasar domestik yang luas dan tumbuh secara cepat menjadi faktor keunggulan Wilayah Jawa. Hal tersebut melatarbelakangi terkonsentrasinya kegiatan ekonomi Indonesia di Wilayah Jawa. Pesatnya pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa. serta industri teknologi informasi dan komunikasi memunculkan adanya simpul-simpul produksi dan distribusi yang berkembang menjadi kota-kota dengan segala fasilitasnya. Potensi pertanian dan perkebunan pun masih signifikan. Wilayah Jawa telah menjadi pusat pertumbuhan bagi industri padat modal dan padat karya seperti industri tekstil, logam, besi, alat angkutan, makanan minuman, elektronik, yang ditunjang oleh konektivitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut didukung pula dengan fasilitas pendidikan paling lengkap dan beragam, serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dasar dan terapan.

Wilayah Jawa memiliki keunggulan: (1) berbatasan langsung dengan ALKI 1; (2) telah diterapkan rintisan *Smart City Creative Financing*, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (3) banyak perguruan tinggi negeri berkualitas baik.

Keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam di Wilayah Jawa yang didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju, menjadikan pariwisata sebagai salah satu potensi utama wilayah Jawa.

Potensi pariwisata yang ada saat ini tercermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek pariwisata berbasis alam maupun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya.

Saat ini, kontribusi Wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional cukup besar (56,48 persen). Namun, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat masih menunjukkan kinerja di bawah nasional, antara lain tingkat pengangguran terbuka di Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, angka partisipasi murni SMA di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta angka RLS Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan analisis *growth diagnostics* per provinsi di Wilayah Jawa, hambatan utama pertumbuhan ekonomi (*the most binding constraints*) pada tiap provinsi di Wilayah Jawa antara lain, SDM Kesehatan di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, SDM Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dan SDM Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Selama masa pandemi tahun 2020 dan pemulihan tahun 2021, tingkat inflasi seluruh provinsi di Wilayah Jawa tercatat terjaga dibandingkan pada masa sebelum pandemi tahun 2019. Namun, tingkat inflasi masih rentan terhadap gejolak harga BBM seperti pada tahun 2022 ketika terjadi Geopolitik Rusia-Ukraina.

Isu utama ekonomi Wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat pengembangan industri di Wilayah Jawa, yaitu rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri. Selanjutnya wilayah metropolitan (WM) di Jawa seperti WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya masih menghadapi berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan. dan permukiman kumuh. Permasalahan perkotaan ini berdampak pada kerugian ekonomi. Contohnya di Jakarta, isu kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar 65 triliun pada tahun 2020.

Isu utama aspek sosial Wilayah Jawa yaitu masih adanya beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia di Wilayah Jawa di antaranya (1) masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; (2) tingginya penyakit tidak menular dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami *stunting* dan insidensi Tuberkulosis; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia di Wilayah Jawa; dan (4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Pada tahun 2022 triwulan II, 3 (tiga) provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional, di antaranya Provinsi Jawa Barat (8,31 persen; peringkat 1), Provinsi Banten (8,09 persen; peringkat 3), dan Provinsi DKI Jakarta (7.18 persen; peringkat 4). Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan, kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri, kondisi dan kualitas balai pelatihan keterampilan kerja belum mampu mengimbangi perkembangan IPTEK industri, serta masih rendahnya pelayanan dasar pendidikan di pedesaan.

2.7.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana-prasarana dan kemudahan akses dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan kualitas distribusi logistik di Wilayah Jawa. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya peningkatan efektivitas perdagangan seiring dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor, meningkatnya investasi industri, dan meningkatnya perkembangan daerah. Keunggulan Wilayah Jawa, seperti angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang tumbuh secara cepat, serta kondisi sarana dan prasarana yang lengkap tidak akan berfungsi secara optimal apabila tidak diimbangi dengan pengembangan teknologi industri.

Produksi tenaga listrik di Wilayah Jawa masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah. Sistem ketenagalistrikan di Wilayah Jawa sudah terinterkoneksi secara menyeluruh termasuk dengan Sistem Bali (membentuk Sistem Jamali/Jawa-Madura-Bali). Sistem Jamali sebagai sistem interkoneksi kelistrikan terbesar di Indonesia berkontribusi terhadap 70 persen produksi energi listrik di Indonesia. Beban puncak tertinggi mencapai 28.094 Mega Watt (MW) dan produksi energi listrik di pembangkitan sebesar 197 Tera Watt hours (TWh) dalam periode setahun. Pola operasi pembangkitan di Sistem Jamali akan sangat menentukan produksi emisi karbon CO_2 yang dihasilkan. Sementara itu, pelayanan ketenagalistrikan Wilayah Jawa didominasi oleh rumah tangga dan industri dengan tingkat konsumsi listrik per kapita yang relatif baik. *Reserve margin* per wilayah di sistem interkoneksi Jawa-Bali memiliki nilai yang

cukup bervariasi di mana wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki angka *reserve margin* yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut disebabkan beban puncak yang berbeda-beda pada masing- masing wilayah. Wilayah Jawa juga memiliki sumber energi primer dalam pengembangan energi bersih (*clean energy*) berupa sumber energi surya, panas bumi, air, dan bayu (angin) masing-masing dengan potensi kapasitas sekitar 640,27 GW, 7,90 GW, 0,58 GW, dan 39,05 GW. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga angin sudah mulai dikembangkan di beberapa provinsi di Wilayah Jawa, seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Wilayah Jawa juga menghasilkan listrik dari beberapa PLTA seperti PLTA Saguling dan PLTA Cirata.

Pemanfaatan infrastruktur TIK di Wilayah Jawa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif. Pembangunan infrastruktur TIK di Wilayah Jawa sudah merata dan menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Jangkauan jaringan seluler 4G telah mencapai sekitar 99,95 persen dari area wilayah pemukiman dengan jangkauan di seluruh provinsi sudah mencapai di atas 99,8 persen. Hal ini merupakan modal dasar dalam mendorong utilisasi digital untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti dukungan digitalisasi pada kawasan industri dan bisnis baru serta pengembangan infrastruktur digital lanjutan. Pengembangan infrastruktur TIK di Wilayah Jawa sudah mulai dimanfaatkan di sektor-sektor selain telekomunikasi seperti sistem pembayaran, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, sebagai contoh gambaran adopsi dari digitalisasi dapat dilihat pada kepemilikan kartu elektronik yang telah mencapai sekitar 591,25 juta kartu elektronik. Angka ini juga merepresentasikan bahwa tingkat literasi digital di Wilayah Jawa sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Wilayah Jawa masih menghadapi permasalahan terutama kelangkaan air dan potensi banjir di berbagai wilayah. Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas. Sementara itu, masih tingginya tingkat ekstraksi air tanah berdampak pada tingginya laju penurunan muka air tanah. Penurunan permukaan tanah ini dan kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim berpotensi menyebabkan banjir di wilayah pesisir pantai utara Jawa.

Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi, terutama di provinsi padat penduduk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan serta dominasi hunian tapak, terutama di perkotaan. Harga lahan dan hunian di pusat kota semakin tidak terjangkau sehingga memicu terjadinya *urban sprawl*, permukiman kumuh, serta permukiman ilegal. Selain itu, sebagian besar hunian masih belum memenuhi standar air minum dan sanitasi aman.

Isu yang terkait desentralisasi dan otonomi daerah adalah penegakan hukum, pengelolaan eksternalitas antarwilayah, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum masih menjadi isu penting di Wilayah Jawa, seperti masalah korupsi, pelanggaran pemanfaatan ruang. dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Mengantisipasi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada tahun 2045, diperlukan tata kelola pembangunan termasuk dalam pembangunan perkotaan yang dapat mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat kompleksitas di Wilayah Metropolitan (WM) seperti Jakarta. Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang lebih andal. Tuntutan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Wilayah Jawa semakin tinggi seiring dengan membaiknya tingkat pengetahuan Masyarakat. Ruang mengekspresikan aspirasi dan ide masyarakat perlu terus dibuka.

Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur. Kemandirian fiskal provinsi di Wilayah Jawa relatif lebih baik, kecuali Provinsi DI Yogyakarta, dibandingkan dengan daerah lain pada tingkat pendapatan per kapita yang sama. Di sisi lain, kualitas belanja daerah di Wilayah Jawa masih rendah. Berdasarkan data APBD 2022, rata-rata porsi belanja pegawai mencapai 39.4 persen. sedangkan rata-rata porsi belanja modal yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset hanya sebesar 12,63 persen terhadap total belanja daerah.

Isu Sosial Budaya dan Ekologi di dua provinsi memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di bawah angka nasional (51,9) pada tahun 2021, yaitu Provinsi Banten (47,47) dan Provinsi Jawa Barat (50,78). Indeks tersebut menggambarkan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama.

Di samping itu, belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia juga perlu diperhatikan dalam pembangunan Wilayah Jawa 20 tahun mendatang.

Permasalahan lingkungan utamanya meliputi banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air. Banjir rob terjadi karena kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan terutama untuk kegiatan industri di kawasan pesisir yang berdampak antara lain menurunnya daya dukung air. Hal ini berpotensi menyebabkan kekeringan.

Di samping itu, terjadi juga penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang disebabkan pembangunan secara masif di bagian utara Wilayah Jawa. Pesatnya pertumbuhan industri, vang dibarengi dengan tingginya mobilitas barang dan penumpang di Wilayah Jawa, menyebabkan peningkatan polusi udara dan air yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan.

Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam. Wilayah ini memiliki risiko gempa bumi pada jalur patahan Cimandiri, Baribis, Lembang, Semarang, Opak, Kendeng, yang tersebar dari bagian barat Wilayah Jawa sampai dengan bagian timur Wilayah Jawa. Terdapat pula sesar Cugenang yang menimbulkan bencana gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya. Lebih lanjut, zona megathrust di pesisir selatan berpotensi menimbulkan bahaya tsunami. Ancaman bahaya geologi lainnya adalah ancaman erupsi gunung api aktif yang berlokasi di darat maupun di laut. Selain itu sebagian besar wilayah perkotaan di Wilayah Jawa juga rentan terhadap bencana banjir. Kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana menjadi isu yang perlu mendapat perhatian yang lebih besar.

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

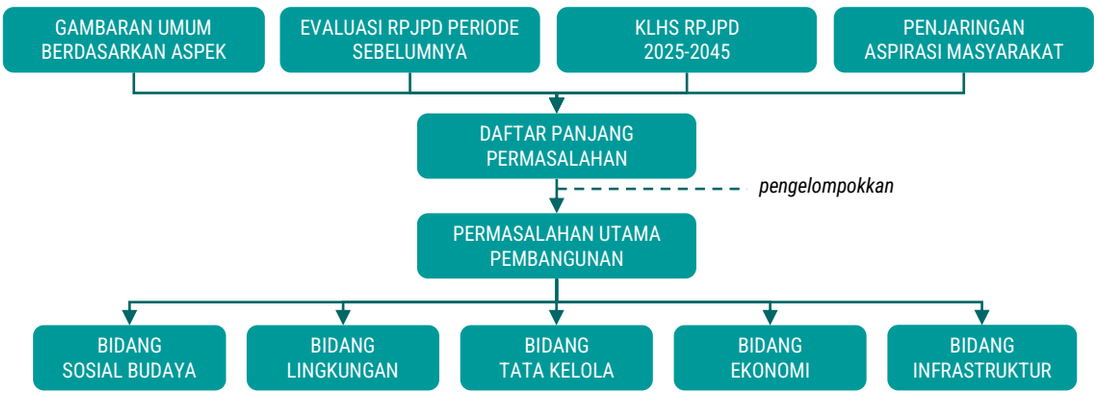
2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari berbagai sumber yang meliputi hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui serangkaian FGD serta memanfaatkan formulir isian yang disebarkan secara *online*. Permasalahan dari berbagai sumber tersebut, kemudian dikelompokkan dengan menganalisa apa yang menjadi permasalahan utama dari daftar panjang permasalahan yang telah dihasilkan. Untuk memudahkan dalam penjabaran selanjutnya, pengelompokkan dilakukan berdasarkan pada bidang pembangunan. Alur perumusan permasalahan pembangunan daerah, selanjutnya ditunjukkan pada gambar berikut di bawah ini.



Gambar 3.1. Alur Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Tabel 3.1. Pengelompokkan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Bidang Pembangunan

No.	Bidang Pembangunan	Permasalahan Utama	
1	Sosial Budaya	a	Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi
		b	Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akibat urbanisasi
		c	Kurangnya kesiapan SDM terhadap perkembangan teknologi
		d	Kurangnya pengetahuan tentang pola gaya hidup sehat
		e	Kurangnya pendidikan karakter
		f	Pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat yang belum berkembang
2	Lingkungan	a	Perkembangan permukiman yang sangat tinggi
		b	Peningkatan beban jalan akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi
		c	Belum maksimalnya upaya pengelolaan sampah terpadu
		d	Minimnya alokasi RTH dan lahan pangan berkelanjutan
		e	Rendahnya kesadaran terhadap kondisi lingkungan
3	Tata Kelola	a	Konflik penggunaan lahan
		b	Pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan
		c	Pelakasanaan penataan ruang yang belum optimal
		d	Tata kelola pemerintahan yang belum optimal
4	Ekonomi	a	Minimnya upaya penyiapan cadangan pangan berkelanjutan
		b	Kurangnya SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tuntutan lapangan pekerjaan
		c	Kurang kuatnya perekonomian bebasis sektor jasa dan perdagangan
		d	Kurangnya pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif
5	Infrastruktur	a	Sarana Prasarana Transportasi yang belum memadai
		b	Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir
		c	Pembangunan sarpras belum optimal medorong daya ungkit ekonomi

Pengelompokkan daftar panjang permasalahan dilakukan berdasarkan bidang pembangunan yang terdiri dari Bidang Sosial Budaya, Bidang Lingkungan, Bidang Tata Kelola, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Masing-masing kelompok bidang tersebut berisikan permasalahan utama yang selanjutnya dijabarkan melalui uraian berikut di bawah ini.

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

A. Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi

Permasalahan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dapat didekati dari kondisi demografi di Kota Bekasi. Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta, yang merupakan pusat ekonomi nasional, telah menjadi magnet yang menarik migrasi masuk. Dengan demikian pertumbuhan penduduk Kota Bekasi tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah tetapi juga oleh migrasi masuk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tentunya akan mendorong jumlah dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dimana ini akan berimplikasi terhadap perlunya peningkatan kapasitas pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pelayanan dasar, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan.

Kedekatan dengan Jakarta mengakibatkan banyak penduduk yang bekerja di Jakarta bertempat tinggal di Kota Bekasi. Berdasarkan data BPS 2019, terdapat 373.125 orang menjadi komuter yang berkegiatan utama di luar Kota Bekasi. Jumlah ini kurang lebih mencapai 27% dari jumlah orang yang bekerja di Kota Bekasi pada tahun 2019. Di antara komuter ini, 66,3% adalah laki-laki, sedangkan 33,7% adalah perempuan. Sebagian besar komuter tersebut memiliki kegiatan utama bekerja yaitu sebesar 84% sedangkan sisanya yaitu 16% adalah untuk sekolah dan kursus.

B. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akibat urbanisasi

Selain menarik sebagai tempat tinggal, Kota Bekasi juga menjadi magnet bagi orang luar Kota Bekasi untuk berkegiatan di Kota Bekasi. Berdasarkan data BPS 2019, terdapat 166.197 komuter dar luar Kota Bekasi, dimana 62% merupakan komuter laki-laki sedangkan 38% adalah komuter perempuan. Sebagian besar komuter datang ke Kota Bekasi untuk bekerja (63%) dan sisanya adalah untuk bersekolah (37%).

Komuter yang tinggal di Bekasi rata-rata berkegiatan di luar wilayah Kota Bekasi Sebagian besar sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sekitar 92,8%. Sedangkan sisanya bekerja dengan berusaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Sebagian besar komuter di Kota Bekasi berpendidikan S1, yaitu sekitar 54,2%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komuter di Bekasi merupakan SDM yang relatif terdidik.

Dengan daya dorong dan daya tarik yang kuat, nampaknya Kota Bekasi tengah bertransformasi dari kota penyangga menjadi kota satelit yang mampu menarik SDM dari luar untuk bekerja di Kota Bekasi. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Kota Bekasi akan menjadi wilayah tujuan bagi orang-orang yang ingin bekerja di Jakarta, namun pada saat yang sama kondisi Kota Bekasi yang semakin lengkap sarana dan prasarananya juga akan menarik orang-orang dari wilayah belakangnya untuk bekerja di Kota Bekasi.

C. Kurangnya kesiapan SDM terhadap perkembangan teknologi

Dengan kondisi demografi yang demikian, pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi diperkirakan akan cukup tinggi. Hal ini disertai dengan munculnya bonus demografi yaitu semakin dominannya angkatan kerja pada kelompok usia yang masih sangat produktif. Konsekuensinya, SDM produktif ini harus dididik dan dibina dengan baik sehingga memiliki karakter yang baik dan kualitas serta keahlian yang memadai untuk masuk di dunia kerja. SDM muda ini sedapat mungkin juga dididik untuk dapat melek teknologi karena bidang-bidang pekerjaan ke depan terutama di Kota Bekasi akan sangat didominasi oleh pemanfaatan teknologi.

Melihat pada angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 yang masih 11,44 yaitu masih pada level SMA atau SMK, maka masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan SDM muda di Kota Bekasi paling tidak hingga ke level D3 ataupun S1. Bidang-bidang pekerjaan di sektor jasa dan industri

yang saat ini sangat sarat dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi diharapkan justru tidak menghalangi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Apabila tidak diantisipasi, bonus demografi ini akan menjadi bom waktu pada saat SDM produktif justru tidak tertampung oleh kesempatan dan lowongan kerja yang ada.

D. Kurangnya pengetahuan tentang pola gaya hidup sehat

Masih terkait dengan SDM, selain infrastruktur pendidikan yang harus diperkuat, kualitas SDM dari sisi kesehatan juga perlu diperkuat. Kebiasaan hidup sehat perlu diperkenalkan terutama untuk mencegah risiko-risiko penyakit menular seperti Covid-19 dan terutama untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan individu sehingga menjadi SDM berkualitas unggul dan memiliki daya saing. Namun demikian dari segi konsumsi berimbang, dari data Pola Pangan Harapan (PPH), konsumsi pangan di Kota Bekasi semakin beragam dan seimbang baik dari sisi komposisi maupun mutu gizinya selama kurun waktu 2018-2022. Hanya saja, pola gaya hidup sehat seperti olahraga dan gaya hidup lainnya masih membutuhkan perhatian.

E. Kurangnya pendidikan karakter

Pendidikan dan kesehatan juga perlu didorong dengan penguatan karakter SDM dengan meningkatkan internalisasi nilai-nilai terkait etos kerja, etika, kerja keras, bertanggung jawab dan sebagainya. Karakter yang baik akan membentuk SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan selalu kreatif untuk menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi baru. SDM tidak hanya dididik untuk siap memasuki lapangan kerja, tetapi juga perlu dididik untuk memiliki *leadership* dan *entrepreneurship*. Ini penting untuk mendorong tumbuhnya industri ekonomi kreatif yang memang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kota-kota satelit seperti Kota Bekasi. Ekonomi kreatif dalam berbagai bentuk, saat ini semakin berkembang dengan berkembangnya *platform* teknologi digital. Hal ini harus dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi agar anak-anak muda mampu mengembangkan inovasi-inovasi baru yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat. Saat ini mulai banyak bermunculan *startup* yang bersifat *socio-entrepreneurship* yang mampu mendorong pemasaran produk-produk lokal dan membantu perekonomian banyak orang, bahkan juga membantu dalam meningkatkan kualitas lingkungan karena memotong rantai pemasaran hingga mengurangi emisi. Saat ini, juga banyak anak-anak muda yang memiliki kreatifitas untuk mengelola sampah hingga memberikan keuntungan, sehingga masalah-masalah lingkungan yang ada justru dijadikan kesempatan untuk mendorong tumbuhnya aktivitas-aktivitas ekonomi baru.

F. Pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat yang belum berkembang

Pembangunan masyarakat perkotaan ke depan harus bersifat inklusif dimana seluruh kelompok dan golongan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua dimensi pembangunan. Dalam hal ini terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini belum diberdayakan secara optimal, antara lain kelompok perempuan, kelompok lansia, kelompok disabilitas dan sebagainya. Perlu dibangun pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat yang tidak saja ditujukan untuk mendidik angkatan kerja yang masih dalam usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan, namun perlu dikembangkan pula pusat pembelajaran dan pelatihan untuk kelompok perempuan, kelompok ibu tunggal (*single mother*), kelompok lansia, kelompok disabilitas dan sebagainya. Hal ini akan mendorong meningkatnya kemandirian masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat, baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun budaya. Di kawasan perkotaan, kelompok-kelompok masyarakat ini memiliki jumlah yang tidak sedikit. Selain itu hadirnya pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat akan memberikan ruang yang berkeadilan terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini masih kurang terperhatikan. Pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, namun pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sudah berkembang di Kota Bekasi. Banyak komunitas yang sudah memulai inisiatif untuk mendidik dan mendorong keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam berbagai kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

3.1.2. Bidang Lingkungan

A. Perkembangan permukiman yang sangat tinggi

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada banyak sektor, salah satu diantaranya adalah sektor perumahan dan kawasan permukiman. Dengan laju pertumbuhan penduduk 0,018%, maka dapat diprediksi bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi di tahun 2045 bisa mencapai 3.928.406 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini tentu akan mendorong kebutuhan akan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman. Dari data jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kita dapat melihat bahwa Kota Bekasi terus mengalami penambahan jumlah IMB tiap tahunnya, meskipun jumlahnya tidak selalu menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi setiap tahun selalu ada penambahan. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman memang tidak bisa terelakkan dari tahun ke tahun. Namun sayangnya, masyarakat belum disiplin dalam mendaftarkan pembangunan rumahnya melalui Izin Mendirikan Bangunan atau IMB. Padahal kedisiplinan ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk sama-sama menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman dan terkendali dalam pembangunannya. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, data jumlah rumah dikategorikan menjadi rumah tidak layak huni dan rumah layak huni. Pada tahun 2019, jumlah rumah layak huni sebanyak 943.480 unit dengan jumlah unit rumah yang memiliki IMB sebanyak 703.210 unit. Pada tahun 2020, jumlah rumah layak huni naik menjadi 945.774 unit, dengan jumlah unit layak huni yang memiliki IMB sebanyak 705.569 unit. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota/kabupaten. Namun kebutuhan yang terus meningkat terhadap perumahan dan kawasan permukiman ini tentu sedikit banyak pasti akan mempengaruhi lingkungan Kota Bekasi secara umum karena seiring dengan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi untuk perumahan dan kawasan permukiman, tentu berdampak pada pola pergeseran dalam pemanfaatan ruang. Penggunaan lahan Kota Bekasi didominasi oleh permukiman teratur (perumahan) dan permukiman tidak teratur yang dibangun secara individu. Permukiman teratur (perumahan) yang dikembangkan developer, banyak dikembangkan di Kota Bekasi dengan tingkat kepadatan cukup tinggi yang memanfaatkan potensi aksesibilitas jalan arteri dan kolektor primer yang strategis untuk menampung limpahan penduduk yang bekerja di DKI Jakarta dan di kota-kota sekitar Kota Bekasi.

Berdasarkan Reviu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2022, bahwa data dari Kepadatan rumah yang dihitung berdasarkan jumlah rumah dibagi dengan luas wilayah administrasi per kelurahan menunjukkan bahwa kepadatan rumah di Kota Bekasi umumnya diklasifikasikan ke dalam kategori rendah dan sedang. Kecamatan yang memiliki kepadatan sedang yaitu Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Utara. Sedangkan data kepadatan rumah yang dihitung berdasarkan jumlah rumah yang dibagi luas wilayah permukiman di setiap kelurahan, menunjukkan bahwa kepadatan rumah di Kota Bekasi diklasifikasikan ke dalam kategori sedang hingga tinggi. Kepadatan rumah yang diklasifikasi tinggi terdapat di Kelurahan Pedurenan, Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustikajaya, Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria, Kelurahan Perwira, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara. Dengan ini dapat dikatakan bahwa secara kondisional, antara daya dukung ruang wilayah dengan kebutuhan ruang wilayah Kota Bekasi telah mengalami pergeseran dari kepadatan rendah ke kepadatan sedang bahkan ke kepadatan tinggi, dan hal ini berdampak pada tumbuhnya kawasan terbangun dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian. Rumah dan lingkungan

permukiman yang memiliki situasi dan kondisi yang baik dan nyaman seperti memiliki ruang yang cukup untuk kegiatan pribadi akan memberikan kepuasan psikis pada individu yang menempatinya. Kualitas pemukiman dapat memberikan pengaruh penting terhadap persepsi diri penghuninya, stres dan kesehatan fisik, sehingga kondisi permukiman ini tampaknya berpengaruh pada perilaku dan sikap-sikap orang yang tinggal. Fenomena inilah yang kian mengkhawatirkan untuk Kota Bekasi hingga 20 tahun mendatang, karena pertumbuhan kawasan terbangun yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kepadatan perumahan, berkurangnya ruang terbuka, tata letak perumahan yang muncul secara tidak beraturan, memburuknya kualitas lingkungan perumahan dan kecenderungan berkembangnya kawasan kumuh semakin besar. Hal ini terjadi karena adanya paradigma dalam pemanfaatan ruang, dimana ruang merupakan nilai ekonomis dalam arahan pengembangan secara fungsi yang berdampak pula pada kewilayahannya.

Di samping fenomena meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman, pengawasan dan pengendalian bagi para pengembangan perumahan juga harus ditegakkan lewat peraturan-peraturan. Masih banyak pengembang-pengembang nakal yang tidak mentaati peraturan yang berlaku, diantaranya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas, dimana pada Pasal 10 dinyatakan bahwa pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum pada lokasi perumahan harus memenuhi proporsi sebagai berikut: 1) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan adalah maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; 2) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana lingkungan adalah minimal 15% (lima belas persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; 3) luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertamanan adalah minimal 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang disetujui untuk prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; 4) proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada lokasi perumahan diambil dari proporsi luasan RTH perumahan dihitung minimal 15% (lima belas persen) dari luas lahan keseluruhan atau Koefisien Dasar Hijau (KDH) 15% (lima belas persen).

Di samping itu perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Bila ini tidak diperhatikan, maka akan memicu tumbuhnya pemukiman-pemukiman liar yang tidak beraturan dan mengancam kualitas lingkungan perkotaan.

B. Peningkatan beban jalan dan polusi akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi

Kota Bekasi terus berkembang tidak hanya dari jumlah penduduk namun juga fasilitas dan sarana prasarana infrastruktur yang mendukung aktivitas warganya, salah satunya sarana dan prasarana transportasi. Pertumbuhan dan mobilitas penduduk tersebut tentunya memerlukan sarana transportasi yang menyebabkan besarnya jumlah kendaraan di Kota Bekasi. Pada tahun 2018 hingga 2020, jumlah kendaraan di Kota Bekasi sebanyak 1.609.441 unit. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan di Kota Bekasi cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang paling banyak digunakan masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1,25 juta unit kendaraan pada tahun 2018 dan 2019 serta 1,18 juta unit di tahun 2020. Sementara itu sedan jeep menjadi kendaraan roda empat yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bekasi, yaitu berkisar 307-310 ribu unit (tahun 2018 dan 2019) dan menurun menjadi 295 ribu unit di tahun 2020. Walaupun data menunjukkan kecenderungan menurun, tapi keberadaan kendaraan di jalan raya tetap banyak, bahkan setelah tahun 2023 dan Indonesia berhasil

lepas dari situasi pandemi, kemacetan kembali menjadi fenomena sehari-hari, bahkan Kota Bekasi menduduki peringkat kedua setelah Kota Tangerang Selatan dalam polusi terburuk di Jabodetabek selama tahun 2023. Menurut data *International Organization of Motor Vehicle Manufactures* (2022) dikatakan bahwa Indonesia menempati posisi kedua produsen kendaraan bermotor terbesar di Asia Tenggara Tahun 2022. Dari tahun ke tahun jumlah unit kendaraan pribadi, Kota Bekasi selalu jauh lebih banyak daripada kendaraan umum. Sejak tahun 2018 jumlah mobil pribadi sebesar 1.583.689 unit dan meningkat di tahun 2019 menjadi 1.588.645 unit, di tahun 2020 menurun menjadi 1.509.177 unit. Hampir 50% penduduk Kota Bekasi memiliki sepeda motor dan 80% dari kendaraan pribadi yang dimiliki orang Kota Bekasi adalah sepeda motor. Kehadiran sepeda motor memang cukup memberi masalah namun hal ini tidak selalu bisa disalahkan sepenuhnya karena berdasarkan riset *Greenpeace* terhadap perilaku bertransportasi masyarakat DKI Jakarta, alasan dalam memilih kendaraan transportasi adalah biaya (27%), keandalan/tepat waktu (32%) dan kemudahan/ketersediaan rute (17%). Dengan menggunakan sepeda motor, dapat menekan biaya transportasi menjadi 10% dari pendapatan (sesuai standar Bank Dunia terkait pengeluaran maksimal untuk transportasi).

Tak hanya soal kemacetan yang ditimbulkan oleh semakin banyaknya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, tapi juga menjadi salah satu penyebab tingginya polusi udara karena menghasilkan emisi gas buang berbahaya. Meskipun bukan satu-satunya penyebab polusi udara, kendaraan bermotor tetap memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan polusi udara di Indonesia.

Pembangunan dan perkembangan kota tidak hanya berdampak positif bagi kemajuan perekonomian namun sekaligus juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak negatif perkembangan di bidang transportasi dengan semakin berkembangnya jumlah kendaraan pengguna jalan adalah adanya kemacetan yang mengganggu kenyamanan, efektivitas dan produktivitas, dan sekaligus juga mengakibatkan polusi.

Secara umum pola jaringan jalan yang terbentuk di Kota Bekasi adalah pola terpusat karena sistem jaringan regional yang berorientasi ke pusat kota. Jalur regional tersebut merupakan jalur yang melewati daerah/kawasan perkantoran, perdagangan dan kawasan terminal serta pasar. Karakteristik lalu lintas di Kota Bekasi didominasi oleh kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan dan komuter dengan pola pergerakan utama berorientasi ke pusat kota dan menuju ke arah DKI Jakarta pada pagi dan kembali ke kota asal di sore hari. Menurut Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2014 disebutkan bahwa jumlah komuter Kota Bekasi yang berkegiatan di luar Kota Bekasi sebanyak 460.000 orang sementara komuter yang berasal dari luar Kota Bekasi yang berkegiatan di Kota Bekasi adalah sebesar 132.000 orang. Daerah tujuan komuter Kota Bekasi yang paling besar adalah Jakarta Timur yaitu 154.175 orang, hampir setengah dari jumlah komuter, mengingat secara administratif Kota Jakarta Timur bersebelahan langsung dengan Kota Bekasi. Dengan sebagian penduduk bekerja di DKI Jakarta, kondisi lalu lintas di Kota Bekasi diwarnai dengan kemacetan yang tinggi terutama pada jam-jam kerja dan jam sibuk, karena besarnya arus lalu lintas yang kurang didukung oleh prasarana jalan yang ada. Kemacetan yang tergolong parah terjadi di pusat kota karena seluruh akses menuju jalan Ir. H. Juanda dan lokasi terminal berada di pinggir jalan Ir. H. Juanda sehingga arus kendaraan keluar masuk terminal sangat mengganggu dan diperparah dengan melebarnya PKL berjualan di badan jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan. Titik kemacetan di Kota Bekasi semakin bertambah tiap tahunnya. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2010 terdapat 13 titik kemacetan di Kota Bekasi dan meningkat menjadi 19 titik kemacetan pada tahun 2014 terutama pada pusat kota atau CBD (*Central Business District*). Pada periode 2018-2023, titik kemacetan semakin bertambah menjadi 24 titik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dan jumlah prasarana transportasi yang cenderung tidak ada peningkatan.

Kapasitas jalan menjadi salah satu penyebab semakin bertambahnya titik kemacetan di Kota Bekasi dari tahun ke tahun. Hal ini karena kapasitas jalan akan mempengaruhi kinerja lalu lintas, terutama kinerja lalu lintas di kawasan rawan macet seperti di kawasan CBD yang merupakan ruas jalan koridor

utama yaitu Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. HM Hasibuan dan Jl. KH. Noer Ali. Volume lalu lintas terlalu besar hingga mendekati ambang kapasitas jalan yang dimiliki.

Transportasi publik di Kota Bekasi belum menjadi primadona karena beberapa hal terkait keamanan, kenyamanan dan juga biaya. Banyak yang lebih memiliki mengendarai sepeda motor karena biaya murah, tepat waktu dan bisa menuju ke rute manapun. Padahal, penggunaan transportasi publik dapat mengurangi kemacetan hingga **12 kali lipat** lebih efektif dibandingkan dengan kendaraan pribadi.

C. Belum maksimalnya upaya pengelolaan sampah terpadu

Kota Bekasi masih memiliki persoalan sampah yang sangat berat karena sampah masih bertebaran di fasilitas umum, permukiman, drainase, bahkan ke sungai. Setiap harinya masyarakat Kota Bekasi menghasilkan timbulan sampah sebanyak 1.700 ton sehari. Satu-satunya TPA yang dimiliki Kota Bekasi yaitu TPA Sumur Batu, tidak mampu menampung semuanya karena kapasitasnya hanya mampu menampung 1.000 ton per hari. Berarti masih ada sekitar 700 ton atau 70% yang tidak bisa ditampung.

Kondisi TPS seringkali tidak mampu menampung sampah yang dihasilkan serta tidak terawat. Sedangkan TPA eksisting sangat menimbulkan bau tak sedap dan selalu penuh dengan cepat. Terdapat kesenjangan antara percepatan timbulan sampah dengan percepatan pengelolaan sampah. Terdapat 78,12% sampah yang belum terkelola oleh Pemerintah Kota Bekasi. Inilah yang menyebabkan banyak sampah membanjiri berbagai sudut kota, bahkan masuk ke dalam drainase dan yang lebih parahnya lagi masuk ke dalam badan air atau sungai. Kota Bekasi juga memiliki potensi penghasil sampah kali terbesar se-Jabodetabek yaitu sebesar **775 ton/hari** mengalahkan jumlah sampah kali DKI Jakarta yang hanya sebesar **365 ton/hari**.

Jumlah eksisting TPS di Kota Bekasi adalah 52 unit dengan titik temu 18 titik dan amrol/kontainer 26 unit. Bila mengacu pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 658.12/kep.377- Dinsih/VI/2016 tentang Penunjukan Lahan sebagai Rencana Perluasan dan Pengembangan TPA Sumur Batu, bahwa pada tahun 2030 Kota Bekasi harus memiliki lahan TPA hingga 38,9 ha. Dengan demikian TPA Sumur Batu harus diperluas karena daya dukungnya sudah tidak terpenuhi atau mencari TPA baru. Berdasarkan Hasil Kajian TPA Tahun 2018 (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi), luas lahan TPA Sumur Batu sampai dengan tahun 2018 ± 16,5 ha. Berdasarkan hasil kajian Penelitian Daya Tampung dan Daya Dukung Hidup Di Sekitar TPA Bantargebang pada akhir tahun 2020 di perkirakan terjadi kelebihan muatan (*overload*) dengan ketinggian sampah lebih dari 30 meter, karena jumlah sampah yang masuk tidak sebanding dengan luas lahan yang ada. Operasional TPA Sumur Batu untuk sementara dengan sistem ditumpuk dan dipadatkan tapi hal ini tidak dapat berlangsung lama mengingat masa layan yang relatif pendek. Untuk kelanjutan TPA Sumur Batu dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi yang sesuai, salah satunya dengan melakukan *landfill mining*. Sebagaimana arahan dari pemerintah psuat terkait permasalahan persampahan perkotaan, bahwa tidak diperkenankan untuk menambah TPA baru namun lebih kepada penanganan sampah di rumah tangga. Upaya-upaya untuk mengurangi timbulan sampah rumah tangga harus semakin sering digalakkan dengan upaya pengelolaan sampah 5R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*, *Replace* dan *Replant*).

D. Minimnya alokasi RTH dan lahan pangan berkelanjutan

Ruang Terbuka Hijau kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. RTH sangat berperan bagi sebuah kota yaitu berperan sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural/estetika dan ekonomi.

Permasalahan ruang terbuka diantaranya yaitu tempat bermain anak-anak tidak digunakan, desain ruang terbuka yang sudah ketinggalan zaman, masalah antara pengguna taman dengan orang-orang

yang berolahraga (yang dapat mengganggu kenyamanan), sepeda motor yang berkeliaran, tulisan graffiti yang dicoret-coret di tembok taman kota. Dengan demikian pemerintah yang telah menyediakan fasilitas RTH dan masyarakat sebagai pengguna RTH, harus bersama-sama menjaga RTH agar bertahan lama.

Menurut data Dinas Tata Kota dan Dinas Pertamanan Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum menyebutkan jumlah RTH atau Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi saat ini belum mencapai standar ideal RTH yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebuah perkotaan idealnya memiliki 30% RTH, dengan 20% RTH yang bersifat publik dan 10% adalah RTH privat. Data RTH total di Kota Bekasi dari tahun 2018-2022 relatif fluktuatif **berkisar antara 11,64% hingga 18,21%**. Angka yang hampir mendekati ketentuan yaitu pada tahun 2020 yaitu 18,21%. Namun demikian pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 12,03%. Masalah alih fungsi lahan juga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pemenuhan RTH di Kota Bekasi. Area hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air sering terkalahkan oleh pembangunan apartemen, mall maupun permukiman warga. Akibatnya pembangunan tersebut malah menyebabkan banjir bagi lingkungan di sekelilingnya.

Kurangnya RTH di Kota Bekasi sedikit banyak berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup karena RTH berfungsi ekologis untuk membantu menjaga kualitas udara. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Bekasi selama **kurun waktu 2019-2021 yang terbaik** yaitu pada tahun **2020** sebesar **53,77%**. Meskipun nilainya merupakan yang terbaik dibandingkan dua tahun diantaranya namun nilai tersebut masih tergolong dalam kategori **"Sangat Kurang"**. Sementara itu, yang **paling rendah** selama kurun waktu tersebut yaitu pada tahun 2021 sebesar **44,60%** dengan status **waspada**.

Terkait lahan pangan, Kota Bekasi memiliki masalah klasik yang juga dialami kota-kota besar yang perekonomiannya melesat maju yaitu adanya keterbatasan lahan. Pertumbuhan penduduk yang terus melaju senantiasa membutuhkan ruang untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sehingga lahan untuk aktivitas pangan semakin berkurang. Tujuh puluh (70%) persen dari penggunaan lahan telah digunakan untuk permukiman sehingga hanya tersisa 7,92% lahan untuk sawah, 6,31% lahan untuk kebun/tegalan.

E. Rendahnya kesadaran terhadap kondisi lingkungan

Masyarakat Kota Bekasi masih belum memiliki kedisiplinan dan kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Beberapa kebiasaan masyarakat yang mencerminkan kebiasaan buruk dalam menjaga lingkungan adalah membuang sampah di sembarang tempat, bahkan di badan air atau sungai. Tingginya jumlah timbulan sampah setiap harinya (1.700 ton per hari) menunjukkan bahwa perilaku masyarakat belum menuju kepada kebiasaan hidup mengurangi jumlah sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah organik dapat dikurangi dengan menyediakan lubang biopori maupun *composting* di masing-masing rumah tangga. Sampah anorganik dapat dikurangi dengan melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, sehingga sampah pun dapat bernilai ekonomi bagi rumah tangga. Berdasarkan data capaian yang tertuang dalam RPJMD teridentifikasi bahwa persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru mencapai 24,94%. Hal ini membuktikan bahwa peran serta masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah masih sangat kurang dan perlu selalu ditingkatkan dengan berbagai sosialisasi dan fasilitasi dari pemerintah dan lembaga terkait.

3.1.3. Bidang Tata Kelola

Tata kelola perkotaan secara umumnya menyangkut tata kelola urbanisasi dan tata kelola pemerintahan secara umum. Tata kelola urbanisasi merupakan hal fundamental untuk disoroti karena terkait satu fenomena aktual yang terjadi di Kota Bekasi. Menempati posisi sebagai wilayah penyangga Jakarta sejak beberapa puluh tahun, Kota Bekasi telah (dan masih) mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat dan cenderung tidak terkendali. Bermula sebagai pusat permukiman para penglaju (*commuter*), beragam bentuk layanan sosial dan ekonomi, serta infrastruktur, turut hadir dan tumbuh berkembang, mewarnai proses urbanisasi fisik dan sosial di kota ini. Karena laju dan polanya, proses urbanisasi ini kemudian menimbulkan beragam permasalahan terkait dengan tata kelola urbanisasi, seperti konflik penggunaan lahan, pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan, dan pelaksanaan penataan ruang yang tidak optimal.

A. Konflik penggunaan lahan

Urbanisasi yang cepat tentu mendorong kompetisi akan lahan, baik dalam konteks hunian (tempat tinggal) penduduk maupun dalam konteks kegiatan bisnis yang mendukung aktivitas penduduk Jakarta, Kota Bekasi, dan wilayah sekitarnya. Secara umum, dorongan akan kebutuhan aktivitas manusia serta potensi rente ekonomi yang dihasilkan di ruang Kota Bekasi, penggunaan lahan ini akan berhimpitan dengan terbatasnya luas lahan yang tetap.

Tata kelola terkait konflik lahan pada hakikatnya terjadi karena ada mekanisme pasar yang bermain dalam alokasi ruang dengan intervensi publik atau pemerintah yang minim atau terlambat, dibandingkan dengan kecepatan pembangunan fisik yang terjadi. Dengan luas lahan yang tetap, kebutuhan akan pembangunan (fisik) ini tidak hanya mengkonversi penggunaan lahan-lahan kosong dan hijau, tetapi memunculkan akan konflik atas lahan yang sudah terbangun. Sebagai contoh, kawasan Kalimalang yang memiliki luas 123.938 ha mengalami pergeseran alih fungsi lahan sebanyak 65,80% (81.539 ha). Penyimpangan penggunaan lahan ini dipengaruhi oleh aksesibilitas yang baik ke beragam tempat selain tentunya mekanisme kontrol yang tidak optimal. Selain itu, aspek kesadaran masyarakat secara umum akan regulasi bangunan dan tata ruang turut mempengaruhi.

Seperti hal yang terjadi di banyak kota-kota besar lainnya, isu legal-ilegal juga turut mewarnai konflik akan lahan di Kota Bekasi. Tata kelola konflik penggunaan lahan ini terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu isu yang seringkali mengemuka dalam konflik jenis ini, termasuk di Kota Bekasi, adalah klaim atas legalitas tanah. Sebagai contoh, konflik penggusuran lahan di Pekayon-Jakasetia merupakan hasil dari tata kelola, dialog/komunikasi, dan klaim yang masih bermasalah antara kedua belah pihak yang berkepentingan (yaitu masyarakat dan pemerintah kota) terkait dengan legalitas tanah. Yang acap kali terjadi di perkotaan Indonesia, termasuk Kota Bekasi, adalah meskipun tidak terdapat aspek legalitas dari sisi kepemilikan tanah, rumah yang dianggap ilegal mendapatkan pelayanan utilitas seperti listrik. Tentu tata kelola pelayanan yang saling tumpang tindih ini menjadi salah satu sumber konflik dalam penggunaan lahan.

Salah satu konflik terkait penggunaan lahan di Kota Bekasi terkait dengan menjamurnya bangunan tinggi. Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki dasar hukum untuk mengatur ketinggian bangunan atau koefisien lantai bangunan (KLB). Selama ini, aturan yang digunakan mengacu pada peraturan dari Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Bangunan tinggi jika tidak diatur sesuai dengan konteks Kota Bekasi akan menimbulkan masalah dengan lingkungan sekitarnya, baik dari sisi sirkulasi udara, sinar matahari, visual, saluran drainase, hingga aksesibilitas jalan dan mobilitas.

B. Pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan

Salah satu konsekuensi dari masalah tata kelola lahan atau pemanfaatan ruang adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Tata kelola air menjadi bagian penting dari hal ini. Wilayah Kota Bekasi termasuk kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi-Karawang. Dalam hal

penggunaan air tanah, baik air tanah dangkal maupun dalam harus dikendalikan, dikarenakan CAT Bekasi-Karawang dinyatakan dalam kondisi kritis.

Sudah sejak 10 tahun lalu, beberapa wilayah di Kota Bekasi, terutama Bekasi Utara, Bekasi Barat, dan Medan Satria, masuk zona merah dalam konteks cadangan air tanah. Banyak sekali industri maupun gedung perkantoran yang masih bergantung pada cadangan air tanah. Kondisi ini paralel dengan belum mampunya PDAM dalam menyuplai kebutuhan akan air mereka. Secara umum, cakupan pelayanan PDAM masih di bawah 30% dari total penduduk Kota Bekasi.

Meskipun ketersediaan air diproyeksikan aman (memenuhi daya dukung air) menurut RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, namun dari sisi volume air tanah diproyeksikan semakin menurun. Hal ini terjadi karena masifnya pembangunan yang telah mengganggu fungsi resapan air. Bangunan formal dan informal banyak yang sudah menempati daerah yang seharusnya menjadi resapan air. Terganggunya daerah resapan air tidak hanya mengganggu siklus dan cadangan air tanah, tetapi juga meningkatkan potensi banjir.

C. Pelaksanaan penataan ruang yang belum optimal

Penataan ruang masih jadi titik lemah penataan pembangunan di kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bekasi. Meskipun penataan ruang lebih banyak menyoroti aspek ruang di atas tanah, tetapi konsekuensinya terasa hingga di bawah tanah, seperti halnya air tanah yang telah diulas sebelumnya. Dapat dikatakan, penataan ruang merupakan salah satu fondasi tata kelola penggunaan lahan dan pembangunan berkelanjutan, seperti yang disampaikan sebelumnya. Dokumen tata ruang secara ideal menjadi pedoman bagi pembangunan berkelanjutan, yang berusaha menyeimbangkan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Namun, seringkali dokumen ini tidak dijadikan rujukan dalam pembangunan (maupun karena mekanisme kontrol yang masih lemah) sehingga pelanggaran tata ruang masih terjadi.

Pelanggaran tata ruang tidak hanya terkait dengan aktivitas sosial-ekonomi oleh masyarakat kecil dan umum, tetapi juga oleh para pelaku usaha berskala besar. Sebagai contoh, perubahan fungsi alur Sungai Cakung menjadi kawasan komersial dengan dikembangkannya Grand Kota Bintang merupakan perwujudan pelanggaran ini yang dilakukan oleh pihak pengembang.

Aspek penataan ruang ini tidak hanya terkait dari sisi pemanfaatan (dan pengendalian pemanfaatan) ruang semata, tetapi juga visi hijau dan keberlanjutannya. Dengan adanya tuntutan akan kebutuhan perumahan yang besar, tata ruang seharusnya dapat juga memfasilitasi terwujudnya ruang hijau dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pertanian perkotaan, alih-alih membuat semua sudut kota menjadi terisi penuh oleh perumahan.

D. Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan mencerminkan kapasitas dan kualitas aparatur maupun kinerjanya secara keseluruhan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam menjalankan roda pembangunan secara lebih luas.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan adalah pelaksanaan reformasi birokrasi. Secara agregat, indeks reformasi birokrasi Kota Bekasi di tahun 2023 adalah 78,94 dengan kategori BB. Dibandingkan dengan periode 2016-2022, indeks tahun 2023 ini meningkat secara drastis. Hal ini tentu merupakan suatu perkembangan yang sangat signifikan dan perlu terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Tabel 3.2. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Tahun 2016-2023

Tahun	Nilai	Kategori
2016	59,08	CC
2017	62,86	B
2018	64,36	B
2019	66,05	B
2020	66,67	B

Tahun	Nilai	Kategori
2021	64,75	B
2022	66,32	B
2023	78,94	BB

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016; Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022; Keputusan Walt Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.213-Org/V/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023-2024

Terlepas dari perkembangan yang signifikan, jika menelusuri lebih detail lagi, ada beberapa aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini terutama mengacu pada nilai SPBE Kota Bekasi yang cenderung mengalami penurunan pasca Covid-19. Jika melihat perbandingan di Jawa Barat, Kota Bekasi menempati peringkat ke-22 dari 27 kota/kabupaten dengan nilai 3,01 di tahun 2023. Begitu pun dengan opini BPK terkait laporan keuangan Kota Bekasi yang selama 2 tahun terakhir (2021-2022) berstatus WDP. Padahal, sejak tahun 2015 hingga 2020, Kota Bekasi memiliki status WTP.

3.1.4. Bidang Ekonomi

A. Minimnya upaya penyiapan cadangan pangan berkelanjutan

Kota adalah suatu kawasan yang terdapat bangunan-bangunan dari lapisan masyarakat yang sudah menjadi satu kesatuan sekaligus sebagai pusat pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan. Sama halnya dengan Kota Bekasi, berbagai sarana dan prasarana yang tersedia memang untuk mendukung kegiatan utama ekonomi kota yaitu jasa dan perdagangan. Hal ini berimplikasi terhadap permintaan lahan yang terus meningkat untuk mendukung aktivitas jasa dan perdagangan serta penyediaan lahan untuk pemukiman penduduk kota yang terus meningkat. Diversifikasi aktivitas ekonomi yang mengarah pada aktivitas industri dan jasa di wilayah perkotaan di Jawa Barat menunjukkan transformasi ekonomi yang terjadi memberikan tekanan terhadap perkembangan sektor pertanian.

Meningkatnya permintaan lahan di satu sisi, sementara disisi lain semakin terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Bekasi, berdampak terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan ketersediaan lahan untuk pertanian semakin sempit yang selanjutnya akan berdampak terhadap menurunnya kemampuan wilayah dalam memproduksi pangan secara mandiri. Kondisi ini selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan cadangan pangan di wilayah Kota Bekasi semakin berkurang.

Tantangan penyediaan pangan di Kota Bekasi tidak hanya muncul dari terbatasnya ketersediaan lahan akibat alih fungsi lahan, tetapi juga dapat disebabkan oleh adanya fenomena perubahan iklim yang berdampak terhadap penurunan produktivitas hasil pangan lokal di Kota Bekasi. Produksi pangan lokal dan perubahan iklim sangat erat hubungannya. Dampak perubahan iklim yang banyak dirasakan masyarakat terkait dengan perubahan cuaca yang tak menentu terutama bagi para petani, mereka mengeluhkan datangnya musim hujan dan kemarau yang sulit diprediksi sehingga mengganggu musim tanam dan hasil produksi.

B. Kurangnya SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tuntutan lapangan pekerjaan

Berkembangnya sektor perdagangan dan jasa menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu *big city* yang maju dan akan bertransformasi menjadi kota Megapolitan dalam 10-15 tahun mendatang ternyata memiliki masalah yang cukup pelik yaitu terkait dengan masalah urbanisasi dan ketersediaan lapangan kerja. Kedua masalah tersebut saling berkaitan erat satu sama lain yang perlu diantisipasi dalam rangka pembangunan perekonomian Kota Bekasi di masa mendatang.

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ingin memperoleh penghidupan yang layak, menikmati

sarana dan prasarana kehidupan yang tidak ada di desa, dan sebagainya. Terjadinya urbanisasi ini menyebabkan Kota Bekasi semakin padat penduduknya. Keadaan ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat kota, diantaranya adalah masalah kesempatan kerja yang semakin terbatas. Pada umumnya penduduk desa yang pindah ke Kota Bekasi memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, di sisi lain kesempatan kerja yang tersedia memerlukan kualifikasi keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Adanya kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan lapangan kerja menimbulkan pengangguran struktural. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat di Kota Bekasi yang bekerja di sektor informal. Hal ini menjadi isu penting ke depan yang perlu mendapatkan prioritas Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM ke depan dan ketersediaan lapangan kerja.

C. Kurang kuatnya perekonomian bebasis sektor jasa dan perdagangan

Kota Bekasi merupakan wilayah *hinterland* Ibu Kota Negara dimana perekonomiannya terus tumbuh dan akan bergeser menjadi kota Megapolitan di masa mendatang. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir tercatat sekitar 4-5 persen per tahun, kecuali pada saat terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mengalami kontraksi dengan tumbuh negatif 2,58 persen. Perekonomian Kota Bekasi saat ini ditopang sebagian besar oleh sektor jasa dan perdagangan, yaitu sekitar 52 persen PDRB Kota Bekasi berasal dari sektor perdagangan dan jasa.

Berkembangnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Bekasi merupakan ciri utama perekonomian perkotaan pada umumnya di Indonesia maupun kota-kota lain di dunia. Nilai tambah yang besar dari sektor perdagangan dan jasa ini menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu *big city* yang maju dan akan bertransformasi menjadi kota Megapolitan dalam 10-15 tahun mendatang. Namun demikian, berkembangnya sektor perdagangan dan jasa di Kota Bekasi memiliki beberapa permasalahan antara lain ***(1)*** *rentannya kedua sektor tersebut terhadap guncangan ekonomi yang berasal dari luar wilayah (external shock),* dan ***(2)*** *sektor perdagangan dan jasa yang berkembang di Kota Bekasi lebih merupakan spillover effect dari perkembangan DKI Jakarta sebagai Central Business District (CBD)* bagi wilayah penyangga termasuk Kota Bekasi.

Sektor perdagangan dan jasa di Kota Bekasi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang berasal dari luar wilayah. Sebagai contoh, terjadinya pandemi covid 19 di tahun 2020 berdampak serius terhadap perekonomian di Kota Bekasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi saat itu mengalami kontraksi dari 5,41 persen di tahun 2019 menjadi -2,58 persen di tahun 2020, dimana sektor perdagangan dan jasa adalah sektor yang paling terpukul dibanding sektor lainnya, yaitu dengan laju pertumbuhan ekonomi sekitar -2,0 persen. Sementara sektor industri olahan terkontraksi dengan pertumbuhan -1,19 persen dan sektor pertanian tumbuh positif 1,35 persen.

Selanjutnya dalam sistem perekonomian terbuka saat ini, tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah akan berdampak terhadap wilayah lain di sekitarnya. DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Indonesia, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tidak hanya berdampak terhadap perekonomian DKI Jakarta sendiri *(intraregional multiplier)* tetapi juga terhadap perekonomian daerah lain di sekitarnya, seperti Kota Bekasi *(spillover effect)*. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan *(linkages)* antara sektor perekonomian antar wilayah.

D. Kurangnya Pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif

Revolusi industri 4.0 mengarah ke digitalisasi dan otomatisasi mengharuskan semua daerah termasuk pelaku ekonomi dan masyarakatnya untuk beradaptasi dengan perubahan cepat. Proses digitalisasi telah menyentuh banyak aspek kehidupan manusia akan dan sudah menjadi kebutuhan saat ini. Teknologi inovasi seperti *artificial intelligence*, *machine learning*, *data science*, *internet of things* terus berkembang dan setiap wilayah harus siap dalam hal ini. Penguasaan teknologi tersebut akan menjadi kunci kemajuan pembangunan ekonomi ke depan.

Salah satu tantangan utama dalam upaya memajukan perekonomian di Kota Bekasi ke depan adalah masalah penguasaan teknologi yang masih terbatas. Salah satu faktornya adalah kualitas SDM. Hal ini tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi yang hingga tahun 2022

masih mencapai 82,46. Meskipun angka IPM ini termasuk tinggi relatif dibanding rata-rata nasional sekitar 70,0, namun jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia angka IPM sudah berada di kisaran 94-97 (UNDP, 2021). Untuk mencapai visi Kota Bekasi 2045 yang maju dalam pembangunan ekonomi maka harus didukung oleh SDM yang kompeten dan unggul. Peningkatan kualitas SDM tentu tidak bisa jauh dengan peningkatan kualitas pendidikan seiring dengan kemajuan industri 4.0.

Seiring dengan kemajuan teknologi seperti *artificial intelligence*, *machine learnin*g, *data science*, dan *internet of things*, maka untuk mendukung kemajuan perekonomian Kota Bekasi di masa mendatang tidak hanya faktor SDM unggul yang harus dipersiapkan, tetapi juga pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui produk-produk inovatif juga penting untuk dikembangkan*.* Ekonomi kreatif merupakan konsep perpaduan inovasi, kreatifitas, budaya dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai tambah.

Ekonomi kreatif di berbagai negara di dunia saat ini diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Sektor ekonomi kreatif di Kota Bekasi merupakan sektor yang potensial untuk terus dikembangkan mengingat sektor ini memiliki sumber daya yang sifatnya tidak terbatas, yaitu berbasis pada intelektualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Tentunya karakteristik sektor ini sangatlah berbeda dengan karakteristik sektor lain yang sarat akan kebutuhan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai bahan dasar pokok dalam proses produksinya, sehingga membutuhkan perlakuan/kebijakan yang berbeda dari sektor ekonomi lainnya.

3.1.5. Bidang Infrastruktur

A. Sarana Prasarana Transportasi yang belum memadai

Bertambahnya jumlah penduduk Kota Bekasi dan berkembangnya Kota Bekasi menjadi kota industri menyebabkan padatnya aktivitas dan meningkatkan kebutuhan akan moda transportasi. Saat ini masyarakat Kota Bekasi cenderung menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Jumlah kendaraan pribadi berbanding terbalik dengan jumlah angkutan umum yaitu terdapat 1.472.474 kendaraan pribadi, sedangkan di Kota Bekasi hanya terdapat 8.858 kendaraan umum (BPS Kota Bekasi, 2021). Permasalahan seperti menunggu angkutan umum datang, sulitnya berpindah moda dan tidak adanya tempat untuk berpindah moda menjadi alasan utama mengapa masyarakat cenderung lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Penggunaan kendaraan pribadi cukup besar sehingga menambah jumlah kendaraan, kapasitas jalan yang terbatas tidak dapat memenuhi jumlah kendaraan yang banyak, dan terjadi kemacetan.

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2010 terdapat 13 titik kemacetan di Kota Bekasi dan meningkat menjadi 19 titik kemacetan pada tahun 2014 terutama pada pusat kota atau CBD (*Central Business District*). Masih ditemukannya permasalahan kemacetan di beberapa titik, misalnya di kawasan Stasiun Bekasi disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi, tidak adanya area transit, dan angkutan umum tidak saling terintegrasi. Kemacetan yang terjadi juga diakibatkan oleh sistem transportasi yang belum optimal. Berdasarkan dokumen Pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Kota Bekasi Tahun 2021, isu transportasi Kota Bekasi dalam fokus penangan dibagi menjadi dua isu yaitu isu terkait dengan angkutan umum dan isu terkait dengan titik kemacetan yang tersebar di Kota Bekasi pada saat jam-jam tertentu.

1. Isu Angkutan Umum

   Pengembangan BRT-APTB, APTB Bekasi dikembangkan dari *bus feeder* inisiatif swasta dengan asal keberangkatan dari Kemang Pratama, Taman Galaksi Indah dan Harapan Indah. APTB Bekasi yang beroperasi sejak 2012 melayani perjalanan Bekasi-Jakarta merupakan integrasi Busway atau BRT Trans Jakarta, mengalami kendala karena belum menemukan bentuk kerja sama pembayaran rupiah/km dengan PT. Trans Jakarta selaku pengelola angkutan umum berbasis BRT di Jakarta.

a. Kurangnya Fasilitas Shelter APTB yang mencerminkan keinginan pusat perjalanan dari Bekasi. Keluhan pengemudi APTB adalah banyaknya kantung penumpang yang berada di luar shelter APTB yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Seperti di daerah Bulak Kapal dan Tol Bekasi Timur.
b. Akan dikembangkan *Park and Ride* (P&R) di stasiun. Meskipun saat ini sudah terbangun *Park and Ride* di sepanjang Stasiun Bekasi-Jakarta namun belum semua potensi perjalanan penumpang terlayani. Disamping Stasiun Bekasi dan Kranji yang sudah sangat padat dan tidak terlayani oleh kapasitas ruang parkir yang ada, beberapa lokasi perlu dilengkapi dengan P&R khususnya menjelang dioperasikannya *Double-Double Track* Cikarang-Manggarai, Seperti dibekasi Timur, Bulak Kapal, Tambun serta wilayah Kabupaten Bekasi.
c. Belum ada *Kiss and Ride* untuk angkot pada P&R angkutan umum menjemput dan menurunkan penumpang di bibir stasiun selama ini menyebabkan kemacetan tinggi karena tidak ada fasilitas yang memadai, berwujud bangunan celukan yang terintegrasi dengan lokasi P&R stasiun.
d. Keselamatan pada perlintasan sebidang KA. Pada lokasi perlintasan sebidang terutama dekat dengan stasiun KA seperti di sekitar Stasiun KA Bekasi dan Jalan Perjuangan sering terjadi antrian panjang dan ketika KA lewat, antrian yang ada masih tersisa, dan menyebabkan resiko tabrakan dengan KA.
e. Okupansi Angkutan Umum 50%. Angkutan umum Kota Bekasi berbasis kendaraan bus mikro berpenumpang 9-16 memiliki jumlah keterisian sekitar 50%, namun beberapa armada sudah sangat tua dan pelayanan diperlukan perhatian pemerintah berupa subsidi kualitas pelayanan kepada organisasi angkutan umum dan penataan trayek yang mencerminkan kebutuhan penumpang, badan usaha yang kuat dan perencanaan secara evolutif menuju pelayanan berbasis angkutan massal BRT.
f. KA dikembangkan *Aeromovel*. Pilihan angkutan massal berbasis rel di Kota Bekasi khususnya atas inisiatif swasta berupa Monorel dan Aeromovel. Keduanya mempunyai kelebihan karena kapasitas dan kecepatannya melayani penumpang yang diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 penumpang/jam/arah pada jam puncak. Persetujuan atas beroperasinya angkutan massal berbasis rel berada pada Kementerian Perhubungan karena menghubungkan dua wilayah antar provinsi dan secara teknis kendaraannya harus memenuhi standar kelayakan.

2. Isu Titik Kemacetan

a. Kemacetan libur sangat panjang. Titik kemacetan Kota Bekasi antara lain: simpang Pasar Rebo, simpang Taman Galaksi, simpang Kemang Pratama, simpang Pekayon, simpang Tol Bekasi Barat, simpang Hasibuan, Stasiun Bekasi, Stasiun Kranji, simpang Kampung Dua, simpang Alexindo, simpang Pondok Ungu, simpang Aqua, simpang Harapan Indah, simpang Perjuangan Summarecon, simpang Proyek Agus Salim, simpang Bulak Kapal, Terminal Bekasi, simpang Rawa Panjang, akses Tol Bekasi Timur, simpang Caman, simpang Tol Jatibening yang setiap hari diperkirakan mencapai 21 lokasi kemacetan. Pada saat liburan seperti hari Sabtu dan Ahad banyak mobil Bekasi keluar untuk keperluan sosial dan pendidikan menyebabkan lalu-lintas mencapai puncak kemacetan. Belum ada manajemen lalu-lintas efektif yang dilakukan dalam menangani kemacetan tersebut.
b. Tersedia Tatralok Kota Bekasi 2013. Kota Bekasi sudah memiliki Tatanan Transportasi Lokal yang merupakan Masterplan Transportasi ke depan, disusun tahun 2013.
c. Pengelolaan Kalimalang. Jalan Kalimalang merupakan jalan berstatus Kolektor Primer yang awalnya merupakan jalan inspeksi Kali Tarum Barat sebagai sumber air bersih penduduk Kota Jakarta dari Bendungan Jatiluhur. Bagi penduduk Kota dan Kabupaten Bekasi, Jalan Kalimalang merupakan urat nadi utama selain jalan arteri primer (jalan nasional) yang sudah ada, karena banyaknya akses ke wilayah perumahan dan industri yang dapat dipenuhi oleh Jalan Kalimalang. Rencana pelebaran Kalimalang di Kota Bekasi telah selesai, dan saat ini tengah dilakukan pelebaran untuk wilayah Kabupaten Bekasi sampai dengan Tegal Danas,

dengan target tahun 2016 seluruhnya akan selesai dan tersambung dengan dana berasal dari APBD Dinas Bina Marga dan Tata Air Kabupaten Bekasi.

d. Dampak Sosial Pembangunan Tol Becakayu. Pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu tahun 2015 memasuki wilayah Kota Bekasi dimana titik kemacetan selama proses pembangunan mulai dirasakan pada wilayah Jaka Sampurna dan Taman Galaksi. Pembebasan lahan sepanjang lokasi proyek menimbulkan dampak sosial yang dirasakan masyarakat. Perhatian pemerintah terhadap bangunan masjid dan musholla sangat rendah, menimbulkan antipati sosial, sehingga perlu upaya agar pemerintah menghargai keberadaan bangunan agama yang merupakan menara akhlak penduduknya.

3. Isu Masalah Transportasi Non Moda

a. Kondisi pejalan kaki saat ini hanya berada di beberapa koridor jalan utama Kota Bekasi dan cenderung tidak terawat terutama yang berada di luar koridor utama.
b. Bangkitan pejalan kaki di simpul-simpul transportasi kota yang semakin hari semakin meningkat.
c. Ketersediaan jalur pejalan kaki yang hanya terpusat di koridor utama Kota Bekasi.
d. Jalur pejalan kaki belum memprioritaskan untuk jalur difabel.
e. Kurangnya keamanan di Jalur pejalan kaki Kota Bekasi.

4. Isu Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIT Jabodetabek)

RIT Jabodetabek merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah yang masuk ke dalam penanganan RIT Jabotabek adalah wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Wilayah Perkotaan Jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Isu RITJ berkaitan dengan pengembangan 9 pilar penanganan Transportasi Jabotabek yaitu:

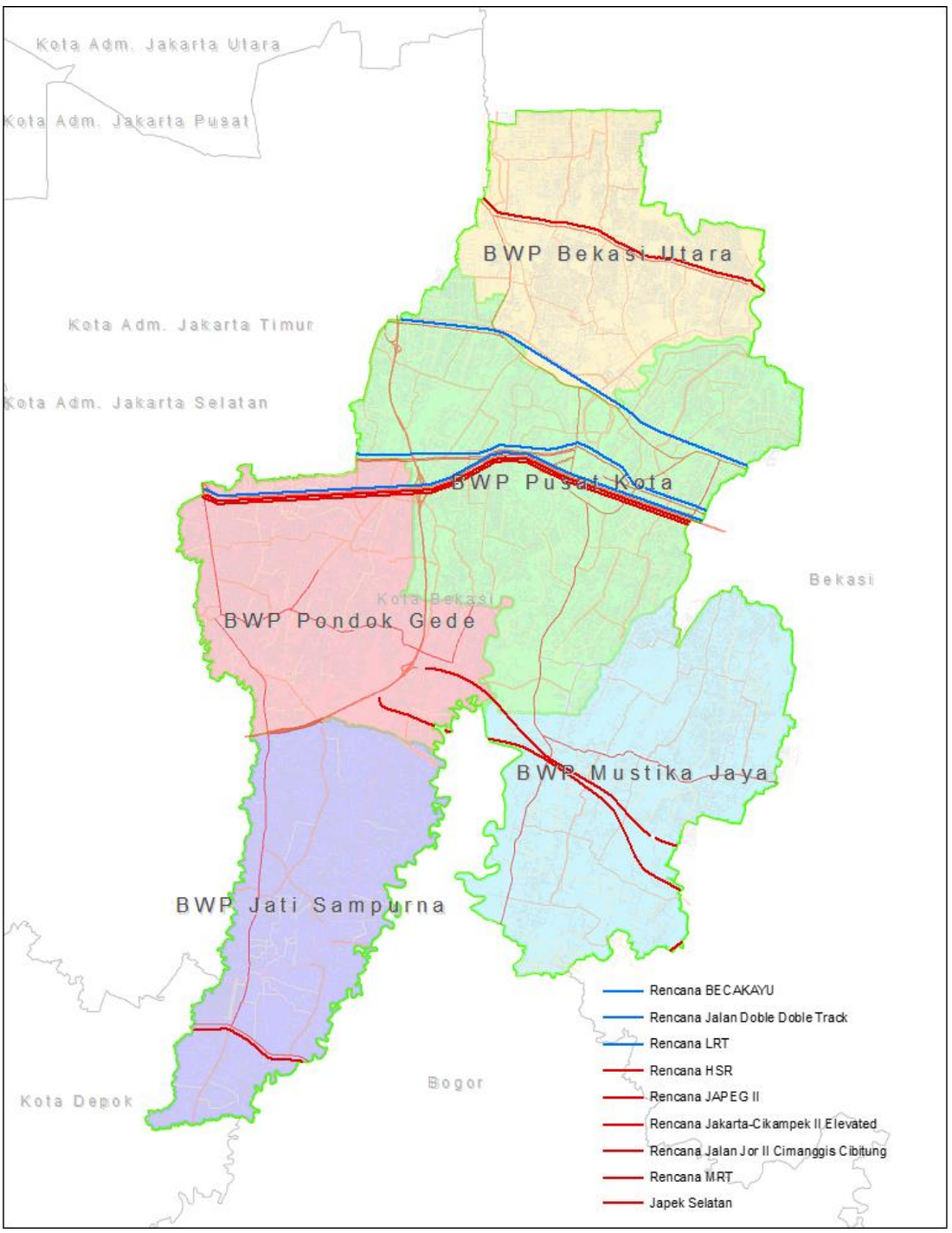
a. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kota
b. Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Perkotaan
c. Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan berdasarkan Pengembangan
d. Pengembangan Transportasi Berbasis Rel
e. Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi
f. Peningkatan Kinerja Lalu Lintas
g. Pengembangan Sistem Pendanaan Transportasi Perkotaan
h. Pengembangan Keterpaduan Transportasi Perkotaan dengan Tata Ruang
i. Pengembangan Transportasi Perkotaan yang ramah lingkungan

5. Isu Lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN)

Proyek Strategis Nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kinerja sistem transportasi Kota Bekasi dan lokasi PSN menjadi isu penting dimana perlu dilihat persinggungan dengan jaringan di dalam Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada beberapa sektor pembangunan di PSN yaitu:

a. Jalan Tol Cibitung -Cilincing;
b. Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
c. Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan;
d. Kereta Api Jakarta-Surabaya;
e. Double Track Jawa Selatan;

f. Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan
g. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Gambar 3.2. Lokasi Proyek Strategis Nasional Kota Bekasi

Berikut nama ruas jalan yang bersinggungan di Kota Bekasi diantaranya Jalan Ir. Juanda, Jalan Patriot, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jati Bening Baru, dan Jalan Caman.

Sarana Prasarana Transportasi yang belum memadai, meliputi:

a. Jalur transportasi dari Jakarta di satu titik tol timur, 1. Pintu tol timur 2. MRT 3. Becakayu 4. Stasiun kereta timur
b. Kurangnya pembangunan jalan pendukung tol
c. Jalan negara di sepanjang kali malang tidak dilebarkan
d. Volume kendaraan semakin meningkat tapi kapasitas jalan yang tidak memadai

e. Akses jalan yang tidak bertambah
f. Akses jaringan jalan tol dan jalan biasa yang semakin meningkat
g. Jumlah kendaraan yang tidak dibatasi
h. Moda transportasi yang sangat banyak
i. Transportasi umum yang tidak diperbaiki
j. Tidak ada pembatasan kendaraan
k. Kurangnya *public transport* yang *reliable*
l. Transportasi kurang tertib
m. Pedestrian hanya tersedia di beberapa titik tertentu
n. Jumlah penduduk meningkat, akses jalan atau ruang jalan yang tidak bertambah
o. Semakin banyak kendaraan sementara prasarana jalan tidak ada perubahan
p. Pertumbuhan jalan yang lebih kecil daripada pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor
q. Transportasi publik yang masih kurang memadai di Kota Bekasi
r. Karena tidak adanya pelebaran jalan dan/atau simpang-simpang yang berpotensi mengakibatkan antrian kendaraan, dan tidak adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian dan Dishub terhadap pelaku parkir liar terutama di badan-badan jalan
s. Semakin banyaknya proyek pusat yang melewati Kota Bekasi (seperti proyek double-double track), akan menutup akses ke arah Utara Kota Bekasi yang apabila tidak dibuatkan alternatif jalan dapat mengakibatkan kemacetan
t. Transportasi umum yang terbatas dan kurang nyaman
u. Meningkatnya volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan

B. Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir

Bencana banjir di Kota Bekasi seringkali terjadi di musim penghujan terutama pada saat hujan dengan curah hujan yang tinggi dan dengan durasi yang cukup lama. Banjir yang melanda Kota Bekasi sebagian melanda permukiman penduduk yang dulunya merupakan rawa maupun perkebunan. Banjir di Kota Bekasi terjadi di seluruh kecamatan di Kota Bekasi terutama yang wilayahnya terdapat aliran sungai yang tentunya menyebabkan kerusakan. Banjir yang terjadi di Kota Bekasi merupakan banjir yang disebabkan curah hujan yang berlangsung lama dan tinggi sehingga tidak tertampung oleh saluran drainase karena melebihi kapasitas dari drainase tersebut. Banjir juga disebabkan oleh luapan air sungai dengan kondisi curah hujan yang sama. Faktor lain adalah faktor manusia yang menjadi penyebab banjir di Bekasi pada tahun 2020 dengan banyaknya proyek nasional di Kota Bekasi. Proyek strategis nasional tersebut yaitu pembangunan Tol Becakayu, proyek Tol layang Jakarta-Cikampek, proyek LRT, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek-proyek tersebut mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir karena minimnya daerah resapan air berkurang akibat proyek. Luapan Kali Bekasi juga menjadi penyebab banjir dikarenakan sudah puluhan tahun belum dilakukan normalisasi yang berujung pada kemampuan dari kali tersebut berkurang dalam menampung air hujan dan juga air kiriman dari Bogor.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, kerentanan kapasitas adaptasi perubahan iklim dapat dilihat dari jasa ekosistem pengaturan iklim dan juga tingkat kerentanan di Kota Bekasi terhadap perubahan iklim. Pada Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Bekasi terdiri dari klasifikasi Indeks Kemampuan Adaptif (IKA), Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), Kerentanan, Risiko Banjir, dan Risiko Kering. IKS semakin tinggi menunjukkan semakin rentan, sedangkan IKA semakin tinggi menunjukkan semakin tidak rentan. Kecamatan Rawalumbu memiliki nilai IKA paling tinggi yaitu 0,77954 merupakan daerah yang paling tidak rentan dibandingkan dengan kecamatan lain. Nilai IKS tertinggi yaitu 0,5666 terdapat di Kecamatan Bekasi Timur yang berarti menjadi daerah paling rentan. Risiko banjir tertinggi dengan nilai 3 terdapat di Kecamatan Jatisampurna, Pondokmelati, Jatiasih, Bantargebang, dan Medan Satria. Risiko kering tertinggi terdapat di Kecamatan Jatisampurna, Pondokmelati, Jatiasih, Bantargebang, dan Medan Satria dengan nilai 3. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dan peta berikut.

Tabel 3.3. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kota Bekasi Tahun 2022

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Pondokgede	0.72590	0.3829	1	1	1
Jatisampurna	0.62802	0.4434	3	3	3
Pondokmelati	0.61094	0.3922	3	3	3
Jatiasaih	0.68062	0.4639	3	3	3
Bantargebang	-	0.4181	3	3	3
Mustikajaya	0.71734	0.3832	1	1	1
Bekasi Timur	0.73998	0.5666	2	2	2
Rawalumbu	0.77954	0.4794	1	1	1
Bekasi Selatan	0.76136	0.4581	1	1	1
Bekasi Barat	0.72302	0.3795	1	1	1
Medan Satria	0.71970	0.5176	3	3	3
Bekasi Utara	0.71806	0.5419	2	2	2

Sumber: KLHS RPJPD Kota Bekasi, 2025-2045

Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kondisi drainase Kota Bekasi. Kualitas jaringan drainase yang buruk karena tumpukan sampah yang menyumbat aliran air, kondisi bangunan drainase di beberapa lokasi yang tertutup serta dangkal, mengakibatkan daya tampung dalam menyalurkan air menjadi berkurang. Sebagai contoh pada bulan Juni tahun 2021 sebanyak 12 wilayah di empat kecamatan se-Kota Bekasi terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur Kota Bekasi. Penyebab banjir, khususnya di perumahan, selain karena intensitas hujan yang tinggi, juga akibat buruknya drainase seperti kejadian banjir di perumahan Pondok Hijau. Akibat air dari sejumlah perumahan sekitar mengalir ke Perumahan Pondok Hijau Permai, sehingga perumahan tersebut menjadi titik terakhir penampungan air. Kejadian lain pada bulan April tahun 2023, akibat buruknya drainase dan tingginya intensitas hujan, ruas Jalan Raya Pekayon Kota Bekasi juga terendam banjir. Secara sistem aliran, jaringan drainase di Kota Bekasi, khususnya di beberapa lokasi perumahan belum terkoneksi dengan saluran utama.

C. Pembangunan sarpras belum optimal medorong daya ungkit ekonomi

Menurut National Urban Design Studi tahun 2000, Kota Bekasi dapat dikategorikan sebagai Kota Metropolitan, dan fungsi Kota dalam skala sistem kota-kota nasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan peran sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur yaitu sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Posisi ini mendorong Bekasi untuk menikmati banyak pembangunan infrastruktur berskala regional maupun nasional. Pembangunan infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, air, merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, maupun pertanian. Namun apakah pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang ada telah membantu mendorong daya ungkit ekonomi Kota Bekasi?

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan suatu perekonomian dan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah serta tinggi atau rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah tertentu. Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk domestik dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan jalan tol Becakayu adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah jalan yang merupakan solusi untuk mengurangi

kemacetan dan memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat Jabodetabek. Namun pembangunan jalan ini bukan tanpa masalah.

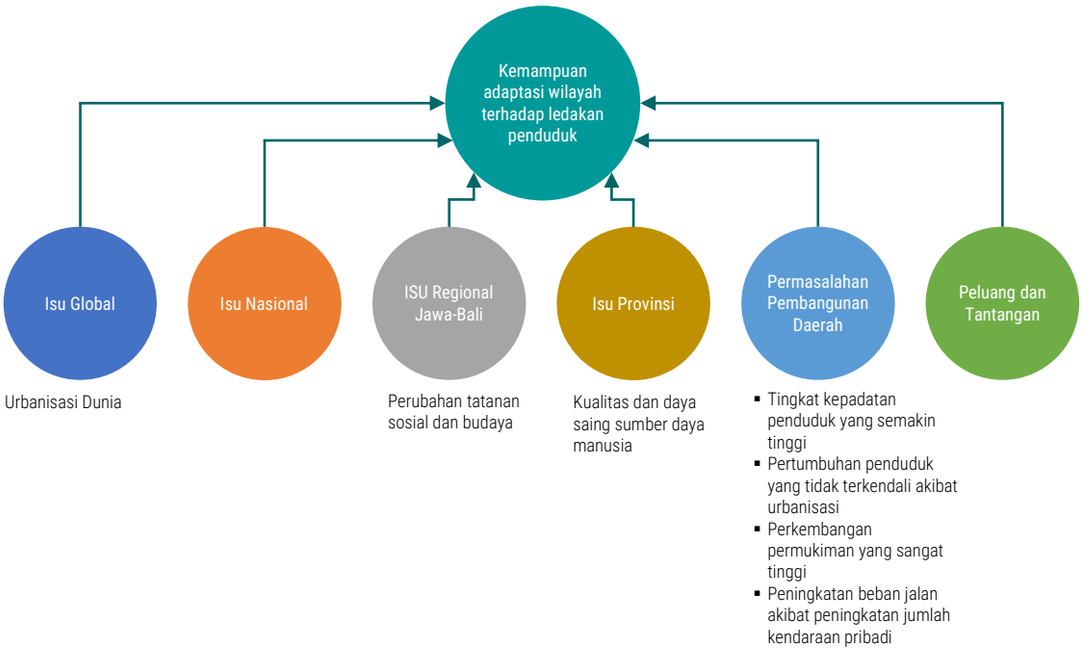
Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk dan tingkat perjalanan komuter yang tinggi mengakibatkan tingginya tingkat kemacetan di beberapa titik kota. Tingginya tingkat perjalanan tidak sebanding dengan prasarana transportasi publik yang memadai. Salah satu fenomena kemacetan yang sering terjadi berada di Stasiun Bekasi. Kemacetan disebabkan kinerja ruas jalan yang terhambat oleh angkutan kota dan taksi/ojek daring yang berhenti dan menunggu penumpang di badan jalan. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bekasi 2018-2023, aksesibilitas dan sistem logistik kota merupakan salah satu komponen yang mendukung daya saing daerah. Berdasarkan gambaran terkait sistem transportasi kota, maka secara struktural Kota Bekasi berpotensi memiliki aksesibilitas yang baik untuk mendukung pergerakan dalam dan luar kota. Namun permasalahan muncul dari ketidakseimbangan antara penggunaan kendaraan pribadi dengan angkutan umum yang mengakibatkan kapasitas jaringan jalan terlampaui. Sebagai akibatnya tingkat pelayanan jaringan jalan di Kota Bekasi menjadi rendah dan pada akhirnya mengakibatkan pergerakan menjadi terhambat. Tingkat pelayanan jalan yang semakin menurun juga dipengaruhi oleh sistem logistik (pergerakan angkutan barang) yang belum terencana dengan baik. Pemisahan sistem angkutan orang dan barang belum dilakukan secara optimal sehingga percampuran sistem pergerakan mengakibatkan kinerja sistem logistik kota belum optimal. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi.

Tingkat pelayanan jalan juga dipengaruhi oleh rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga 2022 berkisar antara 0,09 hingga 0,3, dengan panjang jalan sejauh 1.360,24 km hingga 4.496,23 km dan jumlah kendaraan berkisar antara 1,145 juta hingga 1,697 juta unit. Rendahnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bekasi menunjukkan bahwa kapasitas jalan untuk menampung jumlah kendaraan tergolong sangat rendah. Jumlah kendaraan yang berada di Kota Bekasi sangat tinggi jika dibandingkan dengan kapasitas jalan yang ada. Rasio yang rendah ini berpotensi menimbulkan titik kemacetan.

Namun masalah infrastruktur ini terus menjadi agenda dalam pembangunan Kota Bekasi. Kita dapat melihat optimisme dari arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur Kota Bekasi yang memfokuskan pada: a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur strategis sesuai potensi masing-masing wilayah. c. Pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi terintegrasi JABODETABEK dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur. d. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama untuk meningkatkan aksesibilitas yang seimbang menuju pusat-pusat kegiatan Kota Bekasi. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS. f. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain: pengembangan industri kategori Industri Logam Mesin dan Eletronika ((ILME) (Profil Investasi Kota Bekasi tahun 2020).

3.2. Isu Strategis

1. Kemampuan adaptasi wilayah terhadap ledakan penduduk



Gambar 3.3. Isu kemampuan adaptasi wilayah terhadap ledakan penduduk

Seperti telah dibahas sebelumnya Kota Bekasi saat ini menjadi tempat tinggal bagi para komuter yang bekerja di Jakarta, namun pada saat yang sama Kota Bekasi sendiri juga memiliki daya tarik bagi warga di luar Kota Bekasi untuk bekerja dan sekolah di Kota Bekasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke depan perkembangan penduduk Kota Bekasi akan semakin padat, tidak hanya dari pertumbuhan penduduk alamiah tetapi juga melalui migrasi masuk.

Bagi para komuter yang tinggal di Kota Bekasi tentunya mengharapkan kondisi lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan transportasi yang lancar dari Kota Bekasi menuju kota-kota di sekitarnya, terutama Jakarta. Sedangkan bagi para komuter dari luar Kota Bekasi yang bekerja dan beraktivitas di Kota Bekasi transportasi juga menjadi salah satu infrastruktur utama yang diperlukan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa isu strategis utama terhadap pertumbuhan dan aktivitas penduduk ke depan adalah mobilitas. Mobilitas penduduk yang lancar dan efisien akan menjadi isu utama, termasuk juga mobilitas yang lebih sehat mengingat saat ini sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang menyumbang terhadap peningkatan polusi udara. Dengan demikian perlu pengembangan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi dengan berbasis kepada energi terbarukan.

Selain mobilitas, isu strategis berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah penyediaan permukiman. Dengan berkembangnya Kota Bekasi maka harga tanah akan semakin mahal dan akan berdampak terhadap menurunnya kemampuan untuk menyediakan perumahan bagi warga Kota Bekasi. Perlu skema-skema pendanaan yang dapat membantu warga Kota Bekasi untuk mendapatkan akses terhadap perumahan dan permukiman. Kesulitan untuk mendapatkan perumahan akan menyebabkan tumbuhnya permukiman-permukiman liar dan kumuh yang akan mengganggu kualitas lingkungan dan kesehatan kota.

Pengembangan perumahan dan permukiman tentunya juga harus disertai dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan. Termasuk juga ruang-ruang publik, baik itu ruang terbangun maupun ruang terbuka. Ruang publik ini penting untuk mengurangi segregasi sosial sekaligus memperkuat ikatan sosial. Khusus untuk ruang terbuka hijau (RTH), sangat diperlukan untuk memperkuat penyediaan jasa lingkungan (*ecosystem services*) dan lingkungan yang lebih baik dan nyaman bagi warga kota.

Sebagai perbandingan, di beberapa kota di negara maju, kepadatan penduduk ini diatasi dengan membangun *vertical housing*, yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas atau infrastruktur ini termasuk integrasi antara infrastruktur abu-abu (*grey infrastructure*) dan infrastruktur hijau (*green infrastructure*) dalam desain permukiman yang modern dan nyaman. *Grey infrastructure* adalah infrastruktur yang berbasis rekayasa bangunan, sedangkan *green infrastruktur* adalah infrastruktur yang berbasis tanaman dan keanekaragaman hayati. Mobilitas penduduk difasilitasi dengan pembangunan kota yang semakin kompak dan terkoneksi, dan ruang-ruang yang tersedia dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan bersifat multi-fungsi. Kesemuanya ini difasilitasi oleh pengembangan *smart technology* sehingga kebutuhan dan mobilitas sumber daya yang ada dapat selalu dimonitor. Konsep *compact-green-smart* bisa menjadi alternatif untuk mengatasi permasalahan peningkatan jumlah penduduk yang tinggi.

2. Peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan

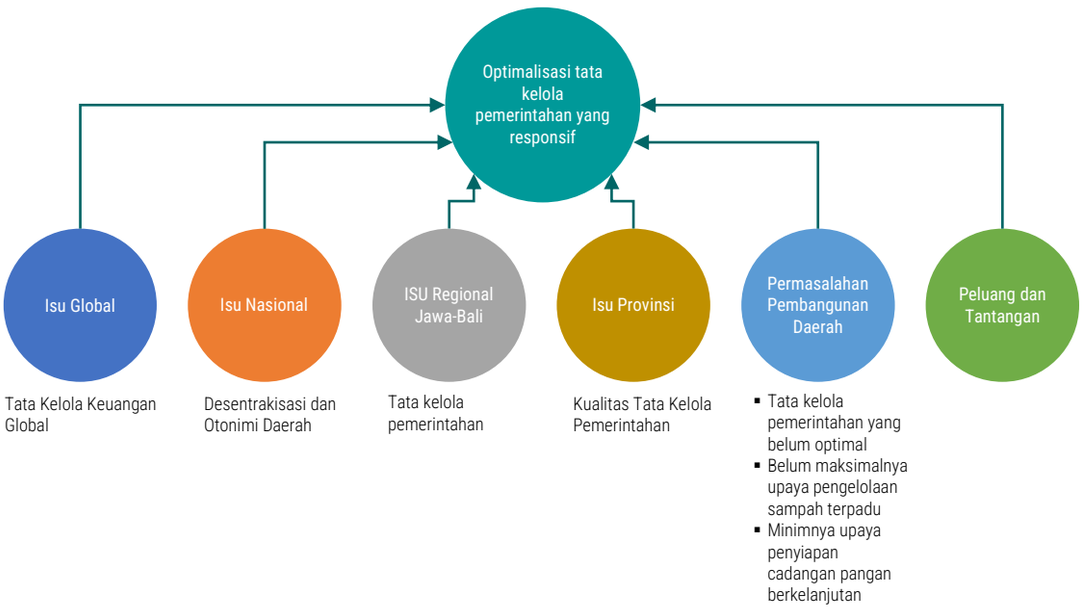


Gambar 3.4. Isu peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan

Pembangunan wilayah yang dilakukan di Kota Bekasi berkembang sangat pesat dalam 1 dekade terakhir. Kontribusi sektor berbasis lahan cukup besar terhadap dinamika penggunaan lahan di Kota Bekasi. Sektor perumahan berkontribusi sekitar 71%, sementara sektor lain, seperti pertanian secara umum masih cukup luas mencapai 15%, sektor jasa dan industri mencapai 6,2% dan tanah terbuka sekitar 6,4% dari total luas alokasi penggunaan lahan (RTRW Kota Bekasi 2024-2044). Sebagai salah satu kota satelit penopang ibukota DKI Jakarta, Kota Bekasi mengalami transformasi menjadi mega urban dengan konsentrasi penduduk yang terus berkembang dan menjadi kota hunian dan sentra jasa perdagangan dan industri. Implikasi dari pesatnya pembangunan yang terjadi di Kota Bekasi tersebut adalah kebutuhan akan ruang yang semakin tinggi, sementara alokasi ruang, baik aktual maupun perencanaan pemanfaatan yang terbatas. Oleh sebab kondisi tersebut maka pengaturan ruang yang efektif dan efisien dengan kegiatan pemanfaatan ruang perlu saling berkesesuaian. Tantangan ke depan yang perlu perhatian bersama dalam kaitan dampak dari pesatnya pembangunan adalah dinamika penggunaan lahan yang semakin tinggi dan berpotensi timbulnya konflik antar penggunaan. Pengaturan ruang yang sesuai daya dukung dan kapasitas sumber daya terhadap kegiatan pemanfaatannya menjadi fokus utama pengelolaan ruang di masa mendatang. Hal ini menjadi salah satu isu strategis penting dalam upaya menjaga keseimbangan kondisi aktual dengan program kegiatan pembangunan dalam perencanaan tata ruang daerah sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan. Isu strategis penting terkait dinamika konflik dari aktivitas penggunaan lahan antara lain inkonsistensi penggunaan lahan dalam kaitannya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap kebijakan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang tentu berkesesuaian terhadap kegiatan pemanfaatan dari aktivitas penggunaan lahan. Konsistensi pemanfaatan ruang ini menjadi hal pokok dan penting.

Berbagai upaya pelestarian dan upaya perlindungan lingkungan perlu dilakukan seperti penegakan dan perlindungan lingkungan, komitmen lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi upaya untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (misalnya dengan upaya perlindungan terhadap resapan air, limbah terpadu, sempadan sungai), Indeks Kualitas Udara (dengan pengurangan emisi GRK) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (penyediaan lahan untuk RTH). Di samping itu perlu perhatian serius dalam mendukung pembangunan rendah karbon dengan melakukan upaya penurunan emisi GRK.

3. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang responsif



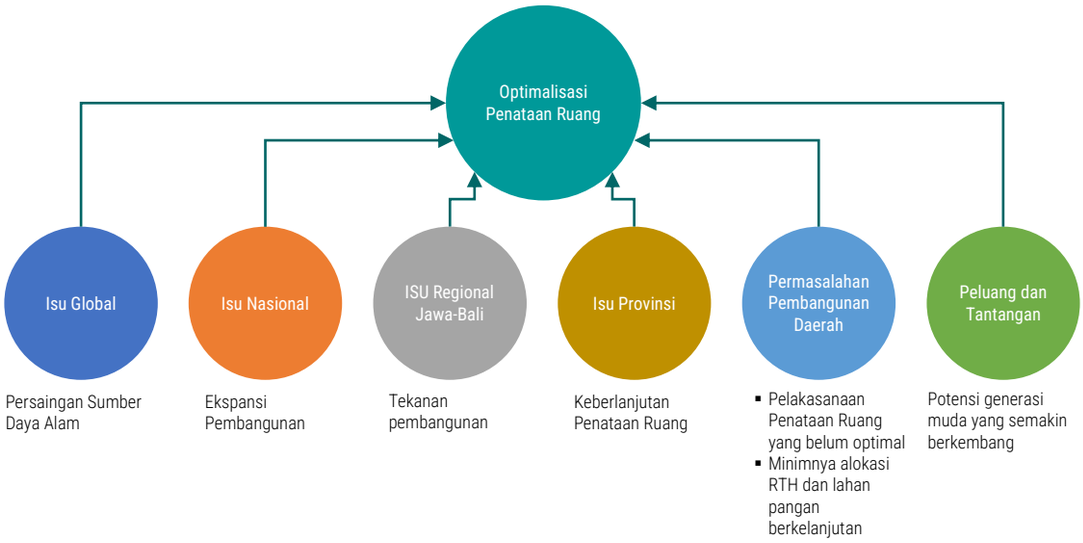
Gambar 3.5. Isu optimalisasi tata kelola pemerintahan yang responsif

Kebutuhan wilayah perkotaan di masa yang akan datang tidak hanya akan semakin meningkat namun akan semakin komplek seiring berkembangnya kebutuhan dan dinamika penduduk perkotaan. Pelayanan publik tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat saja namun juga dalam menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan jangkauan yang lebih merata. Inovasi dan teknologi harus menjadi perangkat utama dalam melaksanakan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Pesatnya pembangunan yang terjadi baik dari arus perkembangan dalam wilayah maupun dari luar wilayah, mengharuskan kondisi tata kelola yang adaptif dan responsif. Perubahan-perubahan cepat wilayah perkotaan umumnya berdampak antara lain pada meningkatnya beban jalan atas kendaraan, peningkatan lahan terbangun yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan wilayah resapan dan lahan pangan, yang jika tidak diimbangi dengan kesiapan tata kelola maka dapat memunculkan berbagai persoalan.

Kemajuan penyelenggaraan pemerintah yang diupayakan terjadi melalui penerapan teknologi dan berbagai inovasi. Hal ini tidak lantas mengurangi rasa kepekaan, kepedulian dan kedekatan antara penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Semakin kompleksnya perkembangan penduduk mendorong masyarakat yang lebih individualistis dan apatis terhadap proses pembangunan. Jika tidak disadari dengan baik maka hubungan penyelenggara pemerintahan dan masyarakat akan semakin berjarak. Padahal keberhasilan pembangunan, salah satunya ditentukan pula oleh keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga diperlukan upaya pendekatan yang optimal dalam membangun *civic engagement*. Pendekatan tersebut memerlukan sikap tanggap terhadap perubahan karakter masyarakat. Kota Bekasi saat ini, bahkan di masa yang akan datang, memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Terdapat kalangan tertentu yang hanya membutuhkan kemudahan dan kecepatan dalam berbagai pelayanan, namun terdapat juga kalangan lain yang

masih berupaya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kepekaan dalam melihat karakter masyarakat dan kebutuhan apa yang harus dipenuhi, perlu menjadi sikap penyelenggara pemerintahan sehingga kebutuhan semua kalangan dapat terpenuhi dengan baik.

4. Optimalisasi penataan ruang



Gambar 3.6. Isu optimalisasi penataan ruang

Kota Bekasi perlu menyediakan ruang terbuka hijau seluas 6.710 ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sebaran vegetasi di Kota Bekasi pada tahun 2021 mengalami penurunan untuk kategori tinggi dengan luas wilayah 6.889 ha khususnya di Bekasi bagian barat. Persentase RTH eksisting di Kota Bekasi juga mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2021 sebesar 8% atau 1.728 ha pada Januari 2021 dan luas RTH yang telah dioptimalkan peruntukannya untuk penataan ruang baru mencapai 2,42% atau seluas 525 ha dengan tipe RTH yang dominan yaitu RTH Kota dan RTH TPU. Persentase ini menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan luas ruang terbuka hijau yang signifikan sejak rancangan RTRW Kota Bekasi diterbitkan pada tahun 2011.

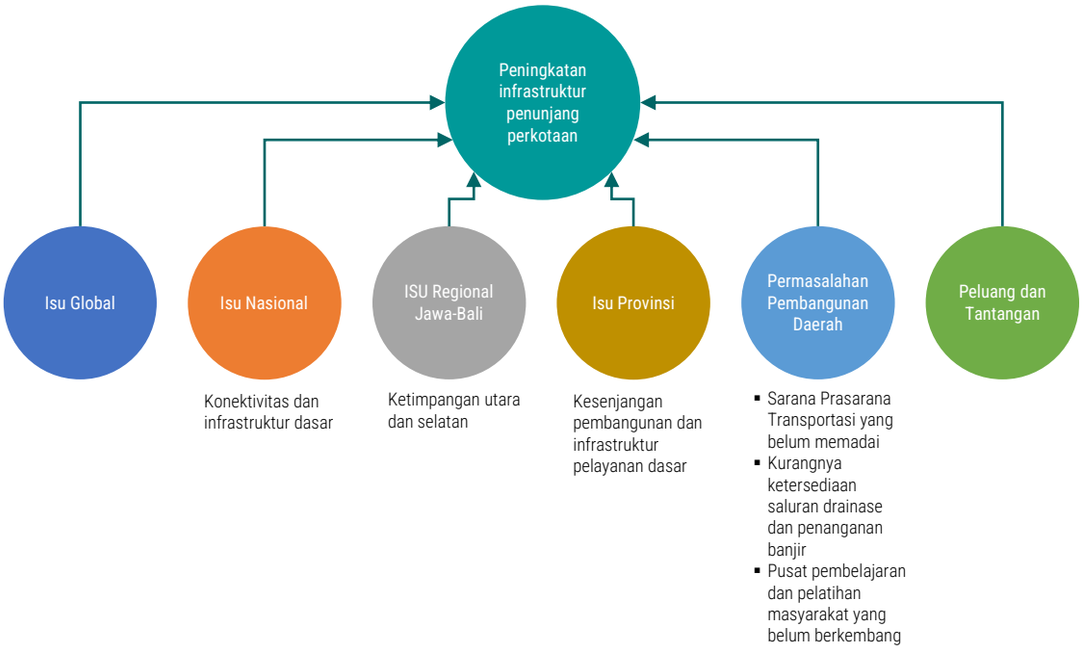
Sementara itu kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) berdasarkan RTRW Kota Bekasi dialokasikan di Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang hanya seluas 30 ha. Perkembangan terbaru setelah terbitnya SK Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK-P6.03.03/XII 2019 terkait LBS terdapat selisih 531,83 ha antara luas KP2B dengan luas LBS, sebagai berikut:

a. Luas KP2B dalam Raperda: 0,17 ha
b. Luas LBS dalam SK: 532 ha

Sesuai Berita Acara Kesepakatan verifikasi aktual penyelesaian ketidaksesuaian lahan sawah yang dilindungi tanggal 1 Agustus Tahun 2022 antara Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian ATR/BPN dan Ruang dengan Pemerintah Kota Bekasi dengan luas 29,64 (dua puluh sembilan koma enam empat) hektar LSD yang dijadikan kawasan tanaman pangan.

Luas ini menunjukkan area yang memang sangat sempit jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk Kota Bekasi akan pangan. Fenomena sempitnya alokasi lahan untuk pangan terutama KP2B memang merupakan hal yang sering terjadi di kota-kota di Indonesia.

5. Peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan



Gambar 3.7. Isu peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan

- **Peningkatan penyediaan layanan dan pemanfaatan angkutan umum serta sarana prasarana transportasi**

Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kota

Transportasi publik di Kota Bekasi belum menjadi primadona karena beberapa hal terkait keamanan, kenyamanan dan juga biaya. Banyak yang lebih memiliki mengendarai sepeda motor karena biaya murah, tepat waktu dan bisa menuju ke rute mana pun. Padahal, penggunaan transportasi publik dapat mengurangi kemacetan hingga **12 kali lipat** lebih efektif dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Okupansi Angkutan Umum di Kota Bekasi baru mencapai 50%. Angkutan umum Kota Bekasi berbasis kendaraan bus mikro berpenumpang 9-16 memiliki jumlah keterisian sekitar 50%, namun beberapa armada sudah sangat tua dan pelayanan diperlukan perhatian pemerintah berupa subsidi kualitas pelayanan kepada organisasi angkutan umum dan penataan trayek sesuai kebutuhan penumpang, badan usaha yang kuat dan perencanaan secara evolutif menuju pelayanan berbasis angkutan massal BRT. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat Kota Bekasi masih enggan menggunakan transportasi umum. Sarana angkutan Trans Patriot yang sudah dimulai, cukup memberi harapan adanya peningkatan layanan angkutan umum Kota Bekasi. Namun jumlah armada dan koridor untuk jalur bus Trans Patriot masih kurang. Saat ini baru terdapat dua koridor dan menampung sekitar 1.000-2.000 penumpang per hari atau sekitar 25.000-45.000 penumpang tiap bulannya.

Pengembangan Transportasi Perkotaan Terintegrasi

Pemerintah telah bekerja sama dengan swasta, yaitu dengan mengembangkan BRT-APTB (Bus Rapid Transit-Angkutan Perbatasan Terintegrasi *Busway*) bagi para komuter menuju DKI Jakarta, namun masih belum beroperasi dengan optimal karena beberapa kendala.

Pengembangan Transportasi Berbasis Rel

Untuk moda transportasi kereta api, pemerintah telah melakukan modernisasi Stasiun Bekasi yang menjadi bagian dari pembangunan jalur dwi-ganda (*Double-double track*/ DDT) Manggarai-Cikarang. Ini merupakan peluang yang besar bagi masyarakat Kota Bekasi dan komuter untuk menggunakan kereta api karena fasilitasnya semakin lengkap dan nyaman serta membantu mengurangi beban kemacetan di jalan raya. Namun masalah kapasitas lahan parkir cukup menjadi kendala karena Stasiun Bekasi dan Kranji sudah sangat padat dan tidak terlayani dengan

kapasitas ruang parkir yang ada. Kapasitas lahan parkir yang cukup, dapat mendukung pengembangan program *Park and Ride* maupun *Kiss and Ride* di stasiun agar mobilitas penumpang yang turun dari stasiun dan akan melanjutkan ke moda selanjutnya, tidak menimbulkan kemacetan di area sekitar stasiun. Beroperasi Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi juga menjadi nilai tambah bagi Kota Bekasi yang harus direspon dengan sangat baik.

Penyelarasan pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan Kinerja Lalu lintas Ruas Jalan Terdampak

Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pemerintah pusat membangun Proyek Strategi Nasional (PSN) yang bersinggungan dengan jaringan jalan dalam Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat beberapa sektor pembangunan PSN di Kota Bekasi yaitu: 1) Jalan Tol Cibitung-Cilincing; 2) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu; 3) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan; 4) Kereta api Jakarta-Surabaya; 5) Double Track Jawa Selatan; 6) Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan 7) Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. Ruas jalan yang bersinggungan, diantaranya: Ir. H. Juanda, Jalan Patriot, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Jati Bening Baru, dan Jalan Caman. Beberapa proyek ini telah selesai dibangun dan menjadi potensi besar bagi perkembangan Kota Bekasi sekaligus kendala dan ancaman apabila tidak direspon dengan sangat baik, terutama manajemen dan rekayasa lalu lintas di daerah terdampak.

Peningkatan Kinerja Lalu Lintas

Titik kemacetan di Kota Bekasi semakin bertambah tiap tahunnya. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2010 terdapat 13 titik kemacetan di Kota Bekasi dan meningkat menjadi 19 titik kemacetan pada tahun 2014 terutama pada pusat kota atau CBD (*Central Business District).* Pada periode 2018-2023, titik kemacetan semakin bertambah menjadi 24 titik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah kendaraan pribadi yang semakin meningkat dan jumlah prasarana transportasi yang cenderung tidak ada peningkatan. Kapasitas jalan menjadi salah satu penyebab semakin bertambahnya titik kemacetan di Kota Bekasi dari tahun ke tahun. Hal ini karena kapasitas jalan akan mempengaruhi kinerja lalu lintas, terutama kinerja lalu lintas di kawasan rawan macet seperti di kawasan CBD yang merupakan ruas jalan koridor utama yaitu Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. HM Hasibuan dan Jl. KH. Noer Ali. Volume lalu lintas terlalu besar hingga mendekati ambang kapasitas jalan yang dimiliki.

- Kurangnya Ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir

Berkurangnya Area Resapan Air dan Rendahnya Daya Resap Tanah

Secara alamiah, topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0-2% ke arah utara dan dengan ketinggian 4-81 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi yang relatif datar memang menyebabkan banyak terjadi genangan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Di samping itu, adanya lereng curam di hulu serta perubahan ekosistem mengakibatkan berkurangnya air yang disimpan di tanah dan memperbesar aliran air permukaan yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan luapan air di hilir. Daya resap tanah terhadap air hujan di wilayah selatan rata-rata 25% karena memiliki pori-pori tanah yang cukup besar sedangkan pada wilayah utara memiliki daya resap yang rendah karena memiliki kandungan tanah lempung yang sulit menyerap air. Untuk wilayah dengan kandungan tanah seperti ini, biasanya akan banyak terjadi genangan air apalagi bila ditambah sistem drainase yang buruk. Di samping itu, pembangunan Kota Bekasi seringkali tidak memperhatikan penyediaan area resapan, bahkan pembangunannya justru berada di area resapan air. Minimnya resapan dan tampungan air karena peruntukkan lahan yang tidak diikuti dengan penyediaan area resapan

membuat air limpasan ke sungai semakin besar dan kapasitas sungai tidak mampu menampung seluruhnya, sehingga terjadi luapan dan genangan.

Memburuknya Kondisi DAS di Kota Bekasi

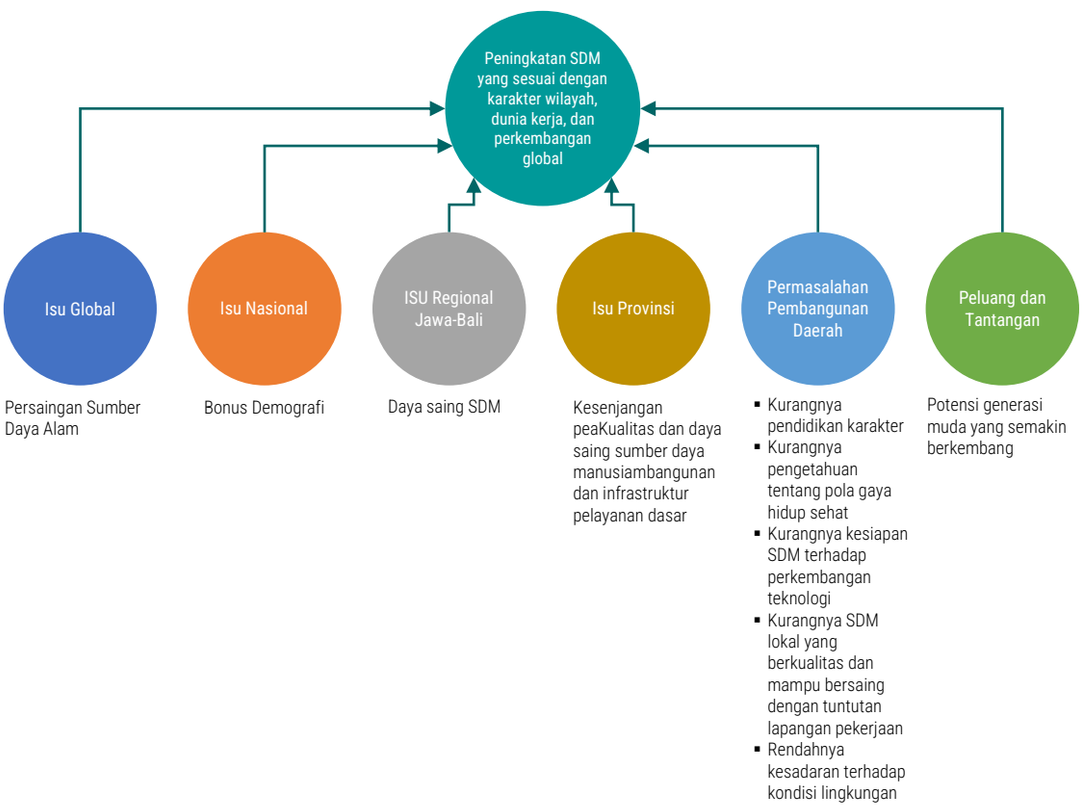
Kondisi DAS di Kota Bekasi juga banyak mengalami pendangkalan dan leher botol yang menghambat laju aliran air. Sungai juga seringkali dipenuhi oleh sampah karena perilaku masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke sungai juga menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan aliran sungai di beberapa titik dan menyebabkan banjir. Beberapa DAS di Kota Bekasi dengan permasalahannya antara lain adalah:

a. DAS Kali Bekasi (perumahan rawan banjir karena berada di bawah level banjir, terjadinya sedimentasi dan penyempitan badan sungai sehingga mengurangi daya tampung sungai).
b. DAS Kali Cakung (perumahan rawan banjir berada di bawah level banjir, *bottleneck crossing toll* tidak mampu menampung kapasitas air, sedimentasi dan penyempitan badan sungai, tidak adanya polder air).
c. DAS Kali Sunter (*bottleneck crossing toll*, banyak pemukiman di area sempadan sungai, pengelolaan sepanjang saluran tidak ada, tidak ada keterpaduan pengelolaan lintas wilayah).

Kurangnya Pemeliharaan Saluran Drainase

Masalah banjir dan genangan air tidak hanya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi dan topografi alamiah Kota Bekasi, namun masalah pemeliharaan gorong-gorong dan saluran drainase juga menjadi salah satu pemicunya. Sungai atau saluran utama yang bersilangan dengan jalan tol di Kalimalang berada di bawah kewenangan yang berbeda sehingga kegiatan pemeliharaan seringkali menjadi permasalahan karena tidak adanya kesepakatan antar pemilik wewenang di titik persilangan tersebut, antara sungai atau saluran utama Kota Bekasi dengan jalan tol di Kalimalang.

6. Peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global



Gambar 3.8. Isu peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan. Salah satu dari tujuh agenda pembangunan tersebut adalah *"Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing".* Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tertuang dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025 pada Misi nomor 2 yaitu *Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Berpengetahuan, Sehat, Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Produktif*.

Pada RPJPD Kota Bekasi 2025-2045, upaya pembangunan diarahkan pada program prioritas untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global. Pemerintah Daerah Kota Bekasi perlu melakukan evaluasi dan memastikan bahwa setiap agenda pembangunan yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia di Kota Bekasi difokuskan pada lima isu strategis, yaitu: 1) pendidikan karakter, 2) pola gaya hidup sehat, 3) SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, 4) SDM yang memenuhi kualifikasi lapangan kerja, dan 5) kesadaran terhadap lingkungan.

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Permasalahan pendidikan karakter ini menjadi isu penting di masa mendatang mengingat derasnya arus globalisasi yang dicirikan dengan arus informasi dan budaya yang tanpa batas melalui berbagai media akan sangat berimbas pada karakter peserta didik yang selanjutnya berimplikasi pada kualitas SDM Kota Bekasi di masa mendatang.

Pendidikan karakter harus selalu diajarkan, dijadikan kebiasaan, dilatih secara konsisten dan kemudian berubah menjadi karakter bagi peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk manusia secara utuh (***holistik***) yang berkarakter, selain untuk membentuk pembelajar sepanjang hayat, yang sejatinya akan mampu mengembangkan semua potensi peserta didik secara seimbang (spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani) dan juga secara optimal.

World Health Organization (WHO, 1999) menyatakan bahwa *a healthy lifestyle is a way of living that lowers the risk of being seriously ill or dying early*. Pola hidup sehat adalah cara hidup yang dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit. Tidak semua penyakit dapat dicegah, namun dengan menerapkan pola hidup sehat dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kritis. Kesehatan tidak hanya mengacu pada fisik yang bugar, tapi juga kesehatan mental dan sosial. Tubuh yang prima akan membantu hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan produktif yang secara langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi pada masa yang akan datang.

Tantangan pembangunan ekonomi ke depan akan semakin berat dan kompleks. Perekonomian ke depan dihadapkan pada ketidakpastian akibat krisis ekonomi, perubahan iklim, dan faktor lainnya yang berdampak terhadap perekonomian pada berbagai level hingga daerah. Di sisi lain, transformasi ekonomi yang terjadi saat ini sudah memasuki era ekonomi digital berbasiskan teknologi dengan dukungan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*). Hal ini menjadi tantangan bagi Kota Bekasi ke depan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi masih menjadi salah satu tujuan utama dan indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Tentu saja, pertumbuhan ekonomi tersebut haruslah merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat disamping mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Selain

itu, terjaganya stabilitas ekonomi merupakan prasyarat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut.

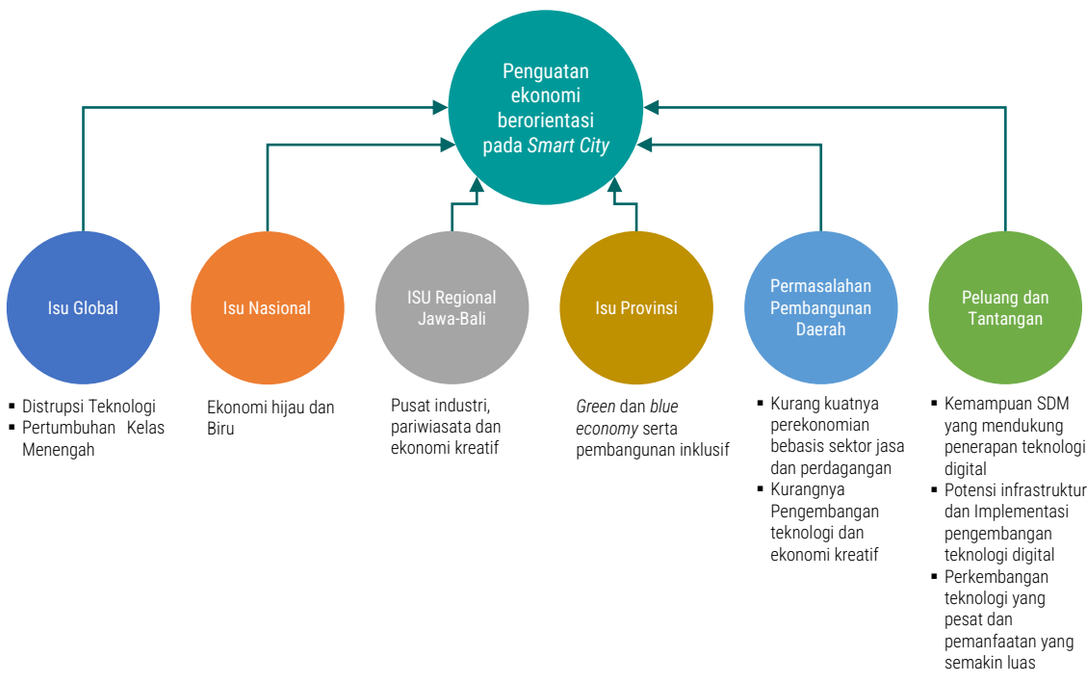
Menurut BPS Kota Bekasi (2023), laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi selama 2011-2021 *year on year* tercatat di angka 5-6 persen per tahun, kecuali di tahun 2020-2021 mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan perekonomian Kota Bekasi yang berbasis industri dan jasa sangat prospektif. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro tidaklah cukup mengatasi masalah pengangguran yang amat kompleks, terutama pengangguran yang bersifat struktural.

Adanya kesenjangan antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan di dunia usaha menjadi isu penting ke depan yang menjadi prioritas program pengembangan. Pengangguran struktural ini lebih disebabkan akibat adanya transformasi struktural ekonomi, dimana tumbuhnya sektor industri dan jasa tidak diiringi oleh peningkatan kualitas SDM yang relevan dengan kebutuhan industri dan jasa tersebut.

Tingkat kesadaran masyarakat secara umum terhadap kondisi lingkungan sekitar di wilayah perkotaan seperti halnya di Kota Bekasi masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat terlihat dari masih banyaknya kasus wabah penyakit yang merebak dan terus berulang di masyarakat, seperti demam berdarah. Kondisi ini jelas menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar seperti banjir. Hal ini salah satunya disebabkan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Beberapa lokasi kecamatan yang sering terdampak banjir antara lain Kecamatan Mustika Jaya, Medan Satria, Rawa Lumbu, Bekasi Utara, Pondok Gede, Jati Asih, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, dan Bekasi Timur. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap masyarakat menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan.

7. Penguatan ekonomi Kota Bekasi berorientasi pada *Smart City*



Gambar 3.9. Isu penguatan ekonomi Kota Bekasi berorientasi pada *Smart City*

Berbicara *smart city* di Kota Bekasi, tidak akan lepas dari inisiatif nasional beberapa tahun lalu. Lebih tepatnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada tahun 2017-2019 me-*launching* suatu Gerakan 100 *smart city* Indonesia, dimana Kota Bekasi termasuk didalamnya. Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pemerintah kabupaten dan kota bahwa *smart city* bukanlah sekedar berurusan dengan teknologi digital semata secara material/teknis, namun sistem bisnis (pemerintahan) secara keseluruhan. Oleh karena itu, secara kerangka, *smart city* yang diusung oleh KOMINFO terdiri dari enam aspek, yaitu: *smart government*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.

Gerakan ini salah satunya dilakukan karena sebelum adanya inisiatif nasional, beberapa kota/kabupaten di Indonesia telah berinisiatif untuk mengembangkan *smart city* dengan perspektif masing-masing. Meski ada beberapa daerah yang sudah menekankan pengembangan aspek-aspek di luar teknis semata, beberapa mengklaim status yang sama, meskipun klaim tersebut hanya berdasarkan keberadaan, misalnya CCTV dan Wi-Fi. Inisiatif *smart city* di Kota Bekasi sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun 2015-2016. Hal ini menandakan bahwa Kota Bekasi sudah melihat peluang pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perkotaannya. Salah satu inisiatif awal di Kota Bekasi terkait *smart city* adalah dikembangkannya aplikasi Sorot, yang berkolaborasi dengan Telkomsel dan LAPI ITB. Secara umum dapat dikatakan Gerakan 100 *smart city* nasional dimulai untuk memberikan panduan yang lebih baik tentang arti sebenarnya dari *smart city*. Diharapkan pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik dan holistik, bahwa selain kehadiran teknologi, *smart city* juga merupakan transformasi proses bisnis secara keseluruhan.

Setiap kota maupun kabupaten mempunyai karakteristik dan prioritas masing-masing dalam pengembangan *smart city*. Dengan sumber daya yang terbatas, diperlukan suatu prioritas. Kota Bekasi sendiri berupaya untuk dapat mencakup berbagai aspek "*smart*" seperti kerangka yang dituangkan pada inisiatif nasional. Sebagai contoh, beberapa aspek tersebut (pada saat evaluasi manfaat *smart city* tahun 2020) adalah: *Smart Government* dengan lokus MPP BTC, *Smart Branding* dengan lokus Pedestrian Jl. A. Yani, *Smart Economy* dengan lokus KOMBAS di Bekasi Town Square, *Smart Living* dengan lokus RSUD Chasbullah Abdul Madjid, *Smart Environment* dengan lokus Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi (terkait larangan penggunaan kantong plastik di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi), *Smart Society* dengan lokus di wilayah RW 23 Kelurahan Margahayu dengan adanya EWS (*Early Warning System*).

Apa yang telah dilakukan Kota Bekasi cukup sejalan dengan preskripsi umum pengembangan *smart city*, dimulai dari suatu *living lab* dimana nanti dapat dilakukan eskalasi secara implementasi. Ini tantangan pertama dan utama dari pengembangan *smart city* di Kota Bekasi. Sejauh mana pembelajaran dan praktik yang baik/gagal di lokus (*living labs*) tersebut, dapat diperluas/tidak sangat bergantung pada upaya konsisten yang dilakukan di *living labs* tersebut.

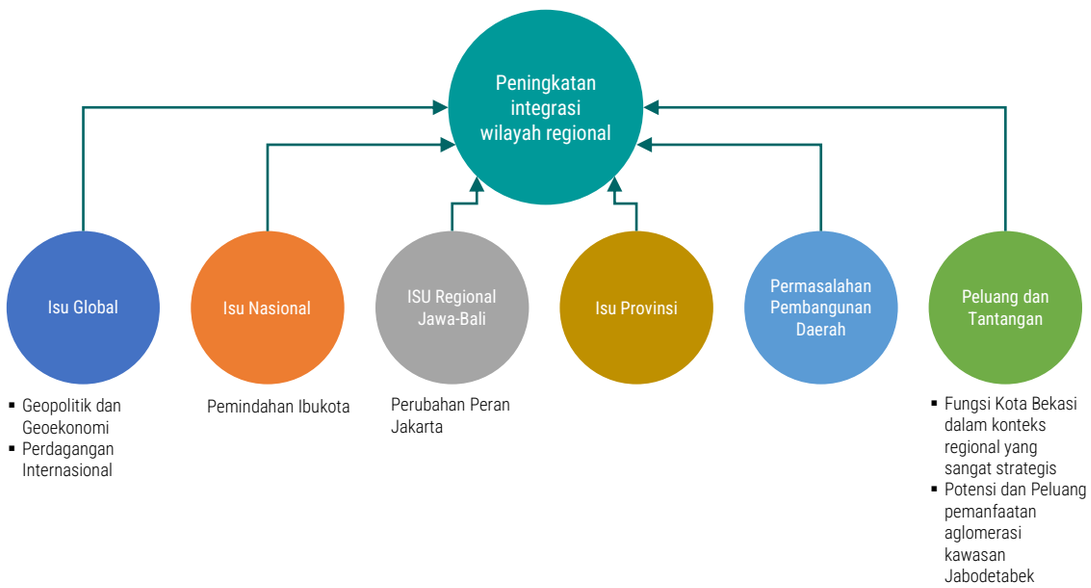
Tantangan yang kedua adalah kolaborasi dan *co-creation*. Dengan karakter penduduk Kota Bekasi yang didominasi oleh mayoritas penglaju (*commuter*), *sense of belonging* terhadap kota menjadi cukup berbeda. Namun, inisiatif yang dilakukan belum lama ini seperti IdenTIK di bawah KOMINFO dapat memunculkan peluang-peluang kolaborasi dan *co-creation*, dimana para sumber daya manusia yang terkait dapat berkontribusi dalam pengembangan *smart city* di Kota Bekasi, dalam bentuk *digital startup*, konten digital, dan lainnya.

Tantangan ketiga adalah pengembangan *smart city* di luar pengembangan aplikasi. Sudah jamak terlihat, termasuk di Kota Bekasi, bahwa *smart city* diwarnai dengan munculnya beragam aplikasi yang ditujukan untuk membantu peningkatan layanan publik. Meski dalam beberapa batasan, hal tersebut membantu dari sisi kecepatan pelayanan, penyampaian informasi, proses pengurusan, dan lainnya, tetapi *smart city* tidak akan optimal jika aspek non digitalnya tidak turut dikembangkan. Sebagai contoh, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dilakukan melalui pengembangan sistem informasi/aplikasi terkait dengan sekolah dan pendaftaran, tetapi juga

perlu diiringi dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, kualitas guru, kualitas siswa, dan bahkan sistem penerimaan siswa baru yang sekarang banyak menimbulkan polemik. Hal ini juga berlaku di sektor lainnya. Aplikasi yang terlampau beragam juga akan memberikan beban tersendiri bagi pengguna (masyarakat), termasuk adanya keberagaman/ketimpangan infrastruktur pendukungnya, seperti kapasitas *handphone* dan jaringan internet. Isu terkait dengan *digital native/migrant* juga tidak dapat dihindari karena keberagaman penduduk perkotaan.

Tantangan berikutnya adalah potensi konflik teknologi-manusia. Aspek layanan dan sistem perkotaan yang semakin terotomatisasi tentu dapat mengubah cara orang hidup dan bekerja. Salah satu ancaman yang paling nyata, terutama dengan adanya populasi yang terus tumbuh, mengakibatkan dapat berkurangnya dan/atau berubahnya lapangan pekerjaan. Perkembangan teknologi digital maupun teknologi lainnya di masa depan tentu akan merubah tatanan sistem sosial yang tentunya memerlukan kualitas dan jenis sumber daya manusia yang berbeda.

8. Peningkatan integrasi wilayah regional



Gambar 3.10. Isu peningkatan integrasi wilayah regional

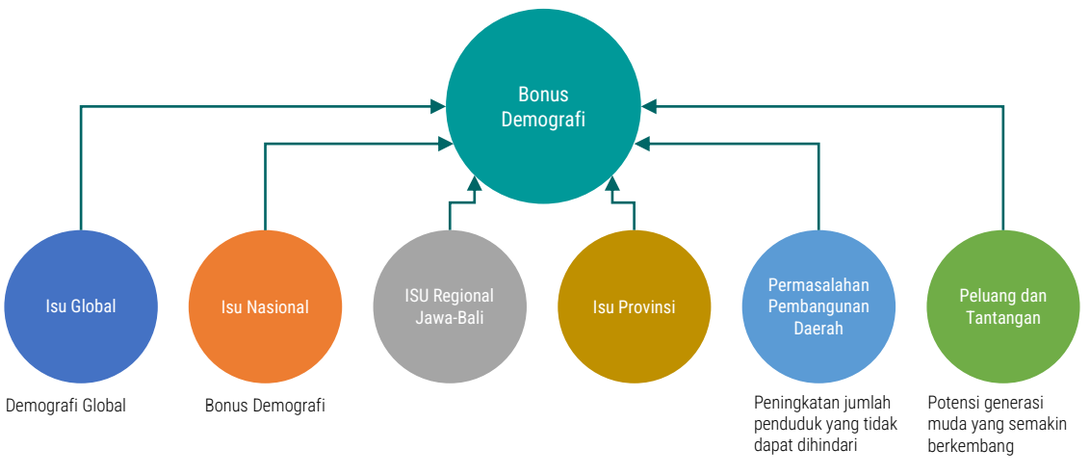
Dalam konteks regional Kota Bekasi memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- Kota Bekasi menjadi wilayah penyeimbang DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, dan jasa. Posisinya yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikan Kota Bekasi wilayah strategis yang mendapat dampak langsung dari berbagai perkembangan aktifitas di Jakarta. Fungsi ini menyebabkan proses suburbanisasi di wilayah Bekasi.
- Kota Bekasi menjadi wilayah penyangga dan pendukung kawasan metropolitan membentuk Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dampak langsung dari perluasan Kawasan Metropolitan Jabodetabek ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Bekasi.
- Kota Bekasi juga menjadi wilayah nodal yang memiliki beberapa pusat kegiatan ekonomi. Pusat kegiatan ekonomi ini menjadi daya tarik berkumpulnya penduduk dan urbanisasi yang pesat.

Integrasi wilayah Kota Bekasi dengan wilayah sekitarnya didukung oleh beberapa program pembangunan jalur transportasi yang mempermudah akses Kota Bekasi ke beberapa wilayah sekitarnya, diantaranya:

- Pembangunan MRT Fase 1-Stage 1 mulai dari Tomang, Jakarta, hingga Medan Satria, Bekasi, yang ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi.
- Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021. Percepatan pembangunan Kawasan Rebana adalah salah satu program pemerintah untuk mengembangkan wilayah metropolitan di Jawa Barat yang meliputi 9 kabupaten/kota, yaitu Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Kota Cirebon. Beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Kawasan Rebana antara lain:
    - Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Rebana yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penanaman modal/investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi di kawasan.
    - Optimalisasi proyek strategis nasional (PSN) yang telah selesai dan fokus pada pengembangan industri besar serta dukungan infrastruktur di perkotaan.
    - Integrasi infrastruktur untuk pembangunan wilayah dan pemerataan ekonomi, termasuk transportasi massal, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.
    - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana Induk) yang mengatur rencana aksi, kebijakan, dan anggaran untuk percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

9. Bonus demografi



Gambar 3.11. Isu bonus demografi

Secara umum jumlah penduduk Kota Bekasi dalam Sensus Penduduk (SP) 2020 tercatat sebanyak 2,54 juta jiwa, nilai ini bertambah sekitar 208 ribu jiwa dari hasil SP 2010. Mengacu pada https://bekasikota.bps.go.id/, dari tahun 2018 sd 2022 pertumbuhan penduduk Kota Bekasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 karena pandemik Covid-19. Jumlah penduduk Kota Bekasi yang tadinya mencapai 3.013.851 jiwa di tahun 2019 menurun menjadi 2.543.676 di tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022 (**Tabel 3.4**).

Jika dilihat dari kelompok umur (**Tabel 3.4**), secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 70,83%, 70,80%, 71,99%, 72,07% dan 70,69% penduduk Kota Bekasi adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun). Sementara persentase tidak produktif dari lima tahun terakhir adalah 2,32%, 2,37%, 4,44%, 4,68% dan 6,16%. Hal ini mengindikasikan dalam lima tahun terakhir bahwa Kota Bekasi masih dalam masa bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di luar usia produktif.

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Bekasi, 2018-2022

Kelompok Umur	Jumlah Total Penduduk				
	2018	2019	2020	2021	2022
0–4	274.415	281.259	198.958	199.420	198.958
5–9	270.246	276.954	192.941	191.603	192.941
10–14	244.630	250.344	207.710	205.174	207.710
15–19	261.419	267.368	202.084	201.047	202.084
20–24	285.973	292.490	208.239	207.569	208.239
25–29	317.139	324.447	223.519	223.924	223.519
30–34	290.907	298.073	229.181	229.778	229.181
35–39	256.823	263.285	213.343	214.503	213.343
40–44	221.928	227.439	200.713	202.248	200.713
45–49	179.869	183.950	173.792	177.081	173.792
50–54	135.107	138.029	154.455	158.185	154.455
55–59	85.600	89.294	129.578	133.864	129.578
60–64	47.258	49.377	96.194	100.394	96.194
65–69	29.544	30.923	62.815	66.163	62.815
70–74	17.409	18.275	29.403	31.827	29.403
75+	21.281	22.344	20.751	22.161	67.332
Total	2.939.548	3.013.851	2.543.676	2.564.941	2.590.257

Sumber : BPS, 2019-2023

Selanjutnya mengacu pada buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2035 diprediksi mencapai 2.728.820 jiwa. Rasio perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia) dibandingkan jumlah penduduk yang produktif (usia kerja) atau *dependency ratio* mencapai angka 45,92%. Artinya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif berada pada jumlah yang cukup kecil. Kondisi ini dikenal dengan kondisi *window of opportunity*. Dalam konteks bonus demografi, istilah ini merujuk pada periode ketika jumlah penduduk usia produktif (usia kerja) suatu wilayah jauh lebih besar daripada jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia).

Bonus demografi di Kota Bekasi ini sebisa mungkin dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas penduduk. Meskipun penduduk usia produktif ini tidak dipisahkan berdasarkan status bekerja atau tidak bekerja, jika dikaitkan dengan pekerjaan maka bisa dimanfaatkan dengan penyediaan lapangan kerja yang mencukupi. Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Kota Bekasi untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Apalagi tahun 2030 di Indonesia terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan Visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

Jika dilihat berdasarkan rasio jenis kelamin, pada tahun 2022, persentase penduduk produktif berjenis kelamin laki-laki Kota Bekasi sebesar 70,27% sementara untuk jenis kelamin perempuan sebesar 71,12%, lebih tinggi dari pada persentase penduduk produktif laki-laki (**Tabel 3.5**). Jika dilihat berdasarkan pengelompokan generasi, sebanyak 15,13% penduduk Kota Bekasi pada tahun 2022 merupakan Post Gen Z (lahir tahun 2013 ke atas). Kemudian sebanyak 23,86% adalah Gen Z (lahir tahun 1997-2012), sebanyak 25,71% adalah Milenial (lahir tahun 1981-1996). Kemudian sebanyak 20,42% penduduk Kota Bekasi pada tahun 2022 merupakan Gen X (lahir tahun 1965-1980), sebanyak 12,28% merupakan Baby Boomer (lahir 1946-1964) dan sebanyak 2,60% adalah Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945).

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bekasi, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
0–4	102.195	96.763	198.958
5–9	98.642	94.299	192.941
10–14	107.171	100.539	207.710
15–19	104.215	97.869	202.084
20–24	104.992	103.247	208.239
25–29	111.321	112.198	223.519
30–34	114.590	114.591	229.181
35–39	107.153	106.190	213.343
40–44	100.082	100.631	200.713
45–49	86.431	87.361	173.792
50–54	76.198	78.257	154.455
55–59	63.015	66.563	129.578
60–64	48.523	47.671	96.194
65–69	32.802	30.013	62.815
70–74	15.043	14.360	29.403
75+	31.923	35.409	67.332
Total	1.304.296	1.285.961	2.590.257

Sumber: BPS, 2023

Kembali mengacu pada Buku Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2020-2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, proyeksi komposisi umur usia produktif di Kota Bekasi pada tahun 2025, 2030 dan 2035 secara berturut-turut adalah 71,35%, 69,69% dan 68,53%. Kelompok usia produktif ini, sebagian besar adalah penduduk di bawah usia 50 tahun. Mereka berada pada komposisi penduduk generasi milenial dan Gen Z. Besarnya jumlah penduduk pada usia produktif, salah satunya pada generasi milenial ini menjadi peluang dalam momentum bonus demografi. Momentum ini seharusnya dapat dimaksimalkan melihat kondisi perkotaan yang menunjang sisi bisnis, baik oleh perusahaan jasa maupun industri. Bonus demografi akan berdampak buruk jika dibiarkan begitu saja tanpa perhatian semua pihak, beberapa ancaman yang muncul diantaranya peningkatan angka pengangguran, anak terlantar dan keluarga miskin. Hal ini bisa saja terjadi jika pemerintah daerah belum melakukan usaha yang maksimal dalam melakukan pemberdayaan terhadap usia-usia produktif khususnya generasi muda.

Berdasarkan hasil proyeksi komposisi umur usia produktif di Kota Bekasi yang disajikan pada paragraf sebelumnya, dimana generasi muda berada dalam komposisi umur tersebut, sehingga generasi muda Kota Bekasi memiliki peran kunci dalam memanfaatkan potensi bonus demografi. Mereka memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan inovasi.

Pemerintah Kota Bekasi, harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi generasi muda selama periode bonus demografi. Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan lingkungan yang mendukung inovasi serta kreativitas. Dengan memanfaatkan potensi generasi muda dengan baik, Kota Bekasi akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perkembangan sosial yang positif.

Tabel 3.6. Penyandingan permasalahan utama dan isu strategis

Bidang	Permasalahan Utama	Isu Strategis
Sosial Budaya	Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi	1. Kemampuan adaptasi wilayah terhadap ledakan penduduk
Sosial Budaya	Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akibat urbanisasi	
Lingkungan	Perkembangan permukiman yang sangat tinggi	
Lingkungan	Peningkatan beban jalan dan polusi akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi	
Tata Kelola	Konflik penggunaan lahan	2. Peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan
Tata Kelola	Pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan	
Tata Kelola	Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal	3. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang responsif
Lingkungan	Belum maksimalnya upaya pengelolaan sampah terpadu	
Ekonomi	Minimnya upaya penyiapan cadangan pangan berkelanjutan	
Tata Kelola	Pelaksanaan penataan ruang yang belum optimal	4. Optimalisasi Penataan Ruang
Lingkungan	Minimnya alokasi RTH dan lahan pangan berkelanjutan	
Infrastruktur	Sarana Prasarana Transportasi yang belum memadai	5. Peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan
Infrastruktur	Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir	
Infrastruktur	Pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat yang belum berkembang	
Sosial Budaya	Kurangnya pengetahuan tentang pola gaya hidup sehat	6. Peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global
Sosial Budaya	Kurangnya kesiapan SDM terhadap perkembangan teknologi	
Sosial Budaya	Kurangnya SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tuntutan lapangan pekerjaan	
Sosial Budaya	Kurangnya pendidikan karakter	
Lingkungan	Rendahnya kesadaran terhadap kondisi lingkungan	
Ekonomi	Kurang kuatnya perekonomian bebasis sektor jasa dan perdagangan	7. Penguatan Kota Bekasi menuju *Smart City*
Ekonomi	Kurangnya Pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif	
Ekonomi	Pembangunan sarpras belum optimal medorong daya ungkit ekonomi	
Ekonomi	Potensi fungsi Kota Bekasi dalam konteks regional	8. Peningkatan integrasi wilayah regional
Ekonomi	Perkembangan Kota Bekasi yang dipengaruhi Kawasan Jabodetabek	
Sosial Budaya	Peningkatan jumlah penduduk yang tidak dapat dihindari	9. Bonus Demografi
Sosial Budaya	Potensi generasi muda yang semakin berkembang	

BAB 4
VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

4.1. Visi

4.1.1. Visi Nasional Indonesia

Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara.



Sumber: Bappenas, 2024

Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045

NKRI yang Bersatu:

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh. Pembangunan ekonomi akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan kebijakan ekonomi nasional yang menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan serta kesatuan yang kuat di seluruh wilayah Indonesia.

NKRI yang Berdaulat:

Pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

1. **Ketahanan:** Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.
2. **Kesatuan:** Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai NKRI yang menjunjung tinggi kerakyatan dan perrnusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat

mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

3. Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.
4. Aman: Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, kepercayaan, agama, dan politik maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

NKRI yang Maju:

Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

1. Beradab: Indonesia memiliki karakter dan jati diri sebagai bangsa yang besar, memiliki sumber daya manusia yang unggul, berbudaya maju, serta mampu berkontribusi pada peradaban dunia.
2. Berdaya: Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
3. Modern: Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.
4. Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.
5. Tangguh: Indonesia memiliki kemampuan fisik, mental, dan spiritual untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.
6. Adil: Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan

nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

7. **Berkarakter**: Bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersumber dari jiwa Pancasila sehingga menjadi bangsa yang memiliki kepribadian dalam berkebudayaan Indonesia.

NKRI yang Berkelanjutan:

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Secara keseluruhan, visi "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" mencakup aspirasi untuk membangun negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Implementasi visi Indonesia dijabarkan menjadi "Visi Indonesia Emas 2045" dengan mempertimbangkan modal dasar (kependudukan, modal dasar sosial-budaya, kekayaan alam serta kekuatan maritim, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Bappenas, 2024

Gambar 4.2. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

4.1.2. Visi Regional Provinsi Jawa Barat

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 mengusung Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan.



Gambar 4.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

1. Termaju: Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu:
    - Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian yang subur, tambang mineral yang kaya, atau potensi pariwisata yang menarik.
    - Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.
    - Investasi dalam infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang modern, energi yang handal, dan akses internet yang luas, dapat meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
    - Memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau.
    - Menerapkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil, termasuk dalam hal investasi sektor-sektor strategis, pengembangan potensi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdaya Saing Dunia: Memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang yaitu:
    - Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi mencakup kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai faktor, seperti produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, akses yang luas terhadap pasar global, serta kebijakan yang mendukung investasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Barat.
    - Teknologi dan inovasi mampu menciptakan nilai tambah melalui penemuan baru, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta penerapan teknologi terkini dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta dukungan terhadap kewirausahaan dan ekosistem inovasi yang dinamis di Provinsi Jawa Barat.
    - Sumber Daya Manusia mencakup kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembelajaran sepanjang hayat, serta pembangunan kemampuan *soft skills* seperti kepemimpinan, kreativitas, dan kolaborasi.
    - Infrastruktur dalam Jangka Panjang mencakup akses yang lancar terhadap transportasi, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta fasilitas publik yang berkualitas. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang modern dan efisien menjadi kunci untuk menjaga daya saing suatu negara dalam jangka panjang.

3. **Berkelanjutan**: Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

   Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan, praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, investasi dalam energi terbarukan, perlindungan habitat alami, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengutamakan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dapat dipastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

4.1.3. Visi Kota Bekasi

Visi adalah pernyataan mengenai kondisi yang dicita-citakan oleh segenap elemen masyarakat Kota Bekasi. Cita-cita ini sebaiknya memiliki batas waktu agar menjadi cita-cita yang terukur dan mampu memotivasi para *stakeholder* terkait untuk dapat bersama-sama mewujudkannya. Dalam RPJPD 2025-2045 ini, Visi Kota Bekasi 2025-2045 yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2045 adalah:



Visi Kota Bekasi dibangun dengan mempertimbangkan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan. Visi daerah Kota Bekasi harus mampu mendukung dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Visi Kota Bekasi juga dilengkapi dengan sasaran visi yang membantu untuk mewujudkan Visi Kota Bekasi secara terukur dan terencana sesuai dengan target-target yang hendak dicapai.

Empat kata kunci yang terkandung pada rumusan visi tersebut adalah i) maju, ii) berdaya saing, iii) berkelanjutan, yang dilengkapi dengan kata keempat yaitu iv) Ihsan. dengan pengertian dari masing-masing kata kunci adalah sebagai berikut:

1) Maju

Pada tahun 2045, Kota Bekasi menjadi mega urban yang maju dengan perekonomian berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Maju tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga maju dalam berbudaya dan berperadaban, sehingga tidak tergilas dengan kemajuan zaman, dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. Kota Bekasi yang Maju juga berarti memiliki produktivitas yang tinggi, karena produktivitas merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang tinggi, didukung tata kelola pemerintahan yang memihak semua lapisan masyarakat, didukung infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung pembangunan Kota Bekasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Bekasi yang Maju juga berarti Modern, di mana kata Modern ini merupakan adopsi dari konsep *smart city*, dengan layanan digital mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi. Kota Bekasi menjadi kota modern yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat

terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan dan inklusif. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan berbasis akses pada *platform* pembelajaran digital dan akses *online* pada pelayanan digital kesehatan terpadu. Termasuk dalam penerapan pedagogi modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi pembelajaran (*pedagogical-technological content knowledge*), yang disertai dengan peningkatan ketersediaan sumber pembelajaran digital. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilakukan pula pengembangan *smart water management* untuk pengelolaan air di wilayah perkotaan yang mengintegrasikan sistem layanan penyediaan air minum dan sanitasi. Termasuk juga dalam mendorong pelayanan pertanahan modern berbasis digital. Lebih luas, Kota Bekasi secara bertahap juga akan mengembangkan infrastruktur yang lebih modern. Pengembangan transportasi dilakukan dengan pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, disertai dengan pendekatan *Transport Demand Management*, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, diharapkan dapat memacu inovasi di Kota Bekasi, khususnya dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul sehari-hari. Hal tersebut termasuk dalam pengembangan pengendalian banjir, sistem peringatan *real time* terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Upaya mengembangkan sektor ekonomi didukung dengan pengembangan *urban farming*, penggunaan *Internet of Things* (IoT), ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*. Termasuk pengembangan sistem pembayaran yang modern, modernisasi perizinan, modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik.

2) Berdaya Saing

Kemajuan pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya, yang direpresentasikan dengan kapasitas daya saing masyarakatnya. Di era kemajuan zaman dengan situasi kompetitif yang tinggi, Kota Bekasi harus memiliki kapasitas berdaya saing. Berdaya saing artinya Kota Bekasi dapat memperkuat dan membangun keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Keunggulan komparatif berarti keunggulan spesifik yang tidak dimiliki oleh wilayah kabupaten/kota lain, sedangkan keunggulan kompetitif adalah keunggulan dalam hal kinerja, produktivitas, dan inovasi yang lebih baik dari kabupaten/kota lain. Dengan demikian Kota Bekasi memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan kehidupan masyarakatnya secara merata dan berkeadilan. Berdaya saing juga berarti Kota Bekasi harus memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, iklim kerja dan berusaha yang baik dan kondusif, dapat memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, mampu menjalankan proses birokrasi yang efektif dan efisien dengan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif dan inklusif memiliki infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang memadai. Kesemuanya ini penting untuk mendorong tumbuhnya investasi dan berkembangnya aktivitas ekonomi riil yang bernilai tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

3) Berkelanjutan

Kota Bekasi berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan pertumbuhan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas hidup masyarakatnya ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, transportasi umum yang terintegrasi dan terlayani dengan baik dan rendah emisi, lingkungan yang bebas polusi udara, air, suara dan sampah serta kondisi hutan,

sungai, situ yang terjaga dengan baik. Tiga pilar berkelanjutan yang akan terus ditingkatkan dalam mewujudkan Kota Bekasi hingga tahun 2045 yaitu: 1) kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi yang mendukung, dengan tingkat pencemaran yang dikendalikan dengan baik (kualitas udara, air, dan tanah) , serta kualitas visual kota yang baik; di samping itu juga tersedia fasilitas perkotaan yang mendukung kegiatan aktivitas masyarakat di berbagai lapisan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, tanpa memandang gender dan juga memberi ruang bagi kaum disabilitas; 2) sektor ekonomi Kota Bekasi dengan dunia usaha yang kondusif, mendukung ekonomi kreatif dan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara inklusif; 3) kehidupan berbudaya Kota Bekasi yang tumbuh dengan baik karena kondisi sosial budaya masyarakat Kota Bekasi yang guyub, tertib damai sehingga menimbulkan rasa aman dan tentram dan menciptakan kohesivitas yang tinggi untuk Kota Bekasi.

4) Ihsan

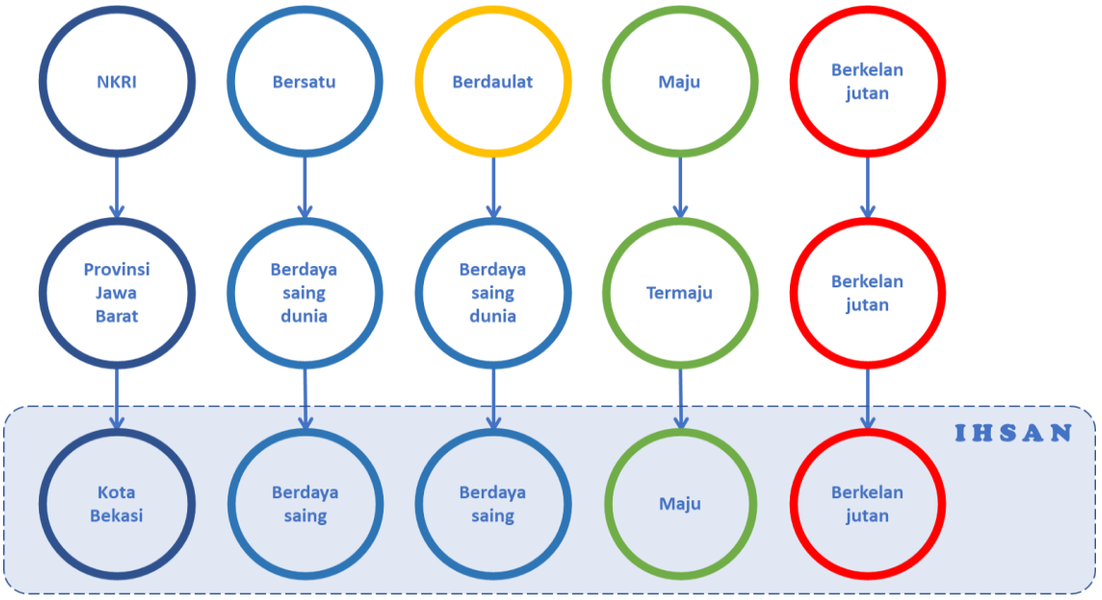
Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama, serta mengandung arti menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya dengan kesadaran berperilaku dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku, serta kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Perwujudan Kota Bekasi Ihsan dilakukan melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, dan kerjasama internasional serta ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Perwujudan kota Ihsan dapat diukur melalui indikator hasil pembelajaran, tingkat penerapan ekonomi hijau, Indeks Pencegahan Korupsi (MCP), Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), Indeks Kota Toleran, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 4.4. Keterkaitan Isu Strategis dan Visi Kota Bekasi Tahun 2025- 2045

Penyelarasan Visi Kota Bekasi dengan Visi Provinsi Jawa Barat dan Visi RPJPN Tahun 2025-2045.



Gambar 4.5. Penyelarasan Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Ketercapaian Visi Kota Bekasi yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan akan ditunjukkan 5 (lima) sasaran visi yaitu:

1. Peningkatan pendapatan per kapita;
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
3. Peningkatan kerjasama daerah dengan dunia internasional;
4. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;
5. Penurunan emisi GRK menuju *Net Zero Emission*.

Tabel 4.1. Indikator dan Target Sasaran Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional 2025-2045				RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045				RPJPD Kota Bekasi 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US$)	5.500-5.520	30.300	Pendapatan per kapita Meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,41 - 57,77	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per Kapita	a. Pendapatan per Kapita (Rp Juta)	48,98 - 49,34	80,59 - 132,67
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	48,19	186,06				
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,87 – 42,00	46,43 – 47,60		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	33,15	30,30
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 – 6,46	0,09 – 0,59	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	3,34 - 3,69	0,05 - 0,34
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379-0,382	0,290-0,320		b. Rasio gini (Indeks)	5,85 - 6,46	0,09 - 0,59		b. Rasio Gini (Indeks)	0,401 - 0,408	0,377 - 0,4
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,383-0,390	0,357 – 0,380		c. Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	4,49	4,53
						d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,96 – 5,37	5,07 – 6,27		d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,14 - 5,50	5,12 - 6,32
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia Internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)	3,87	5	Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Dunia Internasional	Indeks Daya Saing Daerah (skor)	3,88	4,5
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,56	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,80	88,56
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	0,88	8,74
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (poin)	64,06	72,08		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	47,16	53,02

1
Peningkatan Pendapatan per Kapita

Sasaran pertama, pendapatan perkapita Kota Bekasi diharapkan meningkat seiring target peningkatan pendapatan per kapita Indonesia yang diperkirakan akan setara negara maju yaitu sekitar US$ 23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia pada tahun 2045. Kota Bekasi sebagai bagian dari kota metropolitan yang hingga tahun 2045 akan masuk dalam kawasan megapolitan, tentu akan menjadi bagian wilayah yang diharapkan berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan per kapita nasional. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan PDRB industri, perdagangan dan jasa modern (dari sektor pariwisata MICE, akomodasi dan restoran/makan dan minum, serta kontribusi dari industri pengolahan), berbasis inovasi, secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak harus banyak tercipta sehingga mampu meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%.

2
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Sasaran kedua, adalah menyasar pada masyarakat miskin dan masalah ketimpangan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah juga meningkat, sasaran yang hendak dituju adalah kemiskinan menuju 0% (pada kisaran 0,5-0,8%), yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk juga semakin menurun dengan rasio gini di bawah 40%, dan ketimpangan antar wilayah di Kota Bekasi juga menurun, sehingga hampir seluruh wilayah di Kota Bekasi memiliki derajat kemajuan yang setara.

3
Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Dunia Internasional

Sasaran ketiga, diharapkan Kota Bekasi memiliki kemampuan daya saing daerah yang meningkat dalam konstelasi regional maupun nasional yang tentunya didukung oleh SDM yang unggul dan tata kelola pemeritahan yang baik.

4
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sasaran keempat, sejalan dengan meningkatnya daya saing daerah, tentunya didukung dengan meningkatnya daya saing SDM. Kota Bekasi diharapkan memiliki SDM yang unggul dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global dengan akar budaya yang kuat dan sistem perlindungan sosial yang adaptif, memiliki daya saing di kancah domestik dan global, memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas. Daya saing daerah yang meningkat tidak hanya didukung oleh SDM yang unggul, namun juga tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inklusif.

Kata ihsan merupakan bagian dari visi Kota Bekasi yang menjiwai seluruh visi yang ada. Kemajuan Kota Bekasi, keberlanjutan Kota Bekasi, kemampuan Kota Bekasi bersaing dengan daerah lain, memerlukan integritas yang tinggi, baik dari sisi pemerintahan maupun kapasitas masyarakatnya. Untuk mendukung peningkatan daya saing daerah dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan memenuhi kerangka hukum. Daya saing daerah yang meningkat tidak hanya didukung oleh SDM yang unggul, namun juga tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inklusif.

5
Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*

Sasaran kelima, Kota Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060 sesuai target capaian Indonesia Emas 2045. Mengurangi emisi GRK merupakan sebuah tantangan yang cukup kompleks bagi pemerintah, dari mulai biaya investasi awal untuk teknologi bersih, kebijakan yang kurang mendukung, dan perubahan perilaku masyarakat. Maka dari itu diperlukan peran berbagai pihak untuk saling berkomitmen dan mengambil peran dalam mengurangi GRK. Indikator yang dapat diukur dalam melihat pernurunan GRK

adalah indikator Persentasi Penurunan GRK. Nilai tersebut menjadi tolak ukur dalam mengatasi emisi GRK Kab/Kota, begitupun dengan Kota Bekasi.

Selain itu, indikator lainnya yang digunakan untuk mencapai sasaran visi kelima ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi efektifitas program-program pengelolaan lingkungan, indeks kualitas lingkungan mempunyai peranan dalam hal (1) Membantu perumusan kebijakan; (2) Membantu dalam mendisain program lingkungan; (3) Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

4.2. Misi

4.2.1. Misi Nasional

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Misi pembangunan nasional 2025-2045 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045

8 Misi (Agenda) Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

4.2.2. Misi Provinsi Jawa Barat



Gambar 4.7. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

8 Misi Provinsi Jawa Barat

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing
2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif
3. Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, akuntabel dan inovatif
4. Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabliitas ekonomi daerah
5. Mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan
6. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif.
7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.
8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan

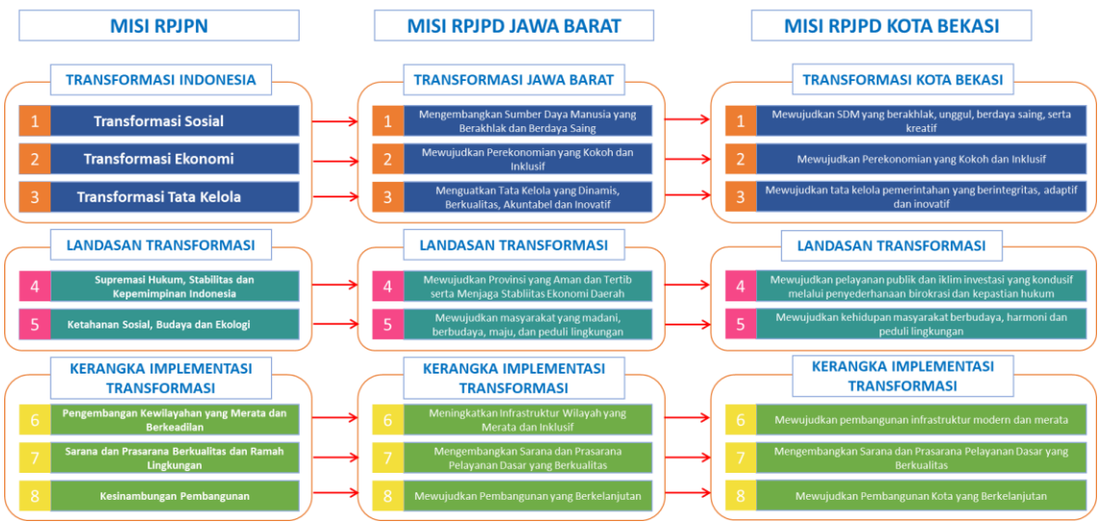
4.2.3. Misi Kota Bekasi

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan.



Gambar 4.8. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan Kota Bekasi 2045

Penyelarasan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045:



Gambar 4.9. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045

Tabel 4.2. Penyelarasan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045			RPJPD PROVINSI 2025-2045		RPJPD KAB/KOTA 2025-2045	
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi		Misi		Misi	
1	Transformasi Indonesia	1	Transformasi sosial	1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan SDM yang berahlak, unggul, berdaya saing, serta kreatif
2		2	Transformasi ekonomi	2	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	2	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD PROVINSI 2025-2045		RPJPD KAB/KOTA 2025-2045	
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi		Misi	
3		3 Transformasi tata kelola	3	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif	3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif
4	Landasan Transfromasi	4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	4	Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi	4	Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum
5		5 Ketahanan sosial budaya dan ekologi	5	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	5	Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan
6	Kerangka Implementasi Transformasi	6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif	6	Mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata
7		7 Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	7	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas
8		8 Kesinambungan pembangunan	8	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	8	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Misi 1. Mewujudkan SDM yang Berakhlak, Unggul, Berdaya Saing serta Kreatif

Kota Bekasi memiliki keunggulan dan ketahanan yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global dengan akar budaya yang kuat dan sistem perlindungan sosial yang adaptif, memiliki daya saing di kancah domestik dan global, memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dan kreativitas di berbagai sektor serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

Kota Bekasi meningkatkan perekonomian yang mengedepankan keunggulan kompetitif dan ekonomi bernilai tambah (*value creation*) berbasis jasa dan industri kreatif, serta mengembangkan ekonomi digital yang mengandalkan pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi (*aspiration*). Tidak hanya itu, pengembangan ekonomi ke depan adalah mengutamakan ekonomi yang berpihak pada pelestarian lingkungan (berkelanjutan) yaitu ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif

Kota Bekasi berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan memberi rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dari segala lapisan masyarakat, baik dari kelompok masyarakat marginal, minoritas, dan rentan.

Misi 4. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Kepastian Hukum

Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat menjalankan kebijakannya dengan transparan, akuntabel, jujur dan berintegritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan untuk merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan dan praktik yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini akan mendorong kepercayaan masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terhadap pemerintah, mendorong semangat masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan bahkan mendorong para investor dalam berinvestasi untuk pembangunan Kota Bekasi.

Misi 5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berbudaya, Harmoni dan Peduli Lingkungan

Kota Bekasi yang memiliki masyarakat yang multikultural, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang matang dalam pemikiran dan terbuka serta menjunjung tinggi perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif dan harmoni, sehingga perbedaan yang ada menjadi modal kemajuan dan perekat persatuan yang didukung kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi dan sosial budaya yang kuat. Kemajuan perkotaan di masa depan semakin membuat masyarakat peduli lingkungan dan kehidupan berkelanjutan hingga generasi mendatang.

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Modern dan Merata

Kota Bekasi membangun infrastruktur modern yang didukung teknologi modern dan inovatif berwawasan lingkungan (*smart green city*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di berbagai sektor serta upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya dilakukan dengan peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di bidang transportasi (mobilitas dan transportasi terpadu), penerapan prinsip rendah karbon di kawasan pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial, serta penyediaan ruang terbuka hijau publik yang aman dan inklusif. Hal tersebut terintegrasi dengan tata kelola sumber daya air terpadu dan pengendalian banjir, sistem peringatan *real time* terhadap kualitas udara, air, dan kejadian bencana. pembangunan infrastruktur modern ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bekasi.

Misi 7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan prasyarat dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah karena hal ini merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Kota Bekasi. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu. Pengembangan ini harus memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana pelayanan dasar yang telah dibangun dan dikembangkan.

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan memang sangat penting untuk menciptakan sistem yang seimbang antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon, dan ketahanan iklim. Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil harus dirancang dengan cermat untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perencanaan tata ruang yang efisien juga sangat penting, termasuk dalam penggunaan lahan dan infrastruktur. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah, kita dapat mengurangi kepadatan populasi dan mencegah konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan

industri juga menjadi bagian penting dalam upaya mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pembangunan yang tepat sasaran, dengan anggaran yang sesuai dan disusun dengan seksama, akan mendorong keberlangsungan upaya dalam mencapai pembangunan kota berkelanjutan.

Tabel 4.3. Penyandingan Permasalahan, Isu Strategis, Kata Kunci Visi dan Misi

Permasalahan Utama	Isu Strategis	Misi	Kata Kunci Visi
Kurangnya pengetahuan tentang pola gaya hidup sehat	6. Peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global	Misi 1. Mewujudkan SDM yang berakhlak, unggul, berdaya saing serta kreatif	BERDAYA SAING, IHSAN
Kurangnya kesiapan SDM terhadap perkembangan teknologi			
Kurangnya SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tuntutan lapangan pekerjaan			
Peluang dan Tantangan	9. Bonus Demografi		
Peningkatan jumlah penduduk yang tidak dapat dihindari			
Potensi generasi muda yang semakin berkembang			
Peluang dan Tantangan	7. Penguatan Kota Bekasi menuju Smart City	Misi 2. Mewujudkan perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	MAJU, IHSAN
Kurang kuatnya perekonomian bebasis sektor jasa dan perdagangan			
Kurangnya Pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif			
Pembangunan sarpras belum optimal medorong daya ungkit ekonomi			
Peluang dan Tantangan	8. Peningkatan integrasi wilayah regional		
Potensi fungsi Kota Bekasi dalam konteks regional			
Perkembangan Kota Bekasi yang dipengaruhi Kawasan Jabodetabek			
Permasalahan Utama	3. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang responsif	Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	BERDAYA SAING, IHSAN
Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal			
Belum maksimalnya upaya pengelolaan sampah terpadu			
Minimnya upaya penyiapan cadangan pangan berkelanjutan			
Permasalahan Utama	6. Peningkatan SDM yang sesuai dengan karakter wilayah, dunia kerja, dan perkembangan global	Misi 5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berbudaya, Harmoni dan Peduli Lingkungan	IHSAN
Kurangnya pendidikan karakter			
Rendahnya kesadaran terhadap kondisi lingkungan			
Permasalahan Utama	5. Peningkatan infrastruktur penunjang perkotaan	Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Modern dan Merata	MAJU, IHSAN
Sarana Prasarana Transportasi yang belum memadai			
Kurangnya ketersediaan saluran drainase dan penanganan banjir			

Permasalahan Utama	Isu Strategis	Misi	Kata Kunci Visi
Pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat yang belum berkembang			
Permasalahan Utama	1. Kemampuan adaptasi wilayah terhadap ledakan penduduk	Misi 7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	
Tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi			
Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akibat urbanisasi			
Perkembangan permukiman yang sangat tinggi			
Peningkatan beban jalan dan polusi akibat peningkatan jumlah kendaraan pribadi			
Permasalahan Utama	2. Peningkatan antisipasi dampak negatif pesatnya pembangunan	Misi 8. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	BERKELANJUTAN, IHSAN
Konflik penggunaan lahan			
Pembangunan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan			
Pelaksanaan penataan ruang yang belum optimal	4. Optimalisasi Penataan Ruang	Misi 4. Mewujudkan Pelayanan Publik dan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Kepastian Hukum	
Minimnya alokasi RTH dan lahan pangan berkelanjutan			

BAB 5
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada bab 4 (empat) menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi yang menyesuaikan dengan isu strategis dan dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan. Tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Diharapkan, proses pentahapan ini akan membuat kebijakan yang disusun menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamikan pembangunan.

Rumusan tema dan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kota Bekasi tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.

TAHAP PERTAMA	FONDASI

Tahap ini merupakan penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi untuk membangun hingga 20 tahun kedepan. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan sarana prasarana pengembangan SDM yang berkualitas dan merata ditunjang dengan penguatan mekanisme dan sistem yang terintegrasi
2. Memperkuat modalitas pembangunan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif
3. Penguatan modalitas kelembagaan yang tepat fungsi, kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Penguatan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum
5. Penguatan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan
6. Penyediaan infrastruktur wilayah secara modern dan merata
7. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

TAHAP KEDUA	AKSELERASI

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek atau sektor yang telah berhasil dan aspek atau sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek atau sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini meliputi:

1. Pengembangan kualitas SDM yang berkualitas dan merata disertai kultur yang mendukung tantangan perubahan
2. Mengakselerasi perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif
3. Akselerasi perwujudan Kota Bekasi yang bertransformasi menjadi kota dengan SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang paritsipatif
4. Akselerasi mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum
5. Akselerasi kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan
6. Akselerasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata
7. Akselerasi sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Akselerasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

TAHAP KETIGA	PEMANTAPAN/ EKSPANSI GLOBAL

Pemantapan pembangunan merupakan percepatan pembangunan pada semua aspek atau sektor sehingga semakin mendekatkan pada perwujudan Kota Bekasi sebagai kota yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan antara lain:

1. Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan
2. Memantapkan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif
3. Pematangan kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri
4. Pematangan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum
5. Pematangan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan
6. Optimalisasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata
7. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

TAHAP KEEMPAT	PERWUJUDAN

Tahap ini merupakan perwujudan Kota Bekasi yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan dengan tetap melakukan percepatan pembangunan di segala aspek atau sektor. Upaya perwujudan pembangunan ini meliputi:

1. Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdaya saing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima
2. Mewujudkan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif
3. Perwujudan Kota Bekasi maju, berdaya saing, berkelanjutan dan ihsan dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inklusif
4. Perwujudan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum
5. Perwujudan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan
6. Perwujudan infrastruktur wilayah secara modern dan merata
7. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2045, serta prioritas pembangunan setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Kota Bekasi untuk setiap misinya adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berahlak, Unggul, Berdaya Saing, serta Kreatif

Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing serta kreatif, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:



Gambar 5.1. Tahapan Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berahlak, Unggul, Berdaya Saing, serta Kreatif

TAHAP I — Pemenuhan sarana prasarana pengembangan SDM yang berkualitas dan merata ditunjang dengan penguatan mekanisme dan sistem yang terintegrasi

Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan SDM yang berkualitas dan merata pada bidang kesehatan meliputi upaya: Pertama, Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Kedua, Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Ketiga, Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. Keempat, Penyiapan dan peningkatan penuntasan *stunting* disertai upaya pencegahan. Kelima, Peningkatan pelayanan ibu dan anak yang prima. Keenam, Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Ketujuh, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.

Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan SDM yang berkualitas dan merata pada bidang pendidikan meliputi upaya: Pertama, Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kedua, Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah termasuk kondisi kebencanaan. Ketiga, Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Keempat, Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kelima, Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Keenam, Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ketujuh, Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal. Kedelapan, Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi masyarakat tidak mampu. Kesembilan, Penguatan sekolah terbuka dan pesantren. Kesepuluh, Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. Kesebelas, Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM

(*Science*, *Technology*, *Engineering*, *Arts*, *and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.

Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan SDM yang berkualitas dan merata pada jaminan sosial yang adaptif meliputi upaya: Pertama, Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Kedua, Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

TAHAP II Pengembangan kualitas SDM yang berkualitas dan merata disertai kultur yang mendukung tantangan perubahan

Pengembangan kualitas SDM yang berkualitas dan merata pada bidang kesehatan meliputi upaya: Pertama, Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Kedua, Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal. Ketiga, Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*. Keempat, Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Kelima, Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap mengedepankan pendekatan budaya. Keenam, Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Pengembangan Kualitas SDM yang berkualitas dan merata pada bidang pendidikan meliputi upaya: Pertama, Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kedua, Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Ketiga, Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif. Keempat, Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kelima, Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Keenam, Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Ketujuh, Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Kedelapan, Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).

Pengembangan Kualitas SDM yang berkualitas dan merata pada jaminan sosial yang adaptif meliputi upaya: Pertama, Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. Kedua, Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.

TAHAP III Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan

Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan, pada bidang kesehatan meliputi upaya: Pertama, Penguatan sistem sanitasi lingkungan. Kedua, Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Ketiga, Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Keempat, Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita. Kelima, Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Keenam, Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan mengedepankan pendekatan budaya. Ketujuh, Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Kedelapan, Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan.

Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan, pada bidang pendidikan meliputi upaya: Pertama, Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kedua, Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Ketiga, Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Keempat, Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kelima, Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Keenam, Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Ketujuh, Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan penigkatan kualifikasi angkatan kerja. Kedelapan, Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Kesembilan, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kesepuluh, Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.

Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan, pada jaminan sosial yang adaptif meliputi upaya: Pertama, Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Kedua, Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.

TAHAP IV Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdaya saing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima

Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdaya saing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima pada bidang kesehatan meliputi upaya: Pertama, Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat. Kedua, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Ketiga Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif. Keempat, Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan yang prima. Kelima, Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh terhadap penyakit. Keenam, Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdaya saing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima pada bidang pendidikan meliputi upaya: Pertama, Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). Kedua, Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Ketiga, Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Keempat, Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. Kelima, Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Keenam, Perwujudan pendidikan vokasi berkelas

dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebekerjaan tinggi. Ketujuh, Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedelapan, Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia.

Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdaya saing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima pada jaminan sosial yang adaptif meliputi upaya: Pertama, Perwujudan sistem jaminan sosial. Kedua, Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif



Gambar 5.2. Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif

TAHAP I — Penguatan modalitas pembangunan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif

Penguatan modalitas pembangunan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif dilakukan melalui upaya: Pertama, Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi). Kedua, Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Ketiga, Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Bekasi, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Kota Bekasi melalui bertambahnya *demand*. Kelima, Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Keenam, Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global. Ketujuh, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kedelapan, Penyiapan, pemetaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. Kesembilan, Penataan dan restrukturasi BUMD. Kesepuluh, Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja. Kesebelas, Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan. Keduabelas, Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Ketigabelas, Penataan dan penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian. Keempatbelas, Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi

komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Kelimabelas, Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Keenambelas, Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Ketujuhbelas, Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan. Kesembilanbelas, Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.). Keduapuluh, Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Keduapuluh satu, Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya. Keduapuluh dua, Penyediaan terintegrasi infrastruktur utama bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan kota. Kedua puluh tiga, Penyediaan terintegrasi infrastruktur utama bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi modern dalam modernisasi pertanian (dengan *smart farmin*g, teknologi sendor, modifikasi cuaca, dll).

TAHAP II Akselerasi perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif

Akselerasi perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif dilakukan melalui upaya: Pertama, Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada klaster industri *consumer goods and general manufactures*, industri pengolahan perikanan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*. Kedua, Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*). Ketiga, Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Keempat, Peningkatan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi. Kelima, Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Bekasi, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Kota Bekasi melalui bertambahnya *demand*. Keenam, Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Ketujuh, Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global. Kedelapan, Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. Kesembilan, Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kesepuluh, Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*. Kesebelas, Peningkatan produktivitas BUMD. Keduabelas, Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau. Ketigabelas, Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke *green*/*low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya. Keempatbelas, Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Kelimabelas, Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian. Keenambelas, Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik. Ketujuhbelas, Peningkatan tata kelola,

aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Kedelapanbelas, Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan. Kesembilanbelas, Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Keduapuluh, Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui *digital marketplace*/*platform*. Keduapuluh satu, Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Kota. Keduapuluh dua, peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produkivitasnya melalui teknologi pertanian terapan modern (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dll).

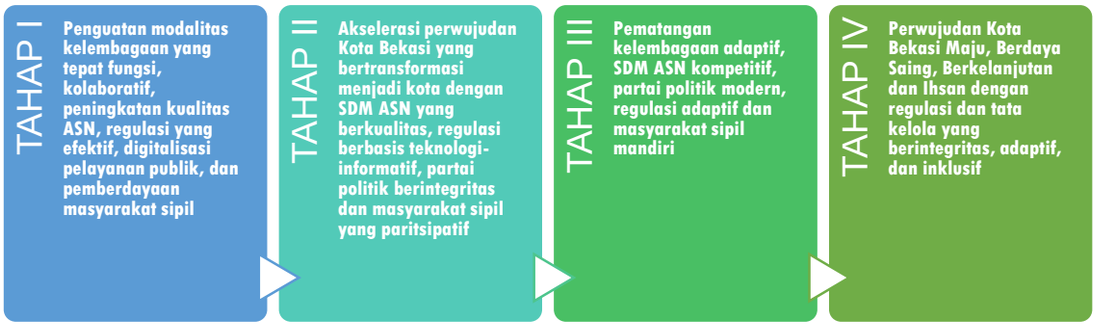
TAHAP III Pemantapan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif

Pemantapan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif dilakukan melalui upaya: Pertama, Pemantapan industri pengolahan dan manufaktur bernilah tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal. Kedua, Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan. Ketiga, Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique and high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, Pemantapan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*. Kelima, Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. Keenam, Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global. Ketujuh, Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kedelapan, Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi. Kesembilan, Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global. Kesepuluh, Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon. Kesebelas, Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya. Keduabelas, Pemantapan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Ketigabelas, Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Keempatbelas, Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global. Kelimabelas, Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan. Keenambelas, Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.). Ketujuhbelas, Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Kedelapanbelas, Pemantapan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya. Kesembilan belas, Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Kota. Kedua puluh, Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*mart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).

TAHAP IV Perwujudan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif

Perwujudan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif dilakukan melalui upaya: Pertama, Perwujudan kawasan strategis industri pengolahan dan manufaktur terpadu, berdaya saing, ramah lingkungan, dan halal. Kedua, Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan. Ketiga, Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing menuju ekspansi global. Keempat, Perwujudan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*. Kelima, Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Keenam, Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global. Ketujuh, Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. Kedelapan, Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikasi dan berdaya saing global. Kesembilan, Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global. Kesepuluh, Penerapan kebijakan perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja. Kesebelas, Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan. Keduabelas, Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. Ketigabelas, Penerapan *closed loop model* pertanian. Keempatbelas, Perwujudan penerapan modernisasi koperasi. Kelimabelas, Perwujudan *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan. Keenambelas, Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Ketujuhbelas, Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Kedelapanbelas, Perwujudan petani yang produktif dan inovatif. Kesembilan belas, Perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan Kota bidang perikanan. Kedua puluh, Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim.

Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif



Gambar 5.3. Tahapan Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif

TAHAP I — Penguatan modalitas kelembagaan yang tepat fungsi, kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil

Penguatan modalitas kelembagaan yang tepat fungsi, kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil dilakukan melalui upaya : Pertama, Pengembangan struktur kelembagaan yang secara fungsi dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan dari sisi teknologi, dan kompleksitas sosial ekonomi kota. Struktur kelembagaan yang fungsional ini diharapkan mampu memberikan ruang pengembangan, baik dari sisi pelaksana (aparatur pemerintah) maupun penerima layanan (masyarakat). Kedua, Peningkatan kualitas ASN, baik dari proses pembinaan, pengorganisasian maupun rekrutmen. Hal ini dapat diperkuat melalui beberapa upaya, terutama (antara lain) melalui pengembangan manajemen talenta dan perwujudan sistem merit. Ketiga, Partisipasi masyarakat

tidak dapat dipungkiri telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Ruang partisipasi masyarakat perlu dikembangkan lebih luas, tidak hanya melalui mekanisme formal yang sejauh ini sudah berjalan (seperti musrenbang) tetapi juga kanal lainnya. Keempat, Fondasi akuntabilitas pemerintah daerah terbangun dengan baik, seiring dengan penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat. Kelima, Pengembangan fondasi awal integrasi teknologi digital (dan sistem cerdas) ke dalam sistem pemerintahan. Keenam, Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.). Ketujuh, Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Kedelapan, Dengan fondasi tata kelola dan ASN yang terbangun, transformasi kebijakan fiskal dan penguatan pendapatan daerah dapat bergerak dengan lebih terarah.

TAHAP II — Akselerasi perwujudan Kota Bekasi yang bertransformasi menjadi kota dengan SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang partisipatif

Akselerasi perwujudan Kota Bekasi yang bertransformasi menjadi kota dengan SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang partisipatif dilakukan melalui beragam upaya. Pertama, peningkatan upaya akselerasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inklusif. Unsur keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan menjadi semakin terlihat. Beragam ruang partisipasi yang diinisiasi oleh masyarakat sipil telah mendapatkan tempat yang lebih besar diiringi dengan literasi dan kepedulian masyarakat sipil pada isu-isu lokal Kota Bekasi di level komunitas maupun kota secara lebih makro. Kedua, peningkatan peran aparatur pemerintah yang dapat menjadi *enabler* dan fasilitator. Sistem manajemen talenta dan merit sudah terbangun, sehingga menghasilkan ASN yang memiliki kualitas baik secara pribadi maupun secara fungsional. Sistem manajemen dan talenta diikuti dengan pergeseran paradigma dan sistem bisnis secara keseluruhan sehingga memfasilitasi peran baru aparatur pemerintah. Ketiga, upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelibatan secara lebih aktif dalam proses pembangunan perlu dilakukan mengingat hal ini merupakan proses jangka menengah dan panjang. Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi poros alternatif pengawas bagi eksekutif dan legislatif untuk mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Keempat, akuntabilitas pemerintah daerah semakin menjadi salah satu karakter yang memperbaiki relasi dengan. Kelima, pemanfaatan teknologi digital dan selanjutnya sistem cerdas dalam pelayanan publik dan tata kelola secara lebih umum, sangat berkaitan dengan arah kebijakan *smart green city* Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi. Perwujudan pelayanan publik digital tidak hanya berfokus pada aplikasi, tetapi lebih kepada penciptaan proses yang lebih efisien dan cepat. Keenam, akselerasi pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan dengan regulasi yang mendukung dan kelembagaan yang sudah terbentuk. Ketujuh, akselerasi sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.

TAHAP III Pematangan kelembagaan adaptif, SDN ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri

Pematangan kelembagaan adaptif, SDN ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri dilakukan melalui beberapa upaya. Pertama, penguatan kultur dan munculnya sub-pusat yang bertindak secara semi-otonom, termasuk yang berpusat pada masyarakat sipil. Hal ini dimungkinkan karena ruang partisipasi dalam proses pembangunan sudah berjalan dengan baik. Struktur kelembagaan yang seperti ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses pembangunan. Kedua, penguatan kinerja ASN dan aparatur pemerintah secara lebih luas, berperan tidak hanya menjadi lebih kompetitif sesuai dengan fungsi dan talenta masing-masing, tetapi juga berperan sebagai mitra dan fasilitator pembangunan. Ketiga, pematangan ruang partisipasi untuk masyarakat sipil di berbagai sektor dan proses pembangunan yang diiringi dengan peningkatan kualitas partai politik. Keempat, pemerintah daerah semakin mempunyai akuntabilitas yang baik. Kelima, penguatan teknologi digital yang semakin menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kota Bekasi. Selain itu, data raksasa, termasuk yang disampaikan oleh masyarakat, sebagai input bagi pengambilan keputusan juga semakin memegang peran penting. Keenam, penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah dan antar lembaga termasuk perguruan tinggi untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. Ketujuh, pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Kedelapan, semakin meningkatnya pendapatan daerah dengan pengelolaan anggaran yang matang.

TAHAP IV Perwujudan Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inklusif

Perwujudan Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan dengan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inklusif dilakukan melalui upaya: Pertama, mendorong terwujudnya tata kelola yang mempunyai nilai integritas, adaptif, dan inklusif. Iklim demokrasi dan partisipasi yang baik didukung oleh masyarakat sipil yang berkualitas dapat menjadi kekuatan yang menopang terwujudnya tata kelola dimaksud. Selain relasi vertikal, relasi horisontal, baik antar bagian pemerintahan maupun antara komponen pemangku kepentingan yang berbeda, menjadi lebih sinergis. Kedua, SDM Kota Bekasi diharapkan sudah siap dalam menggunakan teknologi, dalam beberapa batasan mengembangkannya. Ketiga, pemantapan Kota Bekasi sebagai kota yang memfasilitasi kolaborasi, menjadikan masyarakat sipil (termasuk sektor swasta) sebagai aktor pembangunan aktif yang berkontribusi secara positif. Selain itu, partai politik telah menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat dalam berpolitik dengan integritas yang kokoh. Keempat, terbangunnya akuntabilitas sosial yang telah menjadi bagian sinergi dari tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif. Kelima, mendorong integrasi teknologi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi yang sudah mencapai tahap matang. Kematangan ini tidak hanya dilihat dari sisi teknologi semata, tetapi juga sistem bisnis dan proses, serta manusianya, baik aparatur maupun penggunanya. Keenam, penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan. Ketujuh, perwujudan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Kedelapan, semakin tewujudnya kemandirian pendapatan daerah yang mampu mendorong pembangunan daerah.

Misi 4. Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum



Gambar 5.4. Tahapan Misi Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum

TAHAP I Penguatan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum

Penguatan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya: Pertama, penguatan kelembagaan untuk mendorong mutu dari pelayanan publik. Kedua, penguatan sistem digital dalam pelayanan publik dan respons terhadap laporan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Keempat, Penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif. Kelima, penguatan manajemen satu pintu beserta proses digital. Keenam, mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi baru, pasca berpindahnya ibukota negara, untuk kemudian diberikan beragam insentif investasi.

TAHAP II Akselerasi mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum

Akselerasi mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya: Pertama, akselerasi mutu pelayanan publik. Kedua, percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat. Ketiga, percepatan sistem pemerintahan digital. Keempat, akselerasi penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif. Kelima, akselerasi manajemen satu pintu dengan sistem digital. Keenam, pematangan sistem insentif-disinsentif terkait dengan sektor-sektor baru prioritas investasi untuk mendorong transformasi ekonomi Kota Bekasi.

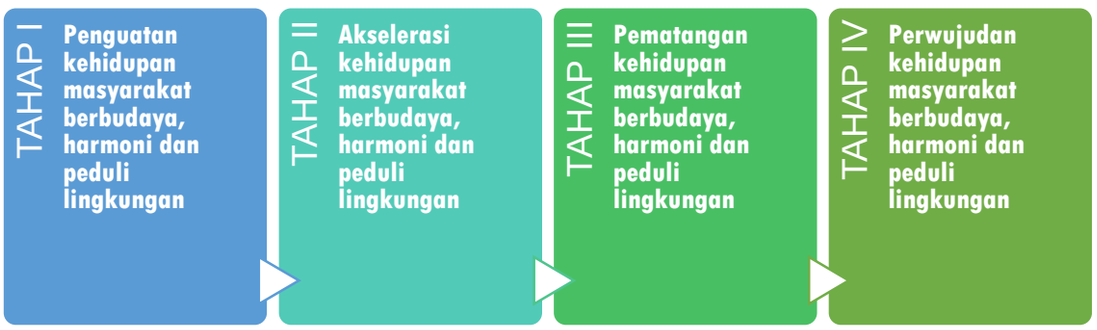
TAHAP III Pematangan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum

Pematangan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya: Pertama, peningkatan indeks kepuasan pelayanan publik dan penguatan akses pelayanan publik yang berkeadilan. Kedua, pelayanan publik sudah makin terdigitalisasi dengan literasi digital masyarakat yang lebih baik. Ketiga, pematangan sistem pemerintah digital dengan kualitas ASN dan sistem bisnis yang dapat lentur terhadap perubahan. Keempat, pematangan proses perizinan serta dukungan hukum dan regulasi yang mendorong iklim investasi. Kelima, pematangan manajemen investasi dan penguatan sistem promosi/*branding* Kota Bekasi sebagai bagian daya tarik investasi. Keenam, peningkatan dampak finansial dan ekonomi, sebagai bagian dari iklim investasi yang semakin baik serta tumbuhnya sektor-sektor baru.

TAHAP IV Perwujudan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum

Perwujudan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya: Pertama, perwujudan kualitas pelayanan publik yang lebih berkeadilan. Kedua, perwujudan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan melalui beragam kanal. Ketiga, terwujudnya *smart governance* yang menjadi kerangka dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keempat, sistem hukum dan perizinan memberikan inklusivitas bagi setiap golongan masyarakat untuk berbisnis maupun dari sisi dampak pembangunan yang ditimbulkan. Kelima, perwujudan *branding* Kota Bekasi yang mendukung sebagai kota ramah investasi. Keenam, perwujudan investasi yang mendukung aspek lingkungan hidup untuk mewujudkan Kota Bekasi yang berkelanjutan.

Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan



Gambar 5.5. Tahapan Misi Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan

TAHAP I Penguatan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan

Penguatan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan dilakukan melalui upaya : Pertama, Optimalisasi penguatan karakter dan jati diri masyarakat dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama serta optimalisasi kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata dan memastikan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terpenuhi dengan baik. Kedua, Optimalisasi pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat lokal, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Keempat, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Kelima, Pemenuhan hak dan jaminan keluarga atas terpenuhinya akses terhadap informasi, edukasi, sosialisasi dan pelayanan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal. Keenam, Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di hilir dengan meningkatkan daya dukung dan daya tampung serta menerapkan teknologi tempat guna pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tempat pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Ketujuh, Optimalisasi upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami. Kedelapan, Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. Kesembilan, Pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.

Kesepuluh, Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kesebelas, Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

TAHAP II Akselerasi kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan

Akselerasi kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan dilakukan melalui upaya : Pertama, Penguatan nilai agama dan nilai luhur kebudayaan lokal yang mampu menciptakan kerukunan antar etnis, agama dan golongan serta meningkatkan peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan dengan memperhatikan kehidupan moderasi beragama dan keberagaman berbudaya. Kedua, Penguatan nilai luhur budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat yang berasas Pancasila untuk mendorong pembangunan modern berasas keberlanjutan sosial, budaya dan lingkungan. Ketiga, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Keempat, Penguatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, dengan menyediakan lingkungan pendukung bagi individu sesuai karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif, penyediaan pelayanan publik dan sarpras inklusif dan pengakuan serta hak bagi perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia. Kelima, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Keenam, Percepatan pengeloaan sampah di hilir melalui fasilitas pengelolaan sampah terpadu Bekarpur (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta). Ketujuh, Peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami. Kedelapan, Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Kesembilan, Percepatan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kesepuluh, Percepatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kesebelas, Percepatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan daya tanggap masyarakat, serta peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural.

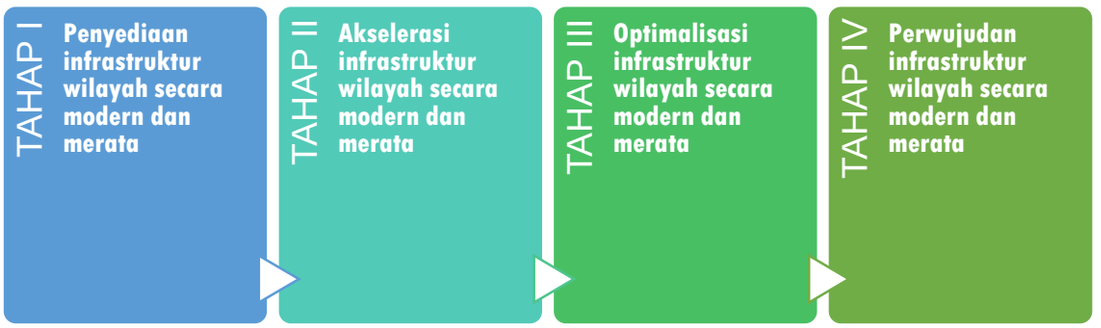
TAHAP III Pematangan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan

Pematangan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan dilakukan melalui upaya: Pertama, Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam mendukung peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan. Kedua, Pemantapan pelestarian kebudayaan lokal serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan seni serta tradisi masyarakat lokal untuk mendorong pembangunan modern yang berasaskan keberlanjutan sosial budaya dan lingkungan. Ketiga, Pemantapan pembangunan responsif gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif. Keempat, Pemantapan pengakuan dan hak bagi perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia serta peningkatan peran dan partisipasinya dalam pembangunan. Kelima, Penguatan kualitas keluarga yang utuh, mandiri dan tangguh dalam arus pembangunan modern. Keenam, Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah terpadu Bekarpur dan pengembangan instrumen *circular economy*. Ketujuh, Pemantapan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami. Kedelapan, Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Kesembilan, Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kesepuluh, Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kesebelas, Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan sistem mitigasi masyarakat, peningkatan sistem peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non struktural.

TAHAP IV Perwujudan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan

Perwujudan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan dilakukan melalui upaya: Pertama, Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya serta peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan. Kedua, Perwujudan masyarakat berbudaya luhur yang menjunjung pembangunan modern berasas keberlanjutan sosial, budaya dan lingkungan. Ketiga, Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Keempat, perwujudan kaum perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia yang berdaya, maju, berkembang, terlindungi dan berperan aktif dalam pembangunan. Kelima, Perwujudan keluarga yang utuh, mandiri dan tangguh dalam arus pembangunan modern. Keenam, Terwujudnya pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*. Ketujuh, Terwujudnya 30% RTH di Kota Bekasi. Kedelapan, Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat. Kesembilan, Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kesepuluh, Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Kesebelas, Perwujudan kapasitas masyarakat tangguh, dan siap siaga dalam mengelola risiko bencana.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata



Gambar 5.6. Tahapan Misi Mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata

TAHAP I Penyediaan infrastruktur wilayah secara modern dan merata

Penyediaan infrastruktur wilayah secara modern dan merata dilakukan melalui upaya : Pertama, Penyediaan dan penataan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian,–kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi). Kedua, Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ketiga, Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan. Keempat, Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Kelima, Perletakan dasar sistem ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan, dengan mengidentifikasi potensi bencana, analisis kerentanan dan kapasitas serta pemetaan sumber daya dan infrastuktur yang ada. Keenam, Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan. Ketujuh, Pengembangan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan. Kedelapan, Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Kesembilan, Pembentukan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Kesepuluh, Penyediaan

infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kesebelas, Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua belas, Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Ketiga belas, Pembangunan sistem pengelolaan jalan daerah. Keempat belas, Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek. Kelima belas, Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi. Keenam belas, Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (ii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; dan (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi. Ketujuh belas, Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh wilayah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Kedelapan belas, Pengembangan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kesembilan belas, Pengembangan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

TAHAP II Akselerasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata

Akselerasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata dilakukan melalui upaya: Pertama, Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi). Kedua, Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: peningkatan akses telekomunikasi dan digital; peningkatan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ketiga, Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan. Keempat, Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Kelima, Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan. Keenam, Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, mendorong pola konsumsi berkelanjutan dan penetapan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular. Ketujuh, Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan. Kedelapan, Peningkatan kualitas dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Kesembilan, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Kesepuluh, Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kesebelas, Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua belas, Pembangunan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Ketiga belas, Penguatan pengelolaan jalan daerah. Keempat belas, Peningkatan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan

perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek. Kelima belas, Akselerasi Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi. Keenam belas, Peningkatan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah. Ketujuh belas, Peningkatan ekosistem digital untuk percepatan transformasi digital. Kedelapan belas, Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kesembilan belas, Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

TAHAP III Optimalisasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata

Optimalisasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata dilakukan melalui upaya: Pertama, Pemantapan penyediaan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal. Kedua, Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: pemanfaatan yang luas terhadap akses telekomunikasi dan digital; tersedianya pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ketiga, Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan. Keempat, Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Kelima, Pemantapan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan. Keenam, Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan pemanfaatan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, terpacunya pola konsumsi berkelanjutan dan pemantapan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular. Ketujuh, Optimalisasi kualitas *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan. Kedelapan, Perluasan kualitas coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Kesembilan, Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Kesepuluh, Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kesebelas, Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua belas, Pengembangan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Ketiga belas, Pemantapan pengelolaan jalan daerah. Keempat belas, Pemantapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek. Kelima belas, Pemantapan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi. Keenam belas, Pemantapan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah. Ketujuh belas, Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas pembangunan berkelanjutan. Kedelapan belas, Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kesembilan belas, Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

TAHAP IV Perwujudan infrastruktur wilayah secara modern dan merata

Perwujudan infrastruktur wilayah secara modern dan merata dilakukan melalui upaya: Pertama, Perwujudan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal. Kedua, Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: terwujudnya akses telekomunikasi dan digital; terwujudnya pengelolaan limbah dan sampah industri; fasilitas kesehatan bagi pekerja; fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Ketiga, Perwujudan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan. Keempat, Perwujudan infrastruktur air baku dan air minum pada

kawasan perkotaan. Kelima, Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan. Keenam, Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan terbentuknya infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, terbentuknya pola konsumsi berkelanjutan dan penerapan regulasi serta kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular. Ketujuh, Pemanfaatan kualitas *coverage* dan kecepatan akses internet secara meluas bagi seluruh masyarakat kota. Kedelapan, erwujudan sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. Kesembilan, Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. Kesepuluh, Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Kesebelas, Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua belas, Perwujudan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa. Ketiga belas, Perwujudan jalan daerah yang berkualitas. Keempat belas, Perwujudan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek. Kelima belas, Perwujudan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi. Keenam belas, Perwujudan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah. Ketujuh belas, Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas pembangunan berkelanjutan. Kedelapan belas, Perwujudan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Kesembilan belas, Perwujudan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.

Misi 7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas



Gambar 5.7. Tahapan Misi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

TAHAP I Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dilakukan melalui upaya: Pertama, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) yang berkualitas secara merata dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*. Kedua, Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan. Ketiga, Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Kelima, Peningkatan keterlibatan *stakeholder* dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.

TAHAP II Akselerasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Akselerasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dilakukan melalui upaya, Pertama, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*. Kedua, Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan. Ketiga, Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Peningkatan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Kelima, Akselerasi keterlibatan *stakeholder* dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.

TAHAP III Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dilakukan melalui upaya: Pertama, Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*. Kedua, Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan. Ketiga, Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Pemantapan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Kelima, Pemantapan keterlibatan *stakeholder* dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.

TAHAP IV Perwujudan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Perwujudan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dilakukan melalui upaya: Pertama, Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*. Kedua, Perwujudan hunian layak di perkotaan. Ketiga, Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi. Keempat, Perwujudan perumahan layak dan terjangkau. Kelima, Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas.

Misi 8. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan



Gambar 5.8. Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TAHAP I Penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: Pertama, Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan,

dsb.). Ketiga, Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan. Keempat, Implementasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Kelima, Perencanaan dan Implementasi pelaksanaan Reforma Agraria melalui Integrasi Data Penataan Aset (*Asset Reform*) dan Penataan Akses (*Access Reform*) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Keenam, Penguatan upaya penegakan hukum dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembentukan kelompok-kelompok lingkungan. Ketujuh, Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedelapan, Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Kesembilan, Pemanfaatan energi baru terbarukan. Kesepuluh, Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif. Kesebelas, Penguatan kelembagaan dan pengelolaan DAS prioritas. Keduaduabelas, Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok. Ketigabelas, Penguatan kelembagaan dan pengelolaan DAS prioritas, dan Keempatbelas Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Bekasi.

TAHAP II Akselerasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Akselerasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : Pertama, Akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Ketiga, Akselerasi penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan. Keempat, Percepatan upaya penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Kelima, Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Integrasi Data Penataan Aset (*Asset Reform*) dan Penataan Akses (*Access Reform*) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi. Keenam, Akselerasi penguatan regulasi lingkungan, termasuk hukum, peraturan, dan standar yang ketat untuk melindungi lingkungan hidup. Ketujuh, Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis kolaborasi dengan berbagai sektor dan lembaga vertikal dan horizontal. Kedelapan, Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Kesembilan, Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan. Kesepuluh, Akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif. Kesebelas, Peningkatan pengelolaan wilayah DAS prioritas secara terpadu. Keduabelas, Penguatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok. Ketigabelas, Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan).

TAHAP III Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : Pertama, Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Optimalisasi substansi dan implementasi panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Ketiga, Optimalisasi penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan. Keempat, Pemantapan upaya penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Kelima, Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria

melalui Integrasi Data Penataan Aset (*Asset Reform*) dan Penataan Akses (*Access Reform*) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Keenam, Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi dan melakukan revisi atau penyempurnaan sesuai dengan perkembangan terkini dalam isu lingkungan. Ketujuh, Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kolaborasi dengan berbagai sektor dan lembaga vertikal dan horisontal. Kedelapan, Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Kesembilan, Pengembangan energi baru terbarukan. Kesepuluh, Penguatan pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif. Kesebelas, Pemantapan pengelolaan DAS prioritas secara terpadu. Keduabelas, Pemantapan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok. Ketigabelas, Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan).

TAHAP IV Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya : Pertama, Perwujudan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Kedua, Penerapan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Ketiga, Penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan. Keempat, Perwujudan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Kelima, Perwujudan Reforma Agraria dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria berbasis ekonomi berkeadilan. Keenam, Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ketujuh, Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis kolaborasi. Kedelapan, Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kesembilan, Perwujudan bauran energi dengan fokus energi baru terbarukan. Kesepuluh, Terwujudnya air yang berkualitas untuk mendukung ketahanan air. Kesebelas, Perwujudan DAS prioritas yang berkelanjutan. Keduabelas, Perwujudan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok. Ketigabelas, Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan).

Rincian arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi tahun 2025-2045 adalah sebagaimana digambarkan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kota Bekasi 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Bekasi yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan	1. Mewujudkan SDM yang berahlak, unggul, berdaya saing, serta kreatif	**Pemenuhan Sarana Prasarana Pengembangan SDM yang berkualitas dan merata ditunjang dengan penguatan mekanisme dan sistem yang terintegrasi**	**Pengembangan Kualitas SDM yang berkualitas dan merata disertai kultur yang mendukung tantangan perubahan**	**Pemantapan kemandirian dan upaya aktif masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan SDM dalam mewujudkan kesejahteraan secara keberlanjutan**	**Perwujudan SDM yang kompetitif dan berprestasi dalam dunia pendidikan dan olahraga, berdayasaing dalam dunia tenaga kerja, dan kesehatan masyarakat yang prima**
		Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Penguatan sistem sanitasi lingkungan	Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan	Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Perwujudan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan responsif
		Penyiapan dan peningkatan penuntasan *stunting* disertai upaya pencegahan Peningkatan pelayanan ibu dan anak yang prima	Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting* Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima	Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima Pemantapan gizi ibu hamil dan anak balita Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Perwujudan Keluarga Sadar Gizi dan Kesehatan yang prima

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap mengedepankan pendekatan budaya	Pemantapan pemberdayaan dan imunisasi dasar lengkap dengan mengedepankan pendekatan budaya Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh terhadap penyakit
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
		Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Pemantapan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Perwujudan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah termasuk kondisi kebencanaan	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Perluasan dan pemerataan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	Penerapan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah			
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal. Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi masyarakat tidak mampu	Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi, peningkatan literasi dan edukasi, serta pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, dan berkebutuhan khusus dalam percepatan penigkatan kualifikasi angkatan kerja Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebekerjaan tinggi
		Penguatan sekolah terbuka dan pesantren	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
		Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*)	Penguatan pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia	Perwujudan sistem pendidikan tinggi yang berkelas dunia
		Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian,	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Penguatan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif	Perwujudan sistem jaminan sosial

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan			
		Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
	2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	**Memperkuat modalitas pembangunan perekonomian yang maju berbasis jasa, ekonomi digital dan industri kreatif**	**Mengakselerasi perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif**	**Memantapkan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif**	**Mewujudkan perekonomian yang maju berbasis Jasa, Ekonomi Digital dan Industri Kreatif**
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada klaster industri *consumer goods* & *general manufactures*, industri pengolahan perikanan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*	Pemantapan industri pengolahan dan manufaktur bernilah tambah tinggi serta penguatan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal	Perwujudan kawasan strategis industri pengolahan dan manufaktur terpadu, berdaya saing, ramah lingkungan, dan halal
		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*).	Pemantapan daya saing kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan	Perwujudan kawasan strategis pariwisata halal dan berkelanjutan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha		
		Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Peningkatan kualitas potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique* & *high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Perwujudan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta berdaya saing menuju ekspansi global
		Penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Bekasi, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Kota Bekasi melalui bertambahnya *demand*	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Bekasi, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Kota Bekasi melalui bertambahnya *demand*	Pemantapan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*	Perwujudan kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	Perwujudan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok global
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah,	Perluasan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah yang mendukung DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri		
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Pemantapan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
		Penyiapan, pemetaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*	Pemantapan kualitas dan daya saing tenaga kerja bersertifikasi	Perwujudan tenaga kerja yang bersertifikasi dan berdaya saing global
		Penataan dan restrukturasi BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD	Pemantapan pengembangan bisnis BUMD yang berdaya saing global	Optimalisasi BUMD yang berdaya saing global
		Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja	Peningkatan kualitas ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon	Penerapan kebijakan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan	Akselerasi implementasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya	Optimalisasi kemudahan perizinan akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya	Perwujudan investasi yang efisien pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
		Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Pemantapan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	Perwujudan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penataan dan penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penyiapan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	Penerapan closed loop model pertanian
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik	Peningkatan keterkaitan koperasi pada rantai nilai pasok domestik dan global	Perwujudan penerapan modernisasi koperasi
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green* & *grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan	Perwujudan *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan	Penerapan pengelolaan kawasan perkotaan yang terintegrasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Percepatan pengembangan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Perluasan pemanfaatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penerapan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform	Pemantapan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	Perwujudan petani yang produktif dan inovatif
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur utama bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan kota	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Kota	Pemantapan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Kota	Perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan Kota bidang perikanan
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur utama bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi modern dalam modernisasi pertanian (dengan *smart farming*, teknologi sendor, modifikasi cuaca, dll)	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produkivitasnya melalui teknologi pertanian terapan modern (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dll)	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*mart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi serta perubahan iklim

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	**Penguatan modalitas kelembagaan yang tepat fungsi, kolaboratif, pengingkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil**	**Akselerasi perwujudan kota bekasi yang bertransformasi menjadi kota dengan SDM ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, partai politik berintegritas dan masyarakat sipil yang paritsipatif**	**Pematangan kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, partai politik modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri**	**Perwujudan Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan degnan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inklusif**
		Pengembangan struktur kelembagaan yang secara fungsi dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan dari sisi teknologi, dan kompleksitas sosial ekonomi kota. Struktur kelembagaan yang fungsional ini diharapkan mampu memberikan ruang pengembangan, baik dari sisi pelaksana (aparatur pemerintah) maupun penerima layanan (masyarakat)	Peningkatan upaya akselerasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inklusif. Unsur keterbukaan dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pembangunan menjadi semakin terlihat. Beragam ruang partisipasi yang diinisiasi oleh masyarakat sipil telah mendapatkan tempat yang lebih besar diiringi dengan literasi dan kepedulian masyarakat sipil pada isu-isu lokal Kota Bekasi di level komunitas maupun kota secara lebih makro	Penguatan kultur dan munculnya sub-pusat yang bertindak secara semi-otonom, termasuk yang berpusat pada masyarakat sipil. Hal ini dimungkinkan karena ruang partisipasi dalam proses pembangunan sudah berjalan dengan baik. Struktur kelembagaan yang seperti ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses pembangunan	Mendorong terwujudnya tata kelola yang mempunyai nilai integritas, adaptif, dan inklusif. Iklim demokrasi dan partisipasi yang baik didukung oleh masyarakat sipil yang berkualitas dapat menjadi kekuatan yang menopang terwujudnya tata kelola dimaksud. Selain relasi vertikal, relasi horizontal, baik antar bagian pemerintahan maupun antara komponen pemangku kepentingan yang berbeda, menjadi lebih sinergis
		Peningkatan kualitas ASN, baik dari proses pembinaan, pengorganisasian maupun rekrutmen. Hal ini dapat diperkuat melalui beberapa upaya, terutama (antara lain) melalui pengembangan manajemen talenta dan perwujudan sistem merit	Peningkatan peran aparatur pemerintah yang dapat menjadi enabler dan fasilitator. Sistem manajemen talenta dan merit sudah terbangun, sehingga menghasilkan ASN yang memiliki kualitas baik secara pribadi maupun secara fungsional. Sistem manajemen dan talenta diikuti dengan pergeseran paradigma dan sistem bisnis secara keseluruhan sehingga memfasilitasi peran baru aparatur pemerintah	Penguatan kinerja ASN dan aparatur pemerintah secara lebih luas, berperan tidak hanya menjadi lebih kompetitif sesuai dengan fungsi dan talenta masing-masing, tetapi juga berperan sebagai mitra dan fasilitator pembangunan	SDM Kota Bekasi diharapkan sudah siap dalam menggunakan teknologi, dalam beberapa batasan mengembangkannya
		Partisipasi masyarakat tidak dapat dipungkiri telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan kota. Ruang partisipasi masyarakat perlu dikembangkan lebih luas, tidak hanya melalui mekanisme formal yang	Upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelibatan secara lebih aktif dalam proses pembangunan perlu dilakukan mengingat hal ini merupakan proses jangka menengah dan panjang. Masyarakat juga diharapkan dapat menjadi poros alternatif pengawas bagi eksekutif	Pematangan ruang partisipasi untuk masyarakat sipil di berbagai sektor dan proses pembangunan yang diiringi dengan peningkatan kualitas partai politik	Pemantapan Kota Bekasi sebagai kota yang memfasilitasi kolaborasi, menjadikan masyarakat sipil (termasuk sektor swasta) sebagai aktor pembangunan aktif yang berkontribusi secara positif. Partai politik telah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		sejauh ini sudah berjalan (seperti musrenbang) tetapi juga kanal lainnya	dan legislatif untuk mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel		menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat dalam berpolitik dengan integritas yang kokoh
		Penguatan fondasi akuntabilitas pemerintah daerah seiring dengan penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat	Akuntabilitas pemerintah daerah semakin menjadi salah satu karakter yang memperbaiki relasi dengan publik	Pemerintah daerah semakin mempunyai akuntabilitas yang baik	Terbangunnya akuntabilitas sosial yang telah menjadi bagian sinergi dari tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif
		Pengembangan fondasi awal integrasi teknologi digital (dan sistem cerdas) ke dalam sistem pemerintahan	Pemanfaatan teknologi digital dan selanjutnya sistem cerdas dalam pelayanan publik dan tata kelola secara lebih umum, sangat berkaitan dengan arah kebijakan smart green city Kota Bekasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi. Perwujudan pelayanan publik digital tidak hanya berfokus pada aplikasi, tetapi lebih kepada penciptaan proses yang lebih efisien dan cepat	Penguatan teknologi digital yang semakin menjadi bagian integral dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kota Bekasi. Selain itu, data raksasa, termasuk yang disampaikan oleh masyarakat, sebagai input bagi pengambilan keputusan juga semakin memegang peran penting	Mendorong integrasi teknologi digital dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Bekasi yang sudah mencapai tahap matang. Kematangan ini tidak hanya dilihat dari sisi teknologi semata, tetapi juga sistem bisnis dan proses, serta manusianya, baik aparatur maupun penggunanya.
		Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Akselarasi pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan dengan regulasi yang mendukung dan kelembagaan yang sudah terbentuk	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah dan antar lembaga termasuk perguruan tinggi untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Akselerasi sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Perwujudan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Seiring dengan penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas ASN, upaya transformasi kebijakan fiskal dan penguatan pendapatan daerah dilakukan	Pengelolaan keuangan daerah yang semakin tepat sasaran seiring berkembangannya sektor-sektor baru prioritas	Semakin meningkatnya pendapatan daerah dengan pengelolaan anggaran yang matang	Semakin tewujudnya kemandirian pendapatan daerah yang mampu mendorong pembangunan daerah
	4. Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum	**Penguatan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum**	**Akselerasi mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum**	**Pematangan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum**	**Perwujudan mutu pelayanan publik dan iklim investasi melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum**
		Penguatan kelembagaan untuk mendorong mutu dari pelayanan publik	Akselerasi mutu pelayanan publik	Peningkatan indeks kepuasan pelayanan publik dan penguatan akses pelayanan publik yang berkeadilan	Perwujudan kualitas pelayanan publik yang lebih berkeadilan
		Penguatan sistem digital dalam pelayanan publik dan respon terhadap laporan masyarakat	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Pelayanan publik sudah makin terdigitalisasi dengan literasi digital masyarakat yang lebih baik	Perwujudan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan melalui beragam kanal
		Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan sistem pemerintahan digital	Pematangan sistem pemerintah digital dengan kualitas ASN dan sistem bisnis yang dapat lentur terhadap perubahan	Terwujudnya *smart governance* yang menjadi kerangka dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah
		Penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif	Akselerasi penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif	Pematangan proses perizinan serta dukungan hukum dan regulasi yang mendorong iklim investasi	Sistem hukum dan perizinan memberikan inklusivitas bagi setiap golongan masyarakat untuk berbisnis maupun dari sisi dampak pembangunan yang ditimbulkan
		Penguatan manajemen satu pintu beserta proses digital	Akselerasi manajemen satu pintu dengan sistem digital	Pematangan manajemen investasi dan penguatan sistem promosi/branding Kota Bekasi sebagai bagian daya tarik investasi	Perwujudan *branding* Kota Bekasi yang mendukung sebagai kota ramah investasi
		Mengindentifikasi sektor-sektor ekonomi baru, pasca berpindahnya ibukota negara,	Pematangan sistem insentif-disinsentif terkait dengan sektor-sektor baru prioritas investasi	Peningkatan dampak finansial dan ekonomi, sebagai bagian dari iklim	Perwujudan investasi yang mendukung aspek lingkungan hidup untuk

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		untuk kemudian diberikan beragam insentif investasi	untuk mendorong transformasi ekonomi Kota Bekasi	investasi yang semakin baik serta tumbuhnya sektor-sektor baru	mewujudkan Kota Bekasi yang berkelanjutan
	5. Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan	**Penguatan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan**	**Akselerasi kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan**	**Pematangan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan**	**Perwujudan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan**
		Optimalisasi penguatan karakter dan jati diri masyarakat dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama dan Optimalisasi kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata dan memastikan bahwa hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terpenuhi dengan baik	Penguatan nilai agama dan nilai luhur kebudayaan lokal yang mampu menciptakan kerukunan antar etnis, agama dan golongan serta meningkatkan peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan dengan memperhatikan kehidupan moderasi beragama dan keberagaman berbudaya	Pemantapan moderasi beragama dan keberagaman budaya dalam mendukung peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan	Penerapan moderasi beragama dan keberagaman budaya serta peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan
		Optimalisasi pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat lokal, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan nilai luhur budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat yang berasas Pancasila untuk mendorong pembangunan modern berasas keberlanjutan sosial, budaya dan lingkungan	Pemantapan pelestarian kebudayaan lokal serta revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya dan seni serta tradisi masyarakat lokal untuk mendorong pembangunan modern yang berasaskan keberlanjutan sosial budaya dan lingkungan	Perwujudan masyarakat berbudaya luhur yang menjunjung pembangunan modern berasas keberlanjutan sosial, budaya dan lingkungan
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemantapan pembangunan responsif gender dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif	Perwujudan kesetaraan gender dan inklusi sosial
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Penguatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, dengan menyediakan lingkungan pendukung bagi individu sesuai karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif, penyediaan pelayanan publik dan sarpras inklusif serta pengakuan dan	Pemantapan pengakuan dan hak bagi perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia serta peningkatan peran dan partisipasinya dalam pembangunan	Perwujudan kaum perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia yang berdaya, maju, berkembang, terlindungi dan berperan aktif dalam pembangunan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			hak bagi perempuan, pemuda, disabilitas dan lansia		
		Pemenuhan hak dan jaminan keluarga atas terpenuhinya akses terhadap informasi, edukasi, sosialisasi dan pelayanan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Penguatan kualitas keluarga yang utuh, mandiri dan tangguh dalam arus pembangunan modern	Perwujudan keluarga yang utuh, mandiri dan tangguh dalam arus pembangunan modern
		Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di hilir dengan meningkatkan Daya Dukung dan Daya tampung serta menerapkan teknologi tempat guna pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan tempat pemrosesan Akhir (TPA) sampah	Percepatan pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengelolaan sampah terpadu Bekarpur (Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta)	Pengintegrasian pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, optimalisasi sampah terpadu Bekarpur dan pengembangan instrumen *circular economy*	Terwujudnya Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
		Optimalisasi upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Pemantapan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami	Terwujudnya 30% RTH di Kota Bekasi
		Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga	Pemantapan sistem sanitasi lingkungan yang sehat	Perwujudan sistem sanitasi lingkungan yang sehat
		Pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Percepatan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Percepatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Perwujudan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan	Percepatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan daya tanggap masyarakat, serta	Pemantapan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan sistem mitigasi masyarakat, peningkatan sistem	Perwujudan kapasitas masyarakat tangguh, dan siap siaga dalam mengelola risiko bencana

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi	peningkatan sistem peringatan dini, mitigasi struktural dan non struktural	peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non struktural	
	6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata	**Penyediaan infrastruktur wilayah secara modern dan merata**	**Akselerasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata**	**Optimalisasi infrastruktur wilayah secara modern dan merata**	**Perwujudan infrastruktur wilayah secara modern dan merata**
		Penyediaan dan penataan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)	Pemantapan penyediaan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal	Perwujudan infrastruktur logistik dan transportasi yang andal
		Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: peningkatan akses telekomunikasi dan digital; peningkatan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: pemanfaatan yang luas terhadap akses telekomunikasi dan digital; tersedianya pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: terwujudnya akses telekomunikasi dan digital; terwujudnya pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
		Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahana	Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan	Perwujudan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan
		Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Pemantapan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Perwujudan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perletakan dasar sistem ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan, dengan mengidentifikasi potensi bencana, analisis kerentanan dan kapasitas serta pemetaan sumber daya dan infrastuktur yang ada	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan	Pemantapan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan	Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan	Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, mendorong pola konsumsi berkelanjutan dan penetapan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular	Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan pemanfaatan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, terpacunya pola konsumsi berkelanjutan dan pemantapan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular	Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan dengan Terbentuknya infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, terbentuknya pola konsumsi berkelanjutan dan penerapan regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan praktik-praktik ekonomi sirkular
		Pengembangan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan	Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan	Optimalisasi kualitas *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan	pemanfaatan kualitas *coverage* dan kecepatan akses internet secara meluas bagi seluruh masyarakat kota
		Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Peningkatan kualitas dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	perluasan kualitas *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	perwujudan sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembentukan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
		Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Pemantapan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan	Perwujudan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
		Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		Penyiapan pembangunan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa	Pembangunan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa	Pengembangan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa	Perwujudan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa
		Pembangunan sistem pengelolaan jalan daerah	Penguatan pengelolaan jalan daerah	Pemantapan pengelolaan jalan daerah	Perwujudan jalan daerah yang berkualitas
		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek	Peningkatan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek	Pemantapan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek	Perwujudan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi	Akselerasi Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi	Pemantapan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi	Perwujudan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;	Peningkatan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah	Pemantapan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah	Perwujudan proporsi Energi Baru dan terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Daerah

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; dan (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi			
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh wilayah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital	Peningkatan ekosstem digital untuk percepatan transformasi digital	Pemantapan pemanfaatan ekosistem digital dalam aktivitas pembangunan berkelanjutan	Perwujudan ekosistem digital dalam aktivitas pembangunan berkelanjutan
		Pengembangan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Perwujudan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
		Pengembangan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Perwujudan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**	**Akselerasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**	**Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**	**Perwujudan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) yang berkualitas secara merata dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*	Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*	Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan infrastruktur konektivitas *intraregion and interregion*
		Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan	Perwujudan hunian layak di perkotaan
		Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi	Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Peningkatan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Pemantapan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	Perwujudan perumahan layak dan terjangkau
		Peningkatan keterlibatan stakeholder dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Akselerasi keterlibatan stakeholder dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Pemantapan keterlibatan stakeholder dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas	Perwujudan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
	8.Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	**Penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Akselerasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Perwujudan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
		Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW),	Optimalisasi substansi dan implementasi panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW),	Penerapan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)	rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)	rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)	wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan	Akselerasi penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan	Optimalisasi penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan	Penerapan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan
		Implementasi penerapan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Percepatan upaya penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Pemantapan upaya penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Perwujudan penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		Perencanaan dan Implementasi pelaksanaan Reforma Agraria melalui Intgerasi Data Penataan Aset (Asset Reform) dan Penataan Akses (Access Reform) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesain komplik agraria	Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Intgerasi Data Penataan Aset (Asset Reform) dan Penataan Akses (Access Reform) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesain komplik agraria untuk mewujudkan ekonomi	Pemantapan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Intgerasi Data Penataan Aset (Asset Reform) dan Penataan Akses (Access Reform) antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesain komplik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan	Perwujudan Reforma Agraria dalam rangka pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta penyelesain konflik agraria berbasis ekonomi berkeadilan
		Penguatan upaya penegakan hukum dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, penyuluhan, dan pembentukan kelompok-kelompok lingkungan	Akselerasi penguatan regulasi lingkungan, termasuk hukum, peraturan, dan standar yang ketat untuk melindungi lingkungan hidup	Pematangan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap regulasi dan melakukan revisi atau penyempurnaan sesuai dengan perkembangan terkini dalam isu lingkungan	Perwujudan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan
		Peningkatan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai sektor dan lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup	Akselerasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis kolaborasi dengan berbagai sektor dan lembaga vertikal dan horizontal	Pemantapan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kolaborasi dengan berbagai sektor dan lembaga vertikal dan horizontal	Perwujudan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis kolaborasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Periode I (2025-2029) Fondasi	Periode II (2030-2034) Akselerasi	Periode III (2035-2039) Ekspansi	Periode IV (2040-2045) Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan
		Pemanfaatan energi baru terbarukan	Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	Pengembangan energi baru terbarukan	Perwujudan bauran energi dengan fokus energi baru terbarukan
		Pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	Akselerasi pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	Penguatan pengelolaan dan peningkatan kualitas air secara terintegrasi dan partisipatif	Terwujudnya air yang berkualitas untuk mendukung ketahanan air
		Penguatan kelembagaan dan pengelolaan DAS prioritas	Peningkatan pengelolaan wilayah DAS prioritas secara terpadu	Pemantapan pengelolaan DAS prioritas secara terpadu	Perwujudan DAS prioritas yang berkelanjutan
		Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok	Penguatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok	Pemantapan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok	Perwujudan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Bekasi	Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan)	Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan)	Perwujudan pembangunan Kota Bekasi yang sinergis (sektor-ruang pembangunan)

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan Kota Bekasi yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045.

5.2.1. Arah Pembangunan Kota Bekasi 2025-2045

Arah Pembangunan Kota Bekasi 2025-2045 merupakan sasaran pokok yang akan dicapai pada akhir RPJPD pada Tahun 2045, serta diselaraskan dengan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Arah Pembangunan Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN. Berdasarkan proses penyelarasan tersebut, Arah Pembangunan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (**Tabel 5.2**) adalah (1) Peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat : (2) Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah; (3) Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif; (4) Peningkatan peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi; (5) Penerapan ekonomi hijau; (6) Transformasi Digital; (7) Peningkatan daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global; (8) Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan; (9) Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif; 10) Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas; (11) Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah; (12) Peningkatan kerjasama regional maupun internasional; (13) Peningkatan kerukunan umat beragama; (14) Peningkatan kualitas keluarga, pemuda dan kesetaraan gender; (15) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (16) Peningkatan ketahanan pangan, air dan energy; (17) Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim;

Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Bekasi 2025-2045

No	RPJP Nasional 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kota Bekasi 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	Transformasi Sosial	Peningkatan Derajat Kesehatan Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		Pemerataan Kualitas Pendidikan Yang Mampu Menjawab Kebutuhan Dan Perkembangan Wilayah
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		Peningkatan Perlindungan Sosial Yang Adaptif
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	Peningkatan Peran Inovasi, Iptek Dan Industri Kreatif Dalam Menggerakan Produktivitas Ekonomi
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau		Penerapan Ekonomi Hijau
		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		Transformasi Digital
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Konstelasi Ekonomi Domestik Dan Global
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		Pembentukan Pusat Kegiatan Wilayah Yang Mendukung Klaster Perekonomian Di Setiap Wilayah Pengembangan

No	RPJP Nasional 2025-2045		RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045		RPJPD Kota Bekasi 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Pemerintahan Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Inovatif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan Keadilan Hukum Dan Demokrasi Yang Berkualitas
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		Peningkatan Kerjasama Regional Maupun Internasional
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		Peningkatan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim

Arah Pembangunan 1 : Peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat

Sasaran Pokok : Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat

Usia Harapan Hidup Kota Bekasi menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat, Angka Kematian Ibu dan Prevalensi *Stunting* juga mengalami penurunan. Selain itu cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Bekasi hampir 100%. Agar pemerataan kesehatan masyarakat dapat terwujud diperlukan arah kebijakan serta upaya yang lebih intensif untuk mencapai sasaran pokok tersebut. Arah Pembangunan Peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, menjadi arah pembangunan yang diprioritaskan melalui upaya penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan merata di setiap kecamatan yang menunjang layanan kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu, menurnkan Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita, serta meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional.

Arah kebijakan meningkatkan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat dilakukan melalui upaya peningkatan SDM dilakukan melalui upaya penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan merata di setiap kecamatan yang menunjang layanan kesehatan masyarakat; perluasan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; penyediaan sarana prasarana dan penyediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang tersebar di setiap wilayah dengan memperhitungkan perkembangan jumlah penduduk; dan memantapkan kondisi kesehatan yang mandiri di tengah upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam

menempatkan kondisi SDM untuk perbaikan taraf hidup, ekonomi dan kesejahteraan keluarga; Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, serta upaya percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; serta Pelibatan aktif terutama dalam mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Arah Pembangunan 2 : Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah

Sasaran Pokok : Terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah

Arah pembangunan pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah menjadi arah pembangunan prioritas dan strategis melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Persentase kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional yang dilihat berdasarkan Skor Literasi Membaca dan Skor Numerasi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Arah pembangunan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah dilakukan melalui peningkatan SDM dilakukan melalui upaya penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan merata di setiap kecamatan yang menunjang layanan pendidikan, produktivitas dan kreativitas masyarakat; Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); Penyediaan sarana prasarana pada semua tingkat pendidikan tersebar di setiap wilayah dengan memperhitungkan perkembangan jumlah penduduk; Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*; Layanan pendidikan dan kesehatan tidak hanya berkualitas namun dapat secara mudah, dekat dan murah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan menurunkan kebutuhan dan biaya operasional yang harus dikeluarkan masyarakat; Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK; Memantapkan ruang belajar yang sangat luas baik di lingkungan formal maupun non-formal di tengah upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam menempatkan kondisi SDM untuk perbaikan taraf hidup, ekonomi dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan sistem dan iklim pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja yang berorientasi pada tantangan global melalui pengembangan kurikulum, pemenuhan standar pelayanan, pengembangan kapasitas tenaga pengajar dan tenaga kesehatan; Pengembangan sistem dan iklim pengembangan SDM diupayakan lebih lanjut dengan pelibatan aktif kader kesehatan, kelompok peduli pendidikan, komunitas kreatif sampai peran aktif lingkungan keluarga; serta mendorong kiprah SDM yang berprestasi dan kompetitif pada berbagai level kompetisi nasional maupun internasional.

Sasaran Pokok : Meningkatnya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan

Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, salah satunya melalui pelaksanaan kinerja Sasaran Pokok Meningkatnya SDM kreatif, inovatif, dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan. Keberhasilan kinerja sasaran pokok tersebut ditandai dengan tercapainya skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Kondisi saat ini telah menunjukkan skor yang baik untuk mendukung tercapainya arah pembangunan tersebut, dimana skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 51,79 yang tergolong dalam kategori sedang (memenuhi standar).

Dalam mencapai arah pembangunan tersebut perlu di dukung dengan dua arah kebijakan transformasi yang berkaitan dengan sasaran pokok ini berupa (i) pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah serta (ii) penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).

Arah Pembangunan 3 : Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif

Sasaran Pokok : Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif

Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, salah satunya melalui pelaksanaan kinerja Sasaran Pokok Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif. Kinerja sasaran pokok tersebut ditandai dengan beberapa indikator, diantaranya Tingkat kemiskinan (%), cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kota (%), dan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%). Pada tahun 2023, Tingkat kemiskinan sebesar 4,1 %, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kota sebesar 0,33%, dan persentase disabilitas bekerja di sektor formal sebesar 13 %. Tingkat kemiskinan di Kota Bekasi dalam 20 tahun mendatang diharapkan dapat menurun, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kota serta persentase disabilitas bekerja di sektor formal meningkat, agar perlindungan sosial yang adaptif di Kota Bekasi dapat meningkat di masa mendatang.

Dalam mencapai arah pembangunan tersebut perlu didukung dengan dua arah kebijakan transformasi yang berkaitan dengan sasaran pokok ini, antara lain berupa (i) penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, (ii) fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, (iii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, dan (iv) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Arah Pembangunan 4 : Peningkatan peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi

Arah Pembangunan 5 : Penerapan ekonomi hijau

Arah Pembangunan 6 : Transformasi Digital

Sasaran Pokok : Meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi

Sasaran pokok “meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi” merupakan sasaran pokok kunci yang memegang peranan penting dalam

pencapaian pembangunan ekonomi Kota Bekasi. Ada beragam indikator keberhasilan dalam sasaran pokok ini untuk menggambarkan (pergeseran) ekonomi Kota Bekasi sampai 20 tahun mendatang. Peran inovasi dan iptek (indeks inovasi daerah) dalam aktivitas ekonomi Kota Bekasi tentunya akan mendorong peningkatan nilai tambah di sektor manufaktur, jasa, maupun ekonomi kreatif. Sejauh ini, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB masih dominan, yaitu sebesar 33-34% sepanjang 2021-2023, meski kontribusi secara gradual semakin menurun. Jasa lainnya yang juga didorong adalah wisata. Potensi wisata ini bisa dikembangkan lebih lanjut yang juga akan mendorong pertumbuhan sektor akomodasi serta makanan dan minuman. Selama 2021-2023, kontribusi sektor ini semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah (i) penguatan modalitas yang diperlukan untuk mendorong pembangunan berbasis jasa, ekonomi digital, dan industri kreatif; (ii) penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique* and *high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; (iii) pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena pembangunan berbasis sektor jasa, ekonomi digital, dan industri kreatif sangat mengandalkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi; (iv) penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon; (v) penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis; (vi) peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya); (vii) pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, *amenitas, ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*).

Arah Pembangunan 7 : Peningkatan daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global

Sasaran Pokok : Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah

Sasaran Pokok Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah ditandai keberhasilannya melalui indikator Indeks Daya Saing. Walaupun hanya memiliki dua titik tahun capaian dari indikator tersebut yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2023, namun nilai capaian menunjukkan adanya peningkatan. Menuju pemenuhan target di tahun 2045 terdapat beberapa upaya yang dilakukan melalui berbagai arah kebijakan. Namun perlu dipahami bahwa Indeks Daya Saing Daerah merupakan gabungan dari berbagai komponen yang melibatkan berbagai sektor pembangunan. Komponen tersebut diantaranya melibatkan pembangunan sarana dan prasarana, investasi dan akses terhadap sumber dana, kebijakan lingkungan, pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumber daya manusia.

Daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Namun dikarenakan indeks daya saing berada pada bagian transformasi ekonomi, maka arah kebijakan yang diambil sangat erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi daerah. Upaya yang dilakukan seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah i). Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique and high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, ii). Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis sektor jasa, ekonomi digital, dan industri kreatif mengandalkan pada pemanfaatan teknologi dan inovasi, iii). Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, dan iv). Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

Sasaran Pokok : Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global

Sasaran Pokok Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global ditandai keberhasilannya melalui indikator Nilai investasi (PMDN dan PMA), Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), dan Nilai Ekspor Barang (USD). Sebagai gambaran pencapaian terhadap indikator-indikator tersebut, salah satunya Kota Bekasi menempati peringkat ke-9 sebagai kota di Jawa Barat yang berkontribusi sebesar 2,3 persen terhadap investasi di regional Provinsi Jawa Barat. Jumlah investasi di Kota Bekasi terus meningkat selama tujuh tahun terakhir (tahun 2015-2021). Selama periode tersebut, telah terjadi peningkatan investasi sebesar 45 persen. Peningkatan investasi ini perlu terus ditingkatkan agar kualitas pembangunan ekonomi semakin maju dan kesejahteraan penduduk dapat terus meningkat di masa depan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan sasaran pokok ini, seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah i). Mendorong peningkatan investasi di sektor jasa, ekonomi digital, dan industri kreatif, ii). Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique and high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, iii). Mendorong hadirnya lembaga-lembaga dan/atau sarana prasarana untuk mendukung kegiatan promosi, investasi, riset, dan inovasi di bidang jasa, ekonomi, digital, dan industri kreatif, dan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

Arah Pembangunan 8 : Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan

Sasaran Pokok : Terkendalinya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem

Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan merupakan strategi penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Dalam mencapai arah pembangunan tersebut perlu di dukung dengan dua arah kebijakan transformasi berupa (i) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau serta (ii) percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak melalui penyediaan hunian vertikal, penataan kawasan kumuh, dan *urban renewal*. Kondisi saat ini telah menunjukkan tren yang baik untuk mendukung tercapainya arah pembangunan tersebut, dimana jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2023 sebesar 61,61 persen.

Arah Pembangunan 9 : Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif

Sasaran Pokok : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas

Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif merupakan landasan penting bagi terciptanya kota yang maju dan sejahtera. Adapun sasaran pokok yang ingin dicapai arah pembangunan tersebut adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mencapai arah pembangunan tersebut diperlukan arah kebijakan transformasi seperti (i) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; (ii) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat; (iii) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja; (iv) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (v) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; dan (vi) Penguatan tata

kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota Bekasi, menuju penyelenggaraan Pemerintah Kota Bekasi yang profesional dan bebas korupsi.

Beberapa indikator dalam mengukur tercapainya arah pembangunan tersebut saat ini telah berada dalam kondisi yang baik dengan tren pencapaian yang relatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi reformasi birokrasi di Kota Bekasi terus meningkat dari tahun 2016-2023, bahkan pada tahun 2023 mendapat predikat sangat baik (BB) dengan nilai indeks sebesar 78,94 poin. Kondisi serupa juga terjadi dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mendapat predikat baik. Sistem tersebut berdampak pada pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien sehingga dapat mempermudah urusan masyarakat. Oleh sebab itu maka kondisi kepuasan pelayanan publik yang diberikan masyarakat juga mendapat predikat A. Perbaikan birokrasi juga sangat berpengaruh terhadap pencegahan korupsi sehingga nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) di Kota Bekasi terus meningkat dengan nilai 94 poin. Secara keseluruhan kondisi indikator-indikator tersebut sudah baik dalam mencapai arah pembangunan untuk meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Arah Pembangunan 10: Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas

Sasaran Pokok : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman

Sasaran pokok "meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman" mempunyai dua indikator keberhasilan. Indikator pertama adalah indeks demokrasi. Indeks demokrasi mencerminkan bagaimana setiap warga Kota Bekasi memiliki hak dan peluang dalam proses politik dan pembangunan kota. Dengan masyarakat yang demokratis, diharapkan terjadi proses *check-and-balance* dalam politik maupun dapat memperkaya proses pembangunan kota. Indikator kedua adalah rasa aman yang dimiliki penduduk. Adanya rasa aman dan kestabilan politik tentu merupakan buah dari perwujudan penegakan hukum secara adil serta terbangunnya demokrasi yang sehat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan Kota Bekasi, tetapi juga mendorong kota ini untuk terus tumbuh dan berkembang secara produktif.

Upaya yang dilakukan seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah (i) pengembangan struktur kelembagaan yang secara fungsi dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, perubahan dari sisi teknologi, dan kompleksitas sosial ekonomi kota; (ii) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif; (iii) akselerasi penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum dalam penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif; (iv) pematangan proses perizinan serta dukungan hukum dan regulasi yang mendorong iklim investasi.

Arah Pembangunan 11: Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah

Arah Pembangunan 12: Peningkatan kerjasama regional maupun internasional

Sasaran Pokok : Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah

Setidaknya ada dua indikator keberhasilan sasaran pokok "meningkatnya stabilitas ekonomi daerah", yaitu terkait ekonomi daerah dan kerjasama antardaerah. Terkait perekonomian daerah, indikator keberhasilannya adalah rasio pajak daerah terhadap PDRB. Pajak merupakan komponen utama dari pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bekasi, yaitu sekitar 70%. Sejauh dari data yang tersedia, *tax rasio* sebesar 1,8%, dimana lebih tinggi daripada rata-rata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia (0,54%). Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dalam hal ini merupakan kontributor terbesar dari pajak daerah Kota Bekasi. Selain itu, dalam rangka mewujudkan ekonomi yang lebih, diperlukan penguatan relasi Kota Bekasi secara nasional maupun global. Kerja sama antardaerah secara spesifik dapat mendorong transfer pengetahuan dan menguatkan pembangunan Kota Bekasi. Adapun relasi secara global dapat menangkap peluang alternatif pembiayaan pembangunan, selain meningkatkan *positioning* di rantai nilai global.

Upaya yang dilakukan seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain, ada dua. *Pertama*, terkait dengan fiskal dan ekonomi daerah yaitu dengan arah peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini dilakukan melalui (i) intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), (ii) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), (iii) peningkatan kualitas belanja daerah, (iv) optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), dan (v) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Adapun arah berikutnya adalah penguatan pengendalian inflasi daerah. *Kedua*, terkait relasi antarwilayah dalam rangka menunjang penguatan ekonomi daerah (maupun pembangunan secara umum) Kota Bekasi. Hal ini dilakukan melalui (i) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.); (ii) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya; (iii) Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.

Arah Pembangunan 13: Peningkatan kerukunan umat beragama

Sasaran Pokok : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan

Sebagai Kota yang termasuk dalam megapolitan Jabodetabekpunjur, Kota Bekasi harus memberi kontribusi dalam perwujudan kota besar yang berkelanjutan dengan didukung oleh kohesivitas masyarakat yang kuat, inklusif, rukun, toleran yang berorientasi pada penguatan moderasi beragama. Kekuatan toleransi ini sangat mendukung kemajuan pembangunan di masa mendatang. Arah Pembangunan ketiga belas didukung oleh dua arah kebijakan transformasi berupa i) **Penguatan nilai luhur budaya dan tradisi masyarakat lokal dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat yang berasas Pancasila** dan ii) Penguatan nilai agama dan nilai luhur kebudayaan lokal yang mampu menciptakan **kerukunan antar etnis, agama dan golongan** serta meningkatkan peran masyarakat, agama dan budaya dalam pembangunan dengan memperhatikan kehidupan moderasi beragama dan keberagaman berbudaya.

Arah Pembangunan 14: Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender

Sasaran Pokok : Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan

Sasaran Pokok Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan ditandai keberhasilannya melalui indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Sebagai gambaran pencapaian terhadap indikator-indikator tersebut, salah satunya Kota Bekasi menunjukkan perkembangan yang baik dalam pencapaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang pada tahun 2019 memiliki nilai 0,342, kemudian menjadi 0,326 pada tahun 2020, lalu pada tahun 2021 menjadi 0,250, tahun 2022 mencapai nilai 0,334, dan terakhir pada tahun 2023 mencapai nilai 0,253.

Pada pemenuhan target tahun 2045, sasaran pokok ini akan mengalami berbagai tantangan dalam berbagai kondisi seperti yang juga dijadikan perhatian oleh nasional seperti tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia juga perlu diperhatikan dalam pembangunan Wilayah Jawa 20 tahun mendatang. Upaya yang dilakukan seperti tertuang pada arah kebijakan berkaitan dengan sasaran pokok ini antara lain adalah Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender.

Arah kebijakan terkait keluarga dan gender dilakukan dengan upaya mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di berbagai ruang aktivitas pemerintah, ruang privat dan swasta serta ruang interaksi masyarakat. Promosi dilakukan secara berkesinambungan

melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital. Penekanan utama pada tahap ini adalah gerakan penyadaran yang menyeluruh di berbagai sektor. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan. Selain itu dilakukan pula upaya penguatan iklim ketenagakerjaan responsif gender, dan inklusif. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga. Dalam mendukung iklim yang responsif, dilakukan pula upaya penguatan tata kelola penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif.

Arah Pembangunan 15: Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sasaran Pokok : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Bekasi dapat dikatakan masih sangat kurang bila dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Bekasi selama kurun waktu 2010-2022. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Bekasi tahun 2025 adalah 47,16. Kondisi ini harus terus diperbaiki sehingga mampu mencapai 53,02 pada tahun 2045.

Kondisi lingkungan tempat tinggal yang layak dengan sanitasi yang baik serta mudah dalam mendapatkan akses air minum sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat. Kota Bekasi dengan kondisi permukiman yang cukup padat saat ini, baik pada permukiman teratur maupun tidak teratur, sangat memerlukan kondisi lingkungan yang baik terutama dalam mendapatkan akses air minum yang layak. Kondisi sanitasi Kota Bekasi saat ini (tahun 2025) adalah 22,59%. Kondisi ini harus terus didorong mencapai 94,09% pada tahun 2045.

Di samping itu, masalah kualitas lingkungan hidup juga terkait erat dengan timbulan sampah. perkembangan produksi sampah di Kota Bekasi setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama sampah yang bersumber dari permukiman, perkantoran, perhotelan, dan lain-lain sehingga perlu fasilitas pengolahan sampah yang bekerja dengan baik. Pada tahun 2025, timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sudah mencapai 17,76%. Kondisi ini diharapkan dapat mencapai 87,88% di tahun 2045.

Untuk mencapai target-target yang dicanangkan di atas di tahun 2045, maka perlu dilakukan upaya-upaya kuat antara lain melalui i) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, ii) Peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami; iii) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, iv) Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga, dan v) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.

Arah Pembangunan 16: Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi

Sasaran Pokok : Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan

Arah Pembangunan Peningkatan Ketahanan Pangan, Air, dan Energi merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan kinerja Sasaran Pokok Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan kinerja sasaran pokok tersebut ditandai dengan tercapainya nilai Indeks Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air yang dibangun dari indikator Kapasitas Air Baku (m^3/detik), dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%). Nilai capaian indeks ketahanan pangan dilihat dari 6 titik tahun yaitu dari tahun 2018-2023, yang kemudian nilai indeks tahun 2023 menjadi *baseline* indikator dengan nilai 93,55. Selain itu peningkatan ketahanan pangan juga dilihat berdasarkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Bekasi yang di tahun 2045 ditargetkan sebesar 0,12%. Indikator Kapasitas Air Baku (m^3/detik) pada tahun 2045 ditargetkan

sebesar 7,97 m³/detik, sedangkan indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) di Kota Bekasi memiliki target sebesar 100% pada tahun 2045.

Dalam praktiknya indikator indeks ketahanan pangan dibutuhkan untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah. Begitupun dengan ketahanan air yang dicapai melalui indikator Kapasitas Air Baku (m³/detik), dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) nilai capaian tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Target yang dibuat untuk sebagai nilai acuan capaian indikator yaitu, indeks ketahanan pangan belum memiliki target, namun untuk indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dengan target 95,96-100 persen.

Ketahanan pangan dan ketahanan air berapa pada bagian dari kebijakan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi maka maka arah kebijakan yang diambil sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Kota Bekasi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah, i) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, ii) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/ subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, iii) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan air seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah i) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas *intraregion* dan *interregion*, ii) Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, iii) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, vi) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

Arah Pembangunan 17: Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sasaran Pokok : Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Arah Pembangunan Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim merupakan salah satu strategi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan kinerja Sasaran Pokok Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sasaran Pokok terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim ditandai keberhasilannya melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB), dan Persentase Penurunan Emisi GRK (%). Nilai capaian pada indikator IRB digambarkan dengan nilai IRB yang selalu naik dari tahun 2013-2022, namun di tahun 2023 menurun menjadi 111 yang kemudian menjadi baseline di tahun 2025. Penurunan tersebut menjadi catatan untuk pemerintah daerah agar mempertahankan prioritas urusan wajib dalam upaya mengurangi indeks risiko bencana. Adapun target untuk 20 tahun ke depan (2045) indeks risiko bencana dengan nilai 110,26-111,27. Nilai capaian tersebut relatif menurun, sehingga perlunya menetapkan penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Nilai untuk indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif ditargetkan pada tahun 2045 sebesar 7.487.320,95 (Ton Co2eq). Target tersebut meningkat dari baseline (2025) sebesar 62.298,43 (Ton Co2eq).

Upaya yang dilakukan dalam mencapai keberhasilan sasaran pokok ini, seperti tertuang pada arah kebijakan antara lain adalah i). Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah, ii) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green* and

grey infrastructure) pada kawasan perkotaan, iii) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan, vi) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, v) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Tabel 5.3. Arah Kebijakan Transfromasi Kota Bekasi 2025-2045

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
	Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*)
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren
	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion
	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique and high-value economy*) serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*
	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Kota Bekasi, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Kota Bekasi melalui bertambahnya *demand*
	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan
Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Kota
	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan
	Modernisasi sarana produksi perikanan
	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada klaster industri *consumer goods and general manufactures*, industri pengolahan perikanan, industri kriya dan ekonomi kreatif, rintisan *green industry*
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi)
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
	Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (*global city*), dan berketahanan
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green and grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan
	Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan
	Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*)

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
	Pengembangan *multi-infrastructure backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa
	Penguatan pengelolaan jalan daerah
	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek
	Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Kota Bekasi
	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Kota yang berdaya saing di tataran global
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon
	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
	Peningkatan produktivitas BUMD
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (ii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi
Transformasi Tata Kelola	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh wilayah. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Kota Bekasi, menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang profesional dan bebas korupsi
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	Penguatan integritas partai politik
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada pebatasan DKI Jakarta/Kabupaten Bekasi/Kabupaten Bogor/Kota Depok
	Penguatan pengendalian inflasi daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	Peningkatan upaya pelestarian hutan kota dan ekosistem alami
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*
Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria

Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam RPJPD Kab/Kota)	
Transformasi	Arah Kebijakan
(1)	(2)
	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional
	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 diturunkan dari visi Kota Bekasi yaitu Kota Bekasi yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Ihsan akan dicapai dengan delapan misi yaitu: 1) Mewujudkan SDM yang Berakhlak, Unggul, Berdaya Saing serta Kreatif; 2) Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif; 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif; 4) Mewujudkan Pelayanan Publik dan Iklim Investasi yang Kondusif melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Kepastian Hukum; 5) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berbudaya, Harmoni dan Peduli Lingkungan; 6) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Modern dan Merata; 7) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas; 8) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan. Agar misi-misi ini dapat tercapai, diperlukan sasaran pokok yang menjadi fokus capaian misi pembangunan Kota Bekasi yang disertai indikator untuk mengukur ketercapaian pembangunan tersebut. Tabel lengkap kertas kerja penyusunan sasaran pokok yang terkait dengan masing-masing misi, berikut indikator pencapaiannya dapat dilihat pada **Tabel 5.4** dan **Tabel 5.5**.

Tabel 5.4. Kertas Kerja Penyusunan Sasaran Pokok

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	**Mewujudkan SDM yang berakhlak, unggul, berdaya saing, serta kreatif**	1. Peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	Sosial	**1. Usia Harapan Hidup (tahun)**	76,12	78,82	**1. Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat**
				2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
				a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	44	5	
				b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9,05	2,38	
				3. Penanganan Tuberkulosis			
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	91	98	
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	98	
				4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	
		2. Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah		**5. Hasil Pembelajaran:**			**2. Terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah**
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
				i) Skor Literasi			
				a. SD	70,32	95	
				b. SMP	84,40	95	
				ii) Skor Numerasi			
				a. SD	56,17	95	
				b. SMP Umum	76,82	95	
				b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,90	15,00	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	15,29	
				6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	52,43	62,43	**3. Meningkatnya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan**
		3. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif		**7. Tingkat Kemiskinan (%)**	3,34 - 3,69	0,05 - 0,34	**4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif**
				8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	27,02 (2022)	80,04	
				9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13 (2023)	70	
2.	**Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif**	4. Peningkatan peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi	Ekonomi	**10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**	33,15	30,30	**5. Meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi**
				11. Pengembangan Pariwisata:			
				a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,38	6,17	
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	25.601 (2023)	72.813	
				12. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	11,3 (2023)	17,3	
				13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
				a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,73 (2023)	99,83	
				b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,53	9,62	
				c. Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,16	0,18	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,06 - 7,68	4,54 - 5,64	
				15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,94 (2022)	59,21	
				16. Indeks Inovasi Daerah	72,74	90	
		5. Penerapan ekonomi hijau		17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			
				a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	64,22	64,22	
		6. Transformasi Digital		18. Adopsi TIK	4,95	5	
		7. Peningkatan daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global		19. Indeks Daya Saing	3,88	4,5	6. Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah
				20. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Milyar Rupiah)	8.412	15.193	7. Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,91	34,29	
				22. Nilai Ekspor Barang (Juta USD)	673	957	
		8. Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		23. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,93	100	8. Terkendalinya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	9. Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Tata Kelola	24. Indeks Reformasi Birokrasi	78,94	80	9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01 (2023)	3,5 - 4,1	
				26. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	86	92	
				27. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)	95	98	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	**Mewujudkan pelayanan publik dan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum**	10. Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	**28. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	52,01 (Provinsi Jawa Barat)	100	**10. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman**
				29. Indeks Demokrasi	81,3	82	
		11. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		**30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**	0,006 (2023)	4,6	**11. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah**
				31. Tingkat Inflasi (%)	3,66 ±1	5,68 ±1	
		12. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional		**32. Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti**	1	5	
				33. Jumlah *Sister City*	1	2	
5.	**Mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni dan peduli lingkungan**	13. Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahan Sosial Budaya dan Ekologi	**34. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	N/A	66,08	**12. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan**
				35. Indeks Kota Toleran	6,46 (2023)	7,5	
		14. Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		**36. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	63,89 (2023)	70,15	**13. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan**
				37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,25	0,2	
		15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup		**38. Kualitas Lingkungan Hidup:**			**14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup	47,16	53,02	
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	22,59	94,09	
				c. Pengelolaan Sampah			
				i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,76	87,88	
				ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	78,33	100	

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		**39. Ketahanan energi, air, dan pangan:**			15. Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan
				a. Indeks Ketahanan Pangan	93,55 (2023)	100	
				b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	1,71	0,12	
				c. Ketahanan Air:			
				i. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	5,94	15,10	
				ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	21,42	100	
		17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		**40. Indeks Risiko Bencana (IRB)**	111 (2023)	110,26 - 111,27	16. Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
				41. Penurunan Emisi GRK			
				a. Kumulatif (Ton Co2eq)	62.298,43	7.487.320,95	

Tabel 5.5. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi 2025-2045

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1. **Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat**	1. Peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	**1. Usia Harapan Hidup (tahun)**	76,12	78,82
			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	44	5
			b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9,05	2,38
			3. Penanganan Tuberkulosis		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	91	98
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	91	98
			4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100
	2. **Terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah**	2. Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah	**5. Hasil Pembelajaran :**		
			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			i) Skor Literasi		
			a. SD	70,32	95
			b. SMP	84,40	95
			ii) Skor Numerasi		
			a. SD	56,17	95
			b. SMP	76,82	95
			b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,90	15,00
			c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	15,29
	3. **Meningkatnya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan**		**6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	52,43	62,43
	4. **Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif**	3. Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif	**7. Tingkat Kemiskinan (%)**	3,34 - 3,69	0,45 - 0,34
			8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	27,02 (2022)	80,04
			9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	13 (2023)	70
			10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	33,15	30,30

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. Meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi	4. Peningkatan peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi	**11. Pengembangan Pariwisata :**		
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,38	6,17
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	25.601 (2023)	72.813
			12. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	11,3 (2023)	17,3
			13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :		
			a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)	93,73	99,83
			b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,53	9,62
			c. Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,16	0,18
			14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,06 - 7,68	4,54 - 5,64
			15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	46,94 (2022)	59,21
			16. Indeks Inovasi Daerah	72,74	90
		5. Penerapan ekonomi hijau	**17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:**		
			a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	64,22	64,22
		6. Transformasi Digital	**18. Adopsi TIK**	4,95	5
	6. Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah	7. Peningkatan daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global	**19. Indeks Daya Saing**	3,88	4,5
	7. Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global		**20. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Milyar Rupiah)**	8.412	15.193
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,91	34,29
			22. Nilai Ekspor Barang (Juta USD)	673	957
	8. Terkendalinya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem	8. Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	**23. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)**	64,93	100
	9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas	9. Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	**24. Indeks Reformasi Birokrasi**	78,94	80
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01 (2023)	3,5 - 4,1
			26. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	86	92
			27. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)	95	98

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target	
				Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman	10. Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	**28. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)**	52,01 (Provinsi Jawa Barat)	100
			29. Indeks Demokrasi	81,3	82
	11. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	11. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	**30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**	0,006 (2023)	4,6
			31. Tingkat Inflasi (%)	3,66 ±1	5,68 ±1
		12. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	**32. Jumlah Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti**	1	5
			33. Jumlah *Sister City*	1	2
	12. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan	13. Peningkatan kerukunan umat beragama	**34. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	N/A	66,08
			35. Indeks Kota Toleran	6,46 (2023)	7,5
	13. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	14. Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	**36. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	63,89 (2023)	70,15
			37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,25	0,2
	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	**38. Kualitas Lingkungan Hidup:**		
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	47,16	53,02
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	22,59	94,09
			c. Pengolahan Sampah		
			i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,76	87,88
			ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	78,33	100
	15. Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan	16. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	**39. Ketahanan energi, air, dan pangan :**		
			a. Indeks Ketahanan Pangan	93,55 (2023)	100
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	1,71	0,12
			c. Ketahanan Air :		
			i. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	5,94	15,10
			ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	21,42	100
	16. Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	17. Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	**40. Indeks Risiko Bencana (IRB)**	111 (2023)	110,26 - 111,27
			41. Penurunan Emisi GRK		
			a. Kumulatif (Ton Co2eq)	62.298,43	7.487.320,95

Tabel 5.6. Persandingan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD Provinsi Jawa Barat				Target RPJPD Kota Bekasi		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	**Kesehatan untuk Semua**				**Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua**				**Peningkatan Derajat Kesehatan untuk Seluruh Lapisan Masyarakat**			
1	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**	74,4	80	1	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**	75,29	80,78	1	**Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)**	76,12	78,82	
2	**Kesehatan Ibu dan Anak:**			2	**Kesehatan Ibu dan Anak:**			2	**Kesehatan Ibu dan Anak:**			
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	112	16		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	151	15		a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	44	5	
	b. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	18,80	5,0		b. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	19	5		b. Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	9,05	2,38	
3	**Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**	274	76	3	**Penanganan Tuberkulosis:**			3	**Penanganan Tuberkulosis:**			
					a) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)	95	95		a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)	91	98	
					b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	88	98		b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	91	98	
4	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**	98,0	99,5	4	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**	95,52	99,5	4	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**	100	100	
IE2	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**				**Pendidikan Berkualitas yang Merata**				**Pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah**			
5	Hasil pembelajaran :			5	Hasil pembelajaran :			5	**Hasil pembelajaran :**			
	a. Rata-rata nilai PISA				a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
	- Membaca	396	485		i) Literasi Membaca	25,93-33,33	70,31-74,07		i) Skor Literasi			
	- Matematika	404	490		ii) Numerasi	7,41-14,81	62,96-66,67		a. SD	70,32	95	
	- Sains	416	487						b. SMP	84,4	95	
									ii) Skor Numerasi			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD				Target RPJPD Kota Bekasi		
						Provinsi Jawa Barat						
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	b. Rata-rata nilai asesmen nasional				b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :				a. SD	56,17	95	
	- Literasi Membaca	62,89	75,73		i) Literasi Memcaca	35,55 - 37,55	71,42 - 73,42		b. SMP	76,82	95	
	- Numerasi	54,36	68,72		ii) Numerasi	19,34 - 21,34	63,01 - 65,01					
	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12		c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09		b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,9	15	
	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32	14,81		d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,16	15,29	
6	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)**	33,94	60	6	**Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**	9,64	9,64 - 14,50	6	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**	52,43	62,43	
7	**Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	66,78	75	7	**Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)**	68,19	75					
IE3	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**				**Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju**				**Peningkatan perlindungan sosial yang adaptif**			
8	**Tingkat Kemiskinan (%)**	7,0-8,0	0,5 - 0,8	8	**Tingkat Kemiskinan (%)**	5,85 - 6,46	0,09 - 0,59	7	**Tingkat Kemiskinan (%)**	3,34 - 3,69	0,05 - 0,34	
9	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)**	43,19	99,5	9	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)**	39,77	80,04	8	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)**	27,02 (2022)	80,04	
10	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**	22,0	60,0	10	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**	24	70	9	**Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)**	13 (2023)	70	
	TRANSFORMASI EKONOMI				**TRANSFORMASI EKONOMI**				**TRANSFORMASI EKONOMI**			
IE4	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**				**Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah**				**Peningkatan peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakkan produktivitas ekonomi**			
11	**Produktivitas Industri dan Pertanian**			11	**Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60	10	**Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**	33,15	30,30	
	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0									
	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,2-3,4	3,3-4,2									
12	**Pengembangan Pariwisata :**			12	**Pengembangan Pariwisata :**			11	**Pengembangan Pariwisata :**			
	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,15	5,36		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	4,38	6,17	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD				Target RPJPD Kota Bekasi		
		Baseline 2025	Target 2045			Provinsi Jawa Barat						
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	536,6	1.341,50		b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	25.601 (2023)	72.813	
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	110	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06	12	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)	11,3 (2023)	17,3	
14	**Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN**			14	**Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD**			13	**Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :**			
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,44	5,0		I) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi(%)	12,31	20,28		a. Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)	99,73 (2023)	99,83	
	b. Rasio Kewirausahaan (%)	3,14	8,0		ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	10,37	12,03		b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,53	9,62	
					b. Rasio Kewirausahaan (%)	3,5	9,86					
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,05	6,03		c. Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,16	0,18	
					Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,62	5,56					
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6									
15	**Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik**			15	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	6,42 - 6,99	5,16-6,14	14	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	7,06 - 7,68	4,54 - 5,64	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	4,00									
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80									
16	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**	56,30	70,00	16	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**	49,88	62,3	15	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**	46,94 (2022)	59,21	
17	**Tingkat Penguasaan IPTEK**			17	**Tingkat Penguasaan IPTEK :**							
	a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,30	2,2 - 2,3		a. Indeks Inovasi Daerah	71,76	81,76	16	Indeks Inovasi Daerah	72,74	90	
	b. Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar									
IE5	**Penerapan Ekonomi Hijau**				**Penerapan Ekonomi Hijau**				**Penerapan Ekonomi Hijau dan Digital**			
18	**Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :**			18	**Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau :**			17	**Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau *Indikator Proksi*:**			
	a. Indeks Ekonomi Hijau (%)	70,8	90,65		a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05		**a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)**	64,22	64,22	
	b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70		b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	23,4	67,91					
IE6	**Transfomasi Digital**				**Transfomasi Digital**				**Transfomasi Digital**			

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD Provinsi Jawa Barat				Target RPJPD Kota Bekasi		
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	43	20 besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	6,4	8	18	Adopsi TIK	4,95	5	
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global				Peningkatan daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global			
20	Biaya Logistik (% PDB)	13,5	8,0	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,88	5					
								19	Indeks Daya Saing	3,88	4,5	
								20	Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Milyar Rupiah)	8.412	15.193	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,7	21,07	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,91	34,29	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	29,32	22	Nilai Ekspor Barang (Juta USD)	673	957	
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan				Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan			
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,34	48,92		Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	24,63%	31.19%					
	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,00	100		a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100		a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64,93	100	
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25		b. Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51					
	TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA			
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif				Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif				Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif			
24	Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	24	Indeks Reformasi Hukum	90,7	100	24	Indeks Reformasi Birokrasi	78,94	80	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	5,00	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01 (2023)	3,5 - 4,1	
26	Indeks Pelayanan Publik	3,68	5,00	26	Indeks Pelayanan Publik	4,62 (2022)	5	26	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	86	92	
27	Anti Korupsi			27	Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89					
	a. Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98									
	b. Indeks Persepsi Korupsi	38	60					27	Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)	95	98	

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD				Target RPJPD Kota Bekasi		
		Baseline 2025	Target 2045			Provinsi Jawa Barat						
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	SUPREMASI HKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH				KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH			
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas				Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas			
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,68	0,89	28	a) Presentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100					
					b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	90					
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,5	80,0	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78 (2020)	69,16	28	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	52,01 (Provinsi Jawa Barat)	100	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang (60 - 80)	Tinggi (> 80)	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	29	Indeks Demokrasi	81,3	82	
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro				Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah				Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah			
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70 – 11,20	18,0 - 20,0	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,58	4,6	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,006 (2023)	4,6	
32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ±1	2,0 ±1	32	Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,8	1,1 - 3,2	31	Tingkat Inflasi (%)	3,66 ±1	5,68 ±1	
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:							
	a. Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200		Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	25,31	78,1					
	b. Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	60		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1,24	2,78					
	c. Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20		Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	6.256.296,31	121.148.522,37					
	d. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120									
	e. Total Kredit/PDB (%)	37,80	80 - 90		Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8					
34	Inklusi Keuangan (%)	91	98	34	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03					
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan				Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan (nomenklatur dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan tetap serumpun dengan IE)				Peningkatan kerjasama regional maupun internasional			
35	Asia Power Index (*Diplomatic Influencer)*	61,54	75,0 - 80,0	35	Jumlah Kerjasama Internasional	N/A	N/A	32	Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti	1	5	
				36	*Jumlah Sister Province*	4	N/A	33	*Jumlah Sister City*	1	2	
36	Asia Power Index (*Military Capability*)	16	45,0									

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD				Target RPJPD Kota Bekasi		
		Baseline 2025	Target 2045			Provinsi Jawa Barat						
						Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI			
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				Peningkatan Kerukunan Umat Beragama				Peningkatan kerukunan umat beragama			
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,70-56,73	65,99-66,28	34	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	66,08	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	35	Indeks Kota Toleran	6,46 (2023)	7,5	
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender				Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	36	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	63,89 (2023)	70,15	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 - 0,45	0,23 - 0,21	37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,25	0,2	
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				Peningkatan kualitas lingkungan hidup			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741					
42	Kualitas Lingkungan Hidup :			42	Kualitas Lingkungan Hidup :			38	Kualitas Lingkungan Hidup :			
	a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,06	72,08		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,16	53,02	
	a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50									
	a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74									
	a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	87,02	88,77									
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,49	85		b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	22,59	94,09	
	c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)		c. Pengelolaan Sampah				c) Pengolahan Sampah			
					- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11	90		i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,76	87,88	
					- Proporsi Rumah Tinggi (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	48	100		ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	78,33	100	
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi				Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi			
43	Ketahanan energi, air, dan pangan :			39	Ketahanan energi, air, dan pangan :			39	Ketahanan energi, air, dan pangan :			
	a. Ketahanan Energi				a. Ketahanan Energi							
	- Indeks Ketahanan Energi	6,77	8,24		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.404	2.670					

No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		No	Arah Pembangunan/ Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025 - 2045		Keterangan
		Target RPJPN				Target RPJPD				Target RPJPD Kota Bekasi		
						Provinsi Jawa Barat						
		Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045			Baseline 2025	Target 2045	
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	191	165					
	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	7,21	0,77		b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	4,58	0,32		a. Indeks Ketahanan Pangan	93,55 (2023)	100	
									b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	1,71	0,12	
	c. Ketahanan Air :				c. Ketahanan Air :				c. Ketahanan Air :			
	- Kapasitas Tampungan Air per Kapita (m³/kapita)	65,18	200		- Kapasitas Air Baku (m³/detik)	4,93	63,12		i. Kapasitas Air Baku (m³/detik)	5,94	15,10	
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,20	100		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100		ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	21,42	100	
IE17	**Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**				**Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim**				**Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim**			
44	**Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)**	0,137	0,11	44	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	109,18	92,98-79,08	40	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	111 (2023)	110,26 - 111,27	
45	**Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**			45	**Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**			41	**Penurunan Emisi GRK**			
	a. Kumulatif	28,12	51,51		a. Kumulatif	2,66	31,65		a. Kumulatif (Ton Co2eq)	62.298,43	7.487.320,95	
	b. Tahunan	36,65	80,89		b. Tahunan	9,27	70,08					

Tabel 5.7. Keteritan Visi dengan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

Kata Kunci Visi	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan
BERDAYA SAING	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	1. Usia Harapan Hidup (tahun)
				2. Kesehatan Ibu dan Anak:
				a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)
				b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
				3. Penanganan Tuberkulosis
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)
				4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
			2. Terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah	5. Hasil Pembelajaran:
				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
				i) Skor Literasi
				a. SD
				b. SMP
				ii) Skor Numerasi
				a. SD
				b. SMP Umum
				b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
				c) Harapan Lama Sekolah (tahun)
			3. Meningkatnya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan	6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif	7. Tingkat Kemiskinan (%)
				8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)
		Rasio Gini (Indeks)		9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Kata Kunci Visi	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan
MAJU	Peningkatan Pendapatan per Kapita	Pendapatan per Kapita (Rp Juta)	5. Meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi	10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)		11. Pengembangan Pariwisata:
		Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
				b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)
				12. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (%)
				13. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:
				a. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
				b. Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)
				c. Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
				14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
				15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
				16. Indeks Inovasi Daerah
				17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:
				a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)
				18. Adopsi TIK
			6. Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah	19. Indeks Daya Saing
			7. Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global	20. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Milyar Rupiah)
				21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
				22. Nilai Ekspor Barang (Juta USD)

Kata Kunci Visi	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan
			8. Terkendalinya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem	23. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
	Peningkatan Kerjasama daerah dengan dunia internasional	Indeks Daya Saing Daerah (skor)	9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas	24. Indeks Reformasi Birokrasi
				25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				26. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
				27. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)
			10. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman	28. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
				29. Indeks Demokrasi
			11. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah	30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
				31. Tingkat Inflasi (%)
				32. Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti
				33. Jumlah *Sister City*
BERKELANJUTAN DAN IHSAN	Penurunan Emisi GRK menuju *Net Zero Emission*	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton Co2eq/2010 IDR Milyar)	12. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan	34. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		35. Indeks Kota Toleran
			13. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan	36. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
				37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	38. Kualitas Lingkungan Hidup:
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup

Kata Kunci Visi	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Pokok	Indikator Utama Pembangunan
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
				c. Pengelolaan Sampah
				i. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
				ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
			15. Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan	39. Ketahanan energi, air, dan pangan:
				a. Indeks Ketahanan Pangan
				b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
				c. Ketahanan Air:
				i. Kapasitas Air Baku (m^3/detik)
				ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
			16. Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	40. Indeks Risiko Bencana (IRB)
				41. Penurunan Emisi GRK
				a. Kumulatif (Ton Co2eq)

BAB 6
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

Untuk mewujudkan visi Kota Bekasi 2045, harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Selain itu, pelibatan publik dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan pencapaian visi Kota Bekasi 2045 dapat terwujud dengan optimal.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Visi Kota Bekasi 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJP Daerah harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dengan memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusif sosial dalam melaksanakan strategi tujuan pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kaidah evaluasi dan pengendalian, serta mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Bekasi 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

Kaidah pelaksanaan juga dapat diterapkan melalui prinsip *SMART Planning*, yang memastikan bahwa setiap tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah *Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *Time-bound*. Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap program dan kebijakan dapat dirancang dengan jelas, sehingga memudahkan dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Selain itu, dalam melaksanakan setiap program, siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) atau siklus *Shewhart* juga perlu diterapkan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan program dimulai dengan perencanaan yang matang, diikuti dengan pelaksanaan yang efektif, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dicapai, dan akhirnya melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program ke depan.

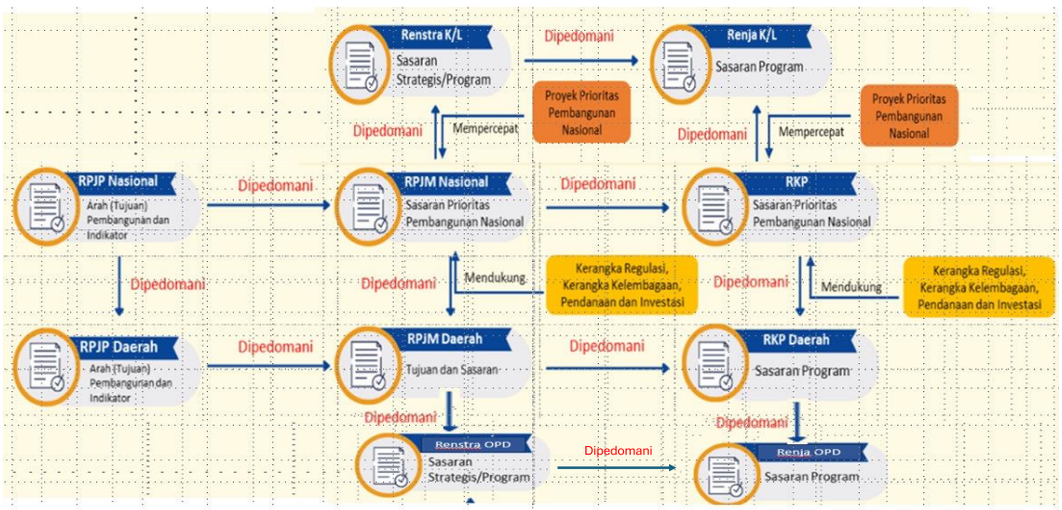
Sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan, prinsip *Money Follow Program* juga diadopsi untuk memastikan bahwa alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas program yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, sumber daya keuangan yang tersedia dapat dipergunakan secara lebih efisien dan efektif, mendukung implementasi program-program strategis yang benar-benar diperlukan untuk mencapai visi pembangunan. Prinsip ini memperkuat hubungan antara rencana dan pendanaan, sehingga setiap program yang direncanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Kota Bekasi.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non-pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahapan arah pembangunan pada setiap periode. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. merupakan proses keterkaitan dokumen perencanaan pusat hingga ke daerah. Dokumen RPJPN merupakan dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyunan RPJMN dan RPJPD. Untuk Dokumen RPJM Nasional, dokumen ini dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Renstra dan Renja K/L, RKP serta dokumen RPJM Daerah. Sedangkan dokumen RPJMD dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Renstra OPD dan RKP Daerah. Renstra dan RKP Daerah juga dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Renja OPD.



Sumber: Bappenas, 2023

Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional

Konsistensi antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut:

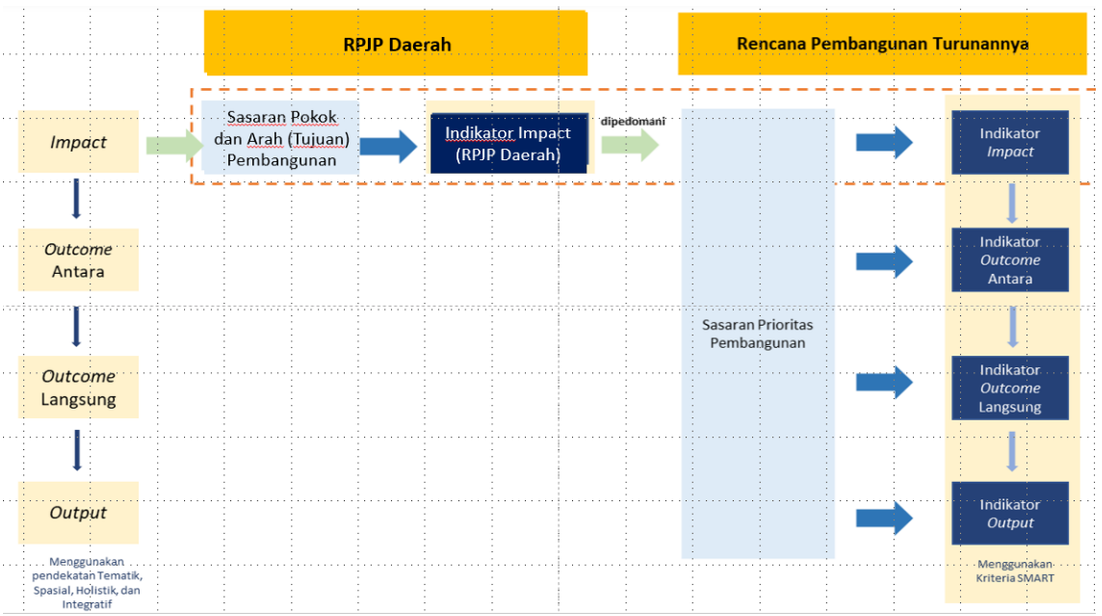
1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Daerah ke RPJM Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJP Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kota Bekasi 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJM Daerah.
3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJM Daerah, dan menjadi pedoman bagi RPJM Daerah untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator sasaran pokok pembangunan.
4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJPD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJMD.
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra PD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD.
7. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. Paradigma holistik tematik menitikberatkan pada keselurahan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan dalam pembangunan. Holistik tematik tersebut didukung paradigma spasial yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang. Sedangkan integratif adalah mengaitkan dan menghubungkan program pembangunan untuk tujuan pembangunan itu sendiri.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara *input-proses-output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat *impact-outcome*, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah daerah maupun OPD (Gambar 6.2).



Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan Turunannya

6.1.2. Kaidah Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kerangka evaluasi dan pengendalian digunakan untuk menjamin tercapainya tujuan dengan rencana pada setiap agenda pembangunan. Dalam mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perlu dilakukan kegiatan pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang terkait, seperti: i) data evaluasi RPJM Daerah; ii) hasil survei dan penelitan dari OPD; dan iii) data pendukung lainnya. Selanjutnya, hasil pemantauan

digunakan sebagai dasar dalam proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Kerangka pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah alat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kerangka pengendalian ini membantu memastikan bahwa RPJPD dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah.

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah tercapai secara efektif. Mekanisme evaluasi dan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dibangun atas sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berjenjang. Tahap awal melibatkan monitoring berkala atas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah. Data dan informasi dikumpulkan secara periodik, dianalisis, dan selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah melalui sistem informasi daerah. Laporan ini memuat capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk penyesuaian program. Evaluasi berkala ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya.

Evaluasi tengah periode RPJPD dilakukan untuk mengkaji pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan partisipasi *stakeholder* terkait, termasuk masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil evaluasi tengah periode menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan RPJPD. Evaluasi ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan dinamika perkembangan yang terjadi selama periode berjalan, sehingga RPJPD tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan.

Evaluasi akhir periode RPJPD dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh untuk mengukur capaian kinerja terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi akhir periode digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja kepala daerah dan sebagai dasar penyusunan RPJPD periode berikutnya. Temuan dan rekomendasi dari evaluasi ini menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Dokumentasi seluruh proses evaluasi dan pengendalian, termasuk laporan dan rekomendasi, tersimpan dan dipelihara dengan baik dalam sistem informasi daerah untuk akuntabilitas dan transparansi.

6.1.3. Mekanisme Perubahan

Perubahan dokumen RPJPD mengikuti mekanisme yang terintegrasi dan berjenjang, mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang mendasar dan berdampak signifikan terhadap arah pembangunan daerah, seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh besar, terjadinya bencana alam yang mengubah kondisi daerah secara drastis, atau adanya temuan evaluasi tengah periode yang menunjukkan ketidaksesuaian RPJPD dengan kondisi riil di lapangan. Usulan perubahan diajukan melalui jalur formal, melalui perangkat daerah terkait, kemudian dikaji dan divalidasi oleh instansi perencanaan daerah sebelum diajukan kepada kepala daerah untuk persetujuan.

Proses pengkajian usulan perubahan melibatkan analisis dampak perubahan terhadap rencana dan program yang telah berjalan, serta mempertimbangkan aspek keuangan dan ketersediaan sumber daya. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa perubahan tidak mengganggu kelancaran program dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan. Setelah mendapat persetujuan kepala daerah, perubahan RPJPD perlu dilegalisasi melalui peraturan daerah (perda)

yang baru atau perubahan perda yang sudah ada, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan RPJPD.

Setelah perubahan RPJPD ditetapkan, proses sosialisasi dan diseminasi informasi kepada *stakeholder* terkait sangatlah penting. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui dan memahami perubahan yang telah dilakukan, sehingga pelaksanaan RPJPD yang telah direvisi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dokumen RPJPD yang telah direvisi kemudian menjadi pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

6.2. Kaidah Pembiayaan

Pelaksanaan RPJPD Kota Bekasi tentu tidak akan berhasil jika tidak mendapatkan dukungan sumber pembiayaan yang diperbolehkan dari ketentuan yang ada. Oleh karena itu, sumber pembiayaan yang dimaksud tentu bersifat legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pembiayaan pembangunan yang dimaksud dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun APBD Kota Bekasi. Selain sumber yang dimaksud tersebut, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti sumber pembiayaan alternatif (KPBU, *blended finance*, penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah).

Optimalisasi sumber pembiayaan baru tentu sangat bergantung pada berbagai upaya untuk mencari sumber pemasukan dari aktivitas ekonomi eksisting serta dari peningkatan ekonomi Kota Bekasi. Pembangunan ekonomi Kota Bekasi yang secara umum semakin mengandalkan pada sektor jasa yang modern dan beragam diharapkan dapat menghasilkan dampak pengganda, baik dari sisi nilai tambah, serapan tenaga kerja, maupun pajak.

Optimalisasi sumber pembiayaan baru ini sangat bergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan para pemangku kepentingan, termasuk elemen masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu, adanya kesepemahaman, partisipasi, dan kolaborasi yang sinergis diperlukan untuk dapat mewujudkan pembangunan Kota Bekasi di jangka panjang.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD. Hal ini merupakan upaya dalam proses pencapaian visi RPJPD yang telah ditahapkan pada setiap periodesasinya. Sehingga ke depan perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, tepat sasaran agar dapat berkelanjutan.

6.3. Sistem Insentif

Sistem insentif dirancang sebagai mekanisme untuk mendorong perilaku dan pencapaian tertentu di antara pelaku pembangunan, baik instansi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Insentif ini dapat berupa insentif finansial, seperti dana tambahan atau bonus bagi pelaku yang mencapai target tertentu, serta insentif non-finansial, seperti pengakuan, penghargaan, atau akses istimewa bagi mereka yang memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dokumen perencanaan harus menetapkan kriteria dan indikator yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima insentif dan dalam kondisi apa, serta mengimplementasikan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan untuk menilai efektivitas program.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merancang sistem insentif sangat penting untuk memastikan insentif yang diberikan relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Selain itu, sistem ini harus dirancang agar konsisten dengan tujuan jangka panjang dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Keselarasan antara semua insentif yang diberikan dengan prioritas program dalam dokumen perencanaan juga sangat penting agar alokasi sumber daya, termasuk insentif, mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kota Bekasi. Dengan cara ini, diharapkan sistem insentif dapat mendorong pelaku pembangunan untuk lebih proaktif dan inovatif dalam melaksanakan program yang mendukung perkembangan berkelanjutan.

Aspek penting lainnya dari sistem insentif mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan insentif, sehingga semua pelaku dapat memahami proses dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai kriteria serta mekanisme insentif. Selain itu, sistem harus fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan dinamika dan perubahan kondisi di Kota Bekasi, memungkinkan penyesuaian strategi dan pelaksanaan yang lebih responsif. Terakhir, sistem insentif juga sebaiknya mendorong inovasi dan partisipasi aktif, dengan menyediakan ruang bagi pelaku untuk berinovasi dalam pendekatan dan solusi yang diusulkan, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam pembangunan dan lebih termotivasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan cara ini, diharapkan sistem insentif dapat mendorong pelaku pembangunan untuk lebih proaktif dan inovatif dalam melaksanakan program yang mendukung perkembangan berkelanjutan.

6.4. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran pokok pada RPJPD Kota Bekasi tentu akan menghadapi hambatan yang pada akhirnya mengganggu ketercapaian RPJPD. Oleh karena itu, penting untuk kemudian menjamin keberlangsungan dan tercapainya keberhasilan rencana pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membangun *framework* manajemen risiko sehingga dapat mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan.

Manajemen risiko merupakan suatu upaya sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko yang akan datang. Manajemen risiko ini perlu dibangun atas dasar rasionalitas keberterimaan sehingga memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi pelaksana RPJPD.

Manajemen risiko merupakan suatu proses rangkaian non-linier, yaitu dapat memberikan umpan balik (*feedback*) di setiap tahapannya. Hal ini dilakukan karena beragam ketidakpastian di masa depan yang membutuhkan upaya-upaya adaptasi (dan penyesuaian) di setiap tahapan. Sebagai rangkaiam manajemen risiko, penting untuk melakukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko di tahap awal. Setelah tahap ini tercapai, perlu dilakukan mitigasi risiko, yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi untuk dapat mengurangi dampak (*impact*). Bahkan jika ditarik lebih ke hulu, maka mitigasi juga bisa dilakukan dengan memahami kemungkinan (*probability*) risiko tersebut muncul dan upaya untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Secara umum, dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara penentuan strategi penanganan, yaitu menerima risiko, men-transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Tentu pilihan yang diambil bisa merupakan gabungan strategi, selain bergantung pada jenis risiko yang dihadapi/akan dihadapi.

Manajemen risiko dalam lingkup Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dimana penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

6.5. Evaluasi Manajemen Risiko

Adanya beberapa hambatan dalam implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran pokok yang tertuang dalam RPJPD Kota Bekasi mengharuskan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi manajemen risiko. Evaluasi manajemen risiko merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka memberikan keyakinan secara terbatas terhadap penerapan pengelolaan risiko yang dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terpisah dengan membandingkan pelaksanaan manajemen risiko dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu penerapan manajemen risiko pemerintah daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dilakukannya evaluasi manajemen risiko diantaranya adalah:

a) Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan daerah
b) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelengaraaan pemerintah daerah
c) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan manajemen risiko pada proses pembangunan, bukan hanya melakukan identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun perlu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Evaluasi manajemen risiko dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Dalam evaluasi manajemen risiko di Kota Bekasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut agar tujuan dari meminimalisir risiko dapat terlaksana. Berikut adalah aspek yang harus diperbaiki dalam evaluasi manajemen risiko, yaitu:

a) Melekatkan proses manajemen risiko sejak penyusunan dokumen perencanaan
b) Memperkuat pemahaman sumber daya manusia terkait menajemen risiko melalui bimtek, diklat dan sertifikasi
c) Mengelola seluruh risiko dari risiko strategis hingga operasional termasuk risiko *fraud* dan risiko kemitraan
d) Menggunakan informasi risiko sebagai dasar inspektorat melakukan pengawasan
e) Mengoptimalkan peran struktur manajemen risiko

6.6. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Mekanisme perubahan dokumen RPJPD adalah proses yang perlu untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Proses ini

dimulai dengan identifikasi kebutuhan perubahan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana yang ada, yang melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Setelah kebutuhan perubahan diidentifikasi, konsultasi publik diadakan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat agar perubahan yang diusulkan mencerminkan aspirasi mereka. Selanjutnya, tim perencana menyusun usulan perubahan berdasarkan hasil konsultasi dan analisis data, yang kemudian dibahas secara internal.

Usulan yang telah dibahas kemudian dibawa ke rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan, menawarkan kesempatan untuk membahas tantangan dan peluang yang mungkin muncul. Setelah mendapatkan persetujuan formal dari otoritas yang berwenang, seperti Wali Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perubahan dicatat dalam dokumen resmi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai perubahan yang dilakukan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Implementasi perubahan harus didukung oleh rencana yang jelas serta penyesuaian dalam anggaran dan kegiatan yang diperlukan. Terakhir, mekanisme perubahan harus mencakup rencana untuk monitoring dan evaluasi berkelanjutan, memastikan bahwa perubahan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang pembangunan daerah. Melalui langkah-langkah sistematis dan partisipatif ini, RPJPD diharapkan dapat responsif terhadap kebutuhan yang berkembang, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

6.7. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok masyarakat lainnya, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas yang dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.8. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Pembiayaan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembiayaan sektor publik maupun non publik. Pembiayaan sektor publik merupakan pembiayaan yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Tujuan dari pembiayaan sektor publik adalah untuk memberikan palayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Pembiayaan sektor publik di Kota Bekasi dapat berasal dari pajak, retribusi, laba BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi dan sumber lain yang sah (pemerintahan), sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah dan lainnya. Pembiayaan sektor publik digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang dibagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan lainnya, serta urusan pilihan seperti jasa, perdagangan, pariwisata dan lainnya.

Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor publik di Kota Bekasi memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan efisien. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah melakukan pemetaan dan analisis potensi pendapatan daerah yang ada, seperti pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang potensi ini, pihak berwenang dapat merumuskan strategi pengoptimalan yang lebih baik, termasuk peninjauan kembali kebijakan pajak dan retribusi untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan mencerminkan nilai layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, Kota Bekasi dapat menjajaki *Public-Private Partnership* (PPP) untuk proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Melalui model kemitraan ini, sektor swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya, sembari menjamin pengembalian investasi melalui model bisnis yang berkelanjutan. Pendanaan alternatif, seperti penerbitan obligasi daerah atau sukuk, juga bisa dipertimbangkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang yang mendukung pembangunan kota.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Implementasi sistem manajemen keuangan yang modern memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan yang lebih baik terhadap pengeluaran dan pendapatan, sehingga pengeluaran dapat dialokasikan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, melalui *platform digital*, pemerintah daerah dapat mempermudah akses layanan kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas pengumpulan pajak dan retribusi secara elektronik.

6.9. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Non-Publik

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang Kota Bekasi untuk tahun 2025-2045, penting bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk tidak hanya mengandalkan sumber daya pembiayaan dari sektor publik namun juga meningkatkan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik. Peningkatan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik dapat menjadi katalisator penting untuk mendukung berbagai inisiatif dan program yang dirancang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing kota di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mendorong kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP). Skema ini memungkinkan transfer pengetahuan, teknologi, dan investasi dari sektor swasta ke dalam proyek-proyek yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian, proyek infrastruktur yang sebelumnya mungkin sulit terdanai oleh anggaran pemerintah dapat direalisasikan dengan lebih efisien dan efektif.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi dapat menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi investasi swasta, dengan cara penyederhanaan regulasi, pemberian insentif fiskal, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Penciptaan iklim usaha yang ramah dan mendukung akan menarik minat investor lokal maupun asing, memperluas basis pembiayaan kota dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Penting juga untuk membangun kemitraan dengan lembaga keuangan lokal maupun internasional untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan. Misalnya, dengan fokus pada pembiayaan hijau *(green financing)* untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang juga menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengoptimalkan kapasitas pembiayaan dari sektor non publik, Kota Bekasi dapat mempercepat laju pembangunan serta memastikan bahwa rencana jangka panjang yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik, mengarah pada masa depan kota yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

6.10. Manajemen Investasi

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kota Bekasi dalam jangka panjang, manajemen investasi daerah menjadi sangat krusial. Sebagai kota yang dalam proses perkembangan pesat, keberhasilan Kota Bekasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk menarik dan mengelola investasi yang efektif. Upaya ini dimulai dengan menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui kebijakan yang transparan dan ramah terhadap investor. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang jelas dan sederhana, sehingga memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan usaha mereka. Selain itu, promosi potensi daerah dan keunggulan kompetitif Kota Bekasi, seperti lokasi strategis, aksesibilitas, dan sumber daya manusia, perlu dilakukan secara proaktif untuk menarik minat investor.

Dalam manajemen investasi daerah, penting untuk membangun kemitraan yang baik antara pemerintah dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, investasi yang dilakukan dapat lebih terarah dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu aktif mengidentifikasi proyek-proyek prioritas yang dapat didanai oleh investasi swasta, seperti infrastruktur transportasi, fasilitas publik, dan pengembangan kawasan perdagangan.

Pentingnya perencanaan yang matang dan berkelanjutan juga tidak dapat diabaikan. Rencana pembangunan yang jelas dan terukur akan memberikan arah bagi investor dalam menentukan langkah strategis mereka. Ini termasuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memanfaatkan analisis data dan studi kelayakan untuk mendukung keputusan investasi.

Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang investasi juga merupakan langkah kunci. Pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan investasi, agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani berbagai aspek investasi, termasuk analisis risiko dan evaluasi proyek. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan investasi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Melalui forum-forum diskusi dan partisipasi publik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, yang akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam manajemen investasi daerah, Kota Bekasi dapat mencapai keberhasilan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Lampiran

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Bekasi

2025-2045

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kota Bekasi

2024

Lampiran 1. Metadata Indikator Sasaran Visi dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

A. Pendapatan per Kapita Meningkat

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)

Nama Indikator	**Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$$\text{PDRB per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{populasi}$$ Keterangan: $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan bersumber dari suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan industri adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (assembling). Kegiatan industri pengolahan dikelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja menjadi Industri Besar, Industri Sedang, Industri Kecil, dan Industri Mikro.
Rumus Perhitungan	$$\text{Kontribusi Sektor Industri} = \frac{Sektor\ Industri}{Total\ PDRB}\ x\ 100\%$$
Interpretasi	• Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB digunakan dengan tujuan mengidentifikasi kontribusi yang diberikan sektor industri pengolahan terhadap PDRB disuatu wilayah. Nilai Kontribusi Industri didapatkan melalui perbandingan antara nilai sektro industri dengan total PDRB. • Nilai kontribusi sektor industri terhadap PDRB tidak sama dengan nilai produksi sektor industri. Nilai produksi sebuah wilayah yang meningkat sedangkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB belum tentu mengingkat, bisa saja terjadi penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan, salah satunya karena kontribusi sektor-sektor lain lebih besar terhadap PDRB, serta melihat potensi ekonomi suatu wilayah ada pada sektro lain, tidak pada sektor industri pengolahan.
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik • Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 04 Nomor 1 April 2021; "Analisis Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Dan Pengaruh Bagi Hasil Pajak Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2017"
Frekuensi	Tahunan

B. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang

1. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$ Keterangan: α = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...., q), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

2. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})(y_i - y_{i-1})$$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran per kapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

3. Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi
Definisi	Kontribusi PDRB Kota Bekasi adalah share PDRB Kota Bekasi terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$Kontribusi\ PDRB_{Bekasi} = \frac{PDRB_{Bekasi}}{PDRB_{Provinsi}}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

C. Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat

Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti
Definisi	Jumlah kerjasama dengan lembaga internasional yang mejadi naskah perjanjian kerjasama dalam kurun waktu satu tahun
Rumus Perhitungan	Jumlah kerjasama yang dibuat mejadi naskah perjanjian kerjasama
Interpretasi	Sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama untuk peningkatan stabilitas ekonomi daerah
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

D. Daya saing sumber daya manusia meningkat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.
Rumus Perhitungan	• Indeks Kesehatan $I_{kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$ UHH = Usia Harapan Hidup • Indeks Pendidikan $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ HLS = Harapan Lama Sekolah RLS = Rata-rata Lama Sekolah • Indeks Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ • IPM $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: IPM < 60 2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70 3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80 4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

E. Intensitas emisi GRK menurun menuju Net Zero Emission

Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Nama Indikator	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR): $IE_t = TE_t / PDRB_t$ IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%): $\%IE_t = (IE_t - IEB_t) \ / \ IEB_t$ $\%IE_t$ = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IEB_t = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

Lampiran 2. Metadata Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045

1. Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

2. Kesehatan ibu dan anak

2.a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $$AKI = (JKI/JLH)\ x\ 100.000$$ Keterangan: AKI: Angka kematian ibu JKI: Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH: Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. **Kualitas Pelayanan Kesehatan**: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. **Akses Pelayanan Kesehatan**: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. **Pendidikan Kesehatan**: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. **Status Gizi**: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. **Kesadaran Masyarakat**: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

2.b. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	*Stunting* (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-*score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{JAB(5)P } stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{\text{JAB(5)}} x\ 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (*stunting*) JAB(5) P *stunting* : Jumlah anak balita pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $\text{JAB(5)SP } stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{\text{JAB(5)}} x\ 100\%$ Keterangan PAB (5) : Prevalensi anak balita yang SP *stunting* menderita sangat pendek (*stunting*) JAB(5) SP *stunting* : Jumlah anak balita sangat pendek (*stunting*) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi *stunting* = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi *stunting* yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. **Kekurangan Gizi:** *Stunting* adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi *stunting* yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. **Akses Pelayanan Kesehatan**: Prevalensi *stunting* yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. **Kemiskinan:** *Stunting* sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan *stunting*. 4. **Pendidikan:** Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. **Faktor Lingkungan:** Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi *stunting*.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia: 5 tahunan

3. Penanganan Tuberkulosis

3.a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Nama Indikator	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3.b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten dikali 100%. $$Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{Jumlah\ penduduk\ Kota}\ x\ 100\%$$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. **Akses Pelayanan Kesehatan**: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. **Kesadaran Masyarakat**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. **Komitmen Pemerintah Daerah**: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. **Pencapaian Universal Health Coverage (UHC)**: Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

2. Terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan wilayah

5. Hasil Pembelajaran

5.a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:

5.a.i. Skor Literasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional) (%)

Nama Indikator	Kemampuan Literasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional) (%)
Definisi	Indikator yang merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi literasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
Rumus Perhitungan	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi dihitung dengan cara jumlah anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi dibagi dengan jumlah anak dikalikan 100 persen. $$Proporsi\ Ketercapaian\ AK = \frac{Ni}{NT}$$ Keterangan: Proporsi Ketercapaian AK = Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek literasi N_i = Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek literasi N_T = Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek literasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Proporsi Ketercapaian AK di suatu daerah, maka semakin tinggi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Frekuensi	Tahunan

5.a.ii. Skor Numerasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional) (%)

Nama Indikator	Kemampuan Numerasi (Persentase peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional) (%)
Definisi	Indikator yang merupakan bagian dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk penilaian asesmen kompetensi numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Rumus Perhitungan	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi dihitung dengan cara jumlah anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi dibagi dengan jumlah anak dikalikan 100 persen. $$Proporsi\ Ketercapaian\ AK = \frac{Ni}{NT}$$ Keterangan: Proporsi Ketercapaian AK = Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi pada aspek numerasi N_i = Jumlah anak yang mencapai standar kompetensi minimal asesmen kompetensi pada aspek numerasi N_T = Jumlah anak yang mengikuti asesmen kompetensi pada aspek numerasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Proporsi Ketercapaian AK di suatu daerah, maka semakin tinggi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi pada daerah tersebut.
Sumber Data	Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Frekuensi	Tahunan

5.b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: 1. Tidak punya ijazah = 0 tahun; 2. SD = 6 tahun; 3. SMP = 9 tahun; 4. SMA = 12 tahun; 5. D1/D2 = 14 tahun; 6. D3 = 15 tahun; 7. D4 = 16 tahun; 8. S1 = 17 tahun; 9. S2 = 19 tahun; 10. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$$Rata-rata\ Lama\ Sekolah\ 15+= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

5.c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$$Harapan\ Lama\ Sekolah = \mathrm{FK} \sum_{i=7}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

3. Meningkatnya SDM kreatif, inovatif dan kompetitif yang berperan dalam pembangunan

6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Definisi	Indeka Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi yang diperlukan untuk berbartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari. IPLM mencakup berbagai aspek literasi, seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM berfungsi untuk mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
Rumus Perhitungan	Perhitungan IPLM terdiri dari dua komponen, yaitu variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan komponen Aspek Masyarakat (AM). Rumus perhitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 komponen UPLM beserta pembaginya, yaitu komponen Aspek Masyarakat (AM). Adapun tujuh (7) unsur pembentuk IPLM yang dinamakan Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri dari: a. UPLM 1 : pemerataan layanan perpustakaan b. UPLM 2 : ketercukupan koleksi perpustakaan c. UPLM 3 : ketercukupan tenaga perpustakaan d. UPLM 4 : tingkat kunjungan masyarakat e. UPLM 5 : perpustakaan yang dibina sesuai SNP f. UPLM 6 : keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan g. UPLM 7 : anggota perpustakaan Selanjutnya, Aspek Masyarakat (AM) yang digunakan untuk setiap Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) adalah sebagai berikut: a. AM untuk UPLM 1 : jumlah kelembagaan yang ada di masyarakat b. AM untuk UPLM 2 : jumlah populasi penduduk c. AM untuk UPLM 3 : jumlah populasi penduduk d. AM untuk UPLM 4 : jumlah populasi penduduk e. AM untuk UPLM 5 : jumlah perpustakaan yang tersedia seperti yang terdapat pada UPLM 1 f. AM untuk UPLM 6 : jumlah populasi penduduk g. AM untuk UPLM 7 : jumlah populasi penduduk Perhitungan IPLM Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui rumus berikut. a. UPLM Kabupaten/Kota: $UPLM_i = \frac{\left(\frac{KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan\ Tinggi + Khusus}{AM_i}\right)}{k_i}$ Keterangan: $UPLM_i$ = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat AM_i = Aspek Masyarakat Kab/Kota sesuai dengan UPLM yang dihitung k_i = Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung b. IPLM Kabupaten/Kota: $IPLMKab\ Kota = \frac{\sum_{i=1}^{7}(UPLM)_i}{7}\ x\ 100$ Keterangan: IPLM Kab/Kota = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota UPLMi = Unsur Pembangun Literasi Masyarakat Tingkatan Skor IPLM: 0-29,9 = Sangat Rendah 30-49,9 = Rendah 50-79,9 = Sedang 80-89,9 = Tinggi 90-100 = Sangat Tinggi
Interpretasi	Tingkatan skor IPLM menggunakan skor indeks dalam skala level 1-100. Semakin tinggi IPLM menunjukkan kondisi literasi masyarakat yang semakin baik. Skor IPLM dalam interval 0-29,9 (kategori rendah) dan 30-49,9 (kategori sangat rendah) membutuhkan pembinaan berdasarkan kelemahan dan kekurangan pada komponen serta didasarkan pada dikotomi kewenangan ranah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. Skor IPLM pada rentang 50-79,9 tergolong dalam kategori sedang yang menunjukkan kondisi literasi yang memenuhi standar. Skor IPLM pada interval 80-89,9 termasuk dalam IPLM yang tinggi sehingga berkategori baik. Skor IPLM pada interval 90-100 tergolong sebagai kelas IPLM sangat tinggi, sehingga menjadi perpustakaan percontohan/model.

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Sumber Data	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekuensi	Tahunan

4. Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif

7. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{x}\right]^\alpha$$ Keterangan: α = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,..., q) $y_i - z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja}\ x\ 100\%$$ Keterangan: $Peserta$ = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah $Semesta\ penduduk\ bekerja$ = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya

9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
	4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\%\ PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD}\ x\ 100\%$ Keterangan: PD_{formal} = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal $AKPD$ = Angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5. Meningkatnya peran inovasi, iptek dan industri kreatif dalam menggerakan produktivitas ekonomi

10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan perbandingan antara nilai ekonomi hasil industri pengolahan terhadap total penyediaan domestiknya (PDRB).
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{Nilai\ industri\ pengolahan}{Nilai\ PDRB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan perbandingan hasil nilai semua komposit sektor Perdagangan dan Jasa dengan total nilai PDRB.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

11. Pengembangan Pariwisata:

11.a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ PDRB\ Penyediaan\ Akmamin = \frac{Nilai\ tambah\ penyedian\ Akmamin}{Nilai\ PDRB\ Kabupaten}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, *ceteris paribus*. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

11.b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu.
Rumus Perhitungan	$Data\ Jumlah\ Tamu\ Wisatawan\ Mancanegara$ dan Domestik $(di\ setiap$ hotel $berbintang\ di\ daera$h (Kabupaten/Kota) $tertentu)$
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

12. Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (ADHB) (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB (ADHB) (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif = \frac{\sum PDRB\ 17\ Subsektor\ Ekonomi\ Kreatif\ Regional}{PDRB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, *ceteris paribus*. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

13. Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD

13.a. Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ Daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ Daerah}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

13.b. Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)
Definisi	Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil merupakan perbandingan jumlah unit usaha Mikro terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama di level kota.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Mikro}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha\ Mikro\ dan\ Kecil}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Usaha mikrol merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali).

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Mikro terhadap Usaha Mikro dan Kecil (%)
	• Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

13.c. Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Kontribusi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Kontribusi volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah[1]. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$Kontribusi\ Volume\ Usaha\ Koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ Usaha\ Koperasi\ Daerah}{PDRB\ ADHB}\ x\ 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	**Tingkat pengangguran terbuka** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Pengangguran** yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan** adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. **Angkatan kerja perempuan** adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. **Penduduk usia kerja perempuan** adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

[1] PDB Atas Dasar Harga Berlaku

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**
Rumus Perhitungan	$$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \; x \; 100\%$$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

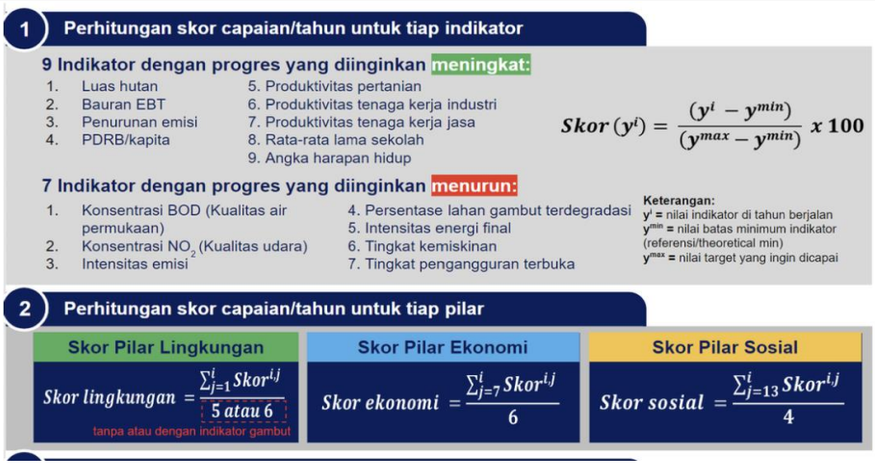
16. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	**Indeks Inovasi Daerah**
Definisi	Indeks Inovasi Daerah menurut Permendagri 104/2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah didefinisikan sebagai seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Penilaian dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pelaporan Inovasi oleh pemerintah daerah 2. Pengukuran dan Validasi yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap delapan variabel dan 36 indikator yang telah ditetapkan 3. Penilaian lebih lanjut oleh tim independent (LIPI, LAN, BRIN, KemenPAN-RB, Kemenkeu, Bappenas, media massa, Perguruan Tinggi, Pakar, Swasta. 4. Penetapan dan Penghargaan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.
Interpretasi	Nilai Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk melihat tingkat inovasi daerah yang berkaitan dengan aspek kemampuan daerah dalam menciptakan, mengadopsi dan menyebarkan inovasi. Pengukuran ini mencakup aspek inovasi dalam tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik dan aspek lainya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terdapat empat hasil penilaian inovasi daerah yaitu sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai. Daerah yang berinovasi dengan baik akan mendapatkan skor yang lebih tinggi sehingga akan memperoleh insentif fiscal dan dukungan lainya dari pemerintah pusat.
Sumber Data	Kementrian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah

17.a. Pilar Ekonomi

Nama Indikator	**Pilar Ekonomi**
Definisi	Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Pilar Ekonomi Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa.

Nama Indikator	Pilar Ekonomi
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	Semakin tinggi skor ekonominya maka semakin tinggi pula progres capaian pembangunan ekonomi Ekonomi Hijau.
Sumber Data	Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): Handbook of Energy and Economy Statistics dan Statisti Ketenagalistrikan, ESDM (Diolah) Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

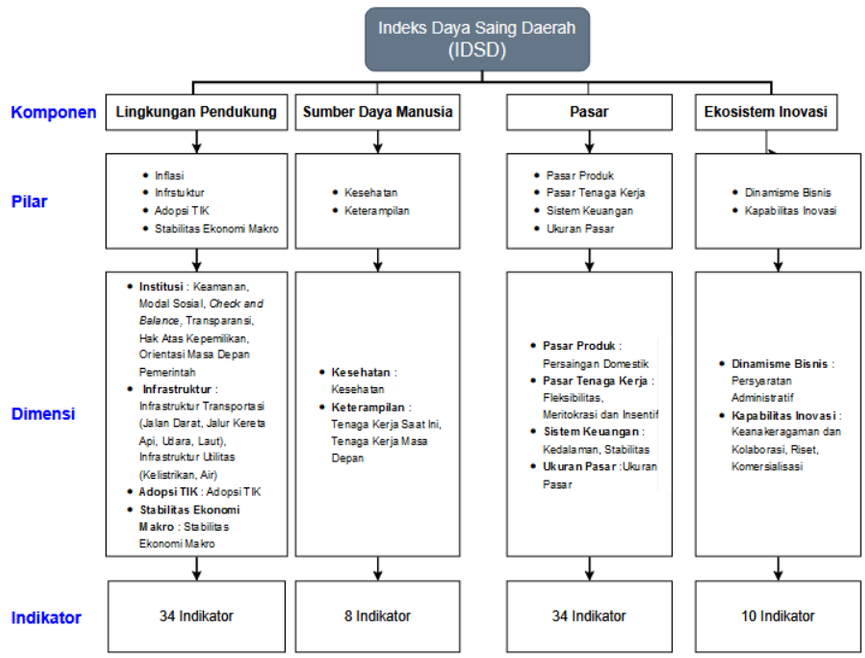
18. Adopsi TIK

Nama Indikator	Adopsi TIK
Definisi	Indikator ini merupakan alat untuk mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.
Rumus Perhitungan	Sesuai perhitungan BRIN
Interpretasi	Daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Indikator ini merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0.
Sumber Data	BRIN
Frekuensi	Tahunan

6. Terciptanya transformasi digital dalam mendukung pengembangan sektor ekonomi daerah

19. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan pengukuran daya saing pada Tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen dasar daya saing, yaitu (1) lingkungan pendukung, (2) sumber daya manusia (SDM), (3) pasar, dan (4) ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing ini dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Secara objektif, pengukuran IDSD dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian/Lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing. Bagan penyusunan IDSD yang terdiri atas komponen, pilar, dimensi, dan indikator adalah sebagai berikut.

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
	 *Sumber: BRIN (2023), diadopsi dari WEF (2019), "Global Competitiveness Index"* Skor IDSD berkisar antara 0-5, termasuk pada seluruh indikator, yang distandardisasi dengan rumus min-max, sehingga pehitungan IDSD sebagai berikut: $Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$ Keterangan: $Skor_{i,d}$ = skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i $N_{i,d}$ = nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d NR_i = nilai terendah untuk indikator ke-i NT_i = nilai terbaik untuk indikator ke-i Hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Skor IDSD berada pada interval 0-5, termasuk pada seluruh indikator. Semakin mendekati nol (0) menunjukkan bahwa IDSD semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati lima (5) menunjukkan bahwa IDSD semakin tinggi atau sangat tinggi. Semakin tinggi skor IDSD maka semakin tinggi pula daya saing suatu daerah, tingkat produktivitas daerah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Frekuensi	Tahunan

7. Meningkatnya daya saing daerah dalam konstelasi ekonomi domestik dan global

20. Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Triliun)

Nama Indikator	Nilai investasi (PMDN dan PMA) (Triliun)
Definisi	Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Rumus Perhitungan	Nilai realisasi PMA dan PMDN dihitung dari PMA dikalikan (Kurs) ditambah dengan PMDN. Nilai realisasi PMA dan PMDN = PMA × (kurs) + PMDN *Catatan: Kurs yang digunakan mengacu pada kurs APBN sebagaimana dalam rilis realisasi investasi triwulanan dari BKPM.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai PMDN atau PMA, maka semakin tinggi kegiatan penanaman modal di suatu daerah.
Sumber Data	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan

21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK}\ x\ 100\%$$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

22. Nilai Ekspor Barang (Juta USD)

Nama Indikator	Nilai Ekspor Barang (Juta USD)
Definisi	Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FOB). FOB merupakan harga barang yang didasarkan pada nilai transaksi yang tercantum pada bukti transaksi, invoice, dsb.
Rumus Perhitungan	Rumus FOB = harga produk di tahap akhir/jadi + biaya lain-lain terkait pengiriman (penyewaan kontainer dan gudang, pajak, biaya transportasi, dan layanan pengelolaan produk selama di pelabuhan)
Interpretasi	Nilai ekspor barang mempunyai nilai minimal 0 dan tanpa batas nilai atas
Sumber Data	Badan Pusat Statistik. Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)
Frekuensi	Tahunan

8. Terkendalinya pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem

23. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m². 3. Memiliki akses air minum layak. 4. Memiliki akses sanitasi layak.

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota **yang telah menerapkan PBG dan SLF** secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak dan bekelanjutan $$PHLB = \frac{JRTHLB}{JRT\ x\ 100}$$ • PHLB = Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan; • JRTHLB = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan; • JRT = Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang **belum menerapkan PBG dan SLF** secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $$PHLTB\ (proksi) = \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRT\ x\ 100}$$ • PHLB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, berkelanjutan; • JRTHLB (proksi) = jumlah rumah tangga hunian layak, berkelanjutan; • JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas

24. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.
Rumus Perhitungan	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120.
Interpretasi	Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada didaerah, diharapkan perwujudan demorkasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^{n} NA_{ij}\ x\ BA_{ij}$$ Keterangan: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

26. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
Definisi	Indeks Pelayanan Publik menurut PermenPAN-RB 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik didefinisikan sebagai hasil pengukuran yang diperoleh dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Rumus Perhitungan	1. persiapan; 2. pelaksanaan; 3. penyampaian hasil dan tindak lanjut; dan 4. pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pemberian penghargaan.
Interpretasi	Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme sdm, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu oleh evaluator dari kemenpan RB berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku dengan hasil PEKPPP. Adapun kategori penilaian tersebut diantaranya: 1. A (Pelayanan Prima) Range Nilai 4,51 - 5,00 2. A - (Sangat Baik) Range Nilai 4,014 - 4, 50, 3. B (Baik) Range Nilai (3,01 - 3,50), 4. B - (Baik Dengan Catatan) Range Nilai 3,01 - 3,50, 5. C (Cukup) Range Nilai 2,551 - 3,00, 6. C - (Cukup Dengan Catatan) Range Nilai 2,01 - 2,50, 7. D (Buruk) Range Nilai 1,51 - 2,00, 8. E (Sangat Buruk) Range Nilai 1,01 - 1,50, 9. F (Gagal) Range Nilai 0 - 1,00.
Sumber Data	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP)

Nama Indikator	Indeks Persepsi Korupsi (MCP)
Definisi	Indeks persepsi korupsi atau IPK merupakan sebuah skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat suatu negara mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik.
Rumus Perhitungan	Indeks Persepsi Korupsi menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dinilai menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persepsi korupsi, artinya semakin rendah korupsi yang terjadi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin rendah nilai persepsi korupsi, maka semakin tinggi korupsinya.
Sumber Data	Transparency Internasional, Komisi Pemberantasan korupsi
Frekuensi	Tahunan

10. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tertib dan aman

28. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
Definisi	Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
	kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, komplek perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap).
Rumus Perhitungan	Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100%. $$P\ PMA = \frac{JPMA}{JP} x100\%$$ P PMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JP : Jumlah penduduk
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, artinya semakin merasa aman masyarakat di kota tersebut. Sebaliknya, semakin rendah, maka masyarakat merasa tidak aman aman
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS): Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial
Frekuensi	Tiga (3) Tahunan

29. Indeks Demokrasi

Nama Indikator	Indeks Demokrasi
Definisi	IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui denganpasti. Begitupun dengan perhitungan IDI level kab/kota, bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di kab/kota. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut akan terlihat kondisi demokrasi kab/kota sesuai dengan ketiga aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia.
Metode Perhitungan	• Komponen IDI ada tiga, terdiri dari 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang Menghambat Kebebasan Berpendapat, 4. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
	3. Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 6. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan Menjalankan Ajaran Agama, 7. Ancaman/Penggunaan Kekerasan dari Satu Kelompok Masyarakat terhadap Kelompok Masyarakat Lain terkait Ajaran Agama,
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 9. Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya, 10. Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok Rentan Lainnya,
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat 12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 14. Voters turnout 15. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	16. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil 8. Peran DPRD	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu 19. Kecurangan dalam penghitungan suara 20. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD 22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu 24. Persentase perempuan pengurus partai politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN 26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	11. Peradilan yang Independen	27. Keputusan hakim yang kontroversial 28. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

• Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain.

Nama Indikator	Indeks Demokrasi
	• Dalam melakukan perhitungan nilai IDI Kab/Kota, langkah awal yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI, yaitu: review media (analisis isi berita surat kabar dan media daring), review dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam (in-depth Interview). Penelusuran berbagai media, dokumen, FGD serta wawancana tersebut di lakukan di kab/kota. • Pendekatan kuantitatif yaitu ketika dilakukan pengumpulan data melalui review media (analisis isi berita surat kabar dan media daring), rivew dokumen (dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD—seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan DPRD, rekomendasi DPRD—serta dokumendokumen resmi lainnya—seperti data demonstrasi dari Kepolisian, data APBD dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD) • Dalam kaidah penelitian ilmiah, FGD termasuk pada kategori teknik pengumpulan data kualitatif. Sebagai salah satu dari teknik pengumpulan data, maka FGD dapat berperan sebagai metode utama, atau bila mengaplikasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data, FGD dapat berperan sebagai komplementer terhadap metode lainnya. • Secara umum, tujuan utama dari aplikasikannya FGD adalah untuk menjaring data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Namun demikian, secara lebih khusus, sedikitnya ada tiga tujuan utama dari dilaksanakannya FGD pada kontek pengumpulan data IDI. **Pertama**, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui review media dan review dokumen. **Kedua**, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. **Ketiga,** menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen. • Sama halnya dengan FGD, wawancara mendalam (in-depth interview) dalam kaidah penelitian ilmiah, juga termasuk kategori teknik pengumpulan data kualitatitif. Pada konteks penyusunan IDI, In-depth Interview diaplikasikan dengan tujuan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman-pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui review media, review dokumen dan FGD. • Penghitungan IDI merupakan hasil bersama dari seluruh unsur yang mendapatkan penilaian. Angka IDI kab/kota didapatkan dari penilaian tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil, (2) Hak-Hak Politik, (3) Lembaga- lembaga Demokrasi. Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses: pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks variabel; dan ketiga, menghitung indeks aspek atau keseluruhan. Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0–100. • Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas/LSM, serta pers.
Interpretasi	Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai: 1. Kategori Tinggi (>80) 2. Kategori Sedang (60-80) 3. Kategori Rendah (<60)
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik Kota Bekasi
Frekuensi	Tahunan

11. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah

30. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$$\text{RPDRB}_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{\text{PDRB}_t} \; x \; 100\%$$ Keterangan: RPDRB_t: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun *t*

Nama Indikator	Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB

31. Tingkat Inflasi (%)

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK pada periode saat ini} - \text{IHK pada periode sebelumnya}}{IHK\ pada\ periode\ sebelumnya}\ x\ 100\%$ Keterangan: IHK = Indeks Harga Konsumen
Interpretasi	Tingkat inflasi, secara tak langsung dapat melihat penurunan daya beli dan juga nilai mata uang dalam suatu daerah, yang nantinya akan dicatat ke dalam bentuk persentase. Berdasarkan tingkat keparahannya, kenaikan angka inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Diantaranya sebagai berikut. • Inflasi ringan, yaitu tingkat keparahan inflasi kurang dari 10% per tahun. • Inflasi sedang, tingkat keparahan inflasi di antara 10% - 30% per tahun. • Inflasi berat, yaitu tingkat keparahan berkisar antara 30% – 100% per tahun. • Hiperinflasi, yaitu ketika tingkat keparahan inflasi mencapai lebih dari 100% per tahun
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

32. Jumlah Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti

Nama Indikator	Jumlah Kerjasama Internasional yang ditindaklanjuti
Definisi	Jumlah kerjasama dengan lembaga internasional yang mejadi naskah perjanjian kerjasama dalam kurun waktu satu tahun
Rumus Perhitungan	Jumlah kerjasama yang dibuat mejadi naskah perjanjian kerjasama
Interpretasi	Sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama untuk peningkatan stabilitas ekonomi daerah
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

33. Jumlah *Sister City*

Nama Indikator	Jumlah *Sister City*
Definisi	*Sister City* adalah sebuah konsep di mana dua daerah atau kota yang secara geografis, administratif, dan politik berbeda, berpasangan untuk menjalin hubungan sosial antarmasyarakat dan budaya.
Rumus Perhitungan	Jumlah *sister city* adalah jumlah kota yang bermitra dengan bentuk kemitraan dengan fenomena global jangka panjang melalui pertukaran teknologi, sumber daya, pengetahuan, keahlian dan pembelajaran.
Interpretasi	Jejaring *sister city* merupakan jejaring internasional yang mana dua atau lebih komunitas setidaknya di dua negara bermitra secara jangka panjang melalui pertukaran teknologi, sumber daya, dan pengetahuan, keahlian, serta pembelajaran Bentuk kemitraan ini merupakan fenomena global. Mulanya, jejaring ini terbentuk dari hubungan persahabatan antara dua kota yang dilatarbelakangi oleh adanya kedekatan secara geografis maupun kesamaan karakteristik kedua kota secara ekonomi, budaya, maupun sejarah Kesuksesan kemitraan sister city dipengaruhi oleh kesamaan karakteristik wilayah, kepemimpinan, partisipasi publik, komunikasi atau aliran informasi yang terbuka, dan hubungan timbal balik. Kesamaan karakteristik tersebut meliputi kesamaan sejarah; kesamaan tingkat ekonomi, kemiripan nama; keterkaitan yang sudah terjalin sebelumnya, serta kemiripan permintaan sesuai kebutuhan kota.
Sumber Data	
Frekuensi	Tahunan

12. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan

34. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Definisi	Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu: 1) Dimensi ekonomi budaya; a) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) 2) Dimensi pendidikan; a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+ c) Angka Kesiapan Sekolah d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah 3) Dimensi ketahanan sosial budaya; a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga 4) Dimensi warisan budaya; a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional 5) Dimensi ekspresi budaya; a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pen- dukung pertunjukkan seni d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 6) Dimensi budaya literasi; a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 7) Dimensi kesetaraan gender; a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat 8) Dimensi budaya literasi; a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 9) Dimensi kesetaraan gender; a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki
Rumus Perhitungan	$$IPK = \sum_{j=1}^{7} (W_j \; x \; indeks \; D_j)$$ Keterangan: IPK = Indeks Pembangunan Kebudayaan W_j = Bobot dimensi ke-j D_j = Dimensi ke-j Rumus menghitung indeks dimensi (D_j): $$Indeks \; D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX_{ij}}{n_j} \right) \; x \; 100$$ Keterangan: D_j = Dimensi ke-j SX_{ij} = Nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi n_j = Jumlah indikator dimensi ke-j
Interpretasi	Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 sangat rendah; 20,01 – 40,00 rendah; 40,01 – 60,00 sedang; 60,01 – 80,00 tinggi; 80,01 – 100,00 sangat tinggi.
Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

35. Indeks Kota Toleran

Nama Indikator	Indeks Kota Toleran (IKT)
Definisi	Indeks Kota Toleran (IKT) adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. IKT dapat digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif praktik dan promosi masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum.
Rumus Perhitungan	Indeks Kota Toleran (IKT) dihitung dengan berdasarkan pada kerangka *indexing*. Studi IKT menetapkan empat variabel dengan 8 (delapan) indikator sebagai alat ukur. Ke-8 indikator tersebut merupakan elemen-elemen yang melekat di sebuah kota, sekaligus unsur pembentuk ekosistem toleransi yang sedang terus menerus didorong dan dipromosikan SETARA Institute melalui studi IKT. Variabel dan indikator untuk menganalisis Indeks Kota Toleran adalah sebagai berikut. 1. Regulasi Pemerintah Kota Indikator 1 : Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya Indikator 2 : Ada tidaknya kebijakan diskriminatif 2. Regulasi Sosial Indikator 3 : Peristiwa intoleransi Indikator 4 : Dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi 3. Tindakan Pemerintah

Nama Indikator	Indeks Kota Toleran (IKT)
	Indikator 5 : Pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi Indikator 6 : Tindakan nyata terkait isu toleransi 4. Demografi Sosio-Keagamaan Indikator 7 : Heterogenitas keagamaan penduduk Indikator 8 : Inklusi sosial keagamaan Kombinasi pembobotan dalam setiap indikator di atas menghasilkan persentase akhir dengan pengukuran sebagai berikut: 1. RPJMD [10%] 2. Ketiadaan kebijakan diskriminatif [20%] 3. Ketiadaan peristiwa intoleransi [20%] 4. Dinamika masyarakat sipil [10%] 5. Pernyataan publik pemerintah kota [10%] 6. Tindakan nyata pemerintah kota [15%] 7. Heterogenitas agama [5%] 8. Inklusi sosial keagamaan [10%] Rata-rata dari kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema skoring, dengan menggunakan skala hipotesis positif dengan rentang nilai 1-7.
Interpretasi	Nilai IKT berada pada rentang 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas rendah ke tinggi, dengan nilai 1 untuk kualitas rendah dan 7 untuk kualitas tinggi.
Sumber Data	SETARA Institute
Frekuensi	Tahunan

13. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat yang berkeadilan

36. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Keterangan: *) metadata masih dalam pengembangan

37. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0{,}005}{MTF} x \frac{0{,}01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} x\ (PR_P\ x\ SE_P)^{\frac{1}{2}}\ x\ TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1\ x\ (PR_L\ x\ SE_L)^{\frac{1}{2}}\ x\ TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing-masing dimensi

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0{,}005}{MTF}} x \frac{0{,}01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P x SE_P} + \sqrt{PR_L x SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR\ x\ IP\ x\ IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan $MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_P, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

38. Kualitas Lingkungan Hidup

38.a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0.376\ x\ IKA) + (0.405\ x\ IKU) + (0.219\ x\ IKL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nomor | Kategori | Angka Rentang 1 | Sangat Baik | 90 ≤ x ≤ 100 2 | Baik | 70 ≤ x < 90 3 | Sedang | 50 ≤ x < 70 4 | Kurang | 25 ≤ x < 50 5 | Sangat Kurang | 0 ≤ x < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut.
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

38.b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).
Rumus Perhitungan	$$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS}\ x\ 100\%$$ Keterangan: PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

38.c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	<u>Timbulan Sampah</u> Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. ***Catatan:*** Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari *waste recovery* sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (*recovery*) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	Cara (1) $$SO = ST - MFPA + RDP$$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $$SO = MFPA + DPA - RDP$$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $$TS = TP\ x\ (TPRT + TPNRT)$$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $$TS = 70\%\ dari\ rumah\ tangga + 30\%\ dari\ non - rumah\ tangga$$ $$TS = \frac{TSRT}{70\%}$$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $$\%SO = \frac{SO}{TS}\ x\ 100\%$$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di daerah.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

15. Terjaminnya ketersediaan dan akses terhadap energi, air, dan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan

39. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan

39.a. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Definisi	Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Rumus Perhitungan	$$Y(j)=\sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$ Keterangan: i = Indikator ke-1,2,3…8, dan 9 j = Kabupaten ke-1,2,3…415 dan 416: kota ke-1,2,3…97, dan 98 Y_j = Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke-j a_i = Bobot masing-masing indikator ke-i X_{ij} = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-I pada kabupaten/kota ke-j
Interpretasi	Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

39.b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$$\int_{x<MDER} f(x)dx$$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

39.c. Ketahanan Air

- Kapasitas Air Baku (m³/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m³/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT}\ x\ 100\%$$ Keterangan: PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

16. Terciptanya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

40. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$$Risk = Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$$ Keterangan: ***Hazard*** **(bahaya)** dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. ***Vulnerability*** **(kerentanan)** dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. ***Capacity*** **(kapasitas)** dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

41. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

Nama Indikator	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
Definisi	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK

Nama Indikator	**Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**
	dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka *baseline* emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK *baseline* daerah untuk periode yang sama.
Rumus Perhitungan	**a. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan** $\%PE_t = PE_t / EB_t$ $\%PE_t$: persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PE_t : penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EB_t : emisi GRK total sektoral *baseline* tahun t t : titik tahun perhitungan **b. Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Kumulatif** $\%PEK = \sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t \Big/ \sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$ $\%PEK$: persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif. $\sum_{i=base\ layer}^{t} PE_t$: akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode *base year* hingga tahun t $\sum_{i=base\ layer}^{t} EB_t$: akumulasi emisi GRK total *baseline* daerah selama periode *base year* hingga tahun t t : titik tahun perhitungan i : *base* year tahun 2010
Interpretasi	Persentase penurunan emisi baik tahunan maupun kumulatif.
Sumber Data	Sistem AKSARA Bappenas
Frekuensi	Tahunan

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD